



RPJMD

Kabupaten Labuhanbatu Selatan



2025-2029





SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 1 Seri D Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

dan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II FUNGSI DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

RPJMD berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perencanaan Penganggaran; dan
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) Sistematisa Dokumen RPJMD terdiri atas:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum Daerah;
 - c. bab III Visi, Misi dan program prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. bab IV program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bab V penutup.
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah, RPJMD dapat dilakukan perubahan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
 - d. bertentangan dengan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

MUHAMMAD REZA PAHLEVI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025
NOMOR 2 SERI D NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029 : (2-78/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Dasar Hukum.....	8
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	10
1.4. Maksud dan Tujuan	12
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	16
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	16
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	16
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	102
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah	142
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum	175
2.2. Gambaran Keuangan Daerah.....	186
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan	212
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	287
3.1. Visi Pembangunan	287
3.2. Misi Pembangunan	290
3.3. Tujuan dan Sasaran	302
3.4. Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan Daerah	312
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	383
4.1. Program Perangkat Daerah, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif OPD	382
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	539
BAB V PENUTUP.....	603
5.1. Kaidah Pelaksanaan.....	603
5.2. Kaidah Pembiayaan	606
5.3. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah	607



Kabupaten
Labuhanbatu
Selatan



BAB 1

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan yang memberikan arah pembangunan wilayah dengan jangka waktu 5 tahun dalam hal ini periode 2025-2029. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Menyusun RPJMD diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Kebijakan pembangunan dalam RPJMD menjadi pedoman dan memandu empat tahap (arah) pembangunan jangka pendek (tahunan) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka menengah.

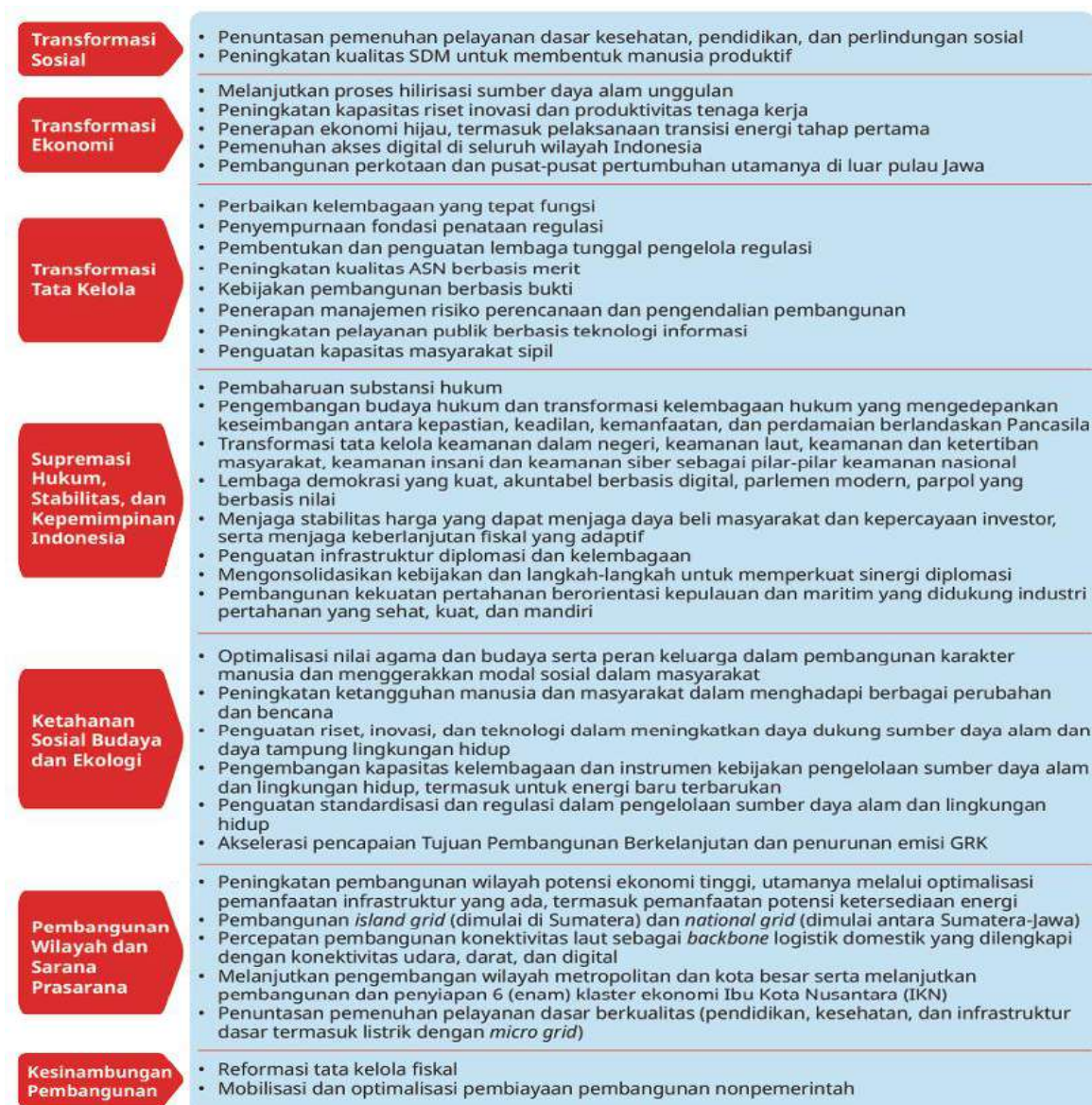
RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 merupakan bagian dari tahap 1 (satu) pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2045. Tahap 1 (satu) RPJPD yang dilakukan dalam RPJMD 2025-2029 difokuskan pada penguatan pondasi pembangunan dengan tema pembangunannya yaitu: “Menata Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang Fokus pada Penuntasan Pelayanan Dasar (Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial, Budaya dan SDM), Pemanfaatan Infrastruktur dan Saranan Prasarana, Percepatan Pertumbuhan Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Hukum”.

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 juga merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah Bapak Fery Sahputra Simatupang, S.H. sebagai Bupati dan Bapak Syahdian Purba Siboro, S.H. sebagai Wakil Bupati yang telah dilantik oleh Presiden RI Bapak Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan hasil Pemilukada Serentak pada tanggal 27 Nopember 2024. Nantinya RPJMD berfungsi sebagai

pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 tahun. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan daerah yang disusun berdasarkan kondisi dan potensi daerah. RPJMD sendiri bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan pembangunan antar daerah. Hal ini untuk menciptakan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Penyusunan RPJMD melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan pelibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. RPJMD ini akan menjadi wadah untuk mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang terukur dan membuat kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih memiliki acuan dalam menjalankan program kerja.

Sebagai bagian dari suatu Sistem Perencanaan Pembangunan, RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen RPJMD ini adalah produk bersama yang merupakan hasil integrasi dari berbagai rujukan. Adapun rujukan dasarnya adalah Visi dan Misi daerah untuk kurun waktu 5 tahun, yang selanjutnya diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti: RPJPN 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2025-20245, RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029, RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2045 serta RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam rangka penajaman relevansi kebutuhan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan 5 tahun ke depan, muatan RPJMD ini sangat terkait dengan kondisi umum dan potensi Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta kebutuhan nyata masyarakatnya.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki potensi pembangunan yang besar dengan lahan pertanian dan perkebunan yang luas, menghasilkan pangan melimpah yang mendorong percepatan pembangunan. Selain itu, kekayaan wisata alam seperti danau, hutan, sungai, dan konservasi hewan menjadikannya daerah yang menarik bagi wisatawan. Potensi ini menjadi dasar kerangka pembangunan yang merespons isu global, nasional, regional, dan provinsi, seperti transformasi ekonomi hijau dan pengurangan emisi karbon. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan keselarasan dengan RTRW Kabupaten, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional, sebagai instrumen penting untuk pembangunan spasial yang mendukung pengentasan kemiskinan dan infrastruktur ramah lingkungan. RPJMD ini juga diarahkan untuk mendukung implementasi RPJMN 2025–2029 sebagai tahap awal RPJPN 2025–2045, yang menekankan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.



Gambar 1.1 Fokus Kebijakan Jangka Menengah Pembangunan

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita.



Gambar 1.2 Asta Cita dalam RPJMN 2025-2029

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Berdasarkan fokus arah kebijakan pembangunan nasional dan Asta Cita dalam RPJMN 2025-2029 di atas, penyusunan RPJMD Labuhanbatu Selatan diselaraskan dengan hal-hal dimaksud yang telah ditetapkan pada level nasional dan disesuaikan pada level daerah. Dengan visi Labuhanbatu Selatan Modern dengan 6 makna misi yakni Maju wilayahnya, Orientasinya pelayanan prima, Dekat dengan warganya,

Ekonominya kuat, Reformasi birokrasinya berdampak, dan Nyaman untuk semua, maka diharapkan tujuan pembangunan antara pusat dan Labuhanbatu Selatan dapat selaras dan setujuan. Berkenaan dengan visi tersebut, Labuhanbatu Selatan juga telah menetapkan misi guna mewujudkan visi Labuhanbatu Selatan Modern. Adapun misi tersebut yaitu:

1. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat.
2. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk Kesejahteraan Masyarakat.
3. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif.
4. Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya.
5. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata dengan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik Berkualitas dan Mengedepankan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, dan Bermartabat.

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan dokumen RPJMD Labuhanbatu Selatan 2025-2029 ini dapat menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan selama 5 tahun kedepan dengan tetap memperhatikan kebijakan pembangunan pada level nasional dan provinsi Sumatera Utara guna memastikan adanya keselarasan maupun kesinambungan pembangunan.

1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

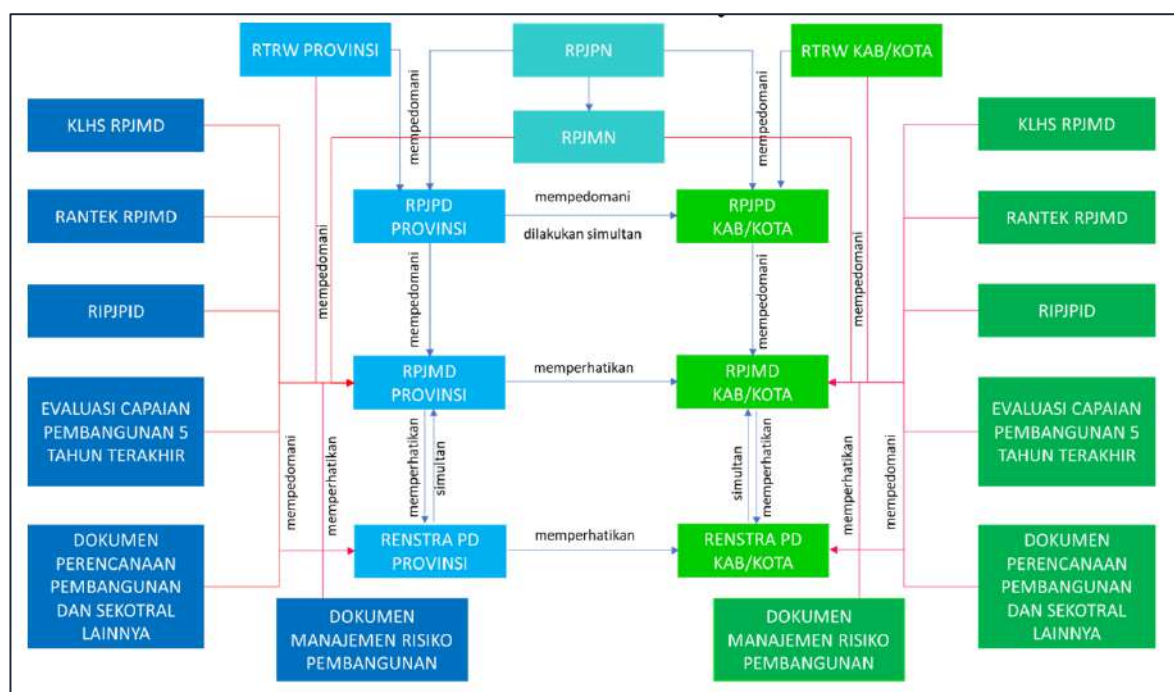
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan

dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

17. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.
18. Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029.
19. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76).

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Sistem perencanaan pembangunan daerah harus sinergi, mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota atau sebaliknya. Masing-masing tingkatan perencanaan bukan hanya memiliki sasaran yang spesifik, tetapi juga agregatif dari sistem perencanaan yang ada di bawahnya. Sebagaimana terlihat dalam gambar secara hierarki, RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun berdasarkan RPJMD Provinsi dan RPJMN Nasional.



Gambar 1.3 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber: Kemendagri, 2023

Dari gambar di atas, secara teknis, dapat disimpulkan bahwa sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus selaras dengan target yang diamanatkan

dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Begitu juga dengan arah kebijakan kewilayahan yang diamanatkan untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Hal yang sama juga disinergikan antara kebijakan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan RPJPN.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah akan menjadi pedoman penyusunan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan. RPJMD merupakan penjelmaan dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJM Nasional. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, RPJMD Labuhanbatu Selatan. diterjemahkan oleh Renstra Perangkat Daerah sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Labuhanbatu Selatan.

Penyusunan RPJMD Labuhanbatu Selatan. didasarkan pada kajian aspek tata ruang yang ada sehingga rencana tata ruang dan RPJMD menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, visi dan misi pembangunan jangka menengah turut menentukan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sebaliknya. Sasaran dan arah pembangunan jangka menengah juga harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial.

Peran RPJMD Labuhanbatu Selatan 2025-2029 sangat penting dalam kaitannya dengan RTRW dan kedudukannya bagi perencanaan pembangunan jangka panjang. RTRW harus dipedomani dalam penyusunan RPJPD Labuhanbatu Selatan, begitu juga sebaliknya. Kedua dokumen tersebut menjadi salah satu rujukan utama penyusunan RPJMD Labuhanbatu Selatan. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan daerah akan menciptakan keterpaduan dan keselarasan pencapaian tujuan pembangunan bersama-sama, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025–2029 juga telah memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025–2029. Hal ini disebabkan karena KLHS berfungsi sebagai instrumen analisis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam setiap kebijakan, rencana, dan program yang dituangkan dalam RPJMD. Dengan adanya KLHS, isu-

isu strategis lingkungan, sosial, dan ekonomi dapat diidentifikasi sejak awal, sehingga arah pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keterpaduan antara RPJMD dan KLHS menjamin bahwa visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah sejalan dengan prinsip keberlanjutan, mitigasi risiko lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan guna mewujudkan cita-cita pembangunan jangka menengah daerah dalam kerangka mencapai tujuan nasional sesuai dengan permasalahan dan isu strategis Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah:

1. Merumuskan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah;
2. Memberikan jaminan terhadap kesinambungan berdasarkan isu strategis dan tantangan global;
3. Mengintegrasikan ekonomi hijau dan inovasi teknologi sebagai dasar pembangunan berkelanjutan;
4. Penyelarasan visi daerah dengan target provinsi dan nasional, khususnya pencapaian SDGs dan RPJMN;
5. Mendukung koordinasi antar pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan;
6. Menjabarkan visi dan misi daerah dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan;
7. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, harmonisasi dan penyelarasan serta sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah;
8. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Pusat;
9. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
10. Mengoptimalkan partisipasi dan kemitraan dalam pembangunan;

11. Menjamin dan berkomitmen untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, transparan, akuntabel dan berkelanjutan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah;
12. Menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang kurangnya terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematika dalam penulisan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Aspek geografi dan demografi;
 - b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Aspek Daya Saing Daerah;
 - d. Aspek Pelayanan Umum;
 - e. Standar Pelayanan Minimal;
 - f. Kerjasama daerah;
 - g. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota; dan
 - h. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.
2. Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
3. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pembangunan daerah; dan
 - b. Isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
2. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat: a) Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan b) Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Subbab Program Perangkat Daerah memuat:
 - a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
 - b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



Kabupaten
Labuhanbatu
Selatan



BAB 2

Gambaran Umum Daerah



www.labuhanbatuselatankab.go.id/

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pada gambaran umum kondisi daerah akan disampaikan dan dijelaskan tentang beberapa hal yaitu: 1) Aspek Geografis dan Demografis; 2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; 3) Aspek Daya Saing; dan 4) Aspek Pelayanan Umum.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada sub bab ini bertujuan untuk memberikan konteks dasar wilayah perencanaan, baik dari sisi fisik maupun kependudukan, yang akan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan program pembangunan selanjutnya.

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 dengan ibukota kabupaten di Kecamatan Kotapinang. Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu Selatan terletak pada 1°26'00" – 2°15'55" Lintang Utara, 99°40'00" – 100°26'00" Bujur Timur dengan ketinggian wilayah berada pada 0 – 500 m di atas permukaan laut. Ketinggian 100 - 500 m di atas permukaan laut hanya terdapat pada Kecamatan Sungai Kanan yang berada di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Secara administratif letak wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara
- c. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara; dan
- d. Sebelah Timur: berbatasan dengan Provinsi Riau.

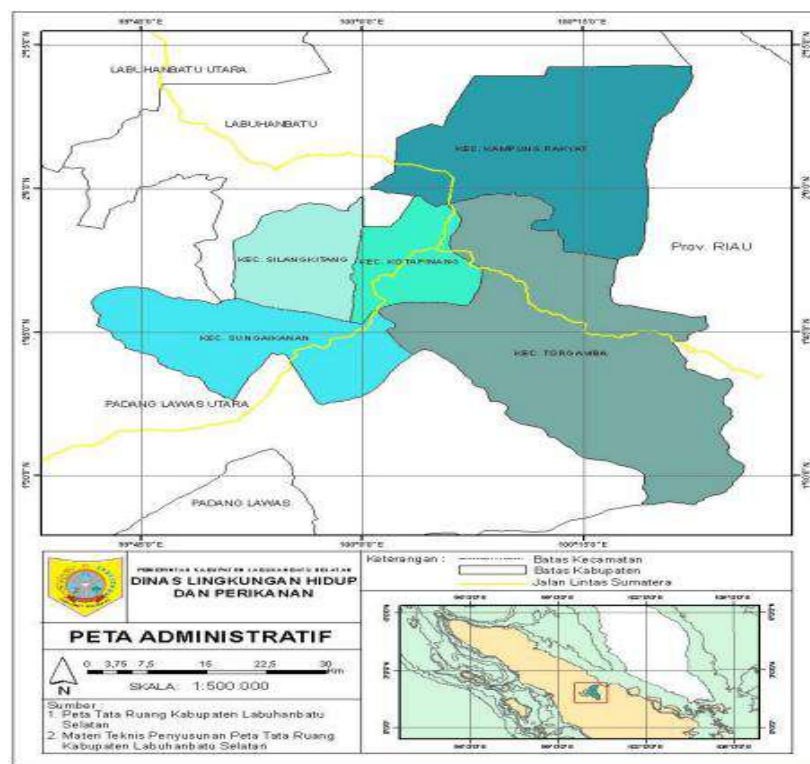
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, luas Kabupaten Labuhanbatu Selatan kurang lebih seluas 321.460,58 Ha yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 52 Desa/2 Kelurahan Definitif. Kecamatan terluas berada pada Kecamatan Torgamba sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil berada pada kecamatan Silangkitang.

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan Per Kecamatan

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Presentase Luas Kecamatan	Jarak Ibu Kota Kabupaten (Km)
1	Sungai Kanan	1	8	15,95%	18
2	Torgamba		14	40,68%	23
3	Kotapinang	1	9	11,22%	10
4	Silangkitang		6	7,12%	25
5	Kampung Rakyat		15	25,03%	31

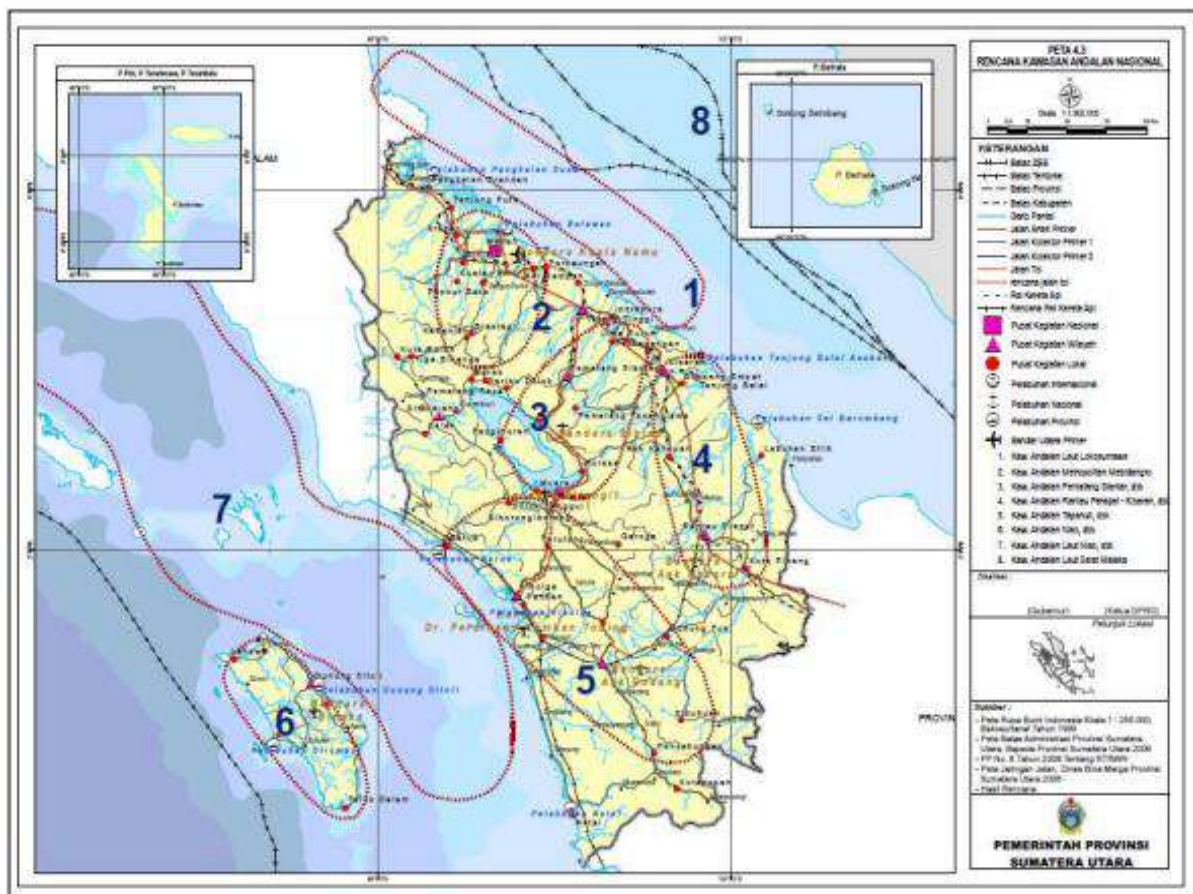
Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam angka 2023

Letak geografis Kabupaten yang berada di dataran rendah akan mengandalkan moda transportasi angkutan darat. Aktivitas perekonomian di Kecamatan Silangkitang dan Kampung Rakyat akan sangat bergantung pada lancarnya arus transportasi darat mengingat jarak tempuh dengan ibu kota kabupaten paling jauh.

**Gambar 2.1 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Secara umum, letak Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki posisi strategis yang menjadi penghubung lintas provinsi antara Provinsi Sumatera Utara dan Riau. Keunggulan ini dapat dioptimalkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai jalur ekonomi utama distribusi produk daerah yang didukung dengan kekayaan sumber daya perkebunan seperti kelapa sawit dan karet seperti industri pengolahan dan hasil

pertanian. Optimalisasi sumberdaya perkebunan tersebut dapat berkontribusi signifikan terhadap rantai pasok industri regional hingga nasional dalam mendukung hilirisasi yang memperkuat struktur industri nasional dan mengurangi kebergantungan impor sesuai agenda RPJPN 2025-2045 melalui penguatan sektor pertanian berkelanjutan dan pengembangan kawasan industri pengolahan berbasis perkebunan. Hal ini sejalan dengan RTRWP Sumatera Utara Tahun 2013-2033, dimana Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk dalam Kawasan Andalan Rantauprapat - Kisaran dan sekitarnya, dengan sektor unggulan perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan dan industri.

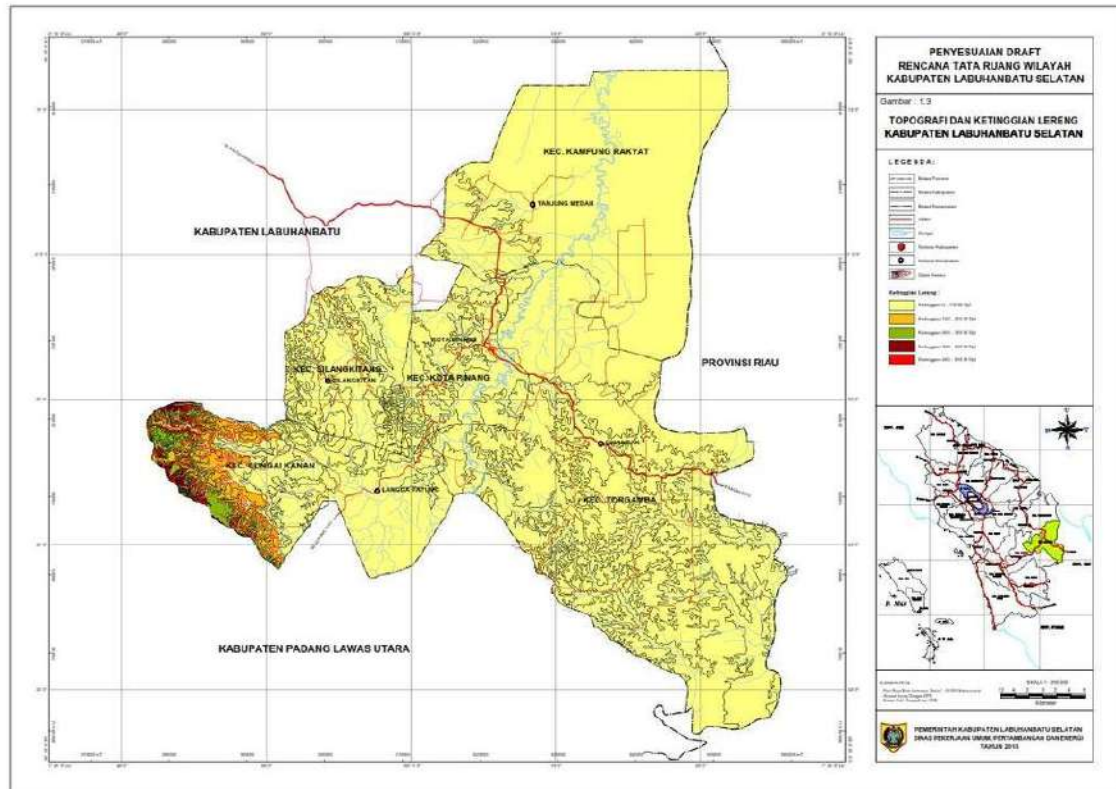


Gambar 2.2 Peta Rencana Kawasan Andalan Nasional di Provinsi Sumatera Utara

2.1.1.2. Topografi

Secara umum kondisi topografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada ketinggian kurang dari 100 m di atas permukaan laut. Ketinggian antara 100 – 500 m di atas permukaan laut hanya terdapat di Kecamatan Sungai Kanan, tepatnya pada bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara (Menurut Data Rupa Bumi Indonesia/Bakosurtanal). Berdasarkan kemiringan lerengnya, pada

umumnya Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada kawasan yang relatif datar dengan kemiringan antara 0 – 8 persen, hingga bergelombang dengan kemiringan 8 – 15 persen. Wilayah dengan topografi berbukit hingga curam dengan kemiringan lereng antara 15 – 25 persen terdapat di bagian barat Kecamatan Sungai Kanan yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.



Gambar 2.3 Topografi Kabupaten Labuhanbatu Selatan

2.1.1.3. Geologi

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain singkapan batuan berumur Pratersier yang tampak di bagian Barat Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Silangkitang (Pul), kemudian diikuti oleh kelompok Kampar yang berumur Tersier di Kecamatan Sungai Kanan, Silangkitang dan sebagian Kecamatan Kotapinang, dan diikuti dengan selaras (Tmt) di Selatan Kecamatan Sungai Kanan dan Silangkitang kemudian diikuti dengan tidak selaras (Tup) yang Nampak pada Kecamatan Silangkitang dan Kotapinang. Penyebaran satuan batuan berumur Quarter di endapkan dengan tidak selaras (Qpmi) yang menyebar disecara luas di Kecamatan Torgamba dan bagian Selatan Kecamatan Kampung Rakyat dan dilanjutkan dengan selaran (Qp) dibagian Utara Kecamatan Kampung Rakyat. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dibedakan atas 5 jenis yaitu: Podsolik kuning, Organosol, Latosol

/Podsolik /Regosol, Hidromorfik Kelabu dan Gley humus Regosol. Jenis tanah yang terbesar adalah jenis tanah Podsolik Kuning yang terdapat sekitar 200.641,60 Ha yang tersebar di semua kecamatan. Kemudian jenis tanah Hidromorfik Kelabu dan Gley Humus Regosol yang terdapat seluas 57.980,20 Ha yang terdapat di Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Kotapinang.

Tabel 2.2 Jenis Tanah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Kecamatan	Podsolik Kuning	Organosol	Litosol/ Podsolik Regosol	Regosol	Hidromorfik Kelabu Gley Humus Regosol	Jumlah
1	Sungai Kanan	40.453,20	-	7.981,80	-	-	48.435,00
2	Torgamba	102.640,90	-	-	-	10.999,10	113.640,00
3	Kotapinang	33.851,90	-	-	1.864,30	12.523,80	48.240,00
4	Silangitang	15.280,60	-	-	15.089,40	-	30.370,00
5	Kampung Rakyat	8.415,00	28.042,70	-	-	34.457,30	70.915,00
	Jumlah	200.641,60	28.042,70	7.981,80	16.953,70	57.980,20	311.600,00

Sumber: RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037

2.1.1.4. Klimatologi

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki iklim tropis seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara. Daerah ini memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Curah hujan Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk tinggi sepanjang tahun 2024, hal ini ditunjukkan dengan nilai curah hujan yang berada dikisaran 137,9-353,5 mm/bulan. Selain itu, tahun 2024 jumlah hari hujan sepanjang tahun relative tinggi dengan rentang jumlah hari yang cukup tinggi yaitu 20-31 hari.

Tabel 2.3 Keadaan Iklim di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari (%)
Januari	174	25	4,2
Februari	152,90	20	5,3
Maret	187,20	20	4,3
April	186,70	15	4,8
Mei	298	21	3,9
Juni	223,80	16	5,5
Juli	7,3	25	6,8
Agustus	353,50	31	4,7
September	186,50	30	4
Oktober	217,30	31	6
November	199,90	30	4,1
Desember	137,90	31	3,6

Bulan	Suhu (oC)			Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	21,60	25,44	32,10	53	86,78	99
Februari	21,30	26,12	33,40	53	84,26	99
Maret	21,10	26,41	33,50	46	83,25	99
April	22,30	27,32	34,20	52	81,43	99
Mei	20,70	26,80	33,90	53	83,62	98
Juni	20,80	26,43	33,40	47	80,12	99
Juli	21,40	26,71	34,20	46	77,23	97
Agustus	20,80	26,13	33,80	67	80,85	90
September	21,40	25,73	34	69,50	81,72	91,25
Oktober	22	26,65	34	67,50	76,97	90,50

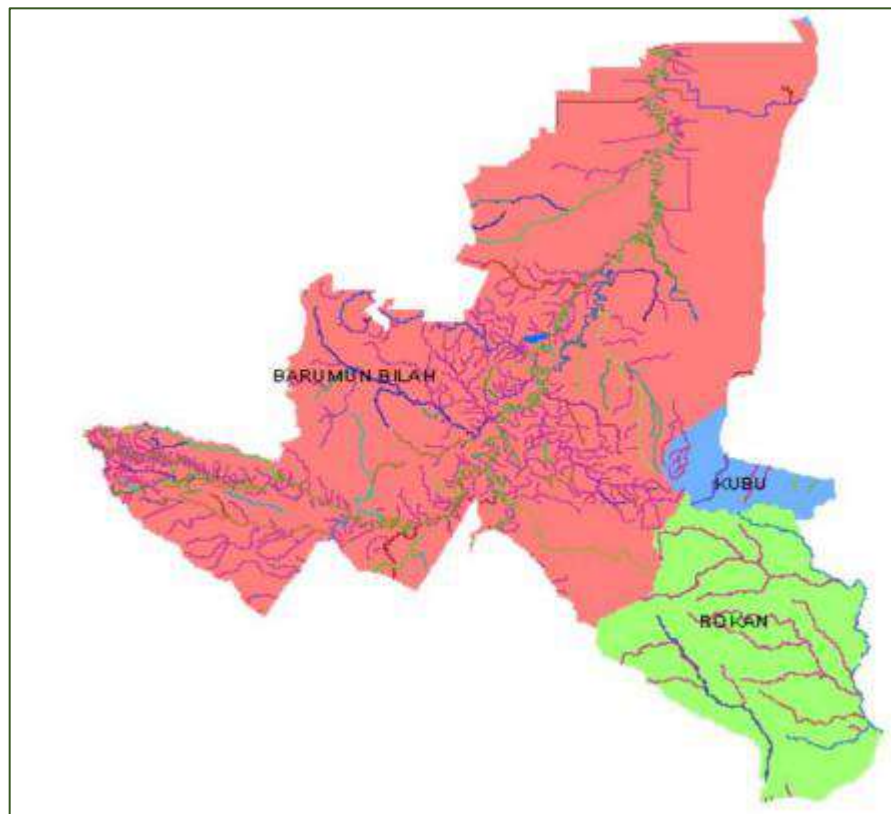
Bulan	Suhu (oC)			Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
November	21,80	26,05	34,10	71,50	81,90	93,25
Desember	20,70	25,97	33,60	68	78,62	89

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Angka Tahun 2025

2.1.1.5. Hidrologi dan DAS

a. Air Permukaan

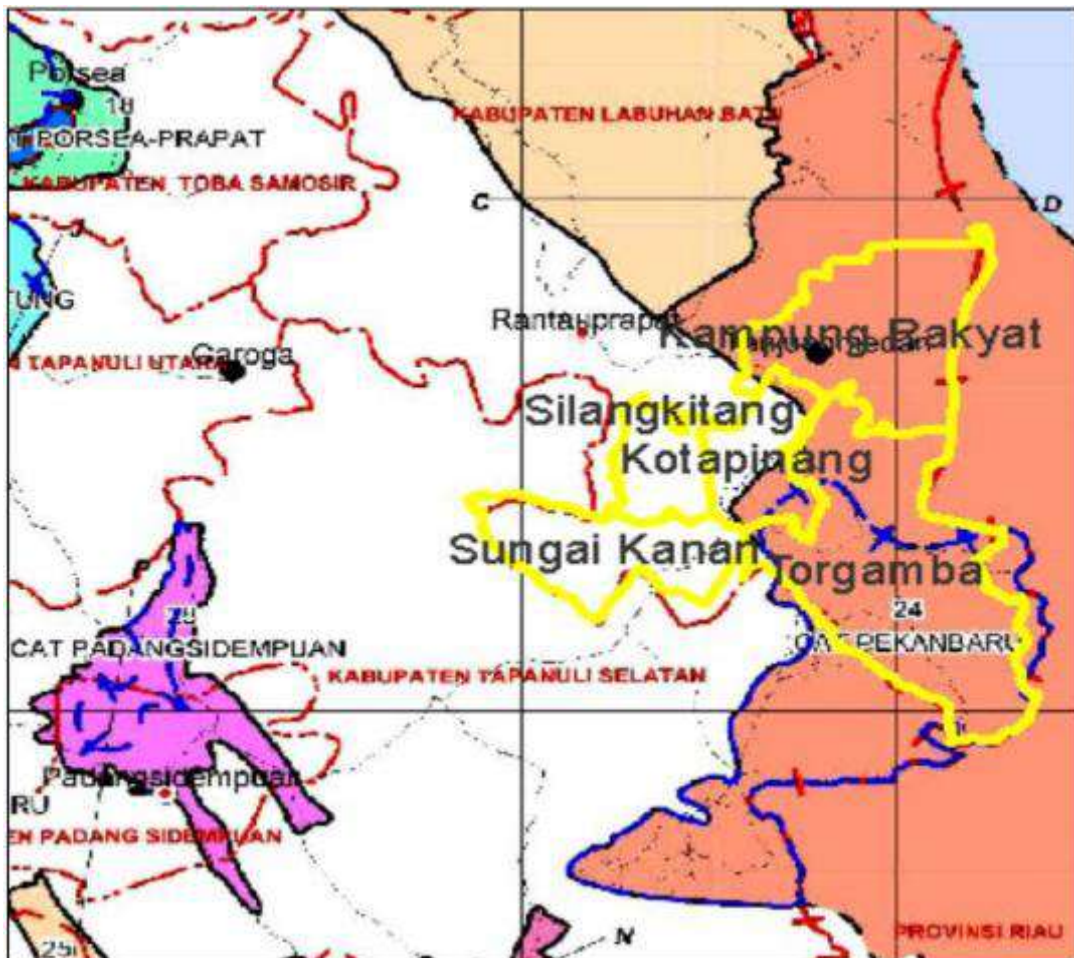
Air permukaan merupakan air yang muncul atau mengalir dipermukaan, seperti; mata air, danau, sungai dan rawa. Data sungai ini juga dilengkapi dengan pola aliran, arah aliran air permukaan masing-masing DAS serta kerapatan sungai yang secara tidak langsung akan memperlihatkan aktivitas sungai tersebut, baik pengaliran maupun pengikisannya. Air permukaan yang dimiliki Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah mata air, danau dan sungai. Kabupaten Labuhanbatu Selatan dialiri beberap aliran sungai, dengan dua sungai terbesar adalah sungai Barumon dengan Panjang sungai yaitu 147 Km sebagai sungai terbesar yang ada di wilayah, kemudian Sungai Kanan yang melintas sepanjang 78 Km. Sungai Barumon ini termasuk kedalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumon yang melintasi beberapa kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Kampung Rakyat. Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumon termasuk kedalam Wilayah Sungai (WS) Kualuh – Barumon yang merupakan Wilayah Sungai (WS) Lintas Kabupaten dan keberadaannya merupakan Kewenangan Provinsi. Secara umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan masuk kedalam Tiga DAS yaitu DAS Barumon Bilah, DAS Kubu dan DAS Rokan.



Gambar 2.4 Peta DAS di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

b. Air Tanah

Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih. Air tanah dangkal ini dapat berupa sumur-sumur, sehingga untuk mengetahui potensi air tanah bebas ini perlu diketahui kedalaman sumur-sumur penduduk, yang kemudian dikaitkan dengan sifat fisik tanah/ batunya dalam kaitannya sebagai pembawa air. Berdasarkan pengamatan dilapangan, masyarakat yang mengandalkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan air baku pada umumnya berada pada wilayah yang tingkat morfologinya datar/ landai. Melalui pengamatan tersebut juga, masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan memperoleh air sumur pada kedalaman sumur 5 m – 20 m. Air tanah dalam adalah air tanah yang memerlukan teknologi tambahan untuk pengadaannya, secara umum dapat diketahui dari kondisi geologinya, yang tentunya memerlukan pengamatan struktur geologi yang cermat. Pada umumnya penggunaan air tanah dalam ini dimanfaatkan bagi keperluan industri. Sebagian wilayah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan masuk kedalam wilayah Cekungan Air Tanah Pekanbaru.



Gambar 2.5 Peta Cekungan Air Tanah di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

(Sumber: PAMSIMAS data diolah)

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

a. Kawasan Budidaya

Berdasarkan peta tutupan lahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Penggunaan lahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan didominasi oleh kegiatan perkebunan Kelapa Sawit seluas 240.923 Ha. diikuti dengan Perkebunan Karet seluas 31.852 Ha dan Perkebunan Campuran Seluas 12.593 Ha. Adapun jenis tutupan lahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020 terlihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	% Luas
1	Danau/Waduk	107	0.03
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	9.163	2.85
3	Hutan Rawa Sekunder	208	0.06
4	Ladang	4.571	1.42
5	Ladang Terbuka	1.539	0.48
6	Perkebunan Campuran	12.593	3.92
7	Perkebunan Karet	31.852	9.91
8	Perkebunan Kelapa Sawit	240.923	74.95
9	Permukiman	4.207	1.31
10	Pertambangan	6	0.00
11	Savanna/Padang Rumput	2	0.00
12	Sawah Irigasi	94	0.03
13	Semak Belukar	14.505	4.51
14	Sungai	1.625	0.51
15	Tambak	64	0.02
Jumlah		321.461	100.00

Sumber: KLHS Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024

Penggunaan lahan untuk kawasan budidaya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri atas bermacam-macam pemanfaatan lahan, terutama untuk lahan perkebunan seluas 285.368 Ha, yang terdiri dari 240.923 Ha perkebunan kelapa sawit, 31.852 Ha untuk perkebunan karet dan 12.593 Ha untuk perkebunan campuran.

b. Kawasan Lindung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037, di Kabupaten Labuhanbatu Selatan direncanakan terdapat kawasan hutan lindung seluas 7.051,73 Ha yang terdapat di Kecamatan Sungai Kanan. Kemudian kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya seluas 41.803,31 Ha di kecamatan Sungai Kanan, kecamatan Torgamba dan kecamatan Kotapinang. Sedangkan kawasan budidaya berupa hutan produksi terdapat di kecamatan Sungai Kanan, kecamatan Kotapinang dan kecamatan Torgamba dengan luas 29.054,89 Ha. Sementara itu untuk hutan produksi terbatas hanya ada di kecamatan Sungai Kanan dengan luas 3.596,27 Ha.

c. Kawasan Strategis

Adapun penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah ditetapkan, terdiri dari :

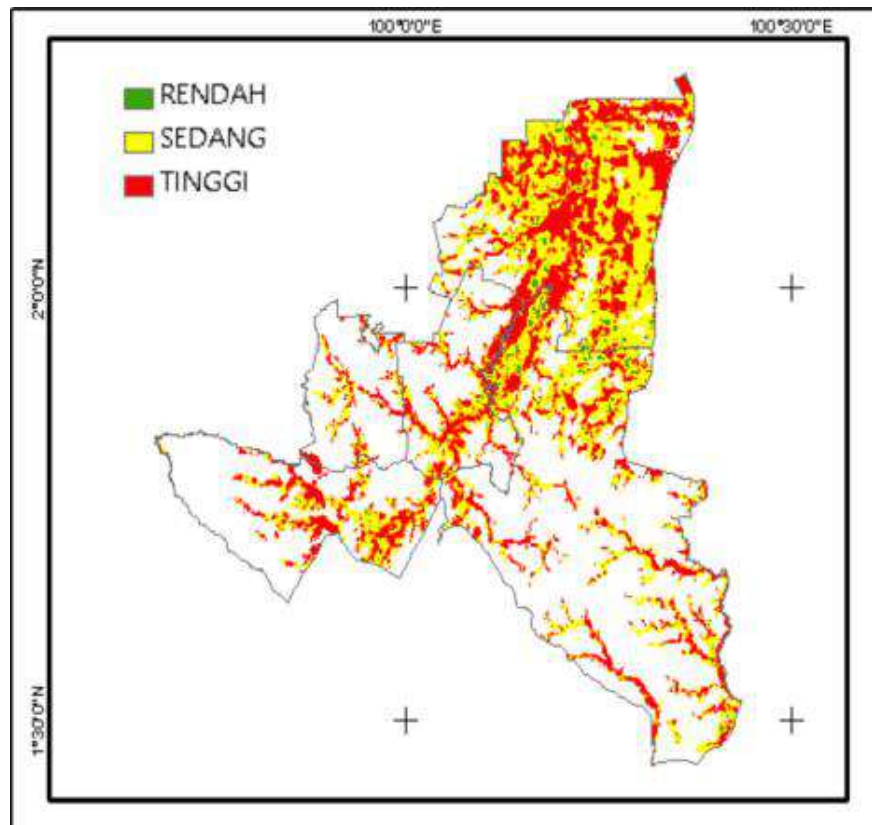
- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, antara lain adalah:
 - (i) Kawasan yang memiliki potensi cepat tumbuh, serta ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah, yaitu:
 - Kawasan perkotaan Kotapinang, di Kecamatan Kotapinang,
 - Kawasan perkotaan Cikampak, di Kecamatan Torgamba;
 - Kawasan perkotaan Langga Payung, di Kecamatan Sungai Kanan;
 - Kawasan perkotaan Aek Goti, di Kecamatan Silangkitang;
 - Kawasan perkotaan Tanjung Medan, di Kecamatan Kampung Rakyat;
 - (ii) Kawasan yang memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi serta memiliki potensi ekspor. Kawasan ini terutama diarahkan pada perkebunan kelapa sawit dan karet yang dimiliki oleh masyarakat dan perusahaan yang mempunyai peluang untuk ekspor, seperti: industri pengolahan CPO, industri minyak goreng dan industri lateks. Pemusatan untuk kawasan ini diarahkan dibeberapa kecamatan, antara lain:
 - Kotapinang: industri pengolahan CPO, Minyak Goreng dan Lateks;
 - Torgamba dan Kampung Rakyat: industri pengolahan CPO.
 - Sungai Kanan dan Silangkitang : Industri pengolahan CPO dan Lateks

- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, adalah Kawasan lindung Nasional Taman Wisata Alam Holiday Resort di Kecamatan Torgamba dan Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Sungai Kanan.

2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

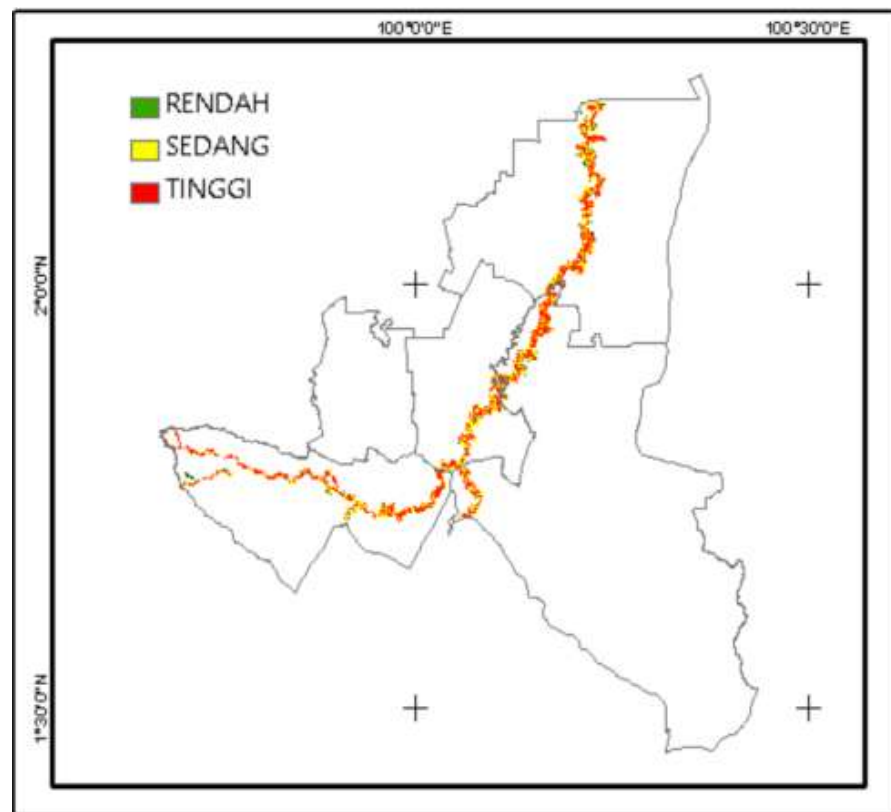
Secara umum, peristiwa bencana alam terjadi dikarenakan peristiwa alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, gerakan tanah/ longsor, gelombang pasang dan non geologis seperti banjir, kekeringan dan kebakaran hutan maupun puting beliung. Berdasarkan kondisi geografis, jenis bencana yang memungkinkan akan timbul di Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain adalah banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim serta tanah longsor/gerakan tanah. Daerah/kawasan yang diperkirakan memiliki potensi terjadinya bencana alam dan kerentanan terhadap perubahan iklim, antara lain adalah:

- 1) **Banjir** Peristiwa banjir merupakan bencana alam yang juga sering terjadi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang beriklim tropis, terutama pada wilayah dengan kemiringan lereng landai atau dataran. Daerah ini diperkirakan terdapat disekitar DAS Barumun yang memiliki kemiringan $< 8\%$ seperti di Kecamatan Kampung Rakyat.



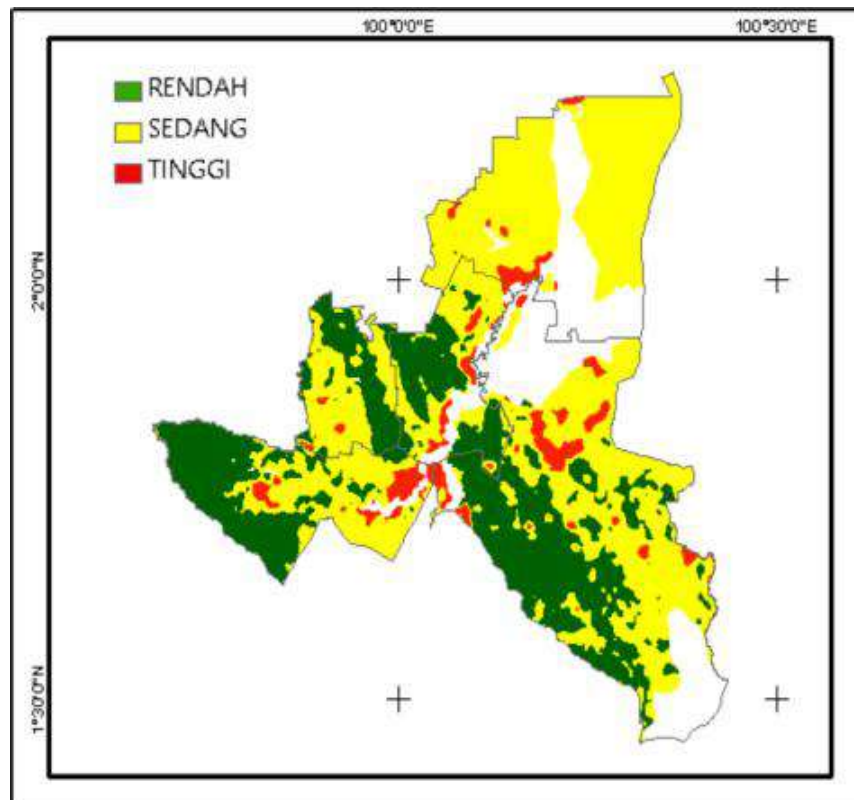
Gambar 2.6 Peta Bahaya Banjir

- 2) **Potensi banjir bandang** dapat terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam. yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai. Hal ini mengingat Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki 3 DAS yaitu DAS Barumun Bilah, DAS Kubu dan DAS Rokan yang mungkin akan berdampak pada Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kotapinang dan Kecamatan Sungaikanan.



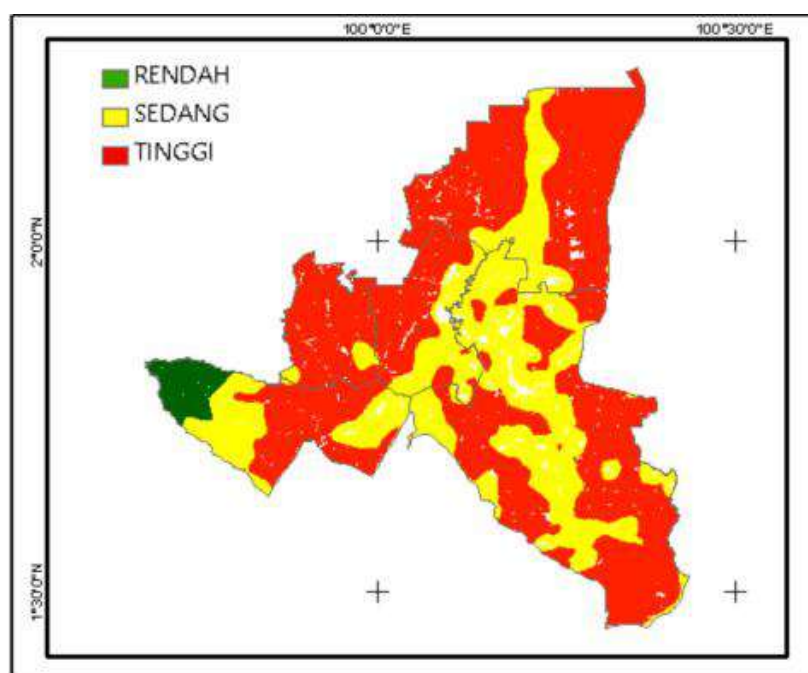
Gambar 2.7 Peta Bahaya Banjir Bandang

- 3) **Bahaya cuaca ekstrim** umumnya didasarkan distribusi klimatologi dengan kejadian ekstrim mencapai $\leq 5\%$ distribusi. Potensi cuaca ekstrim dapat terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena, potensi bencana tersebut pada wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai.



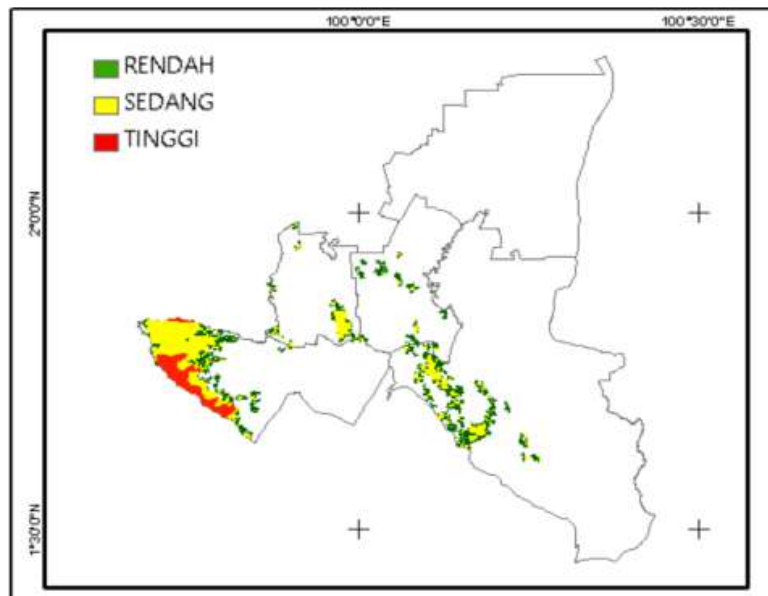
Gambar 2.8 Peta Bahaya Cuaca Ekstrem

- 4) **Kebakaran Hutan dan Lahan** adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan).

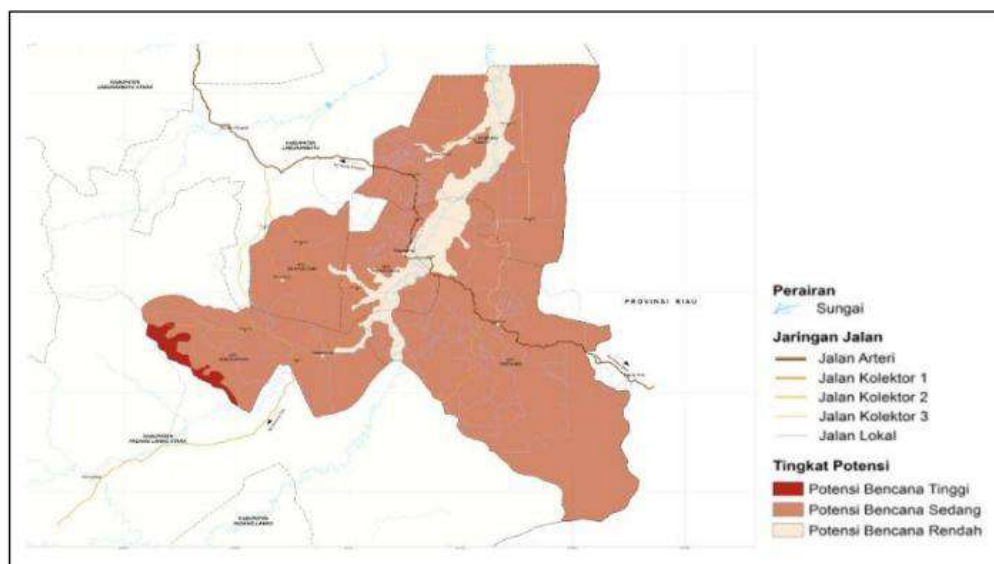


Gambar 2.9 Peta Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

- 5) **Tanah Longsor/Gerakan Tanah** Gerakan tanah atau tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut : air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng.



Gambar 2.10 Peta Kawasan Rawan Longsor

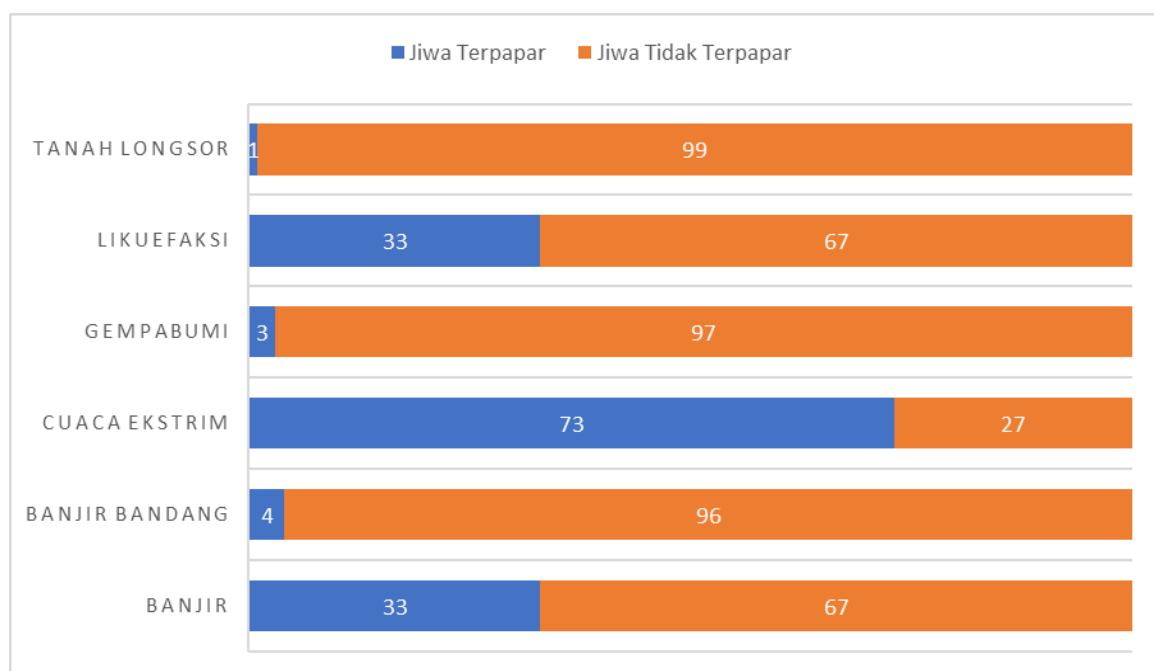


Gambar 2.11 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Sumber: RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037

Gerakan tanah yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dikategorikan sebagai gerakan tanah rendah, karena pada umumnya lahan yang ada berupa lahan dataran yang landai. Sedangkan kawasan yang berpotensi terjadinya gerakan tanah menengah hanya terdapat di sepanjang DAS Barumon mulai dari arah Selatan menuju Utara yang meliputi Kecamatan Kampung Rakyat dan Torgamba. Pada Zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan (Sumber : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM RI, Status Juli 2010). Oleh karena itu berdasarkan peta di atas perlu dilakukan Langkah antisipasi dan edukasi terhadap masyarakat yang terdapat pada wilayah Kawasan rawan bencana dengan potensi bencana sedang hingga tinggi.

Grafik 2.1 Korban Jiwa Disebabkan Bencana di Kabupaten Labuhanbatu Selatan



Sumber: inarisk.bnpb.go.id

2.1.1.8. Daya Dukung Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung penghidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Dalam hal ini variabel dalam mengukur ambang batas dan daya dukung lingkungan hidup yaitu penyedia pangan

dan penyediaan air sebagai kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya serta keseimbangan antar keduanya.

a. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Ambang batas dan status Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) penyedia pangan dimodelkan secara kuantitatif melalui beberapa tahapan, yaitu perhitungan produksi bahan pangan dalam kurun waktu satu tahun, perhitungan kebutuhan bahan pangan yang di konversi kedalam Angka Kebutuhan Energi (AKE) dalam satuan k.kal, perhitungan ketersediaan pangan yang di konversi kedalam Angka Kebutuhan Energi (AKE) dalam satuan k.kal dan langkah terakhir menghitung selisih ketersediaan dan kebutuhan, kemudian. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilakukan perhitungan ambang batas untuk menentukan status daya dukung terhadap penyedia pangan.

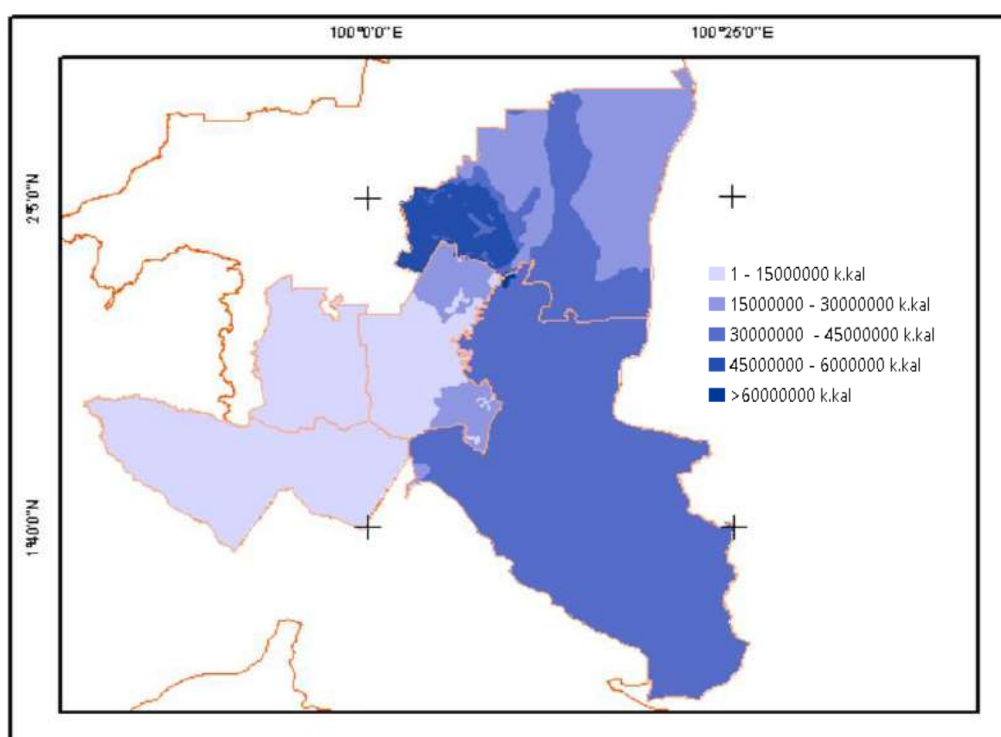
Ketersediaan pangan diperoleh melalui perhitungan menggunakan data produksi tanaman pangan, perkebunan, dan hasil peternakan yang di konversikan menjadi angka nilai kalori pada setiap bahan pangan tersebut. Selanjutnya sebaran ketersediaan pangan dilakukan pembobotan dengan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Pangan. Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki nilai ketersediaan tinggi. Wilayah dengan sebaran ketersediaan pangan dengan nilai tinggi ini umumnya didominasi oleh tutupan lahan berupa Sawah, Perkebunan dan Lahan Pertanian. Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki produksi kelapa sawit yang cukup tinggi, tentunya ini tercermin pada tingginya produksi bahan pangan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena hasil olahan Kelapa Sawit berupa CPO yang dihasilkan merupakan bahan baku atau bahan setengah jadi pembuatan bahan makanan minyak goreng, margarine , dan bahan lainnya.

Tabel 2.5 Data Produksi Bahan Pangan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021

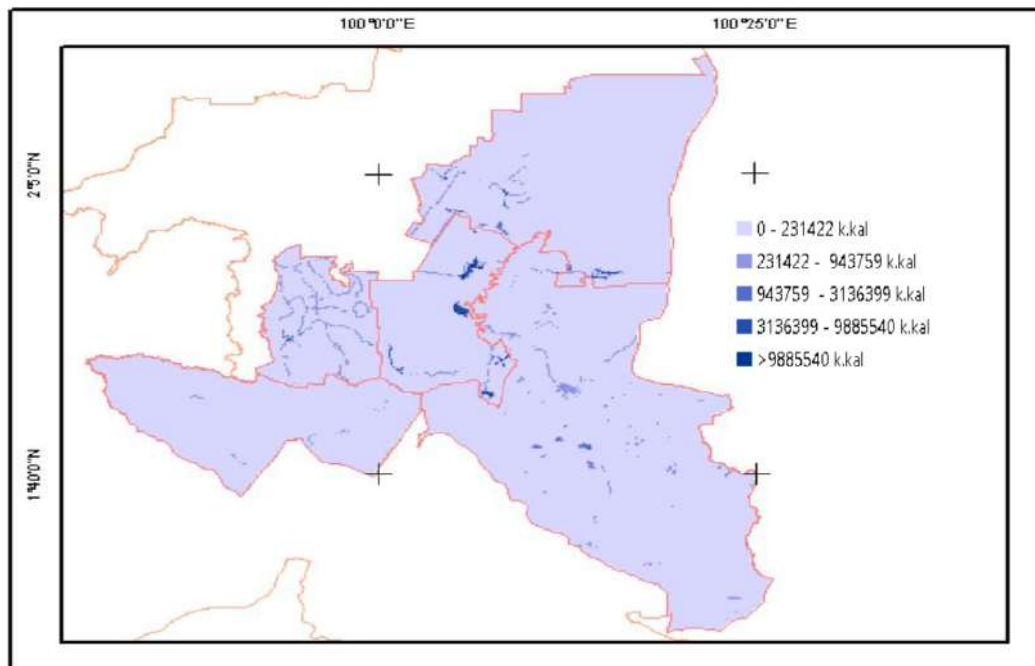
Produksi Pangan	Jumlah Produk	Angka Kalori	Nilai Kalori
Kelapa Sawit (Olein)	2,439,735,700	884	3,925,241,973,016
Ubi Kayu	3,151,900	154	4,853,926,000
Padi (padi)	2,218,300	376	5,338,117,120
Perikanan	684,440	86	588,618,400

Sapi Potong	478,035	273	1,305,035,550
Jagung	322,100	366	1,178,886,000
Mangga	217,900	52	113,308,000
Kangkung	148,800	28	41,664,000
Bayam	141,600	16	22,656,000
Kacang Panjang	113,200	31	35,092,000
Kelapa	111,500	359	400,285,000
Ketimun	100,900	8	8,072,000
Ayam Pedaging	85,910	298	256,011,800
Lainnya	671,115		1,015,421,110

Tabel 2. Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024



Gambar. 2.12. Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 dalam system grid 150 m x 150 m (Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024)



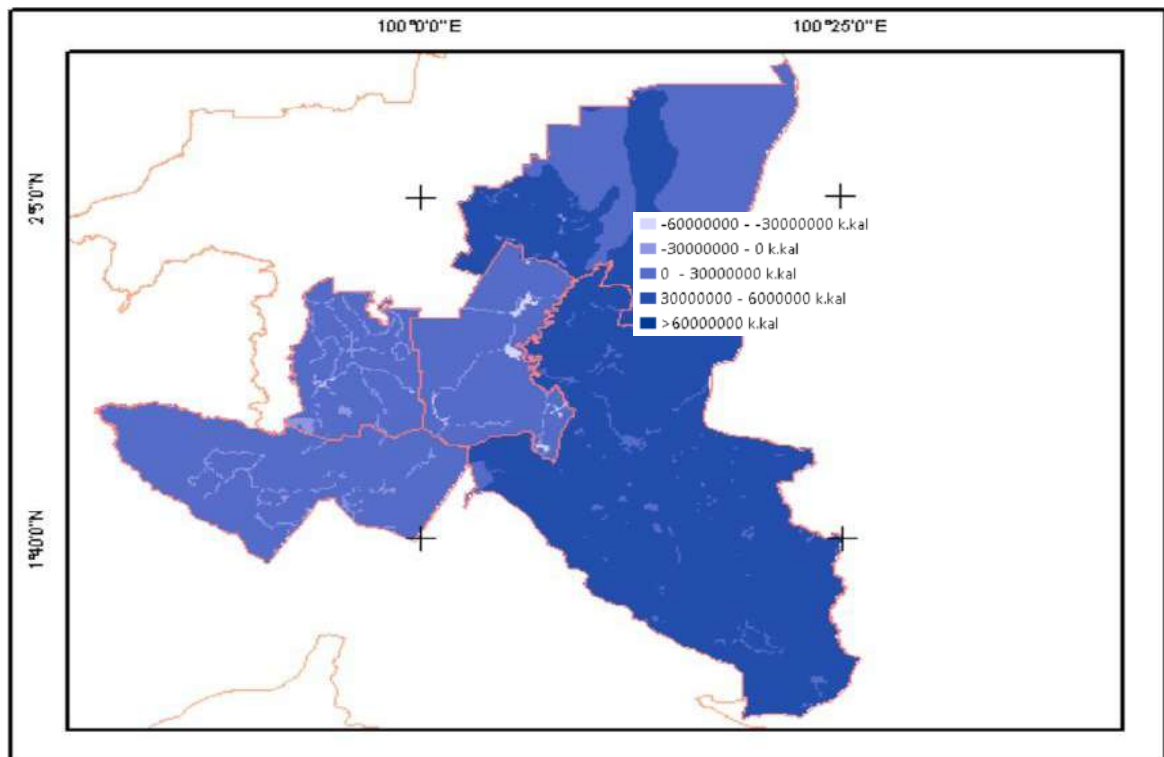
Gambar 2.13. Kebutuhan Energi Bahan Pangan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 dalam system grid 150 m x 150 m (Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024)

Setelah diperoleh sebaran kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan, selanjutnya dihitung nilai selisih ketersediaan bahan pangan menunjukkan peta selisih ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pada perhitungan hasil selisih ketersediaan, di Kabupaten Labuhanbatu Selatan didominasi oleh selisih ketersediaan yang bernilai positif, terutama pada Kecamatan Torgamba. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa secara akumulasi, selisih ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada yang sudah bernilai negatif terutama di Kecamatan Kotapinang. Selisih negatif menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah tidak dapat menunjang kebutuhan pangan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep in situ, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain. Jadi, selisih negatif

tidak mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut terjadi kelaparan.

Gambar. 2.14 Selisih Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 dalam Sistem Grid 5"x5" (Sumber KLHS RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024)

Berdasarkan data hasil analisis diketahui bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan didominasi oleh luas status daya dukung penyedia bahan pangan belum terlampaui/surplus mencapai 300,602 Ha yang mengindikasikan daya dukung penyedia pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih surplus dan dapat digunakan sebagai peyediaan energi bahan pangan. Hal ini dapat menjadi

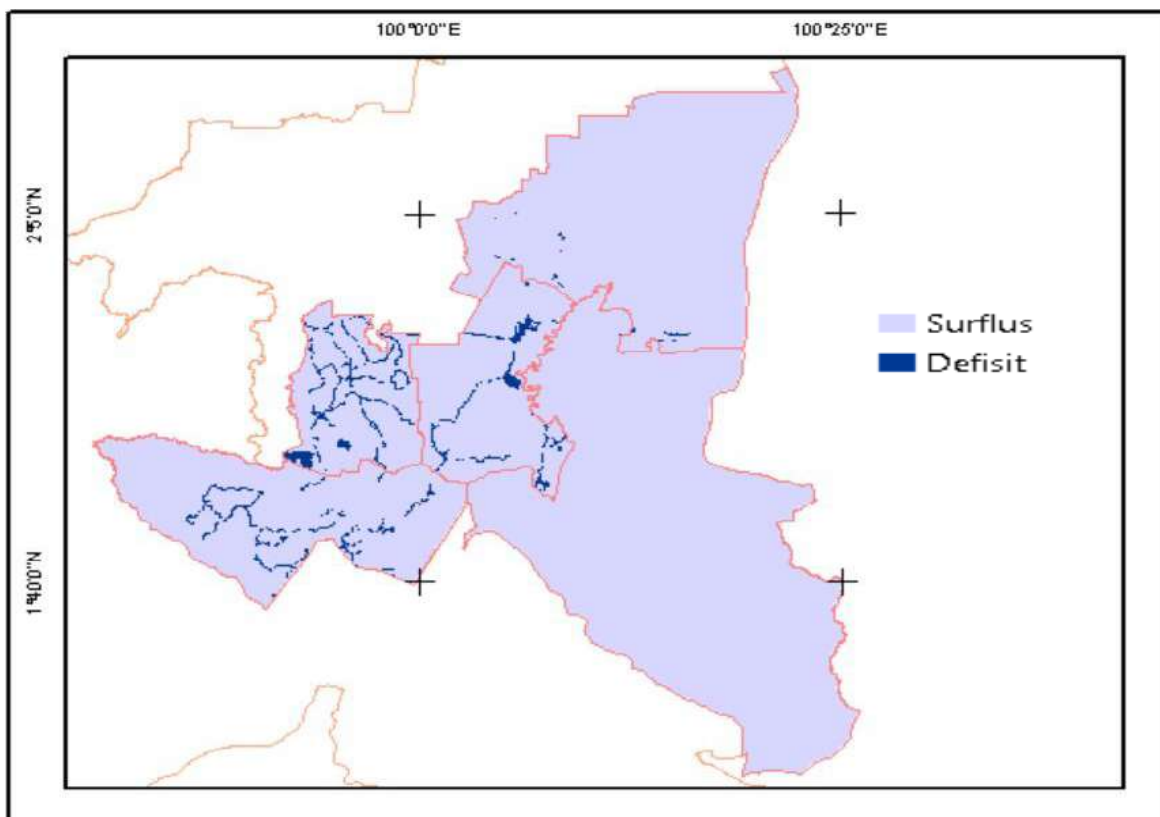


pertimbangan bahwa wilayah dengan status daya dukung penyedia pangan belum terlampaui/surplus untuk dapat dioptimalkan sebagai kawasan budidaya yang tetap menjaga keseimbangan ekologis

Tabel 2.6 Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021

KECAMATAN	Belum Terlampaui (Ha)	Sudah Terlampaui (Ha)
Kampung Rakyat	77,357	245
Kotapinang	30,562	1,984
Silangkitang	21,368	2,885
Sungai Kanan	45,304	2,086
Torgamba	126,011	-
TOTAL	300,602	7,200

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024



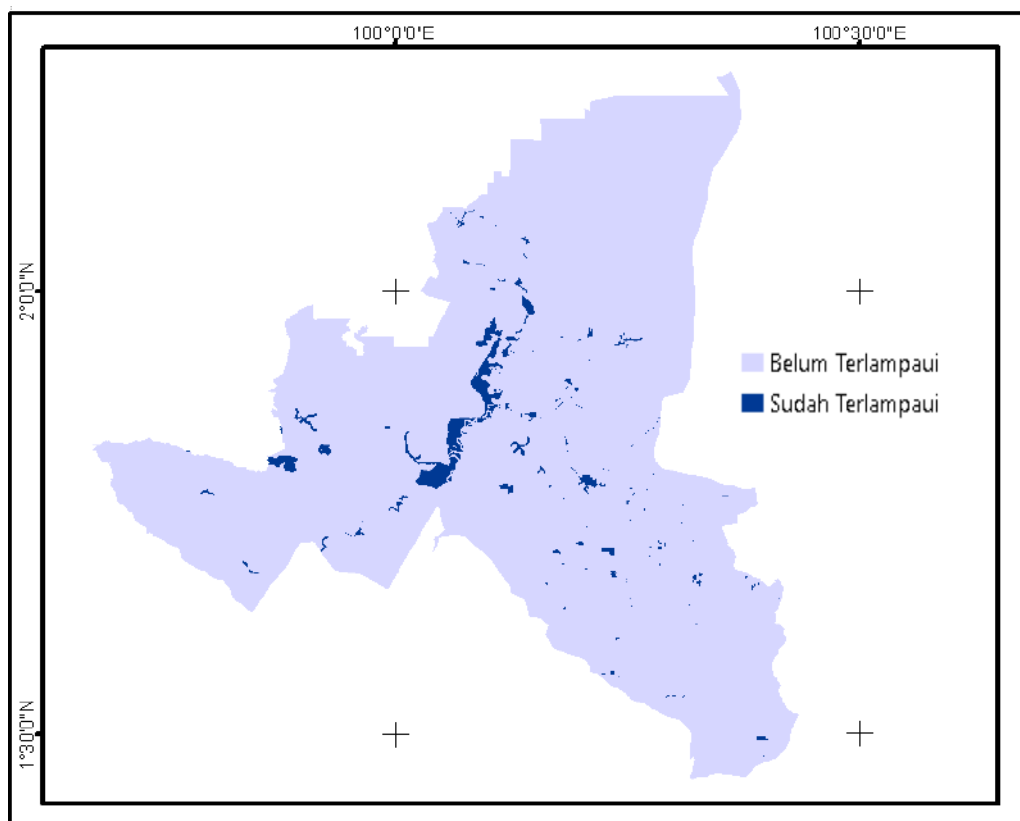
Gambar 2.15 Surplus dan Defisit Ketersediaan Energi Bahan Pangan per Grid di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 dalam Sistem Grid 150 x 150
(Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024)

Dengan adanya tekanan atau pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka kebutuhan terhadap bahan pangan juga akan mengalami peningkatan. Perhitungan jumlah penduduk di setiap unit administratif kecamatan pada tahunproyeksi menggunakan metode geometrik, yaitu:

Tabel 2.7 Proyeksi Penduduk Tahun 2031

Kecamatan	Penduduk Tahun 2010	Penduduk Tahun 2020	Nilai	Proyeksi Penduduk Tahun 2031
Sungai Kanan	45,407	48,447	0.0065	52,025
Torgamba	99,010	109,970	0.0106	123,550
Kotapinang	53,954	64,455	0.0179	78,312
Silangkitang	28,282	30,728	0.0083	33,643
Kampung Rakyat	51,020	60,494	0.0172	72,992
Total	277,673	314,094		360,522

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024



Gambar 2.16 Proyeksi DDTLH Energi Bahan Pangan per Grid di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2031 (*Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024*)

Tabel 2.8 Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan di Kabupaten LabuhanbatuSelatan Tahun 2031

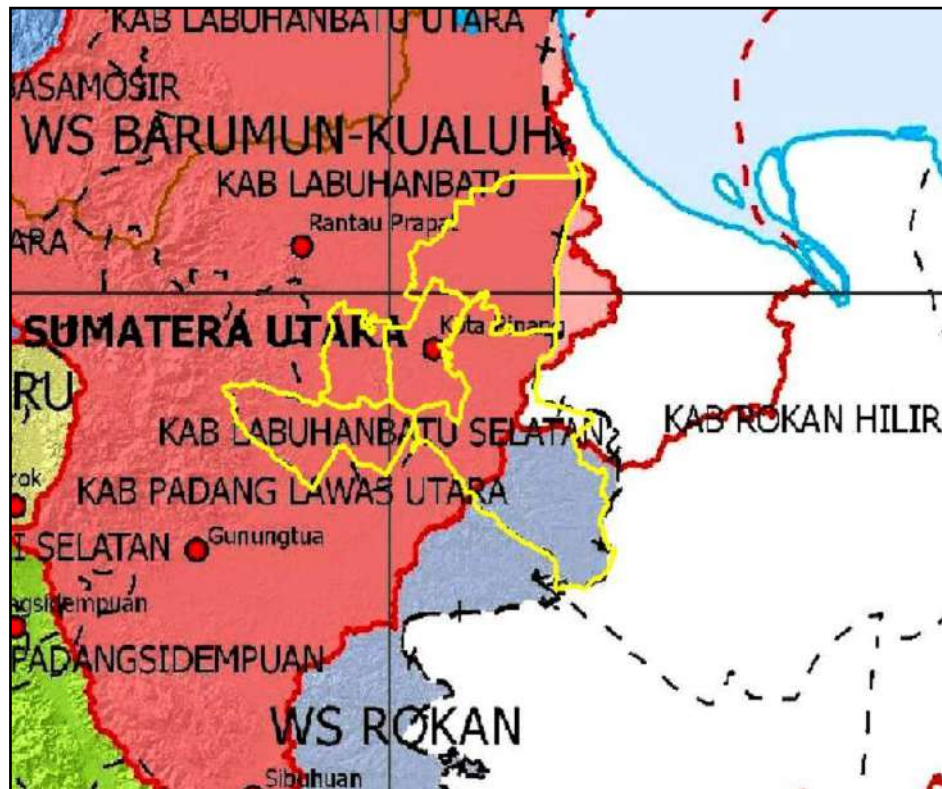
Nama Kecamatan	Belum Terlampaui(ha)	Sudah Terlampaui (Ha)	Total(Ha)
Kampung Rakyat	77,179	423	77,602
Kotapinang	28,300	4,246	32,546
Silangkitang	23,375	877	24,253
Sungai Kanan	47,077	313	47,390
Torgamba	124,900	1111	126,011
TOTAL	300,832	6,970	307,802

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024

Berdasarkan data hasil analisis diketahui bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih didominasi oleh luas status daya dukung penyedia bahan pangan belum terlampaui/surplus mencapai 300,832 Ha yang mengindikasikan daya dukung penyedia pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih surplus dan dapat digunakan sebagai peyediaan energi bahan pangan. Namun pada Kecamatan Kotapinang memiliki luasan sudah terlampaui/defisit paling luas mencapai 4.246 Ha. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bahwa wilayah dengan status daya dukung penyedia pangan belum terlampaui/surplus dapat dioptimalkan sebagai kawasan budidaya yang tetap menjaga keseimbangan ekologis. Terkait daya dukung penyediaan pangan sudah terlampaui agar dapat dilakukan Langkah-langkah pengendalian tata ruang sesuai dengan RTRW.

b. Ambang Batas dan Status DLLH Penyedia Air

Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masuk kedalam tiga wilayah Sungai sebagai salah satu sumber air baku, yaitu Wilayah Sungai Barumon Kualuh, Wilayah Sungai Rokan dan Wilayah Sungai Kubu.



**Gambar. 2.17. Wilayah Sungai Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan(sumber :
Permen PU NOMOR 04/PRT/M/2015)**

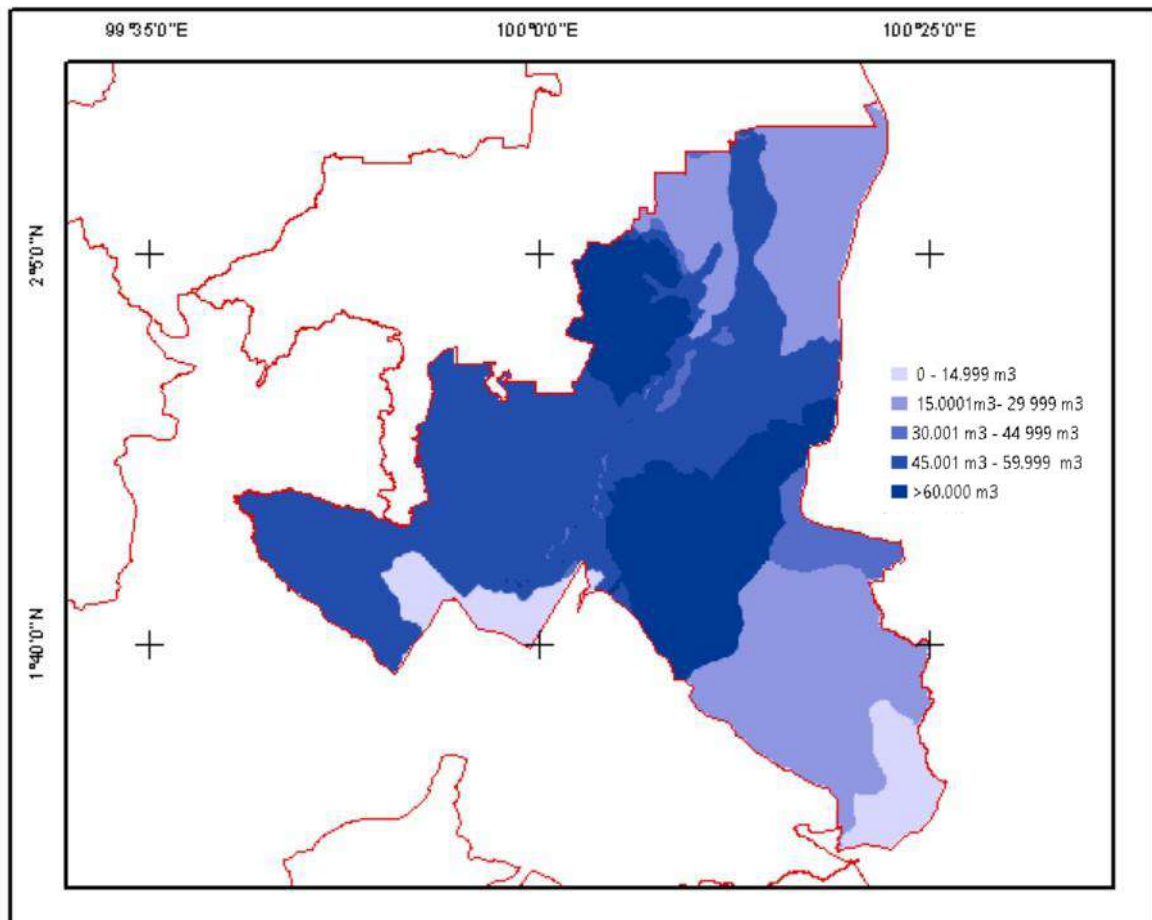
Berdasarkan Laporan Akhir Penelitian Strategi Pendayagunaan Sumber Daya Air Pada Wilayah Sungai Di Indonesia Tahun 2014 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Debit air rata rata Q 80% adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9. Neraca Ketersediaan Air Pada Wilayah Sungai

Wilayah Sungai	Debit Rata-Rata Harian (1.000 m ³ /detik/hari)											
	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	Q 80 %	Q 80 %	Q 80 %	Q 80 %	Q 80 %	Q 80 %	Q 80 %	Q 80 %	Q 80 %	Q 80 %	Q 80 %	Q 80 %
W.S. Kualuh Barumun	1.26	1.15	1.08	1.1	1.26	0.99	0.9	0.79	1.19	1.37	1.71	1.66
W.S. Rokan	0.84	0.58	0.53	0.54	0.54	0.26	0.21	0.16	0.26	0.43	0.52	0.88
W.S. Kubu	0.12	0.1	0.1	0.1	0.11	0.07	0.07	0.06	0.09	0.11	0.13	0.15

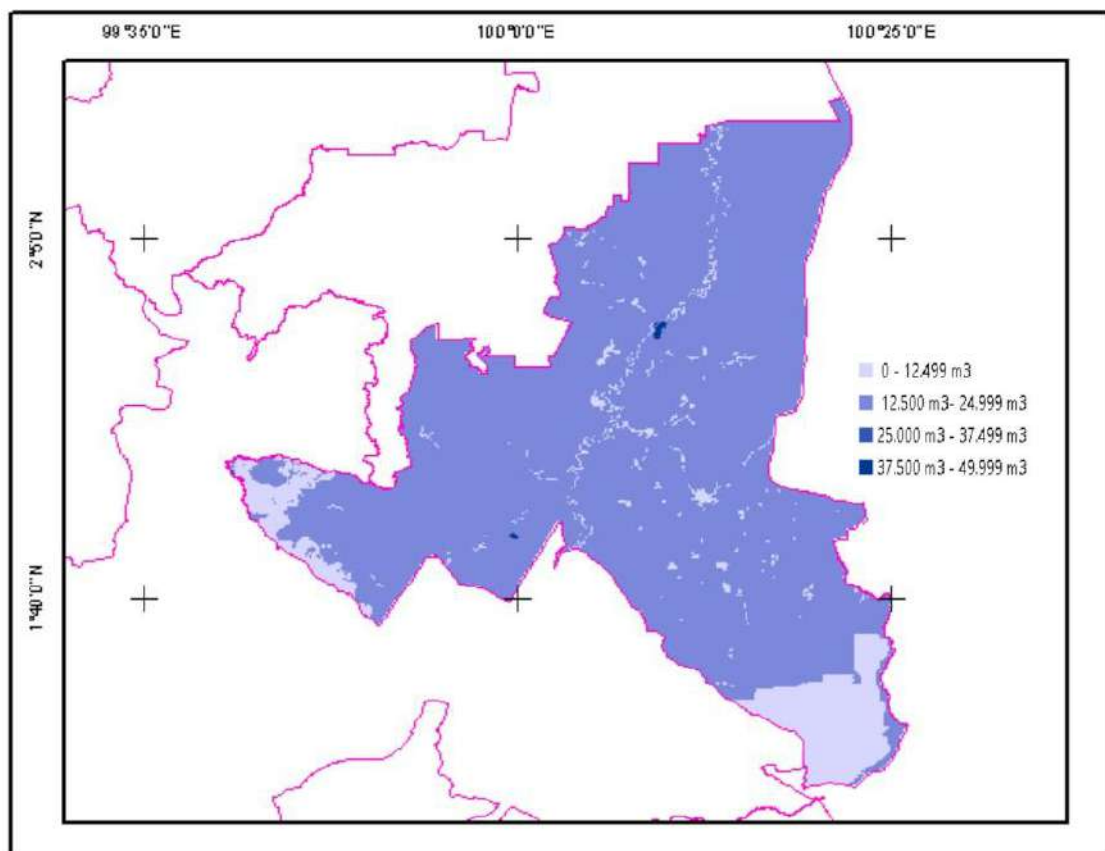
Sumber :Laporan Akhir Penelitian Strategi Pendayagunaan Sumber Daya Air PadaWilayah Sungai Di Indonesia Tahun 2014

Dari kalkulasi yang dilakukan terhadap luas wilayah yang masuk kedalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, didapatkan ketersediaan air di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebesar 5.721.556.986 m³ /Tahun. Ketersediaan air di setiap grid dihitung dengan mendistribusikan ketersediaan air di setiap grid dengan faktor pembobot menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia air (IJEPA) sebagai bobot pendistribusian.



Gambar. 2.18. Ketersediaan Air di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 dalam sistem grid 150 m x 150 m (Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024)

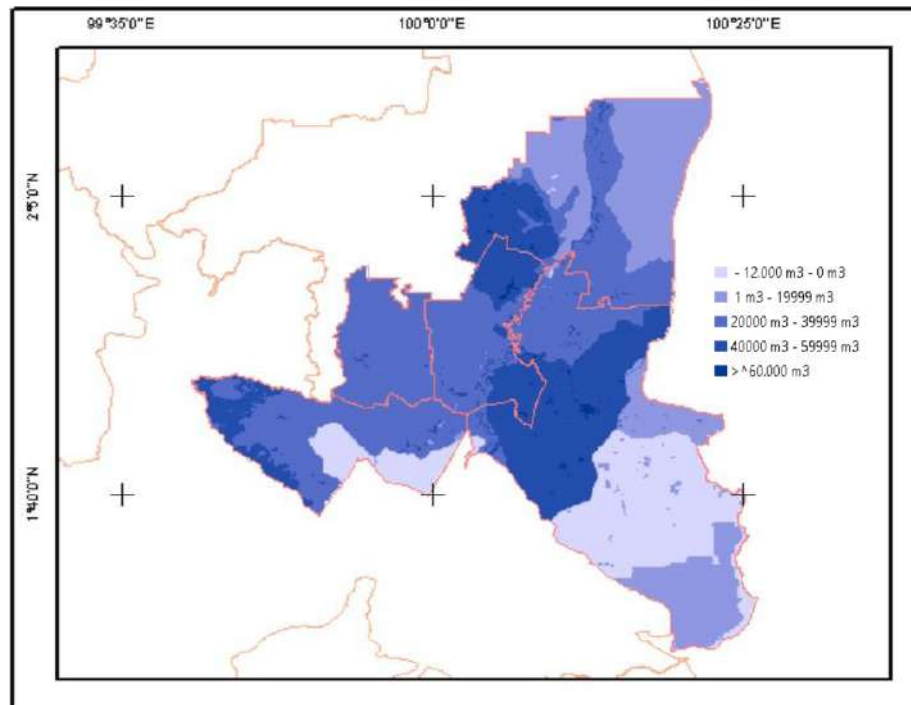
Perhitungan kebutuhan air terbagi dua jenis, yaitu kebutuhan air untuk lahan dan kebutuhan air domestik sesuai dengan KEPMENLHK No. SK.146/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2023. Kebutuhan air lahan dihitung berdasarkan jenis penutup lahan. Penutup lahan yang diperhitungkan kebutuhan airnya adalah persawahan, perkebunan, kebun campuran, lading/tegalan dan tambak. Sementara itu, kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan kebutuhan air untuk hidup layak per kapita, yaitu sebesar 43,2 m³/tahun. Dalam perhitungan kebutuhan air domestik, kebutuhan per kapita dikali 2 sebagai faktor koreksi.



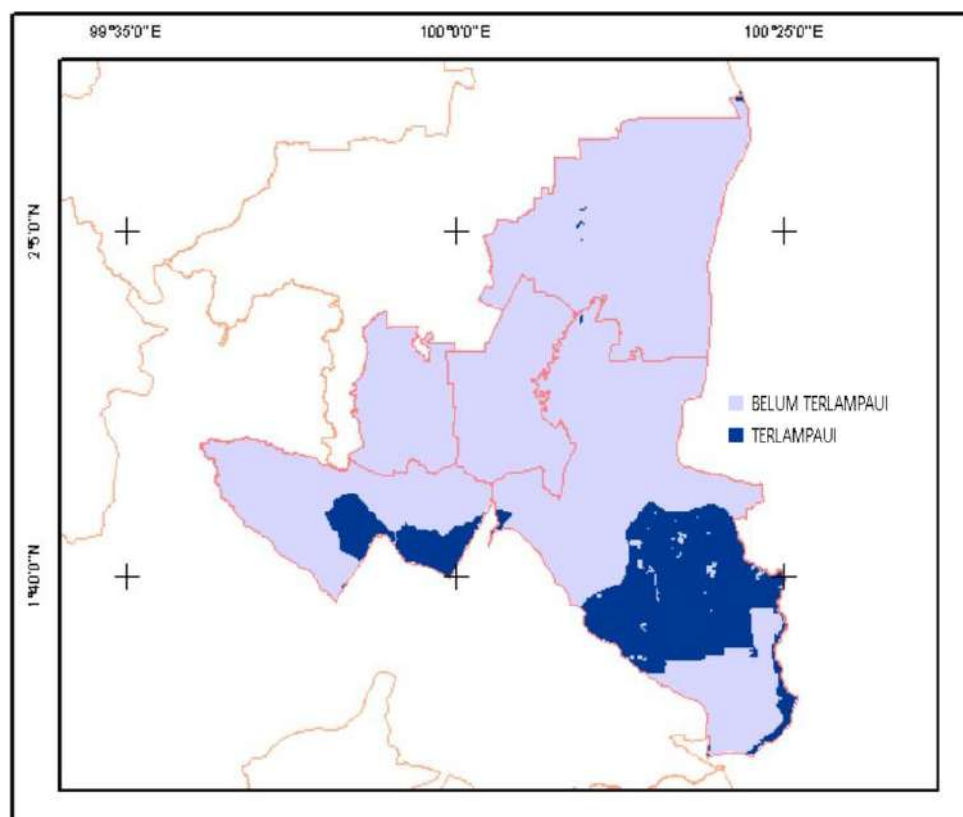
Gambar. 2.19 Kebutuhan Air di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 dalam sistem grid 150 m x 150 m (Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024)

Nilai akumulasi dari kebutuhan, ketersediaan, dan selisih akumulatif air bersih di setiap kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat bahwa semua kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki selisih ketersediaan positif. Hal ini menunjukkan bahwa secara akumulatif selisih ketersediaan air bersih Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum terlampaui/surplus, yang artinya jumlah ketersediaan air bersih lebih tinggi dari jumlah kebutuhan air sehingga air yang tersedia dapat menunjang kebutuhan air bersih. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep in situ, yaitu perhitungan ketersediaan

sumber daya hanya pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain.



Gambar. 2.20 Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan untuk DDLH Penyedia Air di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 dalam Sistem Grid 150 m x 150 m (Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024)



Gambar. 2.21. Status DDLH Penyedia Air Tahun 2022

Tabel 2.10 Luas Wilayah yang Belum Melampaui Ambang Batas DDLH Penyedia Air di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022

KECAMATAN	BELUM TERLAMPAUI	SUDAH TERLAMPAUI
Kampung Rakyat	77,452	151
Kotapinang	32,546	
Silangkitang	24,253	
Sungai Kanan	37,654	9,736
Torgamba	84,029	41,983
TOTAL	255,933	51,869

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024

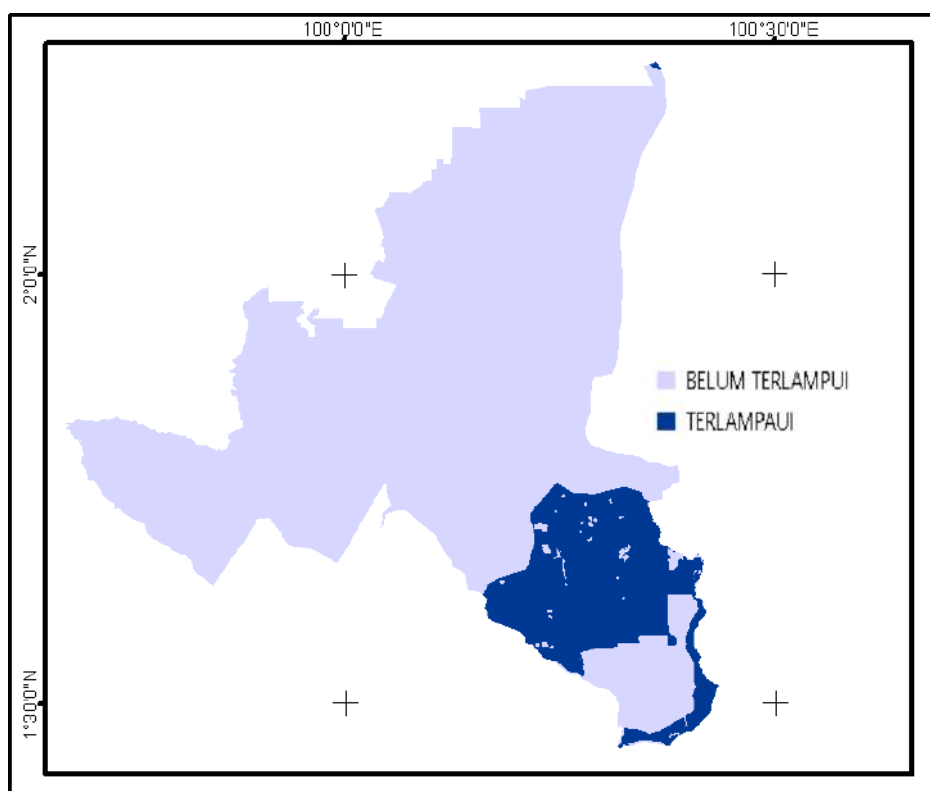
Berdasarkan perhitungan nilai kebutuhan dan ketersediaan didapatkan hasil yang digambarkan dalam peta status daya dukung air dan dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah melampaui ambang batas DDLH penyedia air. Daya dukung melampaui paling banyak terdapat di Kecamatan Torgamba. Wilayah dengan daya dukung melampaui ambang batas paling sedikit terdapat di Kecamatan Kampung Rakyat. Wilayah belum melampaui ambang batas di Kecamatan Kotapinang dan Silangkitang.

Dengan adanya tekanan atau pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka kebutuhan terhadap bahan air juga akan mengalami peningkatan. Perhitungan jumlah penduduk di setiap unit administratif kecamatan pada tahun proyeksi dan Penggunaan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan yang diperhitungkan meliputi kelas lahan persawahan, perkebunan, kebun campuran dan tegalan/ladang dimana kebutuhan air pada lahan sawah $0.001 \text{ m}^3/\text{detik/ha} \times 3600 \times 120$ hari permusim. Untuk dapat menghitung kebutuhan air pada lahan dan pemodelan distribusi penduduk berbasis kelas penutupan lahan dimasa yang akan datang dilakukan proyeksi perubahan tutupan lahan 2046. Dengan asumsi ketersediaan air adalah tetap Kebutuhan Berbasis Lahan dan Domestik sampai tahun 2046, sebagaimana pada tabel dibawah :

Tabel 2.11 Kebutuhan Air Lahan dan Kebutuhan Domestik 2031

KECAMATAN	(M3)	DOMESTIK (M3)	LAHAN (M3)	SELISIH (M3)
Kampung Rakyat	1,474,544,008	6,306,595	593,691,172	874,546,240
Kotapinang	776,045,321	6,766,157	242,679,474	526,599,691
Silangkita ng	419,613,745	2,906,755	187,044,479	229,662,511
Sungai Kanan	922,550,536	4,494,960	311,855,803	606,199,773
Torgamba	2,124,874,797	10,674,720	848,452,964	1,265,747,113
TOTAL	5,717,628,407	31,149,187	2,183,723,892	3,502,755,328

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024

**Gambar. 2.22. Status DDLH Penyedia Air Tahun 2031**

Tabel 2.12 Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan 2031

KECAMATAN	BELUM TERLAMPAUI	TERLAMPAUI
Kampung Rakyat	77,517	85
Kotapinang	32,546	
Silangkitang	24,253	
Sungai Kanan	47,390	
Torgamba	82,073	43,938
TOTAL	263,779	44,024

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024

Berdasarkan data di atas proyeksi daya dukung penyedia air di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagian besar wilayah masih dikategorikan belum terlampaui atau surplus sehingga daya dukung Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih dapat dioptimalisasi untuk memenuhi kebutuhan. Namun untuk menjaga keseimbangan lingkungan dalam penyedia air perlu dilakukan penetapan pemanfaatan lahan yang terkendali untuk fungsi lindung dengan produksi terbatas serta membatasi pemanfaatan dengan potensi penggunaan air besar terutama pada daerah Kecamatan Torgamba yang memiliki daerah defisit terbesar. Selain itu dalam upaya menjaga keseimbangan ekologis perlu ditetapkan dan penerapan sanksi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW.

2.1.1.9. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air dan pangan merupakan isu yang sudah dikenalkan sejak 2012 pada UN Conference on Sustainable Development. Setelah 13 tahun berlalu, akselerasi pencapaian pada tiga isu tersebut semakin mendesak dilakukan oleh berbagai negara yang tergabung dalam kesepakatan global, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) termasuk Indonesia. Keterkaitan antara *Food, Energy, Water* (FEW) Nexus sangat dekat dengan kehidupan manusia. Saat ini, sejalan dengan kebutuhan pangan yang terus meningkat, maka diperlukan energi yang cukup untuk menopang sistem pangan. Namun, pada saat yang bersamaan, produksi energi juga memerlukan suplai air yang memadai. Sehingga diperlukan manajemen yang tepat untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang

berkelanjutan.

Akses rumah tangga terhadap air minum layak menjadi salah satu faktor pemenuhan dalam memastikan kemandirian dan ketercukupan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan data presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak selalu mengalami kenaikan tahun 2020 hingga tahun 2022 mencapai 91,34%, namun tahun 2023 mengalami penurunan hingga 90,47%. Secara umum cakupan akses terhadap air minum sudah cukup tinggi untuk supply konsumsi terhadap rumah tangga. Dalam upaya peningkatan dan perluasan akses air minum layak, dapat dilakukan koordinasi terhadap penyediaan layanan disetiap wilayah melalui skema dalam pengadaan air minum layak diantaranya, SPAM, PDAM dan PAMSIMAS III.

Tabel 2.13 Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Akses terhadap air minum layak	83,49	84,66	91,34	90,47	n/a

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) Konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; serta (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Tabel 2.14 Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah ketersediaan pangan utama (ton)	39.439	35.429	34.379	35.103	32.450
Jumlah konsumsi pangan utama (ton)	20.353,33	31.767,93	31.729,22	31.100,25	29.675,77
Ketersediaan pangan utama terhadap jumlah	1,9377	1,1152	1,0853	1,1287	1,094

konsumsi pangan utama (ton)					
Pola Pangan Harapan	89	90	-	-	-
Presentase Desa Rawan Pangan	7	6	-	-	-

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Angka

Berdasarkan data tersebut jumlah ketersediaan pangan utama terhadap jumlah konsumsi pangan utama terpenuhi, bahkan mengalami surplus yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi devisa daerah (data tahun 2018-2023). Data tersebut selaras dengan nilai pola pangan harapan dan presentasee desa rawan pangan yang terus mengalami peningkatan kualitas pemenuhan pangan daerah, sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi. Berdasarkan data 2023 untuk jumlah ketersediaan pangan utama mengalami penurunan, sehingga perlu menjadi perhatian untuk dapat menjaga pemanfaat dan guna lahan yang difungsikan sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

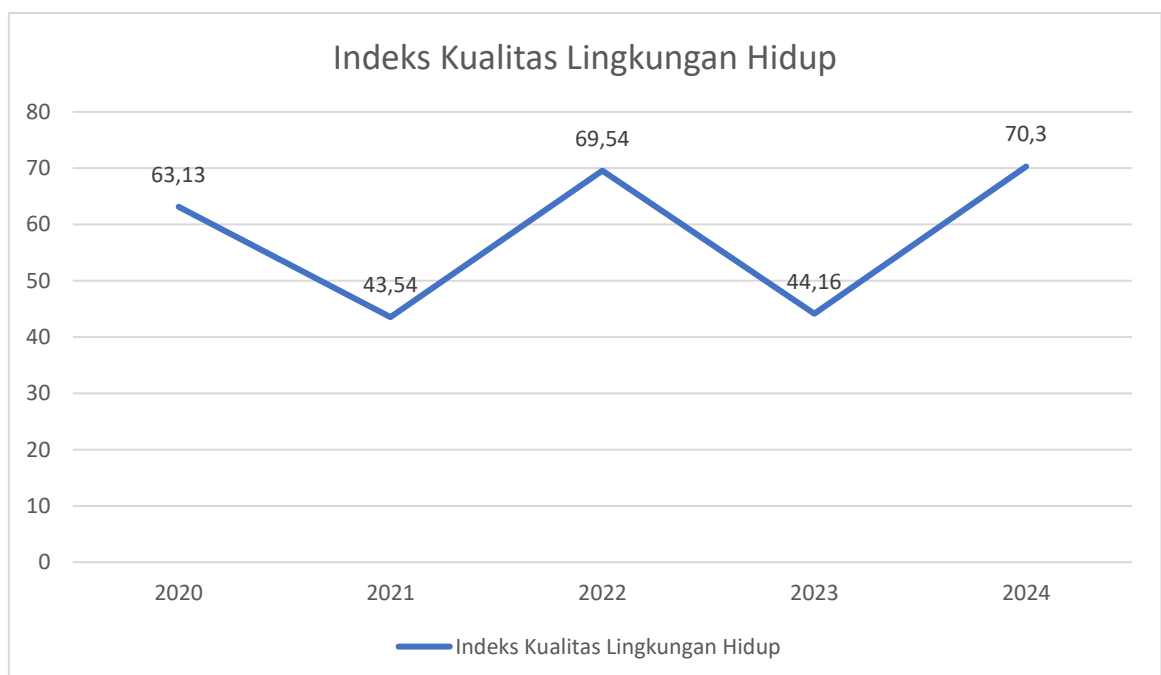
Kondisi ketahanan pangan Labuhanbatu Selatan dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mulai dilakukan pengukurannya oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional mulai tahun 2019. IKP merupakan indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks ketahanan pangan Labuhanbatu Selatan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019, indeks ketahanan pangan Labuhanbatu Selatan sebesar 54,78 dan pada tahun 2024 menjadi 56,18, yang mengindikasikan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan agak rentan. Selanjutnya, ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur oleh BPS Pusat mulai tahun 2019. Kondisi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Labuhanbatu Selatan mengalami fluktuasi yang relatif negatif, ditunjukkan dari nilai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yaitu sebesar 3,79 persen pada tahun 2019 menjadi 5,33 persen pada tahun 2023. Hal ini artinya jumlah populasi penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah jumlah minimum kebutuhan energi mengalami peningkatan dan mengindikasikan pemerataan pangan belum tersebar secara merata.

2.1.1.10. Lingkungan Hidup Berkualitas

Mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan memberikan perhatian pada pelestarian lingkungan hidup, Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu mempertimbangkan perencanaan masa depan yang seimbang antara perkembangan ekonomi dan menjaga keseimbangan alam. Dalam upaya mewujudkan keseimbangan dan menuju pembangunan berkelanjutan tersebut, diperlukan pendekatan untuk menempatkan fokus pada pemahaman tentang kapasitas lingkungan dalam penyediaan pangan, mengatasi polusi, pembebasan limbah, dan menjaga kualitas ekosistem alamnya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan instrumen holistik yang mengevaluasi dan menyajikan gambaran komprehensif tentang kondisi lingkungan hidup dalam ruang lingkup dan periode waktu tertentu. Alat ukur ini secara efektif menyediakan indikasi awal dan kesimpulan yang cepat mengenai status lingkungan, memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan informasi berbasis data. IKLH merupakan 35 agregasi dari beberapa indeks khusus, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang masing-masing memberikan evaluasi terperinci terhadap aspek tertentu dari lingkungan.

Grafik 2.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Labuhanbatu Selatan 2020-2024



Berdasarkan data nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020 s.d 2024 mengalami fluktuasi yaitu 63,13 tahun 2020, mengalami penurunan pada 2 tahun yaitu 43,54 pada tahun 2021 dan 44,16 pada tahun 2023, namun

mengalami peningkatan Kembali pada tahun 2024 dengan capaian 70,3. Skor ini mencerminkan evaluasi kuantitatif atas kondisi lingkungan saat ini di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan menjadi tolak ukur penting dalam pengambilan keputusan serta penentuan arah kebijakan lingkungan dimasa mendatang untuk dapat memperhitungkan kesesuaian tata ruang terhadap pembangunan dan pemanfaatan lahan. Fluktuasi skor ini dapat menjadi input untuk analisis tren lingkungan, serta menjadi fondasi dalam perencanaan strategi dan intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penanganan pengelolaan sampah Labuhanbatu Selatan diperhitungkan berdasarkan volume produksi sampah dengan asumsi timbunan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah dalam satuan m3/bulan yaitu pada tahun 2020 sebanyak 2.248,3 m3/bulan dan pada tahun 2023 sebanyak 1.973,5 m3/bulan.

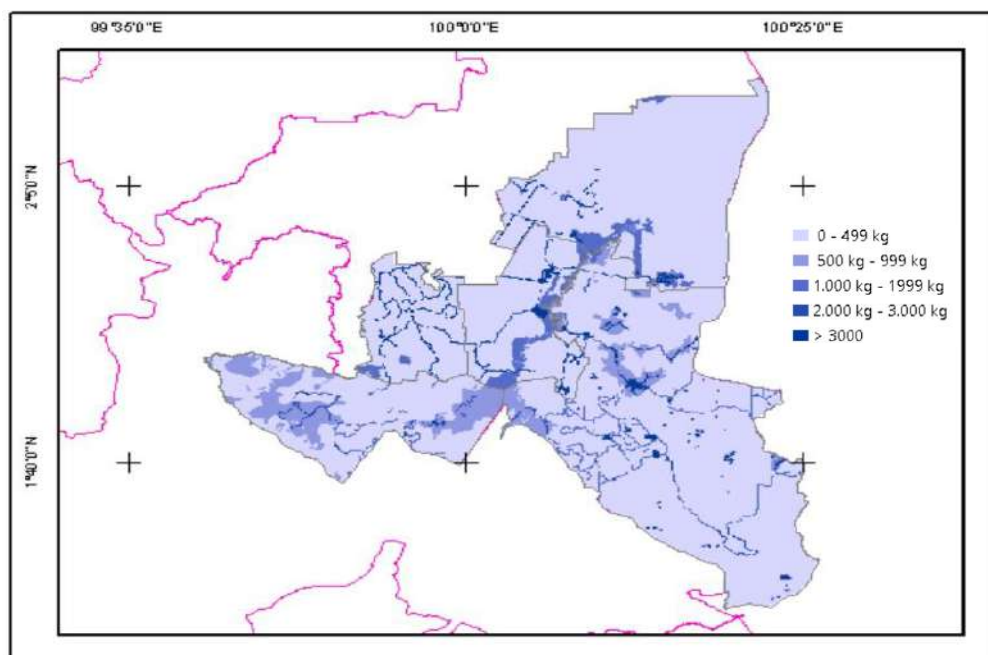
Tabel 2.15 Volume Sampah Yang Diangkut (M3) Per Bulan Di kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Volume Produksi Sampah (m3/bulan)		2.248,3	2.580	1.757	1.973.5

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan 2024

Jumlah timbunan sampah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan setiap tahun semakin meningkat sehingga kapasitas TPA suatu saat akan penuh. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada di TPA Asam Jawa yang memiliki luas ± 4 Ha. Jumlah timbunan sampah secara sederhana dihitung dengan memperhitungkan jumlah penduduk dengan Faktor Estimasi Timbunan Sampah/Kapita, berdasarkan Klasifikasi Kota kecil 0,4 kg/orang/hari (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional).

Sebaran potensi timbunan sampah dimodelkan dengan menggunakan distribusi penduduk dan jumlah sampah yang dihasilkan per kapita per hari dimana pola sebarandari potensi timbunan sampah bergantung pada pola distribusi penduduk, karena pemodelan timbunan sampah hanya mempertimbangkan sampah yang bersumber dari domestik.



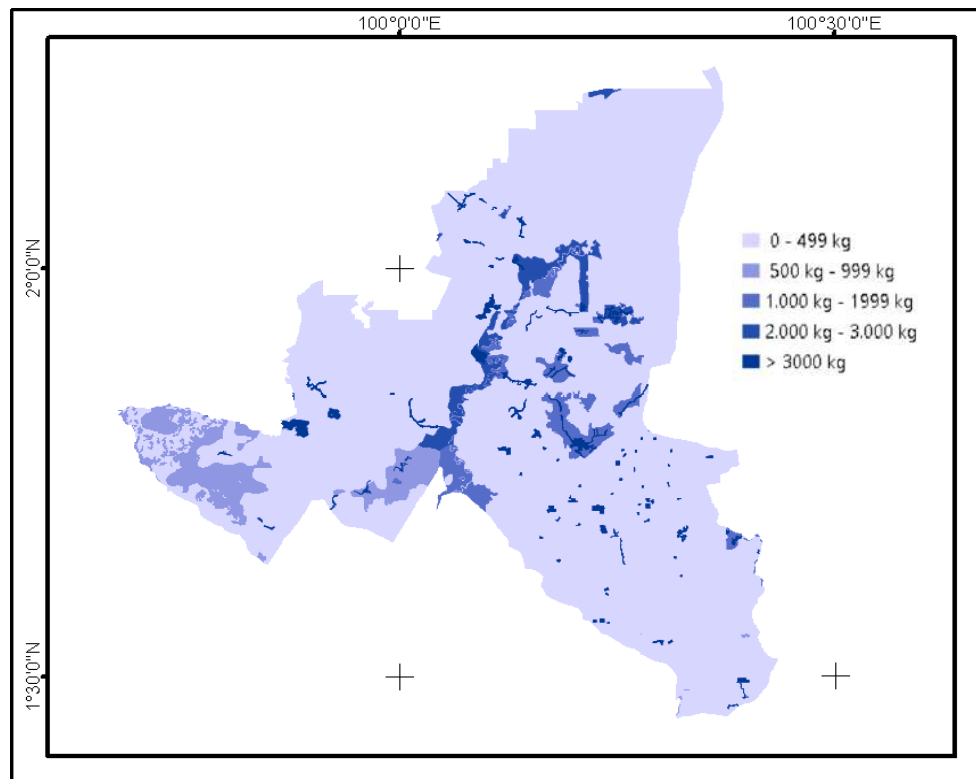
Gambar. 2.24. Potensi Timbunan Sampah Tahun 2022

Secara spasial, timbunan sampah yang kategori tinggi terdapat di Kecamatan Torgamba, Sungai Kanan dan Kotapinang. Dengan jumlah penduduk yang tiap tahun semakin meningkat, nilai potensi timbunan sampah yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Dengan memakai angka proyeksi pertumbuhan penduduk dan timbunan sampah yang dihasilkan sebesar 0,4 kg/orang/hari potensi timbunan sampah sampai tahun 2031 adalah seperti pada tabel dibawah:

Tabel 2.16. Potensi Timbunan Sampah Sampai Tahun 2031

KECAMATAN	2025	2031
Sungai Kanan	7,306,045	7,546,599
Torgamba	16,932,509	17,849,160
Kotapinang	10,279,056	11,232,561
Silangkitang	4,674,224	4,871,451
Kampung Rakyat	9,620,299	10,476,599
Jumlah	48,812,133	51,976,370

Sumber: Analisis Secara spasial terjadi peningkatan jumlah wilayah yang menghasilkan sampah kategori tinggi > 2.000 kg/tahun pada tahun 2031.



Gambar. 2.25. Potensi Timbulan Sampah Tahun 2031 dalam Sistem Grid 150mx

Kondisi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat menggunakan beberapa indikator. Persentase penanganan sampah pada tahun 2021 sudah mencapai 60,01% dengan capaian setiap tahun 2021-2024 mengalami tren positif yang terus meningkat setiap tahunnya dengan target capaian sebesar 60,65% pada tahun 2024. Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan utilitas perumahan dalam kondisi baik memiliki target sebesar 76% dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 telah mencapai 78,50%. Demikian pula dengan permukiman yang tidak kumuh, terus mengalami peningkatan dari 70,50% pada tahun 2021 dan mencapai 73% pada tahun 2024.

Upaya perbaikan terus dilakukan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui peran serta masyarakat dan pemanfaatan teknologi hingga menghasilkan nilai tambah dari sampah yang dikelola. Program peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan difokuskan pada edukasi masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan daur ulang sampah plastik untuk meningkatkan pengelolaan tingkat rumah tangga, menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan meningkatkan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) yang menggunakan teknologi

modern seperti *sanitary landfill* yang tidak sekedar menumpuk sampah melainkan menggunakan teknologi untuk membuang air dan gas hasil dari sampah untuk menurunkan resiko pencemaran lingkungan. Peningkatan pengelolaan sampah dari sektor perusahaan terdapat program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) untuk meningkatkan system pengelolaan sampah tingkat industri sebelum dibuang ke lingkungan serta pemanfaatan sampah menjadi Bahan Bakar Jumpatan Padat (BBJP) yang bekerjasama dengan PT. PLN.

Tabel 2.17 Indikator Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase penanganan sampah	60,01	60,16	60,58	60,65
Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan utilitas perumahan	76	76,50	77	78,50
Presentase pemukiman yang tidak kumuh	70,50	71	71,50	73

Sumber: LKIP, 2024

Akses rumah tangga terhadap air minum layak dan akses terhadap sanitasi menjadi beberapa faktor penunjang daya saing daerah dalam memastikan kemandirian dan ketercukupan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan data presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak selalu mengalami kenaikan tahun 2020 hingga tahun 2022 mencapai 91,34%, namun tahun 2023 mengalami penurunan hingga 90,47%. Secara umum cakupan akses terhadap air minum sudah cukup tinggi untuk supply konsumsi terhadap rumah tangga. Dalam upaya peningkatan dan perluasan akses air minum layak, dapat dilakukan koordinasi terhadap penyediaan layanan disetiap wilayah melalui skema dalam pengadaan air minum layak diantaranya, SPAM, PDAM dan PAMSIMAS III.

Selain itu akses terhadap sanitasi dari data yang tercatat mengalami kenaikan secara konsisten pada periode 2020-2023, namun mengalami koreksi tahun 2024 dengan capaian angka presentase akses 80,9. Secara umum akses terhadap sanitasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus mengalami perbaikan, hal ini sejalan dengan target pembangunan daerah untuk dapat mendorong rumah tangga memperoleh layanan pengelolaan air limbah melalui program PAMSIMAS III yang memiliki semangat untuk mewujudkan target 100% akses air minum aman, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak berbasis masyarakat.

Tabel 2.18 Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan sanitasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Akses terhadap air minum layak	83,49	84,66	91,34	90,47	-
Akses terhadap sanitasi	83,27	84,9	87,49	87,49	80,9

Sumber: BPS Labuhanbatu Selatan

2.1.1.11. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Berdasarkan data yang dirilis oleh BNPB, Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki trend Indeks Risiko Bencana yang masuk dalam kategori sedang (131,20). Nilai tersebut tercatat konsisten sejak tahun 2020, hal ini dimungkinkan dari kondisi potensi bencana yang relative stabil. Indeks risiko bencana perlu diikuti dengan tingkat kapasitas daerah dalam penanganan terhadap bencana yang mumpuni, berdasarkan data saat ini Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikategorikan rendah.

Tabel 2.19 Indeks Risiko Bencana dan Tingkat Kapasitas Daerah dalam Penanganan Bencana Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	131,20	131,20	131,20	131,20	131,20
Tingkat Kapasitas Daerah				Rendah	

Sumber: inarisk.bnpb.go.id

Berdasarkan data dan gambaran terkait dengan wilayah rawan bencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada subbab 2.1.1.4 dan berdasarkan data BNPB, Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki trend Indeks Risiko Bencana yang masuk dalam kategori sedang (131,20) dengan menjabarkan jenis bencana yang terjadi memiliki kaitan dengan perubahan iklim diantaranya cuaca ekstrim, banjir, banjir bandang, kebakaran hutan/lahan dan kekeringan. Sehingga secara umum tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada di kategori sedang, hal ini dimungkinkan dari kondisi potensi bencana yang dalam kategori sedang untuk semua jenis bencana.

Setelah mengetahui tingkat kerentanan, diperlukan informasi terkait tingkat kapasitas daerah dalam penanganan terhadap bencana yang mumpuni. Berdasarkan data penyelamatan dan evakuasi korban bencana meliputi persentase desa Tangguh bencana dan tingkat waktu tanggap darurat kejadian bencana tahun 2021 dan 2022 dengan capaian 100%. Namun berdasarkan data inarisk BNPB tahun 2024, saat ini kapasitas Kabupaten

Labuhanbatu Selatan dalam menanggulangi dan penanganan bencana masih dikategorikan rendah, hal ini dapat disebabkan dari tingkat perencanaan hingga penanganan yang menurun. Perbaikan peningkatan kapasitas dapat dilakukan bersamaan dengan tindakan adaptasi yang diarahkan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kapasitas ketahanan dan adaptasi dalam mengatasi dampak perubahan iklim secara kolektif.

Dalam upaya peningkatan kapasitas daerah dalam penanganan terhadap bencana diperlukan rekomendasi kebijakan, BNPB telah menetapkan 7 prioritas dalam meningkatkan kapasitas daerah yaitu:

Prioritas 1: Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan

Prioritas 2: Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

Prioritas 3: Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik

Prioritas 4: Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

Prioritas 5: Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Prioritas 6: Perkuat Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

Prioritas 7: Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6	Prioritas 7
• Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana • Penguatan Aturan Daerah Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB • Penguatan Aturan dan Mekanisme	• Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan • Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan • Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan • Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	• Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah • Membandingkan Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat • Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga	• Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana • Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah • Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	• Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori • Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air • Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai • Pengurangan Frekuensi	• Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi • Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah • Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi • Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah	• Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintahan Pasca Bencana • Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana • Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana • Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan

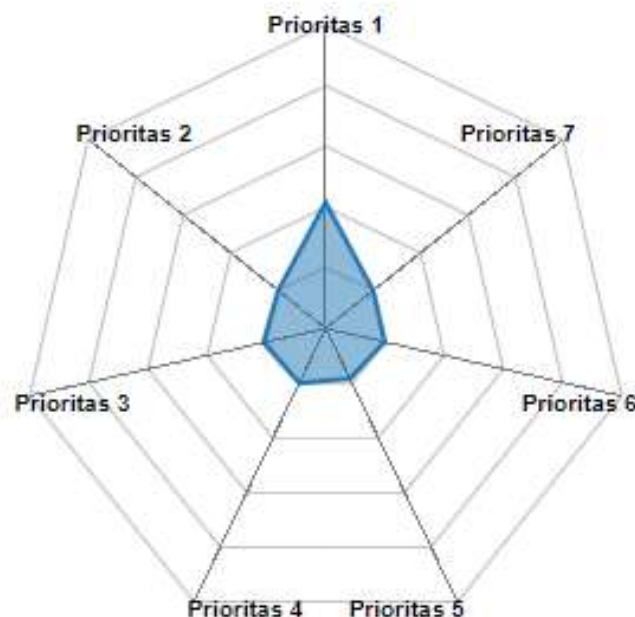
Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6	Prioritas 7
sme Penyebab Informasi Kebencanaan • Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana • Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana • Penguatan Badan	a Daerah	• Penguatan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana • Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah • Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB • Penyeleenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut • Penyusunan Kajian	• Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana • Pembangunan Desa Tangguh Bencana	si dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng • Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan • Pembangunan/R evitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir	Longsor Daerah • Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi • Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah • Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana • Penguatan	masyarakat pascabencana

Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6	Prioritas 7
Penanggulangan Bencana Daerah • Penguatan Forum PRB • Studi Banding Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah		Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah • Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah • Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah • Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik • Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyedi		• Restorasi lahan gambut di daerah berisiko Kebakaran Hutan dan Lahan	Mekanisme Sistem Komando Tanggapan Darurat Bencana • Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana • Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban • Penguatan Kebijakan dan	

Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6	Prioritas 7
		aan Cadang an Listrik untuk Penang anan Darurat Bencan a • Penguat - an - Strategi - Pemenu - han - Pangan - Daerah - untuk - Kondisi - Darurat - Bencan - a			Mekanis me Perbaik an Darurat Bencan a • Penguata - n - Kebijaka - n dan - Mekanis - me - Pengera - han - bantuan - Kemanu - siaan - kepada - Masyara - kat - Terdam - pak - Bencan - a • Penguata - n - Mekanis - me - Penghe - ntian - Status - Darurat - Bencan - a	

Sumber: inarisk.bnpb.go.id

Grafik 2.4 Prioritas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Peningkatan Kapasitas Daerah Tahun 2024



Sumber: *inarisk.bnppb.go.id*

Langkah penguatan kapasitas daerah dalam penanganan daerah berdasarkan pemetaan BNPB, Labuhanbatu Selatan cenderung melakukan Langkah prioritas 1 dengan melakukan upaya penguatan meliputi pengaturan perda terkait rencana tata ruang yang berbasis kajian resiko, penguatan perda terkait perencanaan penanggulangan bencana daerah, penguatan BPBD melalui pelatihan personil hingga sarana prasana, penguatan forum PRB, dan Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan.

Tabel 2.20 Kategorisasi Risiko Iklim Berdasar Tingkat Kerentanan dan Peluang Bencana Iklim di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Kecamatan	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kekeringan
1	Sungai Kanan	0.65	0.49	3	3	4
2	Torgamba	0.68	0.38	1	1	3
3	Kotapinang	0.62	0.45	3	3	4
4	Silangkitang	0.64	0.56	3	3	4
5	Kampung Rakyat	0.60	0.40	3	3	5

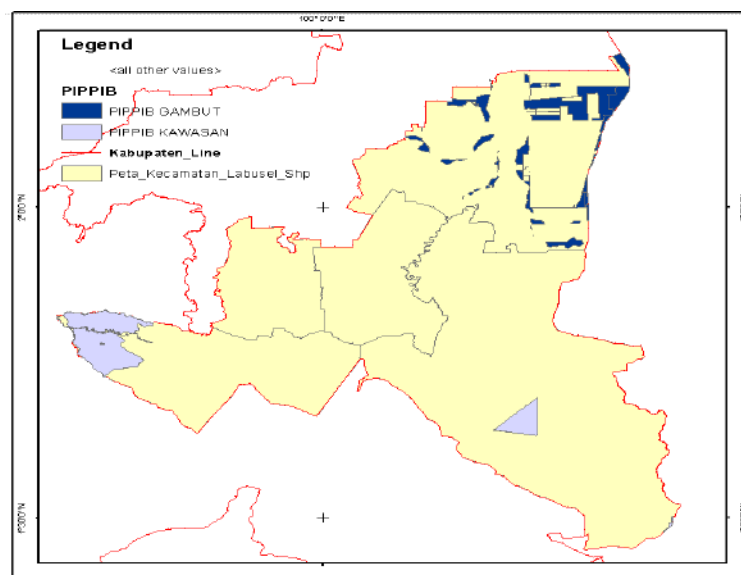
Sumber: *KLHS Kabupaten Labuhanbatu Selatan*

Berdasarkan pemetaan risiko tersebut menjaga tutupan lahan yang berfungsi sebagai penyangga atau kawasan lindung serta memastikan pembangunan sesuai dengan RTRW menjadi penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Salah satu upaya dalam

menjaga kawasan lindung yaitu menetapkan kebijakan Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan lahan gambut. Sehubungan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri LHK No SK.12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.2/11/2023 tanggal 22 November 2023 yang mengatur Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Luas total PIPPIB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencapai 18.695 Ha, yang terdiri dari PIPPIB Gambut, PIPPIB kawasan. Dengan terpeliharanya hutan alam dan lahan gambut ini diharapkan kapasitas penyerapan karbon di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dipertahankan serta menjaga sektor prioritas daerah seperti pertanian dan perkebunan dapat menghasilkan secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel 2.21 Luasan PIPPIB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

JENIS PIPPIB	Luas (Ha)
PIPPIB GAMBUT	8,827
PIPPIB KAWASAN	9,867
TOTAL	18,695



Gambar 2.26 Peta PIPPIB Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Hutan merupakan salah satu pemegang peran penyerap karbon di bumi, aneka tanaman yang tumbuh di hutan berperan besar dalam mengurangi emisi karbon dan juga menjadi penyangga kawasan. Hutan yang sehat dapat menyerap karbon dioksida dari atmosfer melalui fotosintesa, yang kemudian disimpan dalam biomassa tanaman dan tanah. Keberadaan vegetasi hutan tidak semata-mata berapa pada kawasan hutan, namun

juga terdapat pada Areal Penggunaan Lain (APL). Berdasarkan peta tutupan lahan tahun 2022, total luas vegetasi hutan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencapai 18.606 Ha diantaranya berada pada kawasan hutan seluas 18.435 Ha (99.08%) dan berada pada APL seluas 170 Ha (0.92%), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel dibawah:

Tabel. 2.21 Jenis Tutupan Lahan di Labuhanbatu Selatan

Jenis Tutupan Lahan	Apl + Air	Kawasan Hutan	Total
Hutan Lahan Kering Sekunder	22	2,406	2,427
Hutan Tanaman	148	16,030	16,178
Lahan Terbuka	12	119	131
Perkebunan	227,546	17,985	245,531
Permukiman	3,548	303	3,850
Pertanian Lahan Kering	27,287	3,407	30,694
Pertanian Lahan Kering Campur	33	1,075	1,107
Sawah	330	10	340
Semak Belukar	770	5,566	6,336
Tubuh Air	1,245	-	1,245
TOTAL	260,940	46,900	307,840

Sumber : KLHS Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024

Selain mempertahankan keberadaan vegetasi hutan baik pada APL untuk mengendalikan perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan diperlukan juga dukungan pengadaan infrasturktur dalam upaya mitigasi bencana. Dalam upaya mitigasi risiko perubahan iklim kekeringan, dapat dilakukan pembangunan embung dan irigasi dalam memastikan keberadaan pengairan untuk menjaga produksi pertanian dan perkebunan. Dalam kondisi curah hujan tinggi infrasturktur tersebut juga dapat digunakan sebagai aliran air sekaligus tempat parkir air.

Berdasarkan data, upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dan infrastruktur untuk bertahan maupun bangkit dari dampak bencana seperti peristiwa ekstrem atau perubahan iklim telah disusun dalam dokumen

perencanaan dengan program pemberian bantuan rehabilitasi hingga dibangun Kembali hunian yang terdampak bencana, melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan jenis ancaman bencana, serta program pengendalian dan penanggulangan bencana untuk sektor pertanian. Namun dalam keberjalanannya belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan tidak adanya SK Bencana yang dikeluarkan oleh BPBD dari tahun ke tahun, sehingga program untuk meningkatkan kemampuan bertahan maupun bangkit dari dampak bencana belum dapat terealisasi terutama pada penyelenggaraan pembangunan/rehabilitasi bagi rumah korban bencana dan program sejenisnya.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan bertahan maupun bangkit dari dampak bencana seperti peristiwa ekstrem atau perubahan iklim, masih menemui kendala terkait minimnya anggaran yang menjadi salah satu factor penyebab rencana dan program pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi, tidak berjalan efektif. Pelaksanaan rencana program tersebut meliputi, pembuatan dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), Rencana Kontijensi (Renkon), Pusdalops dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan pada BPBD untuk dapat Menyusun rencana penanggulangan bencana serta membentuk Langkah koordinasi antar OPD untuk dapat melakukan sinergi upaya pencapaian program tersebut sesuai dengan tugas fungsinya. Sehingga dengan keterbatasan anggaran tersebut, upaya peningkatan kapasitas tersebut tetap dapat dilaksanakan secara berkala dan dapat dirasakan oleh masyarakat agar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan infrastruktur untuk bertahan maupun bangkit dari dampak bencana.

2.1.1.12. Potensi Sumberdaya Alam

Mengacu pada RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah “Mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan yang Berbasis Perkebunan dengan Memanfaatkan Posisi Strategis yang berada Pada Jalur Lintas Timur dan Penghubung Jalur Lintas Barat Sumatera.” Oleh karena itu peruntukan lahan kedepan perlu memperhatikan rencana pola ruang yang terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari perlindungan setempat, Kawasan cagar budaya, ruang terbuka hijau (RTH) kota dan Kawasan ekosistem mangrove. Adapun Kawasan budidaya terdiri dari Kawasan

pertanian, Kawasan permukiman, Kawasan perikanan, Kawasan peruntukan industri, Kawasan pariwisata dan Kawasan pertahanan keamanan.

Potensi wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pola Ruang RTRW Tahun 2017-2037, Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dilakukan pengembangan yaitu meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan serta kehutanan. Sejalan dengan data ekonomi, dimasa mendatang sector tersebut menjadi salah satu andalan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam peningkatan ekonomi. Keunggulan dari potensi-potensi tersebut meliputi: (ambil data dari RPJMD 2021-2026)

a. Pertanian rakyat

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki potensi di bidang pertanian tanaman pangan. Hal tersebut didukung berdasarkan topografi daerah yang didominasi oleh wilayah daratan datar dan terletak di pesisir timur pantai Sumatera sehingga berpotensi dikembangkan komoditi tanaman pangan sebagai daerah pertanian. Bagi daerah agraris, peran sektor pertanian sangat penting dalam mendukung perekonomian wilayah, terutama sebagai penyedia bahan pangan, sandang dan papan bagi segenap penduduk, serta penghasil komoditas ekspor non migas untuk menarik devisa. Nilai tambah sector pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki potensi sebagai penghasil komoditi ekspor non migas. Perkembangan sektor pertanian dipengaruhi oleh produktivitas dari masing-masing komoditi. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain luas tanam, luas panen serta hasil produksi.

Tabel 2.22 Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kecamatan Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	2023			2024		
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Sungai Kanan	123,84	705,89	5,7	260	1.404	5,4
2	Torgamba	-	-	-	2	-	1,1
3	Kotapinang	5,75	31,63	5,5	38	197,6	5,2

No.	Kecamatan	2023			2024		
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
4	Silangkitan	-	-	-	-	-	-
5	Kampung Rakyat	-	-	-	-	-	-
Jumlah		129,59	737,52	5,69	300	1.601,6	5,34

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Angka, 2025

Secara umum produksi komoditas padi tahun 2024 ada di tiga kecamatan yaitu dari Kecamatan Sungai Kanan (705,89 ton), Kecamatan Torgamba (<1 ton) dan Kecamatan Kotapinang (31,63). Dari sisi produktivitas rata-rata produktivitas di semua kecamatan mencapai angka 5,34 ton/ha. Berdasarkan perbandingan data 2023 terdapat peningkatan dari jumlah kecamatan dan luas panen yang menghasilkan komoditas, namun dari sisi produktivitas angkanya mengalami penurunan. Dengan data tersebut maka perlu dirumuskan kebijakan yang dapat mengoptimalkan angka produksi dengan luas panen yang bertambah melalui pengadaan bibit, pupuk, penggunaan teknologi pertanian, hingga pengendalian harga pasca panen.

Berdasarkan kondisi geografis dan geologi yang ada, mata pencaharian sebagian besar rakyat Indonesia bergantung pada sektor pertanian dan sebagai upaya swasembada pangan. Dari potensi lahan sawah yang ada sebagai penghasil pangan utama telah terjadi penurunan luas potensi lahan persawahan, hal ini akibat menyusutnya luas baku persawahan akibat konversi ke pemanfaatan sektor non pertanian. Proses konversi lahan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan saat ini berlangsung cepat, sehingga dibutuhkan penanganan dan peran Pemerintah menjadi sangat penting dalam hal ini. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengatur proporsi jumlah lahan yang digunakan untuk pertanian, perkebunan maupun industri serta optimalisasi sumberdaya lahan yang ada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menjaga kestabilan produksi pangan daerah dan penghasil komoditas ekspor non migas untuk menarik devisa.

Fungsi pertanian dikenal masyarakat sebagai penghasil produk pertanian untuk kebutuhan pangan dengan komoditas, seperti padi, palawija, dan hortikultura. Namun hasil produksi pertanian memiliki nilai ekonomis yang cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai kegunaan dari sector di luar pertanian, seperti untuk pertambangan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta permukiman. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat dibandingkan dengan nilai kebutuhan hidup, sehingga paradigma mendapatkan penghasilan segera memunculkan pemikiran tentang fungsi pertanian hanya dalam jangka pendek sebagai sector yang kurang menguntungkan, menyebabkan konversi lahan diterima sebagai hal yang wajar dan bukan sebagai masalah hilangnya multifungsi pertanian. Komoditi utama pertanian tanaman pangan yang dikembangkan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari padi dan jagung. Untuk pertanian sayur-sayuran adalah cabai, ketimun, kangkung dan kacang panjang. Untuk pertanian buah-buahan adalah mangga dan durian serta untuk perkebunan adalah kelapa sawit dan karet yang tersebar di 5 Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tabel 2.23 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas
2020	857,2	4.444,56	5,18
2021	413,30	2.218,3	5,4
2022	198,13	915,22	4,6
2023	129,59	737,52	5,69
2024	300	1.601,6	5,34

Sumber: BPS Labuhanbatu Selatan dalam Angka

Berdasarkan data tersebut, potensi bidang pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami penurunan produksi 3 (tiga) tahun terakhir mencapai rata-rata penurunan hingga >50%. Hal tersebut sejalan dengan luasan lahan padi yang terus menyusut, sehingga menjadi perhatian pemerintah untuk

dapat melakukan intervensi terhadap proporsi pemanfaatan lahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tabel 2.24 Produksi Jagung (ton) Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sungai Kanan	7,92	112	45	55,8	19,80
2	Torgamba	60	105	52	150,5	17
3	Kotapinang	27,86	23,4	86	3,2	22,40
4	Silangkitang	72	78,7	-	-	19,60
5	Kampung Rakyat	83,16	3	3,1	-	11,20
	Jumlah	250,94	322,1	184,55	209,5	90

Sumber: BPS Labuhanbatu Selatan dalam Angka

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa potensi komoditi tanaman pangan jagung di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir dengan jumlah produksi tertinggi pada tahun 2021 sebesar 322,1 Ton dan terendah tahun 2024 90 ton. Melihat data tersebut penurunan hasil produksi tanaman jagung yang sangat signifikan, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menjaga luasan lahan produksi hingga ekosistem pertanian yang terkendali untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan diinternal daerah hingga menjadi komoditi ekspor ke daerah sekitarnya.

Tabel 2.25 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2020	63	250,95	3,98
2021	89	322,1	3,6
2022	42,5	184,55	4,3
2023	59,5	209,5	3,52

2024	30	90	3

Sumber: BPS Labuhanbatu Selatan dalam Angka

b. Perkebunan rakyat

Sektor perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki komoditas unggulan yang banyak diusahakan diantaranya, kelapa sawit dan karet kemudian disusul dengan beberapa komoditi lainnya yang terdiri atas: kakao, kelapa, pinang dan aren. Kelapa sawit merupakan komoditas utama dari sektor perkebunan yang berasal dari perkebunan rakyat maupun perkebunan konsesi perusahaan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penggambaran kondisi perkebunan rakyat berdasarkan data terakhir pada Labuhanbatu Selatan dalam Angka 2025.

Dengan luas lahan panen yang terus mengalami peningkatan dari 42.839 Ha pada tahun 2016 menjadi 175.985 Ha pada tahun 2021, hal tersebut sejalan dengan produksi kelapa sawit mengalami peningkatan dari 635.372 Ton pada tahun 2016 menjadi 2.439.735 Ton pada tahun 2021. Tahun 2020 produksi kelapa sawit paling tinggi dalam 6 (enam) tahun terakhir dengan nilai produksi mencapai 3.074.757 Ton, menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan bagi wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Komoditas karet menempati urutan kedua komoditas unggulan bagi wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, hal tersebut digambarkan melalui luas lahan panen yang mengalami peningkatan dari 25.980 Ha pada tahun 2016 menjadi 29.967 Ha pada tahun 2021 dengan luas tanam paling tinggi dicapai pada tahun 2020 dengan luas mencapai 37.273 Ha. Hal tersebut sejalan dengan produksi karet yang juga mengalami peningkatan dari 26.370 Ton pada tahun 2016 menjadi 33.078 Ton pada tahun 2021 dan hasil produksi tertinggi di tahun 2020 mencapai 37.571 Ton.

Tabel. 2.26 Luas dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditas Kelapa Sawit dan Karet di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016-2021

Tahun	Kelapa Sawit		Karet	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2016	42.839	635.372	25.980	26.370
2017	44.972	667.141	27.384	27.689
2018	56.216	879.048	34.230	34.611

Tahun	Kelapa Sawit		Karet	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2019	57.307	640.196	33.139	33.519
2020	186.028	3.074.757	37.273	37.571
2021	175.985	2.439.735	29.967	33.078

Sumber: BPS Labuhanbatu Selatan dalam Angka

Selain kelapa sawit dan karet, Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki potensi dalam pengembangan beberapa tanaman perkebunan, seperti Kakao, Kelapa dan pinang. Komoditas tanaman perkebunan Kelapa merupakan komoditas potensial untuk dikembangkan dan bisa memberikan dorongan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data, luas lahan panen Kelapa terus mengalami perluasan dari 48,5 Ha pada tahun 2016 menjadi hanya 110,9 Ha pada tahun 2021 atau mengalami penambahan 128,66%.

Hal tersebut sejalan dengan kenaikan produksi Kelapa dari 39,75 Ton pada tahun 2016 menjadi 111,5 Ton pada tahun 2021 dengan kenaikan didapat setiap tahunnya. Komoditas pinang mengalami kenaikan setiap tahunnya baik luas lahan maupun produksi, dengan kenaikan signifikan pada tahun 2019 dengan luasan mencapai 51,7 Ha dan produksi mencapai 20 ton.

Tabel. 2.27 Luas dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditas Kakao, Kelapa, Pinang dan Aren di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016-2021

Tahun	Kakao		Kelapa		Pinang	
	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)
2016	209	113	48,5	39,75	11,25	4,65
2017	219,45	114,83	50,93	41,74	11,81	4,88
2018	54	204	65,7	57,1	14,1	6,1
2019	97	61	98,2	56,5	51,7	20
2020	97	61	98,2	56,5	-	-
2021	-	-	110,9	111,5	-	-

Sumber: BPS Labuhanbatu Selatan dalam Angka

Berdasarkan data tersebut, komoditas perkebunan kakao mengalami fluktuasi luasan lahan dan produksi yang cenderung menurun tercatat tahun 2016 luas lahan 209 Ha dan mengalami penyusutan hingga mencapai 97 Ha pada tahun 2020. Sehingga berdampak pada angka produksi tahun 2016 mencapai 113 ton dan menyusut hingga tahun 2020 menghasilkan 61 ton. Hal ini menjadi indikasi bahwa alih fungsi lahan perlu dikendalikan sesuai dengan ketentuan penataan ruang, sebagai respon keseimbangan lingkungan dan hasil produksi perkebunan

c. Tanaman Hortikultura

Tanaman Hortikultura di Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki kontribusi dalam pemenuhan pangan dan ekonomi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan komoditas seperti ketimun, cabai kriting, cabai rawit, bayam, kacang Panjang dan kangkung. Seperti halnya komoditas pertanian lainnya, produksi tanaman hortikultura memiliki nilai ekonomis yang cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai kegunaan dari sector diluar pertanian sehingga hasil panen maupun luas lahan panen cenderung mengalami penurunan.

Tabel 2.28 Luas Panen Tanaman Hortikultura di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2024 (ha)

No.	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Ketimun	26	19	12	13
2	Cabai Kriting	34	35	23	28
3	Cabai Rawit	36	19	18	18
4	Bayam	98	91	94	121
5	Kacang Panjang	64	39	25	15
6	Kangkung	105	94	75	81

Sumber: BPS Labuhanbatu Selatan dalam Angka 2025

Berdasarkan di atas luasan panen tanaman hortikultura mengalami penyusutan seperti halnya pertanian pangan lainnya, hal ini disebabkan rendahnya nilai ekonomis dari hasil panen. Sedangkan tanaman perkebunan justru mengalami peningkatan dari sisi luasan maupun jumlah panen, hal ini karena tanaman hasil perkebunan memiliki nilai jual yang cukup dan bisa diperuntukan juga sebagai bahan baku industri sehingga nilai ekonomi lebih tinggi dan peralihan lahan tersebut sangat

dimungkinkan. Namun data tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan luas lahan, sehingga nilai produksi dapat meningkat.

Tabel 2.29 Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2024 (kuintal)

No.	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Ketimun	1.868	652	445	1.042
2	Cabai Kriting	1.865	1.287	801	1.027
3	Cabai Rawit	1.665	685	559	956
4	Bayam	1.552	795	1.310	1.923
5	Kacang Panjang	4.095	1.331	613	991
6	Kangkung	1.653	879	1.087	1.713

Sumber: BPS Labuhanbatu Selatan dalam Angka 2025

Sejalan dengan menyusutnya luasan panen, produksi hasil panen juga cenderung mengalami penurunan tahun 2021-2023 namun mengalami peningkatan pada tahun 2024 untuk semua komoditas. Factor luas lahan, kondisi iklim dan keterampilan maupun penggunaan teknologi oleh petani menjadi penentu produksi hasil tanaman. Hal ini dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam memastikan peforma hasil produksi tanaman pertanian pangan maupun tanaman hortikultura agar dapat optimal dengan melakukan intervensi terhadap petani dengan fasilitas teknologi pertanian untuk mencapai hasil maksimal dan efektif, selain itu komitmen dalam menjaga nilai jual panen yang cukup sehingga masyarakat menikmati pendapatan yang signifikan maupun bentuk insentif lainnya kepada petani yang diharapkan dapat menekan angka alih fungsi lahan akibat rendahnya nilai ekonomis hasil pertanian.

d. Kehutanan

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara yang diturunkan ke dalam RTRW

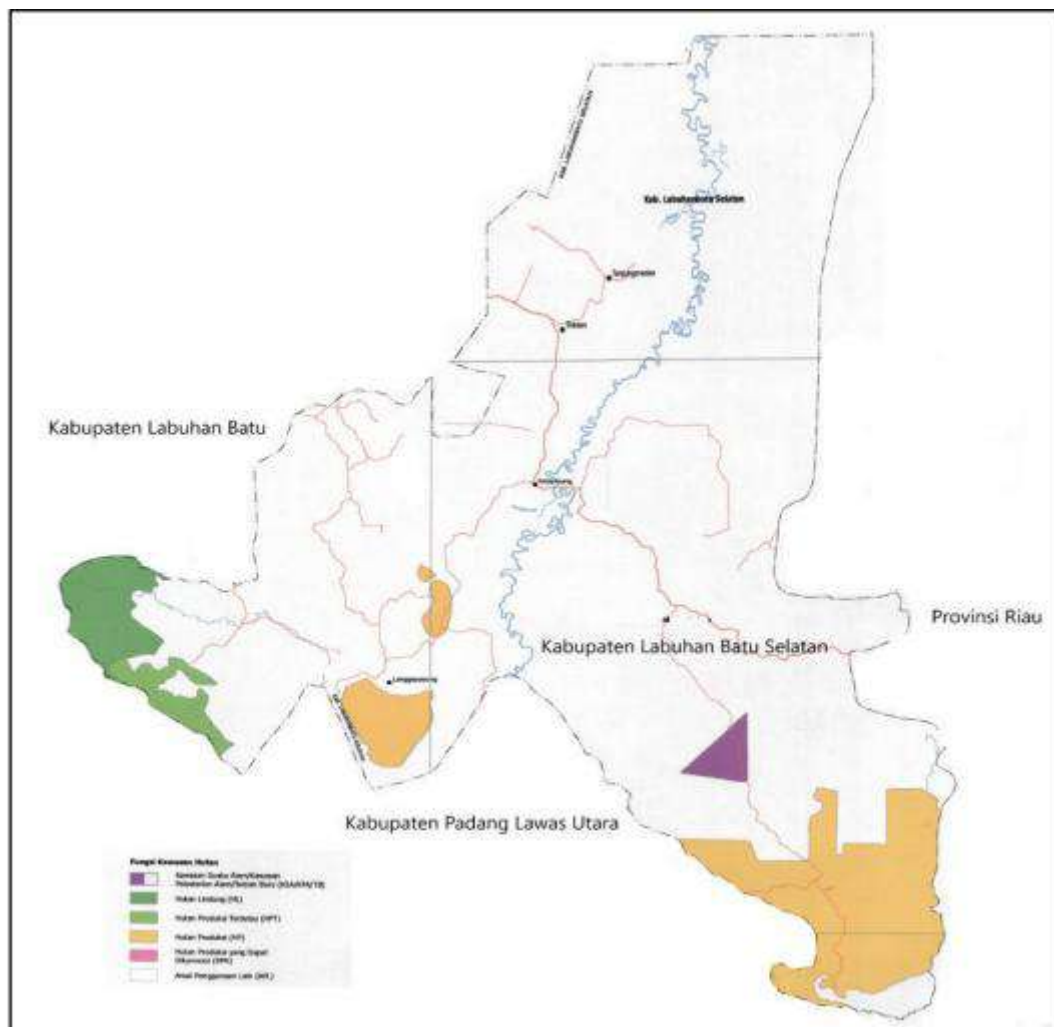
Kabupaten Labuhan Batu Selatan tahun 2017-2037, luas Kawasan hutan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah 86.469,95 Ha.

Tabel 2.30 Status dan Fungsi Hutan

No	Status dan Fungsi Hutan	Luas (Ha)	%
1	Hutan Lindung	7.051,73	8,16
2	Perlindungan Kawasan Bawahannya	41.803,31	48,34
3	Hutan Produksi	29.054,89	33,6
4	Hutan Produksi Terbatas	3.596,27	4,16
5	Suaka alam, pelestarian dan cagar budaya	4.963,75	5,74
Jumlah		86.469,95	100,0

Sumber: SK Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014

Status dan fungsi hutan sesuai dengan RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 7.051,73 Ha di Kecamatan Sungai Kanan, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya seluas 41.803,31 Ha di Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Kotapinang. Kawasan suaka alam, pelestarian dan cagar budaya seluas 4.963,75 Ha di Kecamatan Torgamba. Kawasan hutan produksi seluas 29.054,89 Ha di Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Kotapinang dan Kecamatan Torgamba. Kawasan hutan produksi terbatas seluas 3.596,27 Ha di Kecamatan Sungai Kanan.



Gambar 2.23 Persebaran Wilayah Hutan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Sumber: Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 579 Tahun 2014

e. Perikanan dan peternakan

Produksi sektor perikanan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berasal dari kegiatan budidaya dan penangkapan pada perairan umum. Secara rinci produksi perikanan budidaya dan produksi penangkapan perairan umum 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31 Produksi Perikanan (Ton) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Budidaya	Perairan Umum	Jumlah
2020	1.497,18	148,3	1.645,48
2021	548,79	135,65	684,44

Tahun	Budidaya	Perairan Umum	Jumlah
2022	525,06	132,66	657,72
2023	480,22	149,53	629,75
2024	492,84	152,05	644,89

Sumber: BPS Labuhanbatu Selatan dalam Angka

Berdasarkan data tersebut, produksi perikanan tangkap Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami penurunan pada tahun 2020-2023 pada komoditas perikanan budidaya. Hal ini dapat disebabkan dari ketersediaan stok bibit ikan, stabilitas harga pakan dan adanya efek perubahan cuaca ekstrem sehingga kolam pembudidayaan tidak dapat memproduksi secara optimal serta masih mengalami peralihan pasca pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020 merupakan masa dengan produksi perikanan budidaya tertinggi dengan hasil produksi mencapai 1.497,18 ton. Jumlah ini cenderung terus meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2015-2019), namun tahun 2021-2023 mengalami penurunan. Sedangkan komoditas penangkapan perairan umum mengalami fluktuasi yang relatif stabil. Tercatat sepanjang tahun 2015-2023 penurunan terjadi pada tahun 2019, 2021 dan 2022 dengan penyusutan kurang dari 9%.

Pada sektor peternakan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki potensi dari komoditas ternak, seperti kerbau, sapi, kambing, domba, babi, ayam kampung, ayam pedaging dan itik. Kontribusi sector peternakan dapat dilihat melalui populasi ternak meliputi ternak ruminansia besar (sapi dan kerbau), ternak ruminansia kecil (kambing dan domba), unggas dan ternak lainnya serta produksi berdasarkan hasil ternak meliputi daging dan telur dengan rincian tabel berikut.

Tabel 2.32 Populasi Ternak (ekor) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Populasi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi potong	26.457	20.316	19.644	20.046	21.469
2	Kerbau	177	195	22	24	26

3	Kambing	29.815	18.363	13.827	13.557	14.517
4	Domba	18.660	21.340	8.777	8.965	9.599
5	Babi	1.324	1.023	991	1.016	1.089
6	Ayam kampung	12.368	13.889	15.784	15.784	15.617
7	Ayam pedaging	98.027	128.800	83.055	84.731	133.299
8	Itik	28.791	26.040	13.743	14.022	15.163
Jumlah		215.619	229.966	155.843	158.145	210.779

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Angka

Produksi ternak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Jumlah populasi ternak tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 229.966 ekor dengan ayam pedaging sebagai komoditas tertinggi yang menyumbang kontribusi sekitar 41,19% dari total produksi ternak. Capaian produksi ternak terendah terjadi pada tahun 2022 dengan total produksi ternak hanya sebesar 155.843 ekor yang terjadi hampir disemua komoditasnya mengalami penurunan yang cukup signifikan (3,3%-88,71%) dan hanya produksi ayam kampung yang mengalami kenaikan sebesar 12%. Data tahun 2024 menunjukkan adanya kenaikan populasi ternak untuk setiap komoditasnya.

Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menjaga performa hasil produksi perikanan dan peternakan melalui jumlah populasi hewan ternak agar dapat optimal dengan melakukan intervensi terhadap pelaku budidaya dengan fasilitas pakan ternak untuk mencapai hasil maksimal. Langkah ini selaras dengan RTRWP Sumatera Utara Tahun 2013-2033, dimana Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk dalam Kawasan Andalan Rantauprapat - Kisaran dan sekitarnya, dengan sektor unggulan salah satunya adalah perikanan dan peternakan. Sebagai komitmen dalam menjaga nilai jual panen yang cukup melalui kepastian Kesehatan hewan ternak dengan adanya penyuluhan dan inspeksi. Terwujudnya nilai jual panen yang layak membuat masyarakat dapat menikmati penghasilan yang signifikan yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk ikut serta berkontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah dari sektor peternakan dan perikanan.

Tabel 2.33 Jumlah Produksi Daging dan Telur (Kg) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi	622.413	85.725	589.260	601.058	631.472
2	Kambing	120.402	63.240	53.181	54.260	57.009
3	Domba	17.310	50.130	62.863	64.134	67.378
4	Babi	9.050	9.850	24.775	25.282	25.012
5	Ayam kampung	10.581	9.683	10.280	10.512	10.828
6	Ayam pedaging	81.474	85.910	61.945	62.568	64.444
7	Itik	32.206	31.308	10.039	10.255	10.564
Jumlah		893.436	335.846	812.343	828.069	866.707
1	Ayam kampung	6.610	7.105	6.501	6.631	6.589
2	Itik	45.371	48.315	126.598	103.557	99.830
Jumlah		51.981	55.420	133.099	110.188	106.419

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Angka

Produksi daging di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami fluktuasi dan mengalami kenaikan 3 tahun terakhir. Jumlah produksi daging di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami kenaikan pada tahun 2024 mencapai 866.707 Kg dengan proporsi produksi daging paling banyak disumbang oleh komoditas daging sapi 631.472 Kg atau setara dengan 72,86% dari total produksi daging. Hal tersebut sejalan dengan tingkat populasi ternak untuk komoditas sapi potong. Sedangkan produksi telur mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2020-2024, produksi telur tertinggi disumbangkan oleh komoditas telur itik.

Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menjaga performa hasil produksi perikanan dan peternakan melalui jumlah populasi hewan ternak agar dapat optimal dengan melakukan intervensi terhadap pelaku budidaya dengan fasilitas pakan ternak untuk mencapai hasil maksimal. Langkah ini selaras dengan RTRWP Sumatera Utara Tahun 2013-2033, dimana Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk dalam Kawasan Andalan Rantauprapat - Kisaran

dan sekitarnya, dengan sektor unggulan salah satunya adalah perikanan dan peternakan. Sebagai komitmen dalam menjaga nilai jual panen yang cukup melalui kepastian Kesehatan hewan ternak dengan adanya penyuluhan dan inspeksi. Terwujudnya nilai jual panen yang layak membuat masyarakat dapat menikmati penghasilan yang signifikan yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk ikut serta berkontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah dari sektor peternakan dan perikanan.

f. Industri

Dari semua unit usaha di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2024, klasifikasi penerbitan SIUP terbagi menjadi 2 golongan, yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Perusahaan tercatat cenderung menurun dari tahun ke tahun, namun tahun 2024 tercatat terdapat kenaikan untuk perusahaan industri besar dan penurunan signifikan untuk perusahaan industri kecil, dari 1.719 menjadi 123 perusahaan.

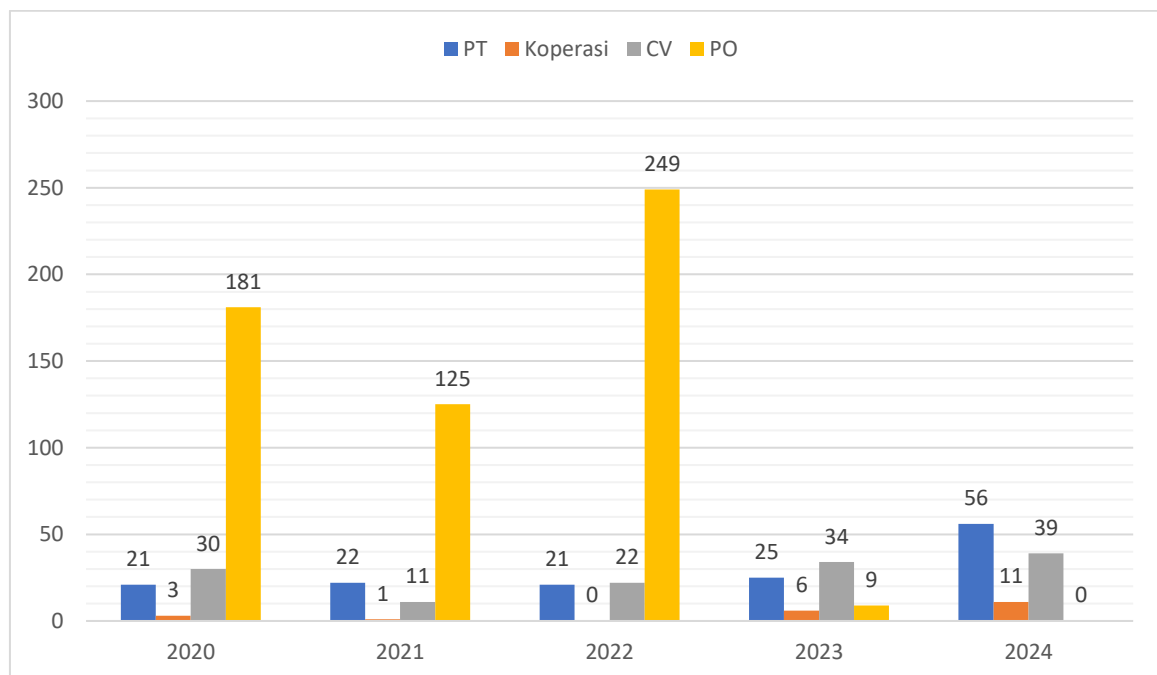
Tabel 2.34 Jumlah Perusahaan Sektor Industri di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Besar/Sedang	55	33	-	11	77
2	Industri Kecil	181	126	107	1.708	123
Jumlah		236	159	107	1.719	200

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Angka

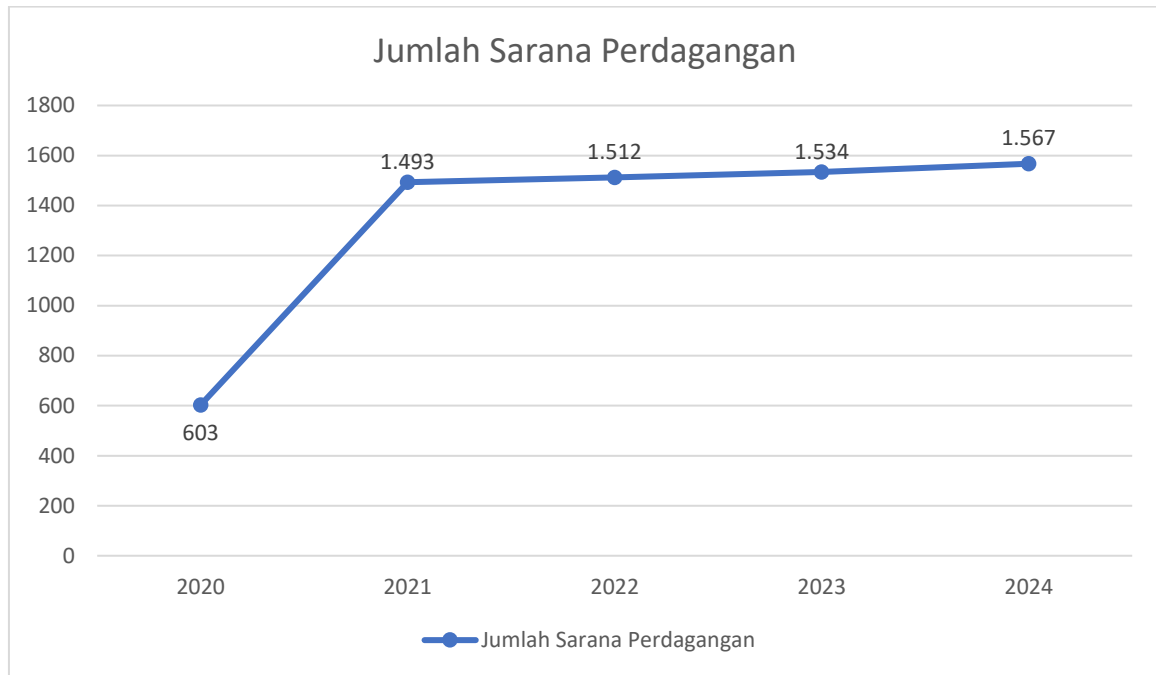
Unit usaha di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV, dan Perorangan. Berdasarkan data unit usaha PT menjadi unit usaha yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan koperasi menjadi unit usaha yang paling rendah dengan jumlah terbanyak pada tahun 2023 yang terdiri dari 6 koperasi.

Grafik 2.5 Jumlah Klasifikasi Perusahaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Angka, diolah

Kontribusi kegiatan industri didukung juga dengan banyaknya sarana yang terdiri dari pasar umum, pasar desa, toko, kios, los, warung dan rumah makan/restoran. Berdasarkan data, tercatat jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu dari 564 sarana perdagangan menjadi 1.534 sarana perdagangan di tahun 2023. Kondisi ini dapat mendukung peningkatan aktivitas industri melalui transaksi yang memunculkan perputaran ekonomi.

Grafik 2.6 Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Angka, diolah

g. Pariwisata

Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan maupun budaya. Kawasan wisata yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebar pada kecamatan Kotapinang, Torgamba, Silangkitang dan Sungai Kanan dengan objek wisata alam, buatan maupun budaya. Objek dan lokasi pariwisata yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35 Objek dan Lokasi Wisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan

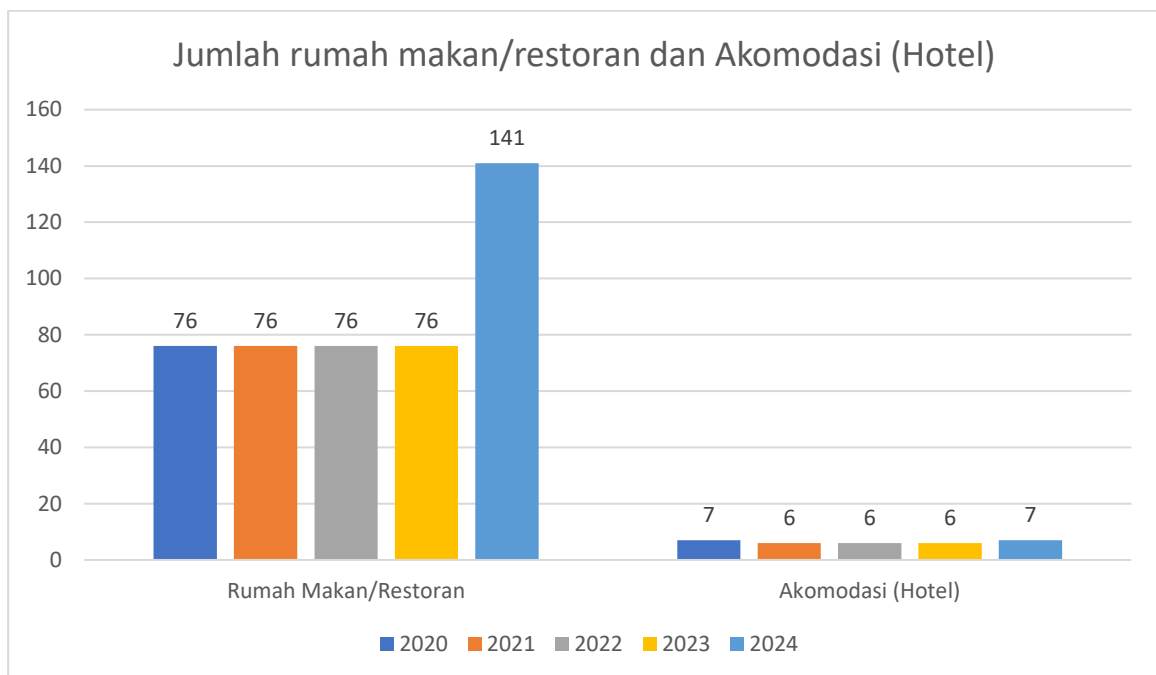
No	Nama Objek Wisata	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jarak dari Ibu Kota Kabupaten
Wisata Alam				
1	Pandayangan Indah	Ulumahuam	Silangkitang	40
2	Danau Pagaran Padang	Asam Jawa	Torgamba	20
3	Pusat pelatihan gajah	Aek Raso	Torgamba	60
Wisata Buatan				
1	Vivetato water & farm	Simatahari	Kotapinang	25

No	Nama Objek Wisata	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jarak dari Ibu Kota Kabupaten
2	Vivetato water & farm	Langga Payung	Sungai Kanan	40
3	Kolam renang Telaga Asri	Kotapinang	Kotapinang	1
4	Famili hill swimming pool	Kotapinang	Kotapinang	1
5	Waterpark pesona	Aek Batu	Torgamba	20
6	Kolam renang Mentari	Aek Batu	Torgamba	20
7	Wisata Indah Batu Ajo	Pasir Tuntung	Kotapinang	40
8	Kolam Padang	Mandalasena	Silangkitang	35
9	Taman Wisata Indah Simatahari	Simatahari	Kotapinang	25
Cagar Budaya				
1	7 cagar budaya		Torgamba	
2	9 cagar budaya		Kotapinang	

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Angka, 2025

Kegiatan pariwisata dalam optimalisasi nya perlu didukung dengan adanya akomodasi seperti penginapan dan rumah makan. Berdasarkan data, tercatat akomodasi dan rumah makan sebagai penunjang pariwisata mengalami penurunan yang terjadi pada tahun 2021-2023. Faktor penyebab menurunnya angka diakibatkan adanya pandemic Covid-19 yang membatasi kegiatan masyarakat untuk dapat berkerumun, sehingga penurunan angka akomodasi dan rumah makan tidak dapat dihindari.

Grafik 2.6 Jumlah Akomodasi dan Rumah Makan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan



Sumber: BPS Labuhanbatu Selatan dalam Angka, 2024 diolah

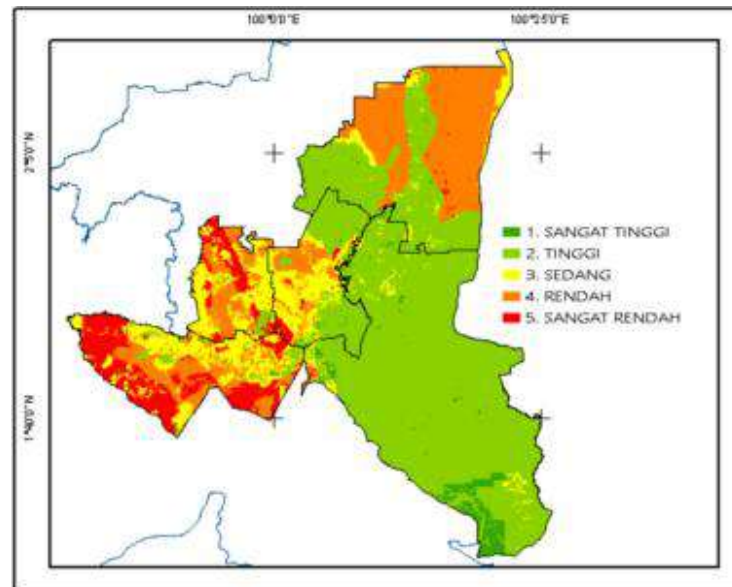
2.1.9 Lingkungan Hidup Berkualitas

Mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan memberikan perhatian pada pelestarian lingkungan hidup, Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu mempertimbangkan perencanaan masa depan yang seimbang antara perkembangan ekonomi dan menjaga keseimbangan alam. Dalam upaya mewujudkan keseimbangan dan menuju pembangunan berkelanjutan tersebut, diperlukan pendekatan untuk menempatkan fokus pada pemahaman tentang kapasitas lingkungan dalam penyediaan pangan, mengatasi polusi, pembebasan limbah, dan menjaga kualitas ekosistem alamnya.

a. Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Jasa lingkungan penyediaan pangan menggambarkan tingkat kondisi ekosistem dalam memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan) yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil peternakan,

hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentunya menggambarkan kondisi wilayah dalam mendukung layanan penyediaan pangan yang akan dipengaruhi oleh kondisi bentang lahan dan kondisi aktifitas pemanfaatan lahan.



Gambar 2.24 Jasa Ekosistem penyediaan Pangan

Ketersediaan pangan diperoleh melalui perhitungan menggunakan data produksi tanaman pangan, perkebunan, dan hasil peternakan yang di konversikan menjadi angka nilai kalori pada setiap bahan pangan tersebut. Selanjutnya sebaran ketersediaan pangan dilakukan pembobotan dengan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Pangan. Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki nilai ketersediaan tinggi. Wilayah dengan sebaran ketersediaan pangan dengan nilai tinggi ini umumnya didominasi oleh tutupan lahan berupa Sawah, Perkebunan dan Lahan Pertanian. Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki produksi kelapa sawit yang cukup tinggi, tentunya ini tercermin pada tingginya produksi bahan pangan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena hasil olahan Kelapa Sawit berupa CPO yang dihasilkan merupakan bahan baku atau bahan setengah jadi pembuatan bahan makanan minyak goreng, margarine dll.

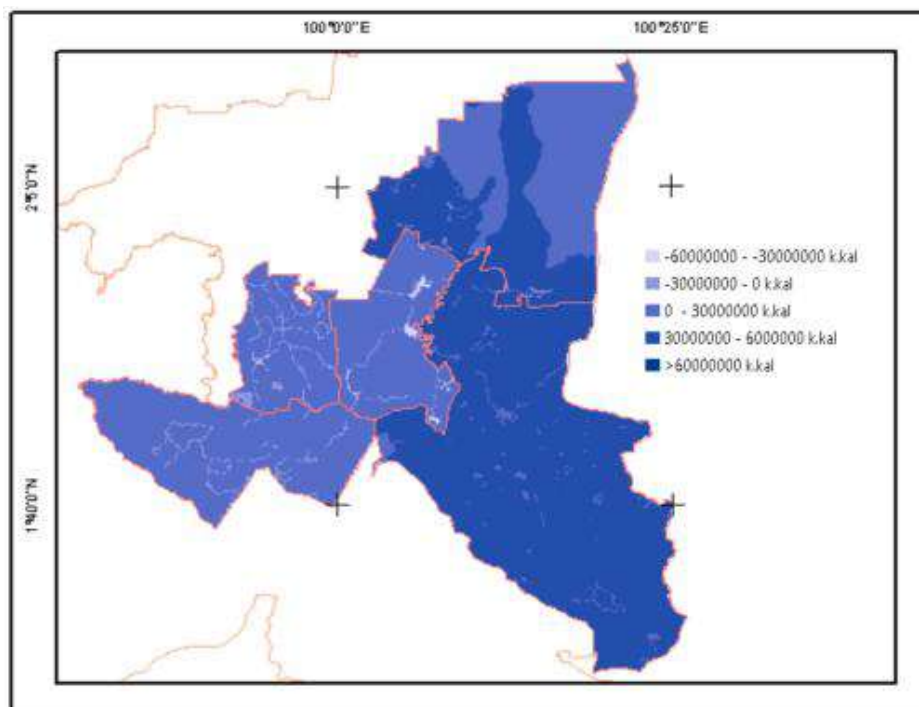
Tabel 2.36 Nilai Ketersediaan, Kebutuhan dan Selisih Ketersediaan Energi Pangan Setiap Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021

Kecamatan	Ketersediaan (k.kal)	Kebutuhan (k.kal)	Selisih (k.kal)
Kampung Rakyat	1,237,446,381,219	46,976,485,500	1,190,469,895,719

Kecamatan	Ketersediaan (k.kal)	Kebutuhan (k.kal)	Selisih (k.kal)
Kotapinang	185,579,464,453	50,089,242,000	135,490,222,453
Silangkitang	52,473,784,859	23,661,088,500	28,812,696,359
Sungai Kanan	115,364,880,401	37,239,636,000	78,125,244,401
Torgamba	2,349,534,555,064	84,859,215,000	2,264,675,340,064
Total	3,940,399,065,996	242,825,667,000	3,697,573,398,996

Sumber : KLHS Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024

Berdasarkan data tabel di atas pemenuhan energi pangan tahun 2021 Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara umum masih terpenuhi. Namun berdasarkan peta sebaran, kebutuhan energi pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak tersebar merata di seluruh wilayah. Wilayah yang memiliki kebutuhan pangan tinggi tersebar di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi ada beberapa kawasan memiliki nilai kebutuhan pangan bernilai sangat rendah karena jumlah penduduk yang rendah di sebaran wilayah tersebut.



Gambar 2.25 Selisih Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021

b. Jasa Lingkungan Penyediaan Air

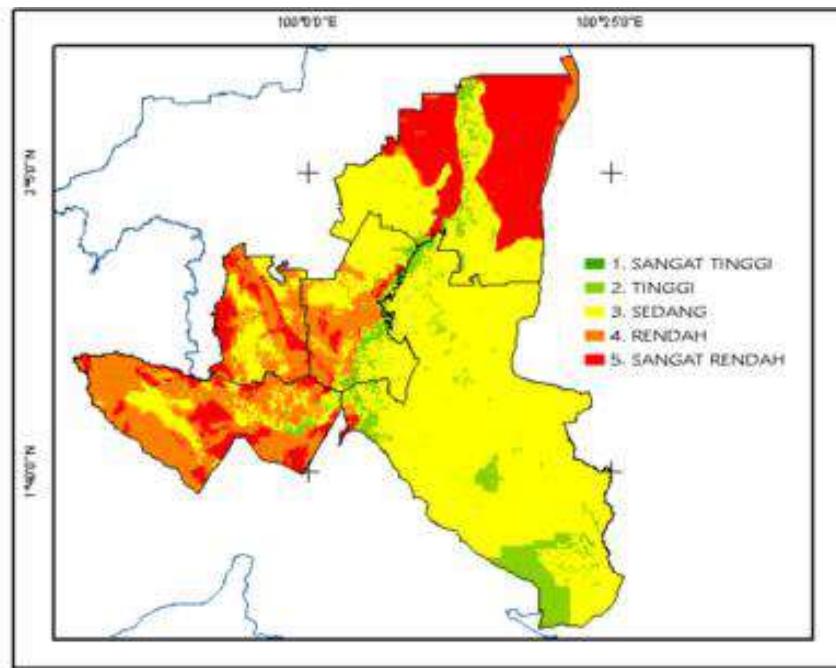
Air bersih merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga ketersediaannya menjadi penting. Ketersediaan recharge area di suatu daerah akan menjaga stabilitas pasokan air. Peran ekosistem dalam penyediaan air bermakna manfaat yang diberikan untuk penyediaan air baik yang berasal dari air permukaan (wilayah sungai Kualuh Barumon, wilayah sungai Rokan dan wilayah sungai Kubu) maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti bentang lahan.

Tabel 2.37 Nilai Ketersediaan, Kebutuhan dan Selisih Ketersediaan Air di Setiap Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021

Kecamatan	Ketersediaan (k.kal)	Kebutuhan (k.kal)	Selisih (k.kal)
Kampung Rakyat	1,248,234,654	599,304,795	648,929,858
Kotapinang	860,985,562	248,650,444	612,335,118
Silangkitang	567,059,178	189,779,693	377,279,485
Sungai Kanan	937,396,465	312,406,278	624,990,187
Torgamba	2,107,191,597	836,023,416	1,271,168,181
Total	5,720,867,456	2,186,164,626	3,534,702,830

Sumber : KLHS Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki selisih ketersediaan air berlebih. Hal ini menunjukkan bahwa secara akumulatif selisih ketersediaan air bersih Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum terlampaui, yang artinya jumlah ketersediaan air bersih lebih tinggi dari jumlah kebutuhan air sehingga air yang tersedia dapat menunjang kebutuhan air bersih.



Gambar 2.26 Jasa Ekosistem penyediaan Air

c. Daya Tampung Sampah

Volume produksi sampah didasarkan pada asumsi timbunan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah dalam satuan m³/bulan yaitu pada tahun 2020 sebanyak 2.248,3 m³/bulan dan pada tahun 2023 sebanyak 1.973,5 m³/bulan.

Tabel 2.38 Volume Sampah Yang Diangkut (M3) Per Bulan Di kabupaten Labuhanbatu Selatan

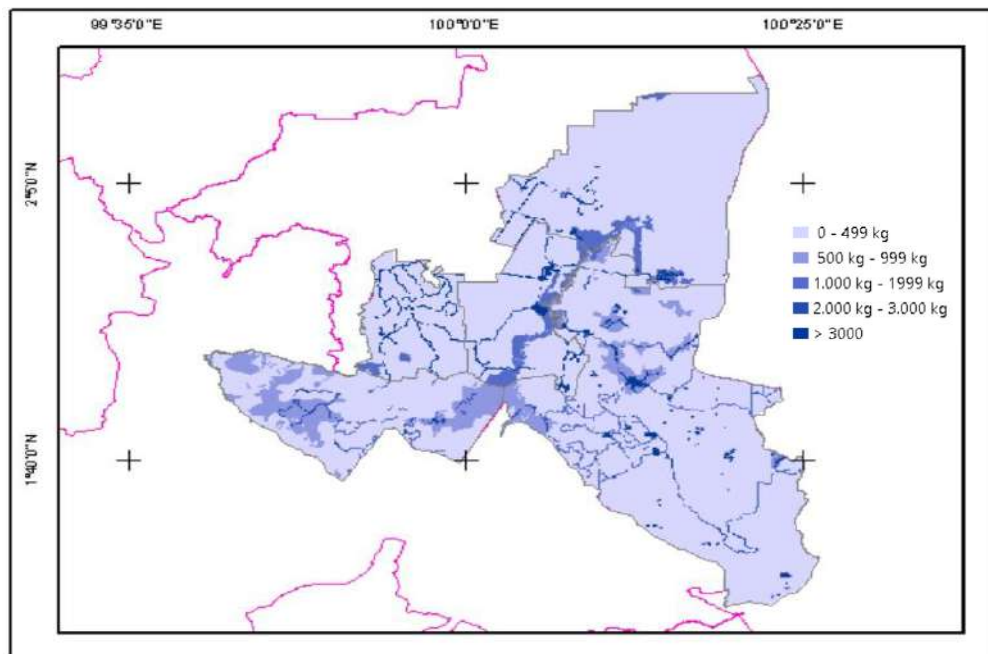
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Volume Produksi Sampah (m ³ /bulan)	-	2.248,3	2.580	1.757	1.973.5

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan 2024

Jumlah timbunan sampah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan setiap tahun semakin meningkat sehingga kapasitas TPA suatu saat akan penuh. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada di TPA Asam Jawa yang memiliki luas ± 4 Ha. Jumlah timbunan sampah secara sederhana dihitung dengan memperhitungkan jumlah penduduk dengan Faktor Estimasi Timbunan Sampah/Kapita, berdasarkan Klasifikasi Kota kecil 0,4 kg/orang/hari (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional).

Sebaran potensi timbulan sampah dimodelkan dengan menggunakan distribusi penduduk dan jumlah sampah yang dihasilkan per kapita per hari dimana pola sebarandari potensi timbulan sampah bergantung pada pola distribusi penduduk, karena pemodelan timbulan sampah hanya mempertimbangkan sampah yang bersumber dari domestik.



Gambar. 2.27. Potensi Timbulan Sampah Tahun 2022

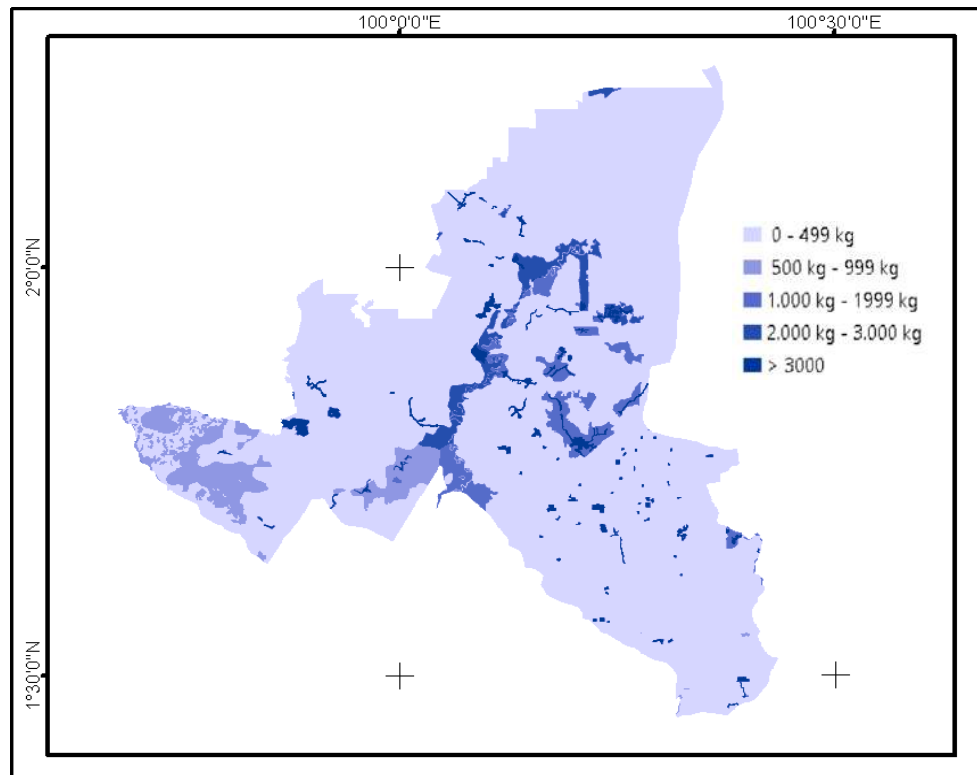
Secara spasial, timbulan sampah yang kategori tinggi terdapat di Kecamatan Torgamba, Sungai Kanan dan Kotapinang. Dengan jumlah penduduk yang tiap tahun semakin meningkat, nilai potensi timbulan sampah yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Dengan memakai angka proyeksi pertumbuhan penduduk dan timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 0,4 kg/orang/hari potensi timbulan sampah sampai tahun 2031 adalah seperti pada tabel dibawah:

Tabel 2.39 Potensi Timbulan Sampah Sampai Tahun 2031

KECAMATAN	2025	2031
Sungai Kanan	7,306,045	7,546,599
Torgamba	16,932,509	17,849,160
Kotapinang	10,279,056	11,232,561
Silangkitang	4,674,224	4,871,451

KECAMATAN	2025	2031
Kampung Rakyat	9,620,299	10,476,599
Jumlah	48,812,133	51,976,370

Sumber: Analisis Secara spasial terjadi peningkatan jumlah wilayah yang menghasilkan sampah kategori tinggi > 2.000 kg/tahun pada tahun 2031.



Gambar. 2.28. Potensi Timbunan Sampah Tahun 2031 dalam Sistem Grid 150mx1

d. Analisis Kualitas Air Sungai

Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan pemantauan kualitas air terhadap 2 sungai yang potensial tercemar oleh aktivitas sekitarnya. Pemantauan dilakukan 2 kali dalam setahun Pengujian kualitas air sungai Tahun 2022 dilakukan di 4 titik/lokasi pengambilan sampel yaitu, hasil analisis masih memenuhi baku mutu air :

1. Hulu dan Hilir Sungai Barumun
2. Hulu dan Hilir Sungai Ulumahuam

Kesimpulan berdasarkan data di atas, maka dengan ini hasil analisis yang telah dilakukan memenuhi baku mutu.

Tabel. 2.40 Kualitas Air Sungai di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Lokasi	Waktu Sampling	Suhu (°C)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)
Sungai Barumun (hulu) Sem I 2022	28 Mei 2022	24.8	67.7	32.0
Sungai Barumun (hilir) Sem I 2022	28 Mei 2022	25.2	76.9	42.0
Sungai Ulumahuam (hulu) Sem I	28 Mei 2022	25.1	19.1	35.0
Sungai Ulumahuam (hilir) Sem I	28 Mei 2022	24.6	54.4	40.0
Sungai Barumun (hulu) Sem II 2022	14 Okt 2022	24.4	63.3	28.0
Sungai Barumun (hilir) Sem II 2022	14 Okt 2022	24.4	63.3	28.0
Sungai Ulumahuam (hulu) Sem II	16 Okt 2022	24.6	25.6	31.0
Sungai Ulumahuam (hilir) Sem II	16 Okt 2022	24.7	48.2	48.0
Lokasi	pH	BOD•5 5 hari 20o C	COD dengan K ₂ Cr ₂ O ₇	Oksigen Terlarut
Sungai Barumun (hulu) Sem I 2022	7.7	2.0	20.7	6.8
Sungai Barumun (hilir)	8.1	2.3	24.8	6.7

Sem I 2022				
Sungai Ulumahuam (hulu) Sem I	8.5	1.9	20.3	6.9
Sungai Ulumahuam (hilir) Sem I	8.2	2.2	22.1	6.7
Sungai Barumun (hulu) Sem II 2022	6.8	1.6	16.9	6.8
Sungai Barumun (hilir) Sem II 2022	6.8	1.6	16.9	6.8
Sungai Ulumahuam (hulu) Sem II	7.0	2.0	18.5	6.4
Sungai Ulumahuam (hilir) Sem II	6.7	2.6	22.7	6.0
Lokasi	Sulfat (SO42)	Klo ida (Cl-)	Nitrat sebagai N	Nitrit sebagai N
Sungai Barumun (hulu) Sem I 2022	3.7	5.7	0.4	<0.004
Sungai Barumun (hilir) Sem I 2022	6.2	8.0	0.5	<0.004
Sungai Ulumahuam (hulu) Sem I	1.8	3.2	0.3	<0.004
Sungai Ulumahuam (hilir) Sem I	2.7	4.8	0.4	<0.004
Sungai Barumun (hulu) Sem II 2022	3.9	13.7	1.3	<0.004
Sungai Barumun (hilir) Sem II 2022	3.9	13.7	1.3	<0.004
Sungai Ulumahuam (hulu) Sem II	2.8	11.8	1.2	<0.004
Sungai Ulumahuam (hilir) Sem II	3.8	14.9	1.3	<0.004
Lokasi	Amon ak (SebagaiN)	Total Nitro gen	Total Fospat sbg P	Klorin Bebas di Laborato rium
Sungai Barumun (hulu) Sem I 2022	0.1	0.5	0.10	<0.03

Sungai Barumun (hilir) Sem I 2022	0.1	0.6	0.13	<0.03
Sungai Ulumahuam (hulu) Sem I	0.1	0.4	0.09	<0.03
Sungai Ulumahuam (hilir) Sem I	0.1	0.5	0.11	<0.03
Sungai Barumun (hulu) Sem II 2022	0.1	1.4	0.08	<0.03
Sungai Barumun (hilir) Sem II 2022	0.1	1.4	0.08	<0.03
Sungai Ulumahuam (hulu) Sem II	2.8	11.8	1.2	<0.004
Sungai Ulumahuam (hilir) Sem II	3.8	14.9	1.3	<0.004
Lokasi	Cadmium (Cd) Terlarut	Timbl (Pb) Terlarut	Fecal Coliform	Minyak dan Lemak
Sungai Barumun (hulu) Sem I 2022	<0.001	<0.01	110.0	<1
Sungai Barumun (hilir) Sem I 2022	<0.001	<0.01	350.0	1.0
Sungai Ulumahuam (hulu) Sem I	<0.001	<0.01	92.0	<1
Sungai Ulumahuam (hilir) Sem I	<0.001	<0.01	220.0	<1
Sungai Barumun (hulu) Sem II 2022	<0.001	<0.01	360.0	<1
Sungai Barumun (hilir) Sem II 2022	<0.001	<0.01	360.0	<1
Sungai Ulumahuam (hulu) Sem II	<0.001	<0.01	480.0	<1
Sungai Ulumahuam (hilir) Sem II	<0.01	<0.01	700.0	<1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Berdasarkan data hasil pemantauan kualitas air sungai tersebut, menunjukkan kondisi kualitas air sungai masih berada pada status tercemar ringan - sedang. Ada

beberapa kemungkinan penyebab terjadinya perubahan kualitas air, yaitu karena adanya kecenderungan meningkatnya beban pencemaran di badan-badan air, sedangkan kemampuan daya tampung dan daya dukung terbatas.

e. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Penilaian efisiensi dilakukan untuk melihat seberapa optimal suatu sumber daya alam telah dimanfaatkan dan sesuai dengan peruntukan lahan dalam tata ruang. Nilai efisiensi diperoleh dengan membandingkan pola ruang yang direncanakan dengan kondisi tutupan lahan eksisting yang direpresentasikan melalui Indeks Jasa Ekosistem (IJE). Terdapat tiga jenis efisiensi yang dinilai yaitu efisiensi penyedia pangan, efisiensi penyedia air dan efisiensi pengaturan tata air.

Tabel 2.41 Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	% Luas
1	Hutan Lindung	7.052	2,19%
2	Hutan Produksi Terbatas	3.596	1,12%
3	Hutan Produksi Tetap	29.055	9,04%
4	Hutan Suaka Alam	2.100	0,65%
5	Perkebunan	240.302	74,75%
6	Permukiman	8.362	2,60%
7	Pertanian Lahan Kering	25.504	7,93%
8	Sawah	1.577	0,49%
9	Sempadan Sungai	3.034	0,94%
10	Sungai	877	0,27%

Sumber: Peta Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nilai efisiensi dinilai pada pola ruang berdasarkan kesesuaian kondisi tutupan lahan eksisting sehingga kesesuaian dengan luas terbanyak akan mendapat nilai efisiensi tertinggi. Hal yang menjadi perhatian adalah nilai efisiensi tinggi bukanlah suatu indikasi bahwa wilayah tersebut memiliki nilai IJE penyedia pangan, air, atau pengaturan tata air dan banjir yang tinggi, namun nilai efisiensi tinggi menunjukkan

bahwa pola ruang di wilayah tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

**Tabel 2.42 Efisiensi Pemanfaatan SDA pada setiap Pola Ruang RTRW
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

No	Penggunaan Lahan	Penyediaan Air	Penyedia Pangan	Pengatur Air
1	Hutan Lindung	36%	48%	75%
2	Hutan Produksi Terbatas	58%	87%	86%
3	Hutan Produksi Tetap	74%	67%	78%
4	Hutan Suaka Alam	74%	92%	92%
5	Perkebunan	51%	42%	48%
6	Permukiman	51%	45%	50%
7	Pertanian Lahan Kering	56%	35%	40%
8	Sawah	59%	63%	59%
9	Sempadan Sungai	74%	56%	63%
10	Sungai	80%	90%	92%

Sumber: KLHS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024

Berdasarkan data di atas penggunaan lahan yang capaian efisiensi pemanfaatan SDA mencapai angka >70% yaitu pada gunalahan hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan suaka alam, sempadan sungai dan sungai. Hal ini dapat mengindikasikan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih cukup rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan Langkah perbaikan melalui rencana tata ruang dengan memperhitungkan keseimbangan ekologis dan penegakkan sanksi pada pemanfaatan lahan yang tidak sesuai RTRW.

f. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kondisi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat menggunakan beberapa indikator. Persentase

penanganan sampah pada tahun 2021 sudah mencapai 60,01% dengan capaian setiap tahun 2021-2024 mengalami tren positif yang terus meningkat setiap tahunnya dengan target capaian sebesar 60,65% pada tahun 2024. Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan utilitas perumahan dalam kondisi baik memiliki target sebesar 76% dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 telah mencapai 73%. Upaya perbaikan terus dilakukan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui peran serta masyarakat dan pemanfaatan teknologi hingga menghasilkan nilai tambah dari sampah yang dikelola. Program peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan difokuskan pada edukasi masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan daur ulang sampah plastik untuk meningkatkan pengelolaan tingkat rumah tangga, dari sektor perusahaan terdapat program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) untuk meningkatkan system pengelolaan sampah tingkat industry serta pemanfaatan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) yang bekerjasama dengan PT. PLN

Tabel 2.43 Indikator Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase penanganan sampah	60,01	60,16	60,58	60,65
Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan utilitas perumahan	76	76,50	77	78,50
Presentase pemukiman yang tidak kumuh	70,50	71	71,50	73

Sumber: LKIP, 2024

Akses rumah tangga terhadap air minum layak dan akses terhadap sanitasi menjadi beberapa faktor penunjang daya saing daerah dalam memastikan kemandirian dan ketercukupan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan data presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak selalu mengalami kenaikan tahun 2020 hingga tahun 2022 mencapai 91,34%, namun tahun 2023 mengalami penurunan hingga 90,47%. Secara umum cakupan akses terhadap air minum sudah cukup tinggi untuk supply konsumsi terhadap rumah tangga. Dalam upaya peningkatan dan perluasan akses air minum layak, dapat dilakukan koordinasi terhadap penyediaan layanan disetiap wilayah melalui skema dalam pengadaan air minum layak diantaranya, SPAM, PDAM dan PAMSIMAS III.

Selain itu akses terhadap sanitasi dari data yang tercatat mengalami kenaikan hingga saat ini mencapai 84,85% pada tahun 2021. Secara umum akses terhadap sanitasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus mengalami perbaikan, hal ini sejalan dengan target pembangunan daerah untuk dapat mendorong rumah tangga memperoleh layanan pengelolaan air limbah melalui program PAMSIMAS III yang memiliki semangat untuk mewujudkan target 100% akses air minum aman, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak berbasis masyarakat.

Tabel 2.44 Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan sanitasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Akses terhadap air minum layak	83,49	84,66	91,34	90,47	n/a
Akses terhadap sanitasi	83,27	84,85			

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

2.1.1.13. Demografi

Demografi merupakan ilmu kependudukan yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia tersebut. Demografi dalam menggambarkan dinamika tersebut meliputi jumlah penduduk, komposisi penduduk, persebaran geografis dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat berubah. Demografi menawarkan informasi mengenai wawasan berharga terkait organisasi populasi yang merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan sebagai subjek dan objek pembangunan. Dalam ruang lingkup pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi SDM berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan.

Gambaran mengenai kondisi demografi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat dari ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

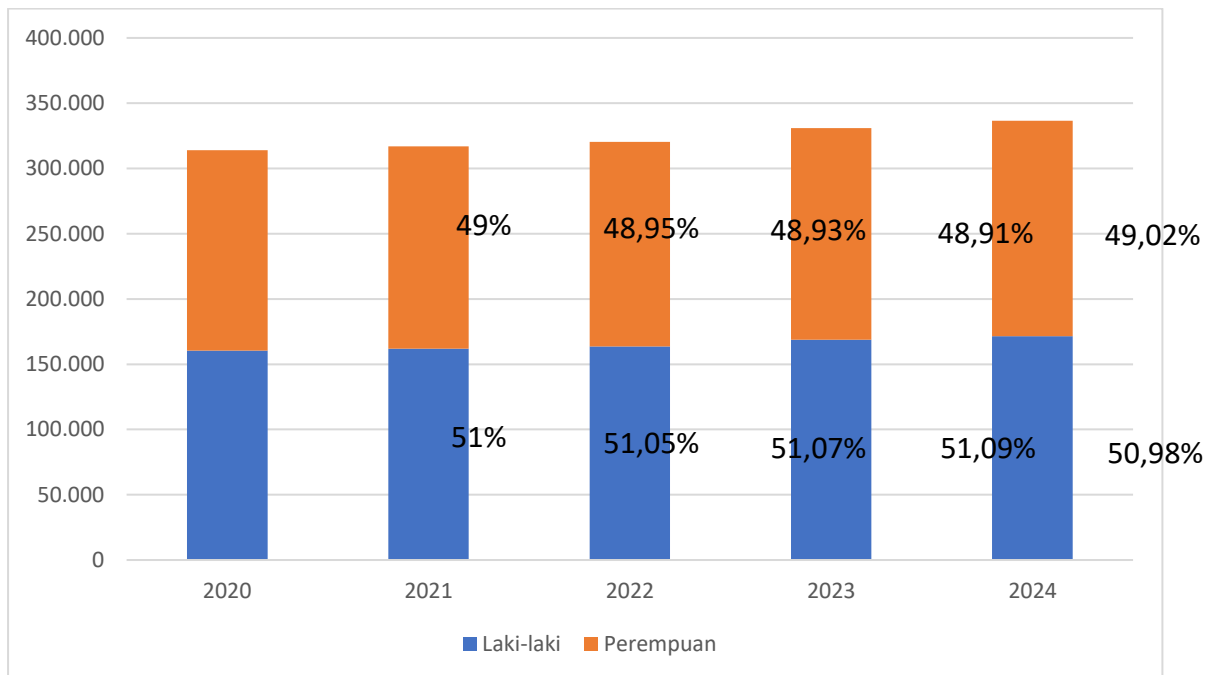
a. Jumlah Penduduk dan Rasio Penduduk

Berdasarkan data kependudukan tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan tercatat sebanyak **336.577 jiwa**, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total jumlah tersebut, **171.513 jiwa** merupakan **penduduk laki-laki** atau sekitar **50,96 persen**, sedangkan **165.064 jiwa** merupakan **penduduk perempuan** atau sekitar **49,04 persen**. Dengan demikian, terdapat **selisih sebesar 6.449 jiwa** antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, di mana penduduk laki-laki masih mendominasi secara kuantitas.

Rasio jenis kelamin (sex ratio) tercatat sebesar **108,91 persen**, yang berarti terdapat sekitar 109 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Rasio ini menunjukkan ketidakseimbangan yang cukup signifikan dalam komposisi jenis kelamin penduduk, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti migrasi kerja, struktur usia produktif yang didominasi laki-laki, atau dinamika sosial-ekonomi lainnya di wilayah tersebut. Peningkatan jumlah penduduk secara keseluruhan menjadi indikator penting dalam merancang berbagai kebijakan pembangunan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, serta perencanaan infrastruktur dan layanan sosial. Jumlah penduduk yang terus bertambah juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan dan pemerataan akses terhadap sumber daya serta layanan dasar.

Di sisi lain, perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan juga perlu menjadi perhatian dalam konteks pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender. Ketidakseimbangan ini dapat memengaruhi dinamika sosial, peran gender dalam masyarakat, hingga peluang kerja dan pelayanan publik yang setara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memantau perkembangan struktur demografi ini guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil bersifat inklusif dan adaptif terhadap perubahan komposisi penduduk.

Secara keseluruhan, data kependudukan tahun 2024 memberikan gambaran mengenai dinamika pertumbuhan dan struktur penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang penting untuk dijadikan landasan dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Grafik 2.9 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diolah

Berdasarkan penggambaran jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020 s.d 2024 dengan pertumbuhan mencapai 0,64%-1,92% setiap tahun, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar. Sehingga perencanaan pembangunan daerah perlu memperhitungkan rencana penambahan penyediaan fasilitas publik dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk serta optimalisasi peningkatan daya saing masyarakat yang terus bertambah.

b. Kepadatan dan Pesebaran Penduduk

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2024 adalah sebesar 110 jiwa/km², dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kotapinang sebesar 206 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Kampung Rakyat sebesar 86 jiwa/km². Selain itu, sebaran persentase penduduk, menjadi salah satu factor pengaruh perbedaan pembangunan wilayah infrastruktur tiap kecamatan. Berdasarkan data, sebaran penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan terbesar di Kecamatan Torgamba sebesar 116.953 atau setara dengan 34.75% jika ditinjau secara luas geografisnya juga terbesar diantara Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sebaran penduduk

terbesar kedua terdapat di Kecamatan Kotapinang dengan jumlah penduduk sebanyak 70.509 orang atau sebesar 20.95%

Dengan pertimbangan faktor tersebut akan berdampak juga pada perbedaan tingkat pelayanan disetiap kecamatan. Oleh karena itu, dalam penyediaan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan penggunaan lahan serta jumlah penduduk berdasarkan wilayah cakupan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) agar tidak ada kesenjangan maupun kelangkaan pelayanan dasar terhadap masyarakat.

c. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dibagi menjadi dua yaitu peningkatan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk positif) atau penurunan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk negative). Pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada proyeksi jumlah penduduk beberapa tahun yang akan datang berdampak pada berbagai potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan seperti ketersediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya tenaga kerja, sarana dan prasarana, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan 2 (dua) decade terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.

Grafik 2.10 Pertumbuhan Penduduk



Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan cenderung linear dan meningkat dari 2 (dua) dekade terakhir.

Berdasarkan data tersebut laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan masuk kategori laju pertumbuhan penduduk positif yang akan mempengaruhi dinamika terhadap lapangan pekerjaan dan sumber daya tenaga kerja, sarana dan prasarana pelayanan dasar dan lainnya.

Dalam hal ini juga pemerintah perlu mempersiapkan program yang akan mengakomodir pengembangan SDM dan memiliki kewajiban dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar seperti fasilitas publik, Pendidikan dan Kesehatan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat terus meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk menandakan adanya peningkatan kebutuhan lapangan kerja. Melihat data kontribusi PDRB, sektor strategis paling tinggi terdapat pada sektor industri pengolahan, pertanian dan perdagangan jasa. Melalui pemetaan tersebut pemerintah dapat Menyusun strategi dalam penyediaan lapangan kerja melalui kebijakan yang memprioritaskan keuntungan untuk daerah melalui kebijakan sektor industri pengadaan pegawai, CSR pemberdayaan manusia maupun peningkatan infrastruktur, sektor pertanian melalui pemberian insentif dan bantuan produksi, serta sektor perdagangan jasa melalui bantuan dana serta program promosi produk.

d. Penduduk menurut kelompok umur

Penduduk menurut kelompok umur digunakan untuk melihat kelompok produktif (usia 15-64 tahun) dan non produktif (usia muda dan usia tua) yang akan berpengaruh pada arah rencana pembangunan daerah. Arah rencana pembangunan daerah yang dimaksud meliputi perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk seperti kebutuhan pangan, sarana prasarana Kesehatan, Pendidikan, lapangan pekerjaan dan lain lain. Data terkait penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada tabel/grafik sebagai berikut.

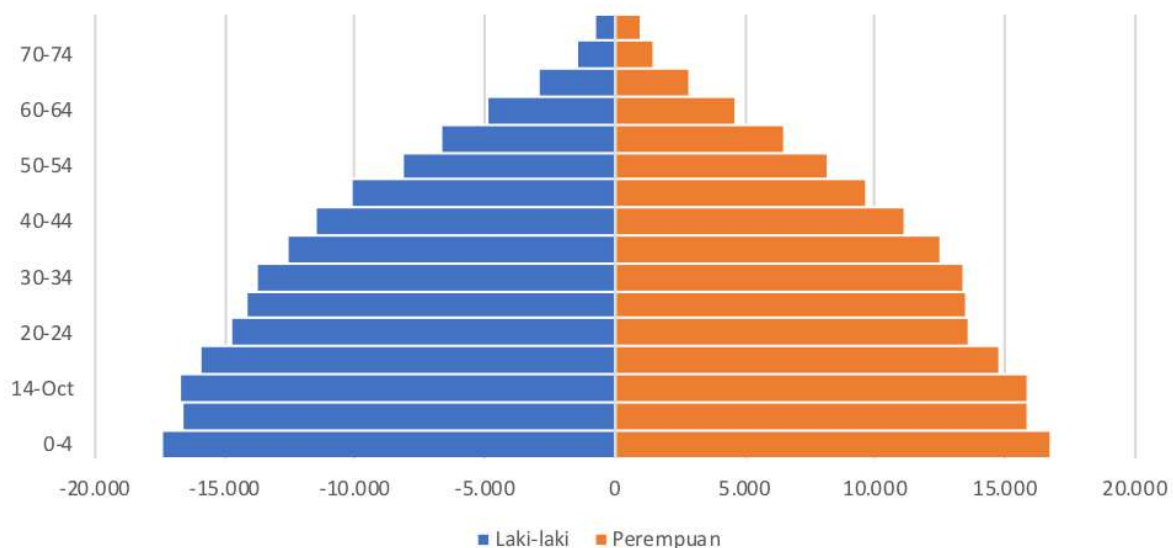
Tabel 2.45 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	17.417	16.731	34.148
5-9	16.644	15.861	32.205
10-14	16.766	15.890	32.656
15-19	15.923	14.793	30.716

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
20-24	14.727	13.657	28.384
25-29	14.187	13.551	27.738
30-34	13.820	13.456	27.276
35-39	12.614	12.520	25.134
40-44	11.515	11.207	22.722
45-49	10.124	9.712	19.836
50-54	8.184	8.217	16.401
55-59	6.671	6.502	13.173
60-64	4.941	4.635	9.476
65-69	2.985	2.925	5.910
70-74	1.497	1.476	2.973
75+	740	1.009	1.749
Jumlah	168.655	162.142	330.797

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024

Grafik 2.7 Piramida Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2025 diolah

Piramida penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah bentuk piramida yang termasuk ke dalam piramida ekspansif atau piramida penduduk muda. Piramida ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bentuk piramida secara keseluruhan yang menyerupai kerucut;

2. Jumlah penduduk usia muda relatif banyak dan penduduk usia tua jauh lebih sedikit;
3. Menunjukkan angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan angka kematian (khususnya untuk penduduk berusia 0-4 tahun dan penduduk usia tua);
4. Piramida penduduk jenis ini umumnya merupakan piramida penduduk di daerah-daerah berkembang.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan penduduk berumur muda (dibawah 15 tahun) sebesar 29,66 persen, dan penduduk umur 65 tahun keatas sebesar 3,48 persen pada tahun 2024. Hal ini memberikan indikasi bahwa potensi kelompok usia produktif perlu mendapatkan perhatian untuk mendapatkan sasaran pengembangan sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan mandiri untuk mengisi peluang-peluang ekonomi yang ada. Upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi penduduk usia produktif, salah satunya adalah pelaksanaan pelatihan vokasi dan keterampilan lainnya yang diarahkan untuk terlibat dalam produksi padat karya.

e. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2024 penduduk Angkatan kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan mayoritas bersekolah SD/MI/ sederajat hingga SMA/ sederajat dengan persentase sebesar 91,29 persen, dengan rincian tamatan bersekolah SD/MI/ sederajat sebesar 32,96 persen, bersekolah SMP/MTs/ sederajat sebesar 19,26 persen, bersekolah di SMA/SMK/MA/ sederajat sebesar 39,08 persen

f. Suku

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, suku bangsa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat suku jawa, batak, melayu, minang, aceh dan lainnya. Jumlah suku bangsa terbesar adalah suku jawa dengan persentase mencapai 49,80% dan peringkat kedua adalah suku batak dengan presentase mencapai 45,61%.

Tabel 2.46 Penduduk Menurut Suku Bangsa Per Kecamatan

Kecamatan	Melayu	Batak	Minang	Jawa	Aceh	Lainnya
Sungai Kanan	0,15	78,30	0,27	19,62	0,07	1,59
Torgamba	0,70	41,16	0,74	52,84	0,19	4,37
Kotapinang	0,65	55,65	0,59	39,43	0,15	3,53
Silangkita ng	0,07	18,27	0,27	79,75	0,07	1,57
Kampung Rakyat	0,34	30,48	0,68	64,29	0,18	4,03
Jumlah	0,47	45,61	0,57	49,80	0,15	3,40

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan SP2010

g. Penduduk menurut Agama yang dianut

Jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada umumnya adalah beragama Islam. Jumlah penduduk yang beragama Islam terdapat sebesar 84,36 persen. Sedangkan Agama terbesar kedua adalah Agama Kristen Protestan yang terdapat sekitar 13,21 persen dari jumlah penduduk yang ada. Dan sisanya adalah merupakan Agama Katolik sebesar 0,82 persen, Agama Budha 0,23 persen, Agama Khonghucu sebesar 0,02 persen dan Agama lainnya sebesar 0,005 persen dengan rincian pada table berikut.

Tabel 2.47 Penduduk Menurut Agama yang Dianut

No	Kecamatan	Agama/Kepercayaan (Jiwa)					
		Islam	Protestan	Katolik	Budha	Khonghucu	Lainnya
1	Sungai Kanan	48.733	1.526	101	9	-	-
2	Torgamba	84.816	28.304	1.562	247	83	16
3	Kotapinang	58.173	5.800	662	494	6	2
4	Silangkita ng	31.635	337	13	6	-	-
5	Kampung Rakyat	55.720	7.748	381	14	-	1
	Total	279.077	43.715	2.719	770	89	19

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam angka 2025

Dalam menjaga ketahanan social dan kerukunan kebijakan dibutuhkan untuk optimalisasi nilai agama dan budaya melalui program lintas agama yang melibatkan

tokoh. Lebih dari itu pelibatan masyarakat dengan perbedaan agama untuk penyelenggaraan pengembangan Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi melalui pembentukan komunitas. Sehingga seluruh masyarakat dengan berbagai latar belakang agama dapat berkolaborasi dalam kontribusi pembangunan daerah dan menjaga kerukunan melalui keberagaman.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kinerja pembangunan ekonomi daerah mempunyai kedudukan yang amat penting, karena hasil positif dari bidang ekonomi dapat menyediakan sumber daya yang lebih luas bagi pembangunan daerah pada bidang lainnya. Oleh karena itu, aspek ekonomi menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah. Secara makro, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi suatu wilayah bisa dilihat dari beberapa indikator seperti kontribusi dan distribusi PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan indikator lainnya yang mampu memberikan informasi tentang perkembangan suatu wilayah terhadap wilayah lainnya.

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari PDRB wilayahnya. PDRB menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumber daya alam serta faktor produksi lainnya. PDRB Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan PDRB menurut lapangan usaha atau sektor produksi yang merupakan jumlah dari nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam periode waktu tertentu. PDRB diukur berdasarkan perhitungan 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha yang dominan di masyarakat, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa lainnya.

a. Pertumbuhan PDRB

PDRB menunjukkan tingkat aktivitas ekonomi dan mencakup kontribusi dari berbagai sektor. Indikator ini tidak hanya menunjukkan seberapa besar sumbangan ekonomi suatu wilayah terhadap perekonomian nasional, tetapi juga dapat digunakan untuk membandingkan kinerja ekonomi antara wilayah di dalam suatu negara. PDRB bertanggung jawab untuk menyediakan data sebagai input kebijakan ekonomi dan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Dalam pengukurannya, PDRB dibagi dalam dua pendekatan yaitu PDRB berdasarkan harga berlaku dan PDRB berdasarkan harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku mengukur nilai produksi barang dan jasa dalam sebuah daerah menggunakan harga yang sesuai dengan nilai nominal dari masing-masing harga disetiap tahunnya. Sementara itu, PDRB harga konstan merupakan nilai PDRB yang telah disesuaikan dengan menggunakan harga konstan pada tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya. Dengan demikian, dampak inflasi pada peningkatan nilai PDRB dapat diminimalisir. Penggunaan PDRB harga konstan memastikan bahwa perubahan nilai PDRB terjadi karena perubahan dalam produksi barang dan jasa, bukan karena fluktuasi harga komoditas.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dari Rp 28.189,97 juta (2020) menjadi Rp. 41.909,64 juta (2024). Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, PDRB ADHB Kabupaten Labuhanbatu Selatan meningkat sebesar Rp 13.719,67 juta. Sektor Industri Pengolahan merupakan kontributor utama dengan peranan mencapai 40,89 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 32,41 persen serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 12,74 persen. Sementara sektor-sektor lainnya hanya memberikan total kontribusi sebesar 13,96 persen terhadap perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Untuk melihat produktivitas ekonomi (dengan mengabaikan inflasi) maka digunakan PDRB Atas Harga Konstan (ADHK). Berdasarkan harga konstan tahun 2010, PDRB Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2024 sebesar Rp 22.619,57 juta. Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010, tahun 2024 sektor Transportasi dan Pergudangan memiliki laju pertumbuhan terbesar yaitu 9,39 persen, selanjutnya sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,60% disusul sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 7,31 persen. Secara keseluruhan,

perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2024 naik mencapai 4,89 persen bila dibandingkan pada tahun 2023.

**Tabel 2.48 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Atas Dasar Harga Berlaku Periode 2018–2023 (Rp miliar)**

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.465,08	8.709,56	10.099,36	11.580,20	13.583,70
2	Pertambangan dan Penggalian	88,42	92,64	98,93	105,40	111,28
3	Industri Pengolahan	12.394,07	13.332,14	14.601,02	15.725,88	17.137,51
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14,26	14,64	15,90	16,59	16,85
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,70	6,11	6,20	6,54	6,95
6	Konstruksi	1.939,95	2.011,42	2.236,19	2.462,25	2.648,25
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.913,47	4.143,61	4.481,00	4.892,28	5.340,05
8	Transportasi dan Pergudangan	286,69	199,64	336,56	384,58	444,01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	244,35	244,09	260,15	284,88	315,13
10	Informasi dan Komunikasi	119,25	131,11	143,45	157,07	167,57

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	243,96	258,70	290,01	309,46	332,67
12	Real Estat	732,66	753,34	809,17	842,14	915,65
13	Jasa Perusahaan	40,70	41,72	45,49	48,14	52,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	451,86	453,12	453,41	465,90	513
15	Jasa Pendidikan	135,53	138,90	146,55	159,09	173,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97,64	97,46	102,61	111,47	119,49
17	Jasa lainnya	25,39	25,93	28,83	32,00	34,63
	PDRB	28.189,97	30.754,13	34.154,82	37.584,31	41.909,64

Sumber : Labuhanbatu Selatan Dalam Angka Tahun 2025

**Tabel 2.49 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2020–2024 (Rp miliar)**

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.239,40	6.654,87	7.096,74	7.432,26	7.760,79
2	Pertambangan dan Penggalan	60,85	62,78	64,58	66,53	70
3	Industri Pengolahan	7.564,18	7.765,83	8.022,73	8.385,13	8.741,64
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12,42	12,67	13,41	13,90	14,44
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	3,52	3,74	3,76	3,90	4,02

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
6	Konstruksi	1.186,01	1.208,31	1.261,96	1.347,89	1.426,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.310,08	2.371,98	2.474,95	2.619,62	2.789,14
8	Transportasi dan Pergudangan	184,28	186,98	201,34	216,13	236,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	161,30	160,70	170,60	182,87	198,60
10	Informasi dan Komunikasi	103,50	110,96	118,44	128,09	137,45
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	163,44	168,45	174,87	182,48	191,23
12	Real Estat	447,31	447,59	473,44	494,74	526,22
13	Jasa Perusahaan	23,50	23,63	24,68	25,69	27,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	267,45	268,37	268,31	273,66	291,73
15	Jasa Pendidikan	92,22	94,18	97,49	104,43	111,36
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65,26	64,54	66,64	70,76	74,42
17	Jasa lainnya	14,59	14,81	15,92	17,25	18,32

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
	PDRB	18.889,31	19.620,41	20.549,86	21.565,33	22.619,57

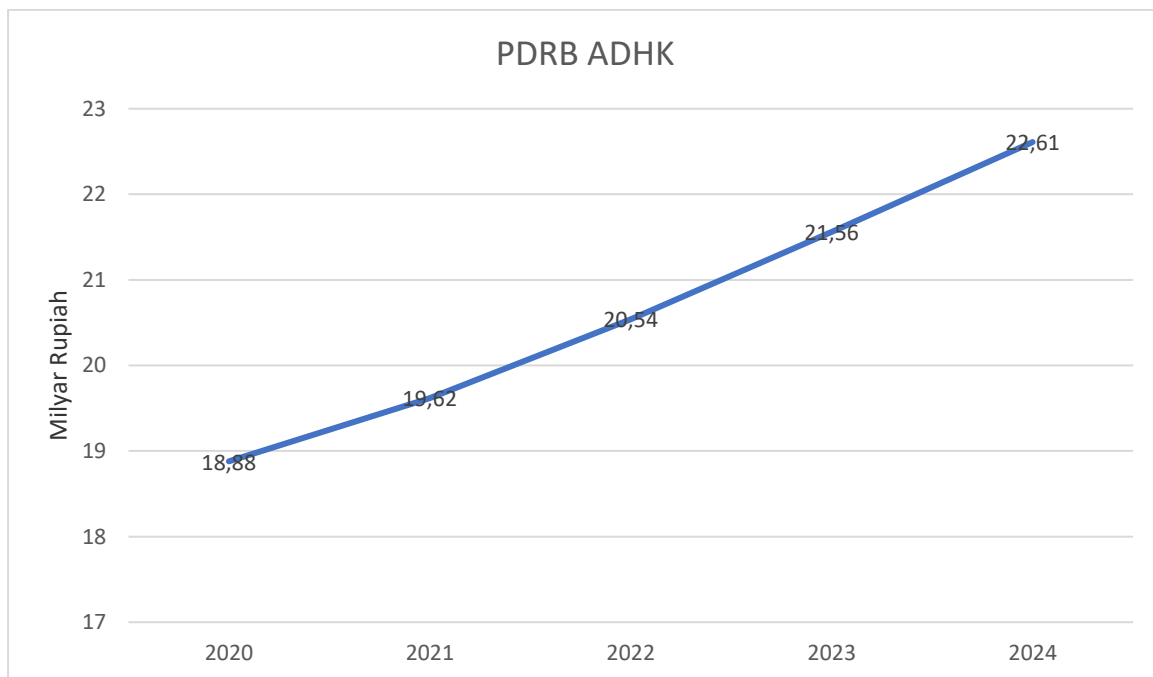
Sumber : Labuhanbatu Selatan Dalam Angka Tahun 2025

Jika dilihat dari pergerakan tren angka PDRB periode 2020 sampai dengan 2024 terlihat bahwa terjadi peningkatan pada jumlah PDRB nominal Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari awal periode yang hanya berjumlah 28,18 Milyar rupiah menjadi 41,9 Milyar rupiah. Evaluasi capaian menunjukkan kenaikan yang terjadi telah efektif berdasarkan kebijakan yang sudah dikeluarkan. Secara umum tren peningkatan juga terjadi secara konsisten setiap tahunnya

Grafik 2.8 Nilai PDRB ADHB Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2020-2024



Grafik 2.9 Nilai PDRB ADHK Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2020-2024



Sementara itu jika dilihat dari PDRB harga konstan (PDRB Riil) nya juga mengalami kenaikan yang konsisten. Tahun dasar harga konstan yang saat ini dipakai adalah harga konstan tahun 2010. Jika dilihat kenaikan dari nilai PDRB riil ini dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 naik dari 18,88 milyar menjadi 22,61 milyar rupiah. Evaluasi capaian menunjukkan implementasi kebijakan cukup efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari data yang telah disajikan di atas terlihat bahwa nilai dari PDRB harga berlaku jauh lebih besar daripada PDRB harga konstan (harga dasar tahun 2010) dengan jarak yang makin melebar. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga memang terjadi dengan rate inflasi yang positif. Jika dilihat dari pergerakan pertambahan (pertumbuhan) maka jelas terlihat bahwa pertumbuhan dari PDRB harga berlaku sedikit lebih besar dari PDRB harga konstan. Baiknya tingkat inflasi ini tergolong relatif stabil. Dari segi pertumbuhan PDRB harga konstan sendiri juga selalu tumbuh yang menunjukkan bahwa secara produktivitas real, ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan meningkat. Ini menunjukkan indikasi yang baik walaupun secara rate hal ini dapat ditingkatkan.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi utama. Angka pertumbuhan menunjukkan seberapa peningkatan nilai ekonomi sebuah entitas (negara/daerah) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan pergerakan yang cukup variatif. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus meningkat setiap tahunnya, terkecuali pada tahun 2014, 2015, 2017 dan 2020.

Grafik 2.10 Nilai Pertumbuhan Ekonomi Kab. Labuhanbatu Selatan periode 2020-204

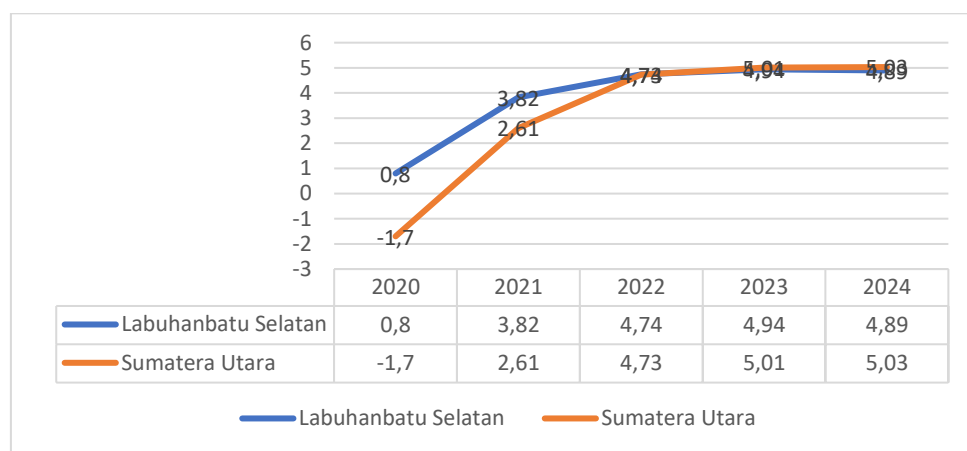


Dari tahun 2020 hingga tahun 2023, nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan konsisten tumbuh diatas 5% setiap tahunnya. Tahun 2020 mengalami nilai pertumbuhan ekonomi negative akibat adanya krisis akibat pandemic Covid-19. Nilai PDRB Kabupaten Labuhanbatu Selatan turun ke level 0.8%. Tahun 2021 hingga 2023 perekonomian Kabupaten Labuhanbatu Selatan mulai mengalami perbaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah positif dan sedang menuju angka pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi. Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan tumbuh sebesar 4,94% sepanjang tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2022, walaupun di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami koreksi dan tahun 2023 nilai pertumbuhan ekonomi berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Sektor industri pengolahan di

Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang membuat nilai pertumbuhan konsisten diangka >4% terhitung dari tahun 2022. Namun dampak dari pandemi global corona virus C-19 pertumbuhan ekonomi secara global menurun drastis termasuk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni 0,8% di tahun 2020. Pada tahun transisi pasca corona virus C-19 Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami tren positif dengan menunjukkan kenaikan hingga tahun 2023.

Grafik 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Provinsi Sumatera Utara



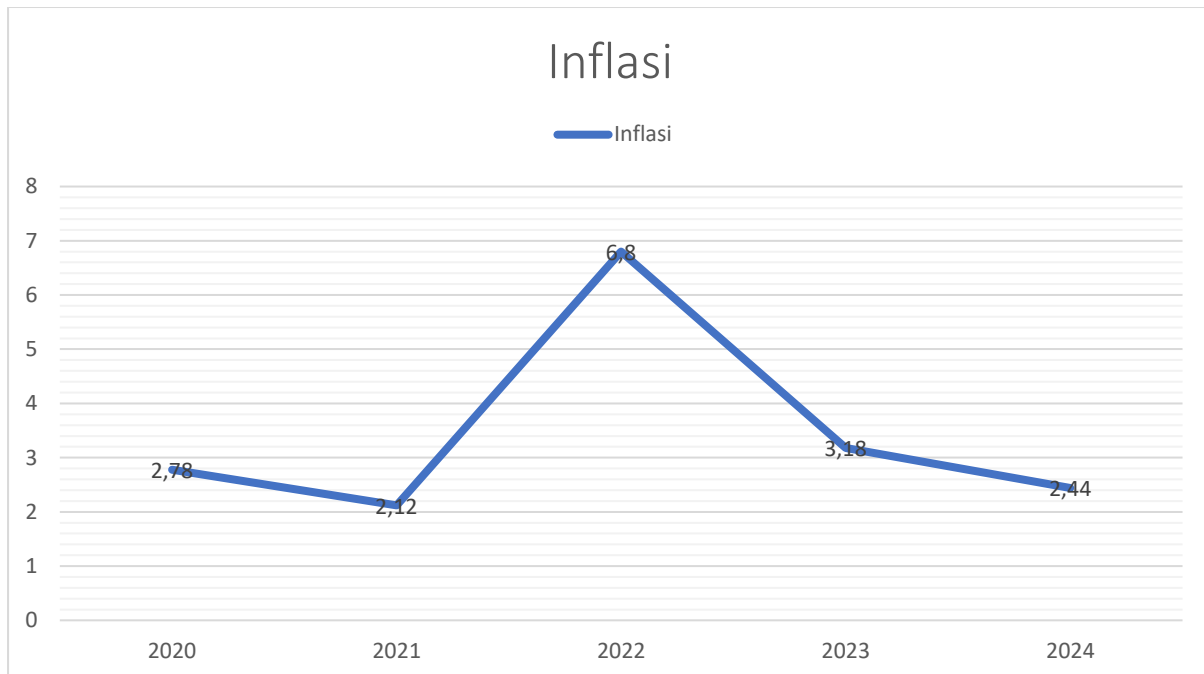
Sumber: Labuhanbatu Selatan Dalam Angka

c. Laju Inflasi

Untuk melihat bagaimana kualitas pertumbuhan ekonomi secara lebih jauh sekaligus kestabilan harga di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka dapat dilihat dari angka inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi utama selain pertumbuhan ekonomi. Angka inflasi adalah indikator ekonomi yang mengukur tingkat kenaikan secara umum dari harga- harga barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Angka ini mencerminkan laju perubahan daya beli uang masyarakat dan memberikan gambaran tentang stabilitas harga di suatu negara atau wilayah. Inflasi yang rendah biasanya menandakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan keadaan moneter yang sehat, sementara inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, dan mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. Memahami angka inflasi dengan cermat sangat penting bagi para pengambil keputusan ekonomi, pemerintah, dan masyarakat

untuk merencanakan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi.

Grafik 2.12 Nilai Inflasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diolah

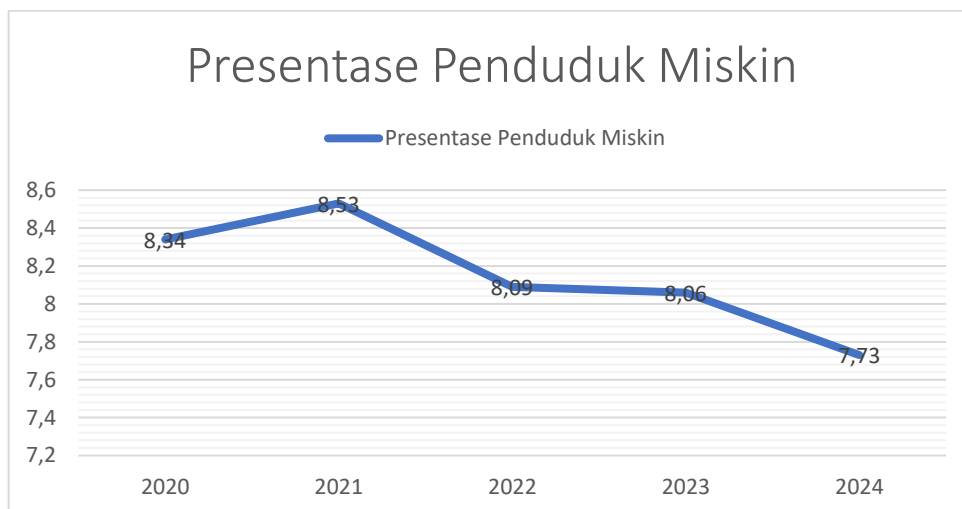
Berdasarkan data tersebut, menunjukkan nilai inflasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yang diperoleh dari penghitungan inflasi menggunakan GDP deflator. Secara umum pengendalian harga dilakukan dengan cukup baik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dimana nilai inflasi yang cukup stabil ini juga menunjukkan bahwa kualitas peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga cukup berkualitas dalam artian secara riil ekonomi memang tumbuh. Kenaikan nilai ekonomi naik baik secara nominal maupun secara riil. Nilai inflasi tinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,8%. Hal ini disebabkan karena harga berbagai komoditas naik menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Juni 2023, kenaikan harga tidak terkendali terutama terjadi hingga September 2023, serta masa transisi pasca corona virus Covid-19.

d. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat di dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Jumlah penduduk

miskin di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2024 sebanyak 29,19 ribu jiwa atau 7,73% terhadap total jumlah penduduk. Jumlah ini menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun sebagaimana data tahun 2020 prosentase penduduk miskin Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebesar 8,34 persen. Laju penurunan prosentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan tahun 2024 relatif baik, meskipun terdapat peningkatan Kembali tahun 2021 dan penurunan yang tidak signifikan pada tahun 2022-2023 terpengaruh oleh pandemic Covid-19. Namun berdasarkan hasil tersebut penerapan kebijakan selama 5 tahun terakhir secara konsisten dapat menekan angka kemiskinan.

Grafik 2.13 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2020-2024



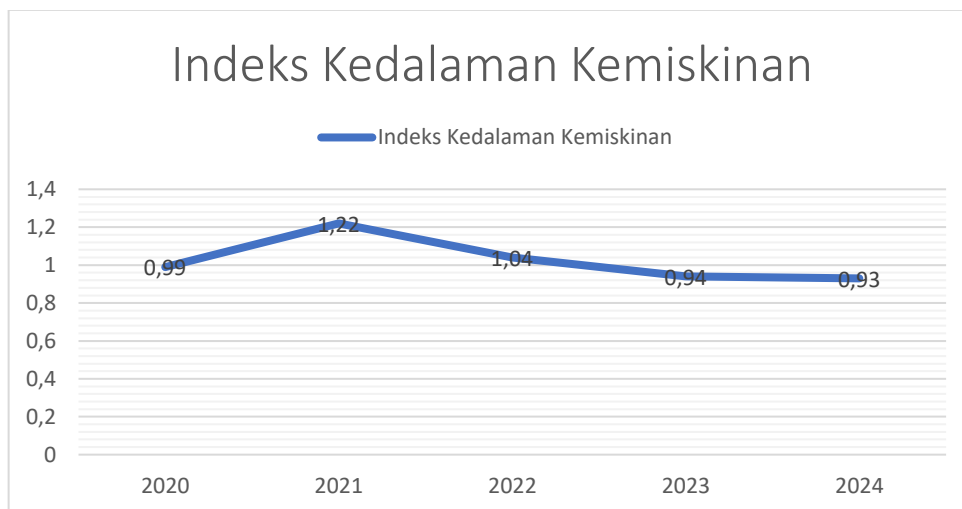
Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diolah

Berdasarkan data tersebut, angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami tren penurunan. Trend penurunan ini menunjukkan perbaikan berkelanjutan yang terjadi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalangan bawah. Faktor ini didukung dari adanya perbaikan tata Kelola pemerintah, pemenuhan pelayanan dasar, pembangunan infrasturktur dan akses terhadap sumberdaya bagi masyarakat, sehingga nilai pengeluaran dari 52 komoditi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan pengeluaran Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan dapat diperbaiki setiap tahunnya.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun 2020 – 2024 angkanya cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 adalah 0,99 dan mengalami kenaikan tahun 2021 dengan nilai 1,22 namun secara konsisten mengalami

penurunan hingga tahun 2024 sebesar 0,93. Dari angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara bertahap menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin kecil. Gambaran tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.14 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diolah

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2), merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (Badan Pusat Statistik Tahun 2025). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin melalui Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah.

**Grafik 2.15 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Periode 2020-2024**



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diolah

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun 2016 – 2023 angkanya cukup fluktuatif. Selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung turun. Dari angka Indeks Keparahan Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin Kabupaten Labuhanbatu Selatan turun dibandingkan dengan tahun 2022. Penduduk miskin Kabupaten Labuhanbatu Selatan semakin homogen kasus/ karakter/keadaannya. Dalam upaya menjaga dan terus melakukan upaya penurunan indeks keparahan kemiskinan perlu dilakukan intervensi pada sector yang dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya dan potensi ekonomi. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

Tabel 2.50 Jumlah Penduduk Miskin, Presentase Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024

N o	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Presentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
1	2020	28,63	8,34	0,99	0,20	404.819

2	2021	30,36	8,53	1,22	0,26	426.574
3	2022	29,38	8,09	1,04	0,26	448.994
4	2023	29,83	8,06	0,94	0,18	486.275
5	2024	29,19	7,73	0,93	0,16	533.535

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024 diolah.

Berdasarkan data tabel tersebut penanganan terhadap kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terlaksana cukup efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan presentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang menunjukkan nilai yang terus menurun. Di sisi lain garis kemiskinan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, kenaikan angka garis kemiskinan ini perlu diperhatikan agar tidak semakin banyak penduduk rentan miskin yang jatuh pada jurang kemiskinan.

e. Indeks Gini

Hasil pemerataan pembangunan dapat diukur juga dengan mengaitkan masalah kemiskinan. Secara logika, gap yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin dapat mengindikasikan bahwa kemiskinan semakin meluas dan begitupun sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur dalam menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan melihat Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Tabel 2.51 Perkembangan Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan Menurut Ukuran Gini Ratio Tahun 2020-2024

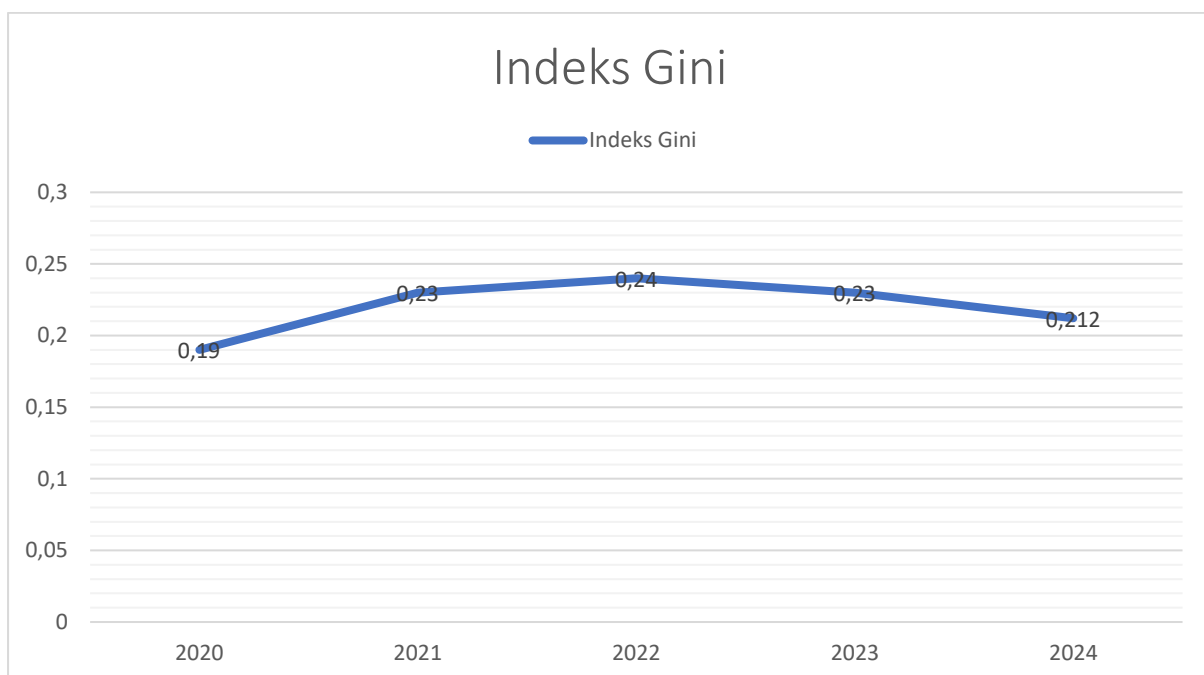
No	Tahun	Gini Ratio	Ketimpangan Dalam Distribusi Pendapatan/Pengeluaran
1	2020	0.193	Rendah dan Relatif Merata
2	2021	0.232	Rendah dan Relatif Merata
3	2022	0.242	Rendah dan Relatif Merata
4	2023	0.231	Rendah dan Relatif Merata

5	2024	0.212	Rendah dan Relatif Merata

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024

Berdasarkan data di atas, secara umum Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan berada pada kategori rendah dan relatif merata. Jika dikaitkan dengan pendapatan per kapita yang terus meningkat serta penurunan Indeks Gini, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, ketimpangan yang rendah belum tentu mencerminkan kondisi yang ideal, karena bisa saja seluruh penduduk berada dalam kondisi sama-sama miskin atau sama-sama kaya, sehingga perlu ditinjau secara lebih mendalam.

Grafik 2.16 Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diolah

Mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan perencanaan pembangunan ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan dalam menjamin pemerataan pendapatan untuk menjaga dan menekan angka gini ratio maupun tingkat kemiskinan secara menyeluruh di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Salah satu upaya dalam pembuatan kebijakan yang menjaga pemerataan, pemerintah perlu memperhitungkan kemudahan akses masyarakat terhadap sumber daya serta persebaran lapangan kerja melalui pembangunan sektor penyumbang PDRB tertinggi yaitu industri

pengolahan, pertanian dan perdagangan jasa dengan memperhitungkan kesesuaian RTRW.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah bekerja dari keseluruhan angkatan kerja selama lima tahun ke belakang terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebanyak 139.998 jiwa sedangkan tahun 2024 telah mencapai 164.144 jiwa. Disisi lain, banyak pengangguran selama lima tahun ke belakang mengalami flustuasi dengan tren positif terus mengalami penurunan dari tahun 2020-2024. Tahun 2020 angka pengangguran sebanyak 7.214 jiwa hingga tahun 2024 mengalami penurunan hingga mencapai 5.498 jiwa atau setara dengan 23,79%.

Tabel 2.52 Penduduk, Bukan Angk.Kerja, Angk.Kerja, Pengangguran & Orang Bekerja di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 – 2024 (Jiwa)

Tahun	Penduduk	Bukan Angk. Kerja	Angkatan Kerja	Pengangguran	Bekerja
2020	314.094	94.350	147.212	7.214	139.998
2021	316.798	83.267	164.416	7.736	156.680
2022	320.320	84.381	169.497	5.334	164.163
2023	330.797	62.242	170.024	5.831	164.193
2024	336.577	66.249	169.642	5.498	164.144

Sumber : Labuhanbatu Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Berdasarkan data lima tahun terakhir nilai TPT Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami dinamika dengan kecenderungan turun hingga 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan data yang tercatat, angka tersebut tidak terlepas dari pengaruh oleh kondisi harga komoditas yang naik dan dipengaruhi juga dari kenaikan BBM serta terpengaruh dari adanya pandemic Covid-19.

Grafik 2.17 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diolah

Angka TPT di Kabupaten Labuhanbatu Selatan cenderung mengalami penurunan pada 5 (lima) tahun terakhir, dengan catatan tahun 2023 mencapai angka 3,43%. Kondisi ini menggambarkan kondisi tren yang cukup positif dalam pengurangan pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mempertimbangkan terjadinya pandemic Covid-19, angka pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami perbaikan. Namun tidak terlepas dengan adanya kendala masih cukup tingginya angka pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang didominasi dengan pengangguran berpendidikan menengah atas dan tinggi (Diploma).

Tabel 2.53 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Tahun 2024

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Angkatan Kerja			Presentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
Sekolah Dasar	54.099	1.248	55.347	97.75
Sekolah Menengah Pertama	31.612	292	31.904	99.08

Sekolah Menengah Atas	64.142	3.535	67.677	94.78
Universitas	14.291	423	14.714	97.13

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data jumlah pengangguran terhadap Angkatan kerja didominasi oleh pengangguran berpendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Hal ini terdampak oleh minimnya keterampilan lulusan Pendidikan tersebut selain dari adanya pandemic Covid-19 maupun tingkat diversifikasi ekonomi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga penyerapan lapangan kerja yang tidak maksimal.

Angka pekerja sektor formal sebagian memiliki jumlah paling tinggi dari status pekerjaan utama lainnya mencapai 51,81% dan diikuti dengan status pekerjaan utama berusaha sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa serapan tenaga kerja di Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih didominasi pada posisi sektor formal. Hal ini membutuhkan perhatian, mengingat sektor formal memiliki kualifikasi penerimaan dengan minimal Pendidikan, oleh karena itu peningkatan Pendidikan, keterampilan dan vokasi agar dapat ditingkatkan sebagai upaya peningkatan serapan tenaga kerja

Tabel 2.54 Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020-2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	3.49	3.12	2.81	2.31	2.10
Mandailing Natal	6.50	6.12	7.64	7.45	7.22
Tapanuli Selatan	4.42	4.00	3.65	3.49	3.41
Tapanuli Tengah	7.54	7.24	7.97	7.81	7.45
Tapanuli Utara	2.94	1.54	1.07	1.03	1.21
Toba Samosir	2.50	0.83	1.39	1.30	1.09
Labuhan Batu	6.05	5.66	6.90	5.99	5.90
Asahan	7.24	6.39	6.26	6.12	5.94

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
Simalungun	4.58	4.17	5.51	5.35	5.17
Dairi	1.75	1.49	0.88	1.23	1.43
Karo	1.83	1.95	2.71	2.63	2.4
Deli Serdang	9.50	9.13	8.79	8.62	8.02
Langkat	7.02	5.12	6.88	6.33	6.08
Nias Selatan	4.15	3.91	3.69	3.48	3.03
Humbang Hasundutan	0.84	1.94	0.42	0.84	0.92
Pakpak Bharat	1.93	1.36	0.26	0.45	0.97
Samosir	1.20	0.70	1.16	1.03	0.89
Serdang Bedagai	5.54	3.93	4.98	4.97	4.88
Batu Bara	6.48	6.62	6.21	5.88	5.75
Padang Lawas Utara	3.11	3.19	4.31	4.42	3.99
Padang Lawas	4.11	4.07	5.90	5.75	5.47
Labuhan Batu Selatan	4.90	4.71	3.15	3.43	3.24
Labuhan Batu Utara	6.82	5.74	3.75	4.84	4.6
Nias Utara	4.54	3.00	2.59	2.57	2.82
Nias Barat	1.71	0.74	0.53	0.80	1
Kota Sibolga	8.00	8.72	7.05	6.79	6.52
Kota Tanjung Balai	6.97	6.59	4.62	4.47	4.08
Kota Pematang Siantar	11.50	11.00	9.36	8.62	8
Kota Tebing Tinggi	9.98	8.37	6.39	6.24	6.18
Kota Medan	10.74	10.81	8.89	8.67	8.13
Kota Binjai	8.67	7.86	6.36	6.10	5.44

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Padangsidempuan	7.45	7.18	7.76	7.57	7.17
Kota Gunungsitoli	5.94	4.80	3.65	3.67	3.3
Sumatera Utara	6.91	6.33	6.16	5.89	5.6

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Angka, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 adalah 3,24% merupakan TPT yang relatif cukup sedang dibandingkan dengan 33 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, dengan TPT paling tinggi adalah di Kota Medan (8,67%). Berbagai upaya kebijakan perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada 20 (dua puluh) tahun ke depan, antara lain dengan Program Diversifikasi Kegiatan Ekonomi di Sektor Pengolaha Industri dan Jasa, Program Peningkatan Keterampilan Kerja, Program Kewirusahaan Pemuda dan pendirian Sentra Pelayanan Publik untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja pelayanan perijinan.

Pada prinsipnya pembangunan ketenagakerjaan salah satunya melalui Pendidikan secara umum dan keterampilan ditujukan untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini karena tenaga kerja selain penting peranannya dalam proses produksi juga merupakan subyek dari objek pembangunan suatu wilayah. Sebagai subyek pembangunan, tenaga kerja menjadi faktor utama yang menggerakkan proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai obyek pembangunan, tenaga kerja merupakan sasaran akhir bagi peningkatan kesejahteraan. Sehubungan dengan hal tersebut maka pembangunan bidang ketenagakerjaan perlu dilakukan secara konsisten dan terarah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tenagakerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan perlindungan tenaga kerja melalui sistem pengawasan ketenagakerjaan yang efektif.

g. Indeks Pembangunan Manusia

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu.

Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) menurut UNDP didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM adalah salah satu ukuran pencapaian hasil pembangunan dari suatu wilayah dalam tiga dimensi yang mendasar pada pembangunan yaitu:

- 1) Hidup sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran (Angka Harapan Hidup);
- 2) Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah atas *gross enrollment ratio* (bobot satu per tiga) (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), dan
- 3) standard kehidupan yang layak yang diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto perkapita dalam paritas daya beli (Pengeluaran Perkapita).

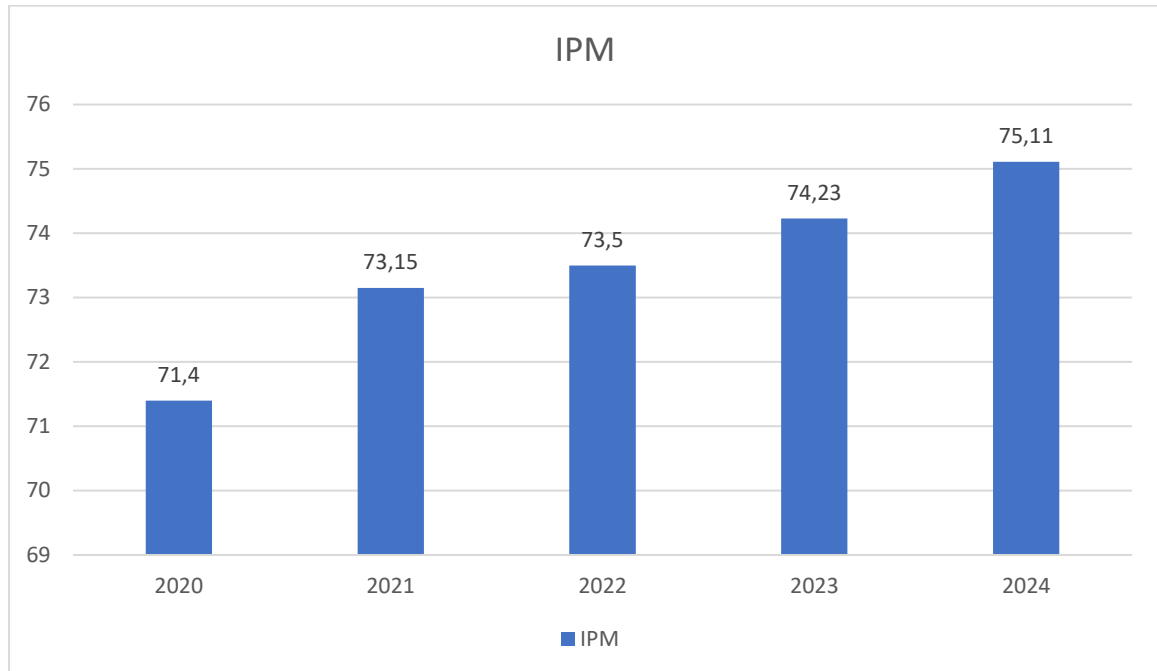
Manfaat pengukuran indeks ini adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah tergolong wilayah yang maju, berkembang atau sebaliknya, sekaligus mengukur efektivitas kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Semakin tinggi nilai IPM mencerminkan pencapaian pembangunan manusia yang semakin baik. Perkembangan IPM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.55 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
IPM	72,86	73,15	73,59	74,23	75,11
AHH	68,71	71,84	72,14	72,46	72,71
HLS	13	13,01	13,12	13,42	13,53
RLS	8,75	8,90	8,92	8,93	
Pengeluaran perkapita (Ribu rupiah / orang /tahun)	11.495	11.562	11.751	11.950	

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, BPS Provinsi Sumatera Utara diolah

Grafik 2.18 IPM Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam 10 tahun terakhir



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diolah

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, level IPM Labuhanbatu Selatan di bawah IPM Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional. Namun capaian IPM Kabupaten Labuhanbatu Selatan selalu mengalami kenaikan, akan tetapi masih berada di bawah IPM Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Hal tersebut disebabkan rendahnya kenaikan setiap dimensi penyusunnya terutama standar hidup layak dan pengetahuan, meliputi Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita. Oleh karena itu perencanaan infrastruktur, layanan dan tata Kelola terhadap aspek yang dapat meningkatkan dimensi penyusun IPM secara lebih optimal.

Tabel 2.56 Perkembangan IPM/HDI Kab.Labuhanbatu Selatan dan Provinsi SUMUT dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Tahun	Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	Nasional
2020	72,86	73,62	72,81
2021	73,15	73,84	73,16
2022	73,59	74,51	73,77
2023	74,23	75,13	74,39

2024	75,11	75,76	75,02

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara 2024 dan BPS Tahun 2025

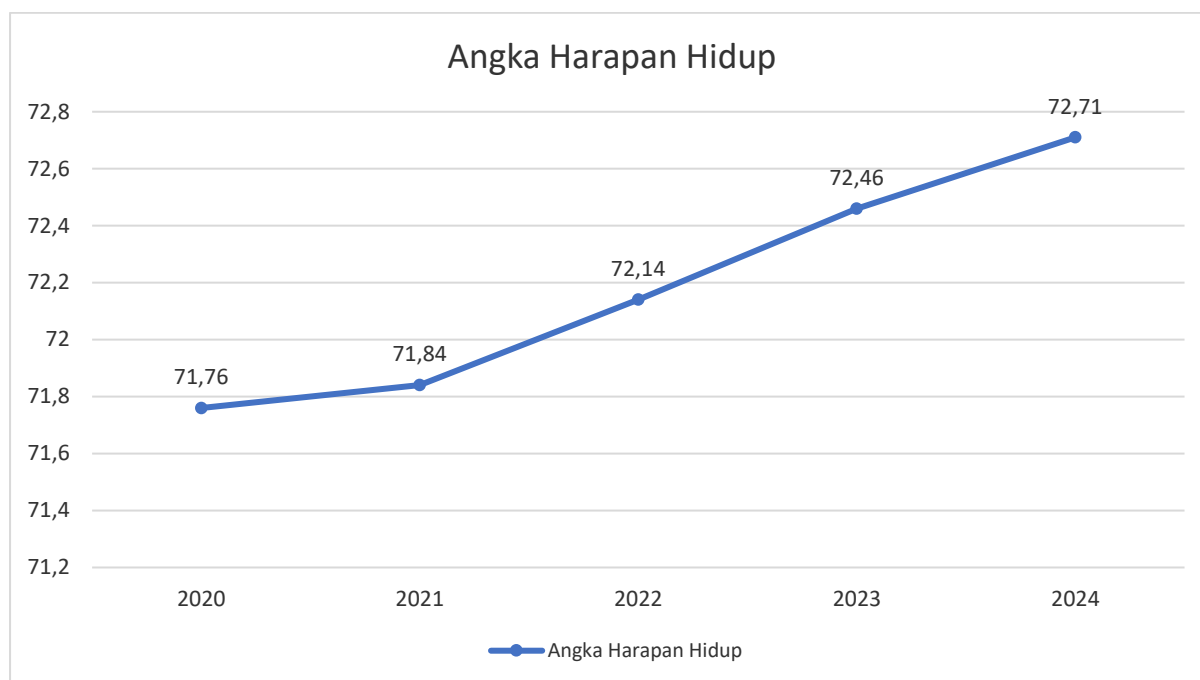
Pembangunan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menunjukkan adanya hasil positif terhadap serangkaian usaha dan kebijakan yang meningkatkan taraf hidup masyarakat yang diukur dari peningkatan pertumbuhan PDRB dalam 10 tahun terakhir, penurunan gini ratio, penurunan angka kemiskinan dan kedalaman kemiskinan. Capaian positif ini tidak lepas dari catatan perbaikan untuk terus memberikan perbaikan taraf hidup masyarakat dengan mempertimbangkan pemertaan kesejahteraan. Hal ini berkaitan dengan pemerataan capaian yang mendukung perbaikan ekonomi yaitu, distribusi PDRB, gini ratio, penurunan angka kemiskinan dan kedalaman kemiskinan. Langkah intervensi dalam pemertaan hal tersebut melalui memperluas lapangan kerja dan pemerataan akses masyarakat dalam mengelola sumber daya alam serta faktor produksi lainnya.

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu diperhatikan terkait kualitas perkembangan manusia dengan penanganan terhadap program yang menyentuh langsung kemasyarakat khususnya kualitas sumber daya manusia. Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan dan kunci tercapainya kesejahteraan. Indikator tercapainya kesejahteraan sosial dilihat dari Angka Harapan Hidup, Kesehatan keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender dan ketenagakerjaan.

a) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Berdasarkan grafik AHH dalam kurun waktu 10 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2024 AHH Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan angka 72,71 tahun. Tingginya AHH ini membutuhkan kebijakan penanganan lansia yang komprehensif, hal tersebut akan berkaitan pada peluang banyaknya penduduk yang memenuhi AHH mengindikasikan jumlah lansia akan semakin meningkat setiap tahunnya. Jika tidak diantisipasi jumlah lansia yang tidak produktif kedepannya akan menjadi beban dependensi rasio bagi penduduk usia.

Grafik 2.19 Angka Harapan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diolah

Tabel 2.57 Perbandingan AHH Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional 2020-2024

Tahun	Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	Nasional
2020	71.76	73	71,47
2021	71.84	73.1	71,57
2022	72.14	73.39	71,85
2023	72,46	75,13	73,39
2024	72,71	75,76	74,15

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS

Jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, level IPM Labuhanbatu Selatan masih di bawah AHH Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Selaras dengan nilai IPM Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan AHH namun masih tergolong rendah. Berdasarkan data angka tersebut pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki salah satu focus

untuk dalam perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan yang menunjang harapan hidup melalui upaya diantaranya, perbaikan layanan dan fasilitas Kesehatan dan program pemberdayaan terhadap lansia.

Angka Kematian Ibu (AKI) dan **Angka Kematian Balita (AKB)** di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan catatan data periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi yang relatif membaik yaitu mengalami penurunan.

Tabel 2.58 Angka Kematian Ibu dan Balita Labuhanbatu Selatan 2020-2024

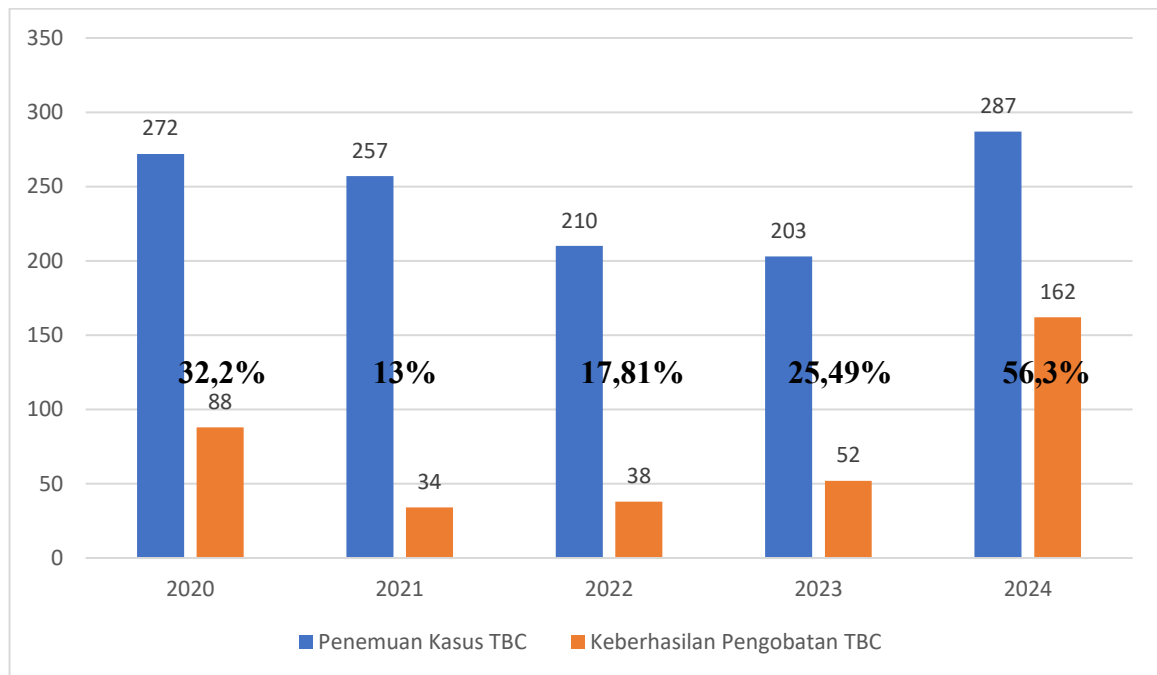
Indikator	2021	2022	2023	2024
Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)	114	25,04	25,43	38,1
Angka kematian balita (per 1.000 kelahiran)	2,1	0,36	1	0,89

AKI di Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 sebanyak 114 kasus dari 100.000 kelahiran hidup namun pada tahun 2022-2024 terus mengalami perbaikan hingga tahun 2024 mencapai angka 38,1 per 100.000 kelahiran hidup. Target nasional Tahun 2020-2024 mengamanatkan agar AKI dapat ditekan menjadi 60,8 per 100.000 kelahiran, hal ini menunjukkan bahwa AKI Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah memenuhi target nasional. Beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi AKI diantaranya kunjungan antenatal, Riwayat komplikasi, kekurangan darah, akses terhadap fasilitas Kesehatan, kualitas sarana dan prasarana Kesehatan, sosial ekonomi dan gizi. Penyebab ini menjadi perhatian untuk dapat dilakukan intervensi untuk terus dapat menekan angka kematian ibu.

Demikian juga yang terjadi pada AKB di Labuhanbatu Selatan, tahun 2021 menjadi periode dengan capaian tertinggi yaitu 2,1 per 1.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2022-2024 terus mengalami perbaikan hingga capaian tahun 2024 adalah 0,9 per 1.000 kelahiran. Adapun faktor penyebab kematian bayi antara lain gangguan pernafasan dan jantung, kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan komplikasi kehamilan.

Penemuan kasus penderita TBC berdasarkan data, penderita kasus TBC Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2020 s.d 2024 mengalami fluktuasi yaitu 272 kasus tahun 2020, 257 kasus tahun 2021, 210 kasus tahun 2022, 203 kasus tahun 2023 dan 287 kasus tahun 2024. Data terkait **keberhasilan pengobatan** mengalami fluktuasi dengan tren yang cenderung terus mengalami perbaikan.

Grafik 2.20 Penemuan dan Kesembuhan TBC Labuhanbatu Selatan 2020-2024



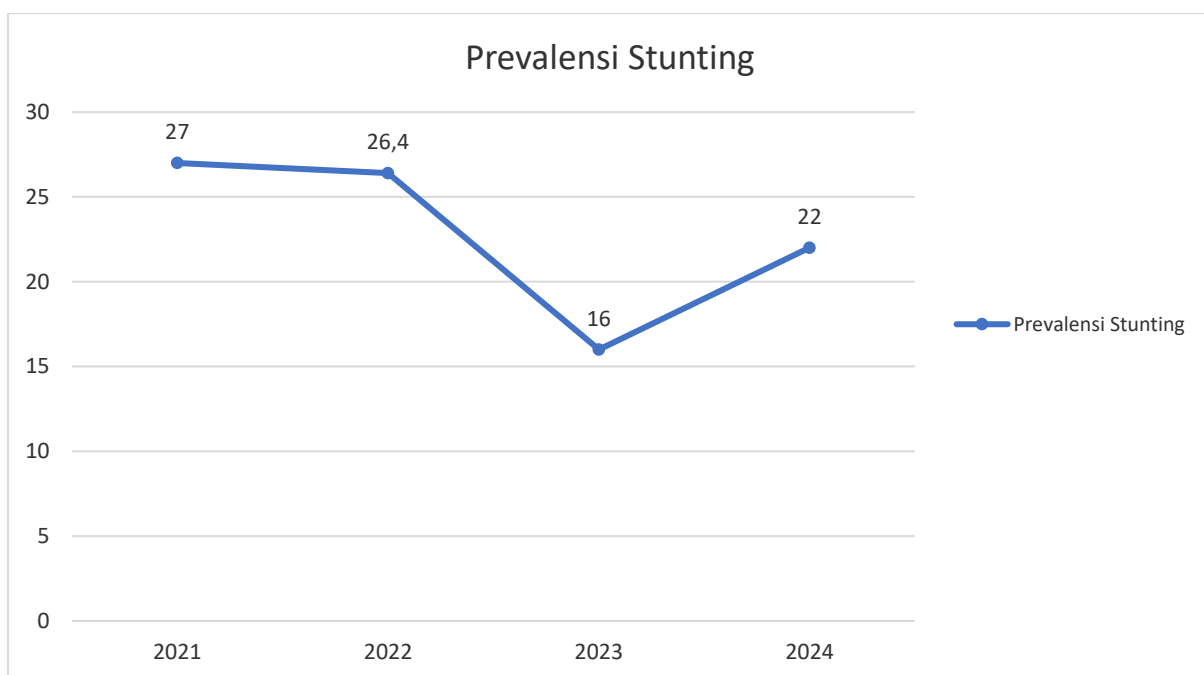
Berdasarkan data, keberhasilan pengobatan TBC terus mengalami tren kenaikan yang menunjukkan upaya peningkatan sarana dan prasarana serta kesadaran Kesehatan masyarakat ikut meningkat. Peningkatan penemuan dan kesembuhan TBC diperlukan untuk mencapai pembangunan masyarakat yang berkelanjutan melalui peningkatan akses sarana prasarana maupun peningkatan kesadaran hidup sehat masyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang sehat.

b) Prevelensi Stunting

Prevalensi stunting di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020 hingga 2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 mencatat angka stunting paling besar mencapai 27 dan angka terendah tercatat pada tahun 2023 yaitu mencapai 16. Namun mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2024 hingga angka 22. Kasus stunting pada balita umumnya terjadi karena tidak ada makanan (faktor kemiskinan) dan ada makanan tetapi tidak diasupkan (faktor perilaku dan pola asuh). Dari kasus stunting

balita di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagian besar karena faktor kemiskinan, sedangkan penyebab lainnya karena perilaku dan pola asuh anak yang salah. Penyebab terjadinya kasus stunting ini biasanya terjadi karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang pemberian makanan pada bayi dan balita dengan menu gizi seimbang. Selain itu, pengaruh lainnya dari kurangnya pengawasan orang tua dalam hal pola asuh/tumbuh kembang balita, karena mempercayakan pengasuhan anak pada asisten rumah tangga atau orang terdekat lain. Hal ini menyebabkan munculnya masalah kurang gizi pada balita, oleh karena itu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dapat memberikan kebijakan yang menjamin Kesehatan dan gizi ibu hamil melalui pemenuhan sarana prasarana dan kemudahan aksesnya serta ketersediaan pangan untuk setiap rumah tangga terutama ibu hamil.

Grafik 2.21 Prevalensi Stunting Kabupaten Labusel Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diolah

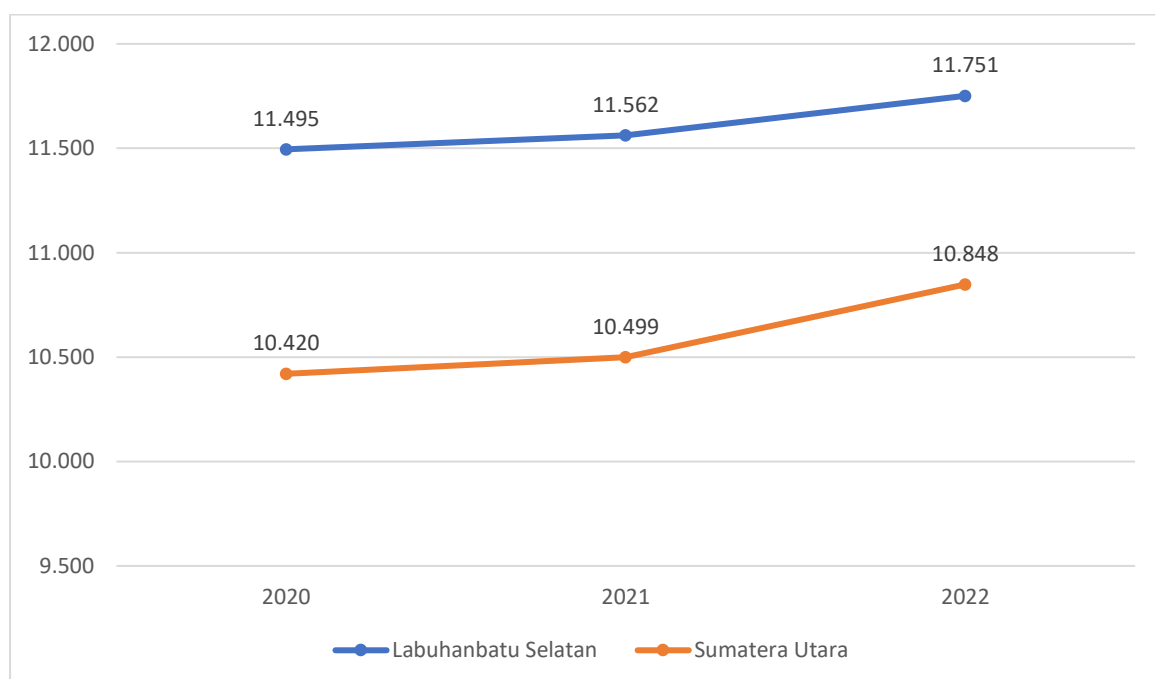
c) Pengeluaran per Kapita

Dimensi terakhir dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah standar hidup layak, yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita (PPP) yang disesuaikan, atau dikenal juga sebagai daya beli masyarakat. Indikator ini mencerminkan seberapa besar kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari, baik berupa barang maupun jasa, serta menjadi gambaran umum atas kondisi ekonomi rumah tangga.

Daya beli masyarakat menjadi ukuran penting dalam menilai sejauh mana penduduk dapat menikmati hasil pembangunan, termasuk dalam mengakses pangan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan dasar lainnya. Semakin tinggi daya beli, semakin besar pula potensi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Grafik 2.22 Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diolah

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus meningkat setiap tahunnya. Data ini berkontribusi pada tingkat IPM Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

2.1.2.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Harapan Lama Sekolah

HLS mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun keatas). HLS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun ke tahun

terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 sebesar 13,42 tahun yang mengindikasikan anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 13,42 tahun atau setara dengan tingkat I di Perguruan Tinggi (PT). Ukuran HLS yang tinggi cenderung berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup termasuk peningkatan pendapatan, kesempatan kerja yang lebih baik, dan akses yang lebih baik ke sumber daya.

Grafik 2.23 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diolah

Tabel 2.59 Perbandingan HLS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional 2020-2024

Tahun	Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	Nasional
2020	13	13.23	12,98
2021	13.01	13.27	13,08
2022	13.12	13.31	13,10
2023	13,42	13,48	13,15
2024	14,25	13,49	13,21

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Tahun 2025

Berdasarkan grafik perbandingan HLS dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, maka Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih di bawah rata-rata provinsi

namun sedikit diatas angka Nasional. Hal ini menjadi perhatian pentingnya bagi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk bekerja sama dengan pemerintah Sumatera Utara melalui identifikasi faktor-faktor dan mengembangkan strategi yang sesuai dengan konteks daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Dengan demikian, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat mencoba untuk terus ditingkatkan hingga melebihi harapan lama sekolah yang ada di tingkat provinsi maupun nasional dalam jangka waktu yang lebih lama. Selain itu berdampak pada peningkatan kualitas hidup termasuk peningkatan pendapatan, kesempatan kerja yang lebih baik, dan akses yang lebih baik ke sumber daya.

b. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka melek huruf dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial dan kemajuan pendidikan suatu wilayah karena diasumsikan bahwa dengan adanya kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan. Angka melek huruf adalah kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca-tulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2017 sudah mencapai 95,5 % yang artinya bahwa 95,5 % penduduk dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sudah dapat membaca. Pada tahun 2018, Angka Melek Huruf meningkat menjadi 95,7 % dan mengalami fluktuasi pada tahun 2020 hingga 2022 dengan Angka Melek Huruf terbesar pada level 99,71 % pada tahun 2021.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui kualitas sistem pendidikan pada suatu wilayah tertentu. Rata-rata Lama Sekolah yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan sistem pendidikan dan program sosial lainnya termasuk program pemberantasan kemiskinan. Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai Rata-rata Lama Sekolah yang terus mengalami peningkatan dari kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dimana pada tahun 2019 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencapai 8,74 tahun dan meningkat menjadi 8,93 tahun pada 2023.

Tabel 2.60 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Labuhanbatu Selatan	8,74	8,75	8,90	8,92	8,93
Sumatera Utara	9,45	9,54	9,58	9,71	9,82
Nasional	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2024

Jika dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara yang berada di kisaran 9,12 tahun pada 2016 sampai 9,82 tahun pada 2023, maka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih berada di bawah Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan dengan angka Nasional, Kabupaten Labuhanbatu Selatan lebih tinggi. Kondisi ini bisa dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk bisa menyusun dan menjalankan program di bidang kesejahteraan agar dapat meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Angka Pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2022 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mayoritas telah menamatkan jenjang bersekolah SD/MI/ sederajat hingga SMA/ sederajat dengan persentase mencapai 89,02 persen dengan rincian bersekolah SD/MI/ sederajat dengan persentase sebesar 26,9 persen, bersekolah SMP/MTs/ sederajat sebesar 21,21 persen, bersekolah di SMA/SMK/MA/ sederajat sebesar 40,91 persen. Ketercapaian ini masih perlu ditingkatkan untuk dapat memaksimalkan bonus demografi yang muncul dikemudian hari, sehingga Langkah untuk dapat menumbuhkan kesadaran serta keterjangkauan akses pelayanan dasar pendidikan perlu dipastikan untuk setiap kecamatan.

RLS dan HLS dapat merepresentasikan partisipasi pendidikan dan sistem pendidikan di Labuhanbatu Selatan, namun belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pendidikan di Labuhanbatu Selatan. Dalam menggambarkan kualitas pendidikan dalam hal mutu dan pemerataan pendidikan, digunakan hasil asesmen nasional yang menilai AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) yaitu **Literasi Membaca dan Numerasi**. Berdasarkan data, capaian angka literasi dan numerasi untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Labuhanbatu Selatan periode tahun

2021 hingga 2023 selalu mengalami perbaikan setiap tahun namun mengalami koreksi pada tahun 2024.

Tabel 2.61 Angka Literasi dan Numerasi Labuhanbatu Selatan 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
SD				
Angka Literasi	1,59	1,63	85,61	64,21
Numerasi	1,5	1,53	74,08	44,45
SMP				
Angka Literasi	1,6	1,66	98,07	62,1
Numerasi	1,55	1,62	96,25	57,75

Sumber: Labuhanbatu Selatan, 2025

Secara umum capaian akhir tahun 2024 angka literasi dan numerasi Labuhanbatu Selatan mencapai kategori sedang, sesuai dengan klasifikasi capaian pada presentase 40%-70%. Berdasarkan data tersebut, mengindikasikan bahwa kemampuan siswa dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan masih perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi perhatian mengingat Labuhanbatu Selatan akan mendapatkan bonus demografi, sehingga Langkah peningkatan angka literasi dan numerasi dapat ditingkatkan untuk menghasilkan masyarakat yang terpelajar untuk dapat menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Lebih jauh dari itu dapat membangun pondasi dasar Pendidikan masyarakat untuk dapat menjadi SDM yang terampil dan berdaya saing.

Pembangunan Literasi Masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat untuk membangun budaya literasi masyarakat. Berdasarkan data, capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Labuhanbatu Selatan tercatat pada tahun 2023 dan 2024 dengan masing-masing capaian 52,29 dan 71,63. Dengan capaian tersebut, tingkat literasi masyarakat labuhanbatu selatan cukup tinggi dan diharapkan dapat membantu menumbuhkan kemampuan siswa dalam berpikir

menggunakan konsep, prosedur, fakta. Capaian ini diukur berdasarkan 7 variabel yaitu (1) pemerataan layanan perpustakaan, (2) ketercukupan koleksi, (3) ketercukupan tenaga perpustakaan, (4) tingkat kunjungan masyarakat, (5) perpustakaan ber SNP, (6) keterlibatan masyarakat pada kegiatan perpustakaan dan (7) anggota perpustakaan. Berdasarkan capaian tahun 2024, Langkah intervensi dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai variabel yang belum maksimal yaitu penambahan tenaga perpustakaan melalui pembukaan formasi, penambahan koleksi perpustakaan melalui kolaborasi dengan sektor akademisi dan penerbit serta peningkatan kunjungan masyarakat melalui kegiatan interaktif maupun kemudahan akses perpustakaan.

Dalam meningkatkan angka Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan salah satunya melalui keterjangkauan akses pelayanan dasar pendidikan perlu dipastikan untuk setiap kecamatan. Selain keterjangkauan akses, sebagai upaya dalam meningkatkan mutu peserta didik yang akan dicetak, perlu diperhitungkan rasio perbandingan jumlah guru dengan jumlah siswa pada setiap jenjang. Hal ini mempengaruhi tingkat fokus siswa dan pengajar untuk dapat melakukan pengajaran dan menerima materi yang disampaikan oleh tenaga pengajar.

Tabel 2.62 Ketersediaan Sekolah Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
Sungai Kanan	20	41	23	15
Torgamba	51	77	41	30
Kotapinang	32	42	15	9
Silangkitang	13	22	9	10
Kampung Rakyat	38	47	17	13
Total	154	229	105	77

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2025

Tabel 2.63 Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan/Kecamatan	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid
SD			
Sungai Kanan	489	6434	13,15746421
Torgamba	821	12281	14,95858709
Kotapinang	533	7551	14,16697936
Silangkitang	227	2541	11,1938326
Kampung Rakyat	478	7648	16
SMP			
Sungai Kanan	305	1987	6,514754098
Torgamba	471	5311	11,27600849
Kotapinang	254	3311	13,03543307
Silangkitang	129	1173	9,093023256
Kampung Rakyat	215	3385	15,74418605
SMA			
Sungai Kanan	213	2948	13,84037559
Torgamba	385	5030	13,06493506
Kotapinang	183	3568	19,49726776
Silangkitang	138	1727	12,51449275
Kampung Rakyat	180	2901	16,11666667

Berdasarkan data 2024, ketersediaan sekolah dengan jumlah murid di Kabupaten Labuhanbatu Selatan relative cukup memenuhi secara merata pada setiap kecamatan. Hal ini dapat dilihat juga melalui perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid dengan hasil seluruh jenjang pada setiap kecamatan masih dibawah 20.

Angka ini dapat membantu tenaga pengajar untuk mendidik siswa secara lebih optimal dan fokus. Kondisi Pendidikan setiap kecamatan yang ada saat ini sudah cukup baik, sebagai respon dan mempersiapkan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berdaya saing, akan mempertimbangkan pengadaan sarana, prasarana serta pelatihan keterampilan tambahan secara merata pada setiap kecamatan untuk masa mendatang.

2.1.2.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Kondisi perlindungan sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah berjalan namun masih dihadapkan pada persoalan pemerataan dikarenakan belum akuratnya penerima manfaat sehingga belum menjangkau seluruh penduduk rentan. Hal ini dikarenakan belum adanya sistem yang terintegrasi sehingga data mutakhir belum terakomodir, meskipun dari sisi cakupan telah memadai jika diakumulasikan baik yang berasal dari sumber pembiayaan APBN maupun APBD. Sebagai upaya peningkatan penerima bantuan sosial tepat sasaran, diperlukan mekanisme verifikasi yang ketat melibatkan pemanfaatan integrasi data yang mutakhir. Selain itu sebagai upaya optimalisasi menekan angka miskin, bantuan yang sifatnya bantuan sosial konsumtif akan dialihkan untuk menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi yang diharapkan dapat berkelanjutan, diikuti dengan pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha. Sehingga diharapkan perlindungan sosial melalui program ini dapat menjangkau seluruh penduduk meliputi masyarakat rentan untuk dapat keluar dari garis kemiskinan dan secara adaptif saat kondisi darurat dapat menjangkau penduduk terutama kelompok rentan terdampak untuk dapat penghidupan layak.

Cakupan Jaminan Kesehatan Labuhanbatu Selatan 2024 telah mencapai angka 93% dari cakupan tahun 2020 yang mencapai 60,52%. Hal ini menjadi catatan baik dimana cakupan jaminan Kesehatan menjadi salah satu tolak ukur untuk memastikan masyarakat dapat membantu akses Kesehatan. Selain itu juga diharapkan agar dapat ditingkatkan mencakup minimal 95 persen dari total jumlah penduduk yang sifatnya inklusif, untuk semua segmen masyarakat termasuk kelompok disabilitas, kelompok rentan dan kelompok yang terabaikan, tidak bias gender, serta mencakup semua kebutuhan pelayanan dasar yang merata bagi semua individu masyarakat Labuhanbatu Selatan.

Selain itu perlindungan sosial dapat dilihat berdasarkan **cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja** sebagai perlindungan kepada pekerja dan keluarganya dari resiko sosial ekonomi yang berkaitan dengan pekerjaan seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan kehilangan pekerjaan. Berdasarkan data, capaian cakupan kepesertaan ini pada tahun 2023 dengan angka 23.887 peserta atau setara dengan 28,08% terhadap keseluruhan jumlah buruh/karyawan/pegawai. Nilai capaian tersebut masih tergolong rendah, diharapkan agar dapat ditingkatkan melalui perencanaan kebijakan terhadap penyedia kerja oleh pemerintah. Sehingga perlindungan kepada pekerja dan keluarganya dari resiko sosial ekonomi dapat dirasakan merata bagi pekerja masyarakat Labuhanbatu Selatan

2.1.2.4. Bergama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Agama yang dianut, mayoritas penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah muslim, diikuti dengan Kristen (protestan dan katolik), buddha dan konghucu. Salah satu upaya untuk memperkuat karakter masyarakat adalah dengan memperkuat landasan spiritual, etika, dan moral yang diharapkan akan memberikan dampak pada terciptanya kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilihat dari adanya dialog antar tokoh agama yang telah dilakukan dengan membentuk forum kerukunan umat beragama Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam menjaga ketahanan sosial dan kerukunan kebijakan dibutuhkan untuk optimalisasi nilai agama dan budaya melalui program lintas agama yang melibatkan tokoh. Lebih dari itu pelibatan masyarakat dengan perbedaan agama untuk penyelenggaraan pengembangan Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi melalui pembentukan komunitas. Sehingga seluruh masyarakat dengan berbagai latar belakang agama dapat berkolaborasi dalam kontribusi pembangunan daerah dan menjaga kerukunan melalui keberagaman.

2.1.2.5. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

Indeks Keluarga Sehat memegang peranan penting dalam pembangunan jangka panjang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sebagai indikator komprehensif yang mengukur berbagai aspek kesehatan dan kesejahteraan keluarga, indeks ini memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan kesehatan dan kesejahteraan di tingkat lokal, yang sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kebijakan publik. Secara keseluruhan, Indeks Keluarga Sehat merupakan alat penting yang

membantu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam merancang strategi pembangunan jangka panjang yang holistik, terfokus pada kesehatan, dan berkelanjutan, dengan mengutamakan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup keluarganya. Namun sayangnya, data terkait Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya terdata tahun 2017 dan 2023 dengan nilai 0,071 (2017) dan 0,15 (2023) yang masuk dalam kategori keluarga tidak sehat. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah Labuhanbatu Selatan untuk dapat mendorong peningkatan pembangunan pada 12 indikator dari IKS meliputi aspek Kesehatan fisik, mental, social dan lingkungan.

Berdasarkan perencanaan, pemerintah Labuhanbatu Selatan berupaya melalui program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. Upaya ini dilakukan dengan melakukan intervensi terhadap aspek pendayagunaan dan peningkatan kapasitas mitra kerja dan organisasi kemasayarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPPKS), penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan, serta pemberian rehabilitasi sosial terhadap keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis.

Peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Semangat mewujudkan pemberdayaan perempuan untuk pembangunan gender ditunjukkan dari rasio peningkatan peran kesetaraan gender dan pembinaan organisasi maupun perempuan dalam organisasi yang mencapai presentase >90%. Untuk dapat melihat peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintah maupun swasta.

Tabel 2.63 Indikator Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah (%)	38,97	59,93	69,75	70,6	74,82
Partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	31,37	33,19	34,59	38,20	36,20
Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak	75	80			

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

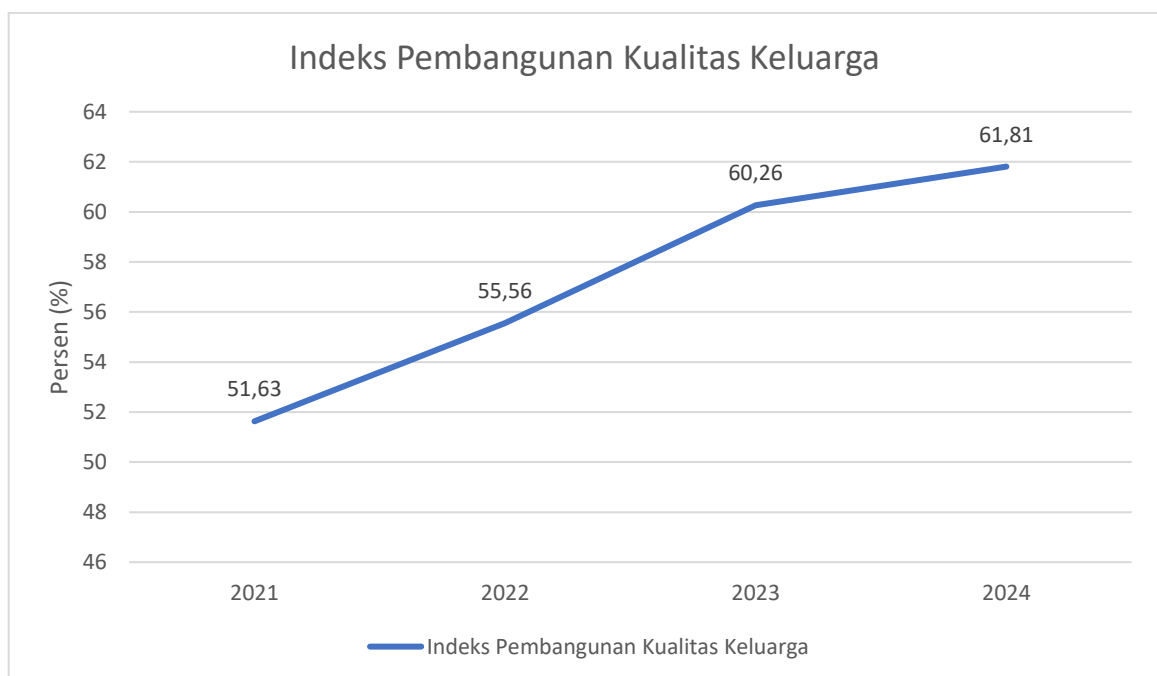
Indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah indikator yang diukur dengan membandingkan jumlah ASN perempuan Pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun N dengan seluruh pekerja perempuan (ASN) perempuan dan pekerja perempuan di perusahaan formal) Tahun N. Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2020 tercatat Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 38,97% dan terus meningkat hingga mencapai 74,82%% pada tahun 2024. Begitu pula halnya dengan Partisipasi angkatan kerja perempuan yang mencapai 31,37% pada tahun 2020 dan secara konsisten naik hingga tahun 2023 hingga angka 38,20%. Berdasarkan capaian data tersebut, tingkat keterlibatan perempuan dalam pembangunan terus mengalami peningkatan baik dari ranah pemerintahan maupun pekerjaan sektor swasta. Hal ini memberikan dampak positif yang membuka kesempatan bagi peningkatan kesetaraan gender di Labuhanbatu Selatan.

Disisi lain, data peningkatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak tergambarkan tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan data capaian peningkatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak mengalami perbaikan hingga mencapai 80% pada tahun 2021. Realisasi kelembagaan PUG dan hak anak ini menunjukkan komitmen Labuhanbatu Selatan untuk memberikan keleluasaan dan memastikan keamanan yang didapatkan perempuan dan anak untuk merasakan hak yang sama dalam menerima dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

Selaras dengan kondisi data di atas, perkembangan **Indeks Perlindungan Anak (IPA)** juga mengalami perkembangan secara konsisten selama periode 2021 hingga 2023. Tercatat tahun 2021 IPA sebesar 59,49 meningkat menjadi 63,27 di tahun 2023. Meskipun demikian, capaian ini masih mengkategorikan cukup rendah meskipun IPA tahun 2023 telah mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2021. Oleh karena itu, Langkah peningkatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak menjadi salah satu variabel yang perlu ditingkatkan agar angka IPA juga bergerak secara simultan.

Pembangunan kualitas keluarga sebagai komunitas terkecil dalam masyarakat menjadi salah satu pendekatan penting dalam pembentukan sumber daya manusia berkarakter melalui pendekatan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga diukur berdasarkan 3 dimensi utama yaitu Ketentraman Keluarga, Kemandirian Keluarga dan Kebahagiaan Keluarga. Berdasarkan data, Labuhanbatu Selatan selama periode 2021 s.d 2024 kinerja pembangunan keluarga secara konsisten mengalami peningkatan.

Tabel 2.24 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Labuhanbatu Selatan 2021-2024



Capaian kinerja Pembangunan Keluarga ini termasuk dalam kategori cukup baik/berkembang yang masuk dalam rentang 40-70%. Adapun demikian Pembangunan keluarga sebagai unit terkecil dan pintu masuk bagi pembangunan sumber daya manusia menghadapi kondisi yang perlu untuk terus mendapat

perhatian. Hal tersebut dapat diintervensi sesuai dengan 3 dimensi utama pembangunan keluarga yaitu **Ketenteraman** meliputi kondisi kerohanian, legalitas keluarga, jaminan Kesehatan dan keharmonisan keluarga, **Kemandirian** meliputi kebutuhan dasar tercukupi, jaminan keuangan, akses terhadap Pendidikan, Kesehatan dan akses informasi serta **Kebahagiaan** interaksi antar anggota keluarga dan interaksi sosial.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Pada tahun 2024 IPG Kabupaten Labuhanbatu Selatan tercatat sebagai capaian tertinggi selama periode 2020-2024 yaitu sebesar 88,9 yang terus naik secara konsisten tahun 2020-2022 namun mengalami koreksi pada tahun 2023 dengan angka capaian 75,13. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah cukup setara antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding IPM. Dalam hal menjaga dan meningkatkan inklusivitas pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pemerintah akan mengambil Langkah-langkah strategis untuk memberikan ruang serta pengembangan secara menyeluruh dalam pembangunan daerah.

**Tabel 2.64 Indeks Ketimpangan dan Pembangunan Gender
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Uraian Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketimpangan Gender	0,563	0,533	0,514	0,5	0,52
Indeks Pembangunan Gender	87,43	87,61	87,98	75,13	88,9

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indeks pencapaian ketimpangan yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dengan dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi. Berdasarkan data tahun 2020-2023 Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara konsisten mengalami penurunan, dimana tahun 2020 IKG Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencapai 0,563 dan pada tahun 2022 mencapai 0,514, namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan hingga mencapai angka 0,52. Hasil tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menekan ketimpangan gender dan memberikan perbaikan terhadap pelayanan serta kesempatan dalam peran pembangunan daerah yang merata. Dalam upaya peningkatan tersebut dapat meningkatkan inklusivitas pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pemerintah akan mengambil Langkah-langkah strategis untuk memberikan ruang serta pengembangan secara menyeluruh dalam pembangunan daerah terutama pada aspek Kesehatan reproduksi, pemberdayaan daeran serta partisipasi pada kegiatan ekonomi.

Meskipun IPG dan IKG telah menunjukkan kinerja yang membaik namun masih terjadi kesenjangan dalam hal akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan utamanya pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta keterwakilan pada posisi strategis. Prasyarat mewujudkan kesetaraan gender yang ideal dimana perempuan menjadi berdaya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menghadapi fenomena yang melingkupi perempuan seperti diskriminasi, kekerasan, budaya patriarki, beban ganda, ketimpangan pendapatan dan posisi lemah lainnya dibanding laki-laki. Tentu hal ini perlu menjadi perhatian ke depan utamanya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta melakukan berbagai upaya untuk mereduksi posisi lemah perempuan.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

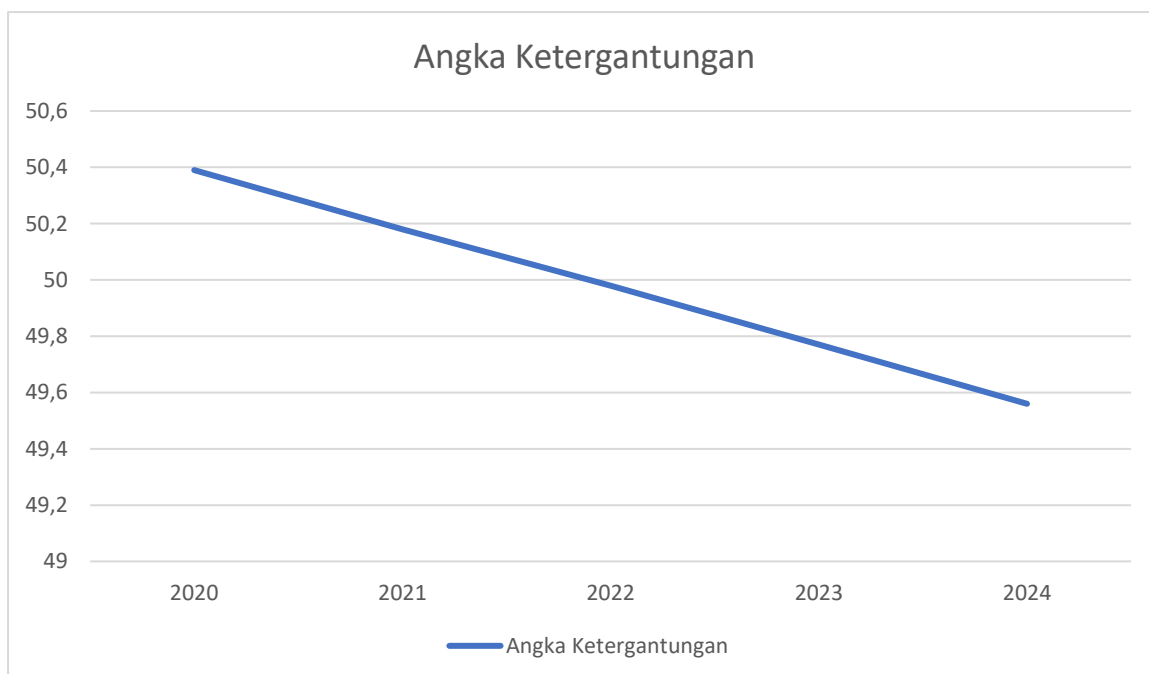
Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan mutu tenaga kerja maka

potensi peningkatan angka pengangguran bisa terjadi. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif, sebagai nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi.

Indikator yang menggambarkan ketergantungan penduduk non produktif terhadap kelompok usia produktif adalah rasio ketergantungan. Kondisi yang timpang dengan kecenderungan besarnya kelompok usia non produktif akan menyebabkan tekanan di bidang ekonomi dan sosial.

Angka ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan data terus mengalami penurunan dari tahun 2020 mencapai angka 50,39 dan tahun 2024 ada pada angka 49,56. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif menanggung 49,56 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65 keatas). Data menunjukkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami surplus demografi, yang ditunjukkan angka ketergantungan yang terus menurun.

Grafik 2.25 Angka Ketergantungan Labuhanbatu Selatan 2020-2024



Sumber : Labuhanbatu Selatan dalam Angka

Momentum ini menjadi peluang untuk dapat melakukan optimalisasi peningkatan daya saing sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan kapasitas dengan perbaikan pendidikan dan peningkatan layanan Kesehatan untuk memastikan harapan hidup masyarakat. Peningkatan kapasitas Pendidikan dilakukan pembinaan Pendidikan terhadap masyarakat dan juga pembinaan bagi pendidik maupun tenaga pendidik. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berdaya saing melalui kompetensi dan keterampilan.

a. Pembinaan Pendidikan

Tingkat partisipasi Pendidikan menjadi salah satu indikator yang dapat diukur dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tingkat Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilaksanakan berjenjang dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Tingkat partisipasi Pendidikan digambarkan berdasarkan ketersediaan fasilitas pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Kasar (APK) yang dihitung berdasarkan presentase peserta didik disetiap jenjangnya, serta rasio guru terhadap murid. Data tingkat partisipasi tersebut selama 5 tahun terakhir di lihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.65 Indikator Pendidikan

No	Uraian Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sekolah Dasar (SD)							
1	APM	98,8	99,08	98,96	99,53	99,58	99,01
2	APK	105,17	103,89	103,06	103,07	-	110,83
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	-	-	99,28	99,53	99,68	89,41
Sekolah Menengah Pertama (SMP)							
1	APM	85,99	85,99	90,68	86,12	88,61	88,94
2	APK	89,01	92,05	93,75	88,90	-	110,13
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	-	-	97,33	94,33	96,41	99,83
Sekolah Menengah Atas (SMA)							

No	Uraian Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	APM	71,75	72,62	77,39	72,56	59,54	61,58
2	APK	101,05	100,28	98,36	99,68	-	90,08
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	-	-	69,26	74,53	74,39	-

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Angka partisipasi murni SD/MI dari tahun 2019 hingga tahun 2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang cenderung meningkat. Sedangkan angka partisipasi kasar SD/MI justru terus mengalami penurunan setiap tahunnya, menunjukkan akses Pendidikan dan partisipasi Pendidikan masyarakat pada jenjang SD/MI sudah diikuti sesuai dengan usia penduduk dalam menempuh pendidikannya. Hal tersebut ditunjukkan juga dengan angka Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar yang terus meningkat setiap tahunnya.

Pada jenjang SMP/Mts berdasarkan data APM terus mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga 2021, namun mengalami penurunan tahun 2022 menjadi 86,12. Penurunan ini disebabkan dari adanya pandemic covid-19 yang masih dalam masa transisi dengan masa *new normal*. Sama halnya dengan nilai APK pada jenjang SD/MI, nilai APK jenjang SMP/Mts mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Berdasarkan data partisipasi masyarakat dalam Pendidikan usia 13-15 tahun belum mencapai angka optimal, akan tetapi dapat dipenuhi melalui sekolah non formal melalui Pendidikan yang ada disatuan Pendidikan non formal melalui PKBM. Data tersebut ditunjukkan melalui nilai APK yang cukup tinggi melampaui nilai APM serta mempengaruhi fluktuasi pada Angka Partisipasi Sekolah.

Sedangkan data APM pada jenjang SMA/SMK/MA mengalami fluktuasi yang cenderung menurun hingga data tahun 2023 dengan nilai paling rendah yaitu 59,54. Terhitung data dari tahun 2020 hingga 2023 nilai APM ini terus mengalami penurunan yang dapat disebabkan dari pandemic covid-19 yang masih dalam masa transisi dengan masa *new normal* dan adanya tuntutan untuk menanggung kebutuhan ekonomi, mengingat Pendidikan usia 16-18 tahun dapat dilalui dengan mengikuti sekolah non formal melalui Pendidikan yang ada disatuan Pendidikan non formal

melalui PKBM. Melihat fenomena ini pengadaan pelatihan keterampilan dan adanya jenjang vokasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi Langkah strategis, sebagai upaya menjawab lulusan sekolah yang tidak terserap sebagai tenaga kerja yang mumpuni.

b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pembinaan atau pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan (sekolah). Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuan, wawasan berpikir, sikap terhadap pekerjaan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Suatu program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan biasanya diselenggarakan atas asumsi adanya berbagai kekurangan dilihat dan tuntutan organisasi, atau karena adanya kehendak dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan ini yaitu:

- 1) Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan patut dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan baik untuk tenaga struktural, tenaga fungsional maupun tenaga teknis penyelenggara pendidikan.
- 2) Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan professional dan atau teknis untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan posisinya masing-masing.
- 3) Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan untuk mendorong meningkatnya kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan atau sistem sekolah; dan menyediakan bentuk- bentuk penghargaan, kesejahteraan dan insentif sebagai imbalannya guna menjamin terpenuhinya secara optimal kebutuhan sosial ekonomis maupun kebutuhan sosial-psikologi.

- 4) Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan/posisi, baik karena kebutuhan-kebutuhan yang berorientasi terhadap lowongan jabatan/posisi di masa yang kan datang.
- 5) Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sebenarnya dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja dan ketahanan organisasi pendidikan. Menyangkut pembinaan dan jenjang karir tenaga kependidikan disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis tenaga kependidikan itu sendiri. Meskipun demikian, dapat saja berjalan karir seseorang menempuh puncak karirnya.

c. Kesehatan

Peningkatan kondisi kesehatan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah dan menjadi modal daya saing untuk memastikan akses Kesehatan dapat dengan mudah didapatkan masyarakat. Salah satu kebijaksanaan dasar pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat 3 Rumah Sakit yang tersebar di dua Kecamatan, yaitu 1 rumah sakit di Kecamatan Torgamba dan 2 rumah sakit di Kecamatan Kotapinang. Kemudian terdapat 17 klinik yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu 3 klinik di Kecamatan Sungai Kanan, 9 klinik di Kecamatan Torgamba, 4 klinik di Kecamatan Kotapinang dan 1 klinik di Kecamatan Kampung Rakyat.

**Tabel 2.66 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun 2020-2024**

No	Jenis Fasilitas	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Sakit	3	3	3	3	3
2	Puskesmas	17	17	17	17	17
3	Posyandu	269	305	305	310	319
4	Klinik	22	21	21	21	17

5	Polindes	18	18	18	18	n/a

Sumber: Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2025

Berdasarkan data tersebut jumlah fasilitas Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun 2020-2024 yang mengalami fluktuasi dan penurunan yaitu klinik. Rendahnya jumlah fasilitas Kesehatan ini pada tahun 2020 saat terjadinya pandemic Covid-19. Hal tersebut terjadi pada posyandu dan polindes yang menjadi fasilitas Kesehatan yang tidak memungkinkan dilaksanakan saat pandemic covid-19. Sedangkan jumlah klinik dan puskesmas yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan cenderung stabil yaitu 17 unit puskesmas tersebar di seluruh kecamatan.

Tabel 2.67 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Dokter			Tenaga Perawat	Tenaga Bidan	Tenaga Farmasi	Tenaga Gizi
		Umum	Gigi	Spesialis				
1	Sungai Kanan	8	3	-	42	90	9	2
2	Torgamba	22	12	4	74	184	21	8
3	Kotapinang	37	13	18	140	155	28	7
4	Silangkitang	7	3	-	27	51	6	2
5	Kampung Rakyat	12	5	-	24	84	7	3
	Total	86	36	22	307	564	71	22

Sumber: Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2024

Untuk tenaga kesehatan, di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2023 memiliki 86 dokter yang tersebar di seluruh Kecamatan, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 82 orang. Sama halnya dengan dokter jumlah Perawat, di Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 307 perawat dari tahun 2023 yang mencapai angka 248 perawat di seluruh Kecamatan. Tenaga Kesehatan lainnya seperti tenaga

bidan, tenaga farmasi dan tenaga gizi juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data tahun 2023. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan jumlah tenaga kesehatan diantaranya banyaknya tenaga kesehatan yang memasuki masa purna tugas (pensiun) dan kematian sedangkan pengadaan guru baru (CPNS) jumlahnya terbatas.

Tabel 2.68 Angka Harapan Hidup

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Labuhanbatu Selatan	68,71	71,84	72,46	72,46	72,71
Sumatera Utara	69,10	73,10	73,39	73,67	73,90

Sumber: Labuhanbatu Selatan Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data tabel, angka harapan hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus meningkat. Namun jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang berada di kisaran 69,10 tahun pada 2020 sampai 73,90 tahun pada 2024, maka Angka Harapan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih berada di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ini menjadi indikasi bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk bisa menyusun dan menjalankan program di bidang kesejahteraan agar terus dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui pemenuhan fasilitas dan tenaga Kesehatan secara optimal serta merata berdasarkan kebutuhan tiap kecamatannya.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Produktivitas ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat juga dilihat dari distribusi persentase setiap sektor terhadap PDRB ADHB. Berdasarkan nilai tersebut dapat menunjukkan sektor-sektor strategis yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan nilai PDRB dan memberikan dampak terhadap serapan tenaga kerja bagi masyarakat. Data mencatat pada tahun 2024, sektor dengan distribusi persentase PDRB tertinggi yaitu industri pengolahan yang mencapai 40,89%, diikuti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 32,41% dan ketiga adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mencapai 12,74%. Akan tetapi berdasarkan data tren, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terus mengalami peningkatan terkait distribusi persentase PDRB yang dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan melalui pemberdayaan petani dan

pelaku ternak, penggunaan teknologi pertanian dan ternak serta pengendalian lahan dalam mendukung keberlangsungan tani dan ternak. Sedangkan sektor Industri Pengolahan menunjukkan stagnansi yang ditunjukkan dari nilai distribusi persentase PDRB, sehingga diperlukan inovasi penggunaan teknologi pengolahan ataupun diversifikasi produk serta menerapkan hilirisasi produk industri pengolahan untuk dapat menjaga performa kontribusi terhadap PDRB.

Tabel 2.69 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2020–2024 (%)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,47	28,32	29,57	30,81	32,41
2	Pertambangan dan Penggalian	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27
3	Industri Pengolahan	43,95	43,35	42,75	41,84	40,89
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Konstruksi	6,88	6,54	6,55	6,55	6,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,88	13,47	13,12	13,02	12,74
8	Transportasi dan Pergudangan	1,02	0,97	0,99	1,02	1,06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,87	0,79	0,76	0,76	0,75
10	Informasi dan Komunikasi	0,42	0,43	0,42	0,42	0,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87	0,84	0,85	0,82	0,79
12	Real Estat	2,60	2,45	2,37	2,24	2,18
13	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,60	1,47	1,33	1,24	1,22
15	Jasa Pendidikan	0,48	0,45	0,43	0,42	0,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,35	0,32	0,30	0,30	0,29
17	Jasa lainnya	0,09	0,08	0,08	0,09	0,08
	PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Catatan: * Angka Sementara * Angka Sangat Sementara Sumber : Labuhanbatu Selatan Dalam Angka Tahun 2025

a. Angkatan Kerja

Data pada tahun 2024, menunjukkan angkatan kerja di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah 169.642 orang atau 50,41 persen dari total penduduk, dengan rincian tingkat partisipasi Angkatan kerja mencapai 96,76% (164.144 orang) dan tingkat pengangguran mencapai 3,24% (5.498 orang). Pendidikan yang ditamatkan oleh tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja, dalam hal ini menjadi dasar pertimbangan kemampuan individu dalam melakukan pekerjaan.

Tabel 2.70 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Total	Presentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
Pendidikan Sekolah Dasar	54.009	1.248	55.347	97,75
Pendidikan Menengah Pertama	31.612	292	31.904	99,08
Pendidikan Sekolah Menengah Atas	64.142	3.535	67.677	94,78
Universitas	14.291	423	14.714	97,13
TOTAL	164.144	5.498	169.642	96,76

Berdasarkan data di atas, usia produktif yang telah bekerja masih banyak pada Pendidikan akhir sekolah menengah dan sekolah dasar. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam penyerapan tenaga kerja melalui pemenuhan Pendidikan agar

dapat ditingkatkan melalui penyelenggaraan pelatihan kejuruan dan keterampilan untuk memastikan SDM dapat terserap secara optimal untuk bekerja.

b. Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Berdasarkan data Angkatan kerja masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tingkat partisipasi Angkatan kerja mencapai 73,20% (164.193 orang) dengan status pekerjaan utama pada tabel berikut:

Tabel 2.71 Jumlah Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (Jiwa) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023-2024

Status Pekerjaan Utama	Jumlah Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (Jiwa)					
	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki+Perempuan	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Berusaha Sendiri	10,792	13,204	13,705	11,899	24,497	25,103
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	8,196	10,540	5,977	13,729	14,173	24,269
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	11,499	9,081	2,681	1,841	14,180	10,922
Buruh/Karyawan/Pegawai	59,379	54,708	25,703	20,543	85,082	75,251
Pekerja bebas	4,230	10,049	1,577	1,216	5,807	11,265
Pekerja keluarga/tak dibayar	7,371	5,160	13,083	12,174	20,454	17,334
Jumlah	101,467	102,741	62,726	61,402	164,193	164,144

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024

Berdasarkan data tersebut dapat digambarkan bahwa pekerjaan utama tertinggi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan diisi oleh sector formal sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai yang mencapai 45,85% pada tahun 2024. Jumlah pekerjaan utama sektor non-formal tahun 2024 lebih tinggi dari sektor formal, dalam upaya peningkatan kualitas perlu diberikan perhatian untuk dapat meningkatkan kapasitas untuk seluruh elemen sesuai dengan sektor masing-masing. Sehingga

setiap elemen dapat berkontribusi secara optimal pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan Selatan.

Jika melihat data penduduk bekerja menurut lapangan usaha diketahui bahwa presentase tinggi terdapat pada sector perdagangan dan jasa dengan presentase terbesar diisi oleh perempuan yang mencapai 59,63-60,23% dan diikuti dengan sector pertanian yang diisi oleh laki-laki yang mencapai 48,13-56,05%. Berdasarkan data ini kebijakan pengembangan SDM, pemberian subsidi dan pelaksanaan investasi dapat diarahkan untuk optimalisasi serapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas mutu produk, sehingga pertumbuhan positif dan berkelanjutan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat terwujud.

Tabel 2.72 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (Persen) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022-2024

Lapangan Usaha Penduduk Bekerja	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (Persen)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pertanian	48.13	56.05	59,15	31.81	32.46	26,82
Industri	13.7	11.17	8,77	7.96	7.91	6,51
Perdagangan dan Jasa	38.17	32.78	32,08	60.23	59.63	66,67
Labuhanbatu Selatan	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau

Pembangunan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan sejauh ini sudah mulai mengarah pada prinsip ekonomi hijau. Upaya peerapan ekonomi hijau yang meliputi pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial, telah diinisiasi dengan pembangunan pabrik biometana jenis compressed natural gas (bio-CNG) untuk menekan polusi pabrik kelapa sawit dan dapat dimanfaatkan untuk dapat menghasilkan energi terbarukan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang mengatur perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah sebagai

bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.1.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan peningkatan produktivitas sektor-sektor produktif serta penguatan peran sektor eksternal yang dilakukan melalui perdagangan domestik, antar wilayah, dan ekspor untuk meningkatkan partisipasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rantai nilai global. Integrasi ekonomi domestik dan global tersebut salah satunya tergambar melalui indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Dari sisi nominal, PMTB Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan dari Rp7,51 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp10,84 triliun pada tahun 2024. Berdasarkan data, pertumbuhan PMTB mengalami pertumbuhan secara konsisten setiap tahunnya yaitu tahun 2021 yang mencapai 5,9 persen terus meningkat pada tahun 2022 mencapai 7,9 persen kemudian angka meningkat paling tinggi pada tahun 2023 sebesar 12,7 persen dan tahun 2024 peningkatan melambat sebesar 8,5 persen. Dalam konteks perannya terhadap PDRB, kontribusi PMTB pada tahun 2020 sebesar 26,65 persen, kemudian mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Tahun 2021 menjadi 25,88 persen namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 25,32 persen dan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 26,38 persen. Kontribusi PMTB terhadap PDRB tersebut kembali menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 25,87 persen.

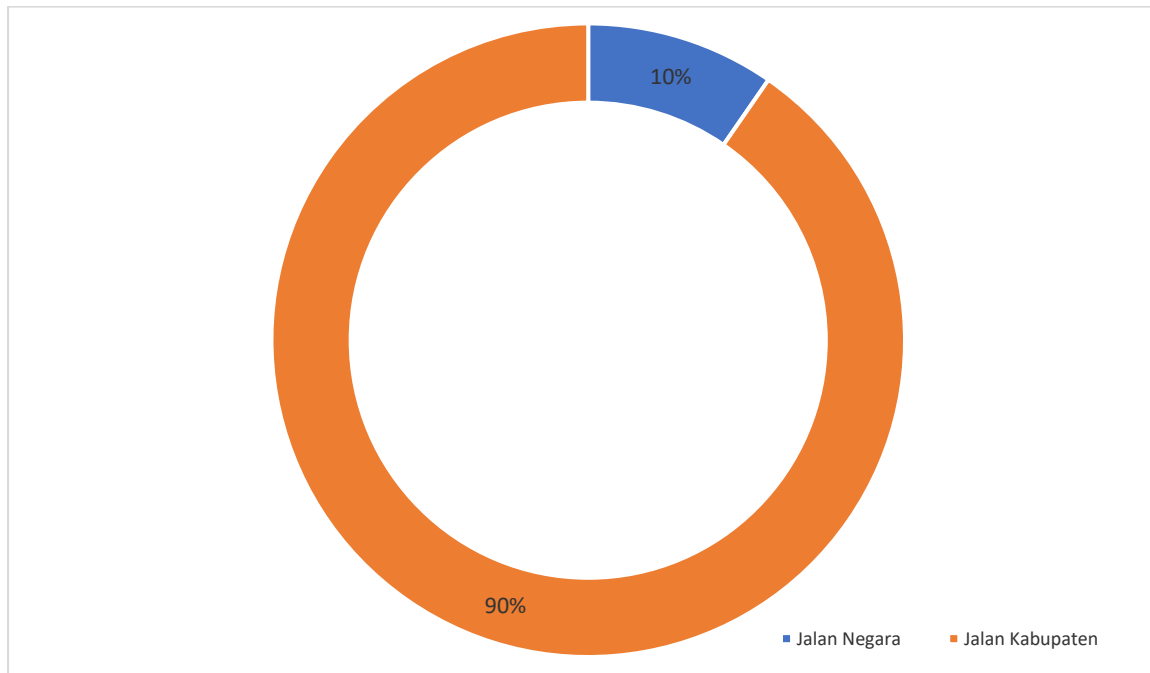
Selain itu, kondisi tersebut ditunjukkan dengan nilai Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selama lima tahun nilai ekspor barang dan jasa secara konsisten meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Nilai ekspor tahun 2020 tercatat sebesar 5,619 T, meningkat hingga menjadi 11,032 T pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan nilai ekspor antar daerah lebih besar dari nilai impornya, atau dengan perkataan lain perdagangan antar daerah dari dan ke Kabupaten Labuhanbatu Selatan selalu mengalami surplus. Peningkatan net ekspor antar daerah juga mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara total. Sehingga, ekspor antar daerah harus ditingkatkan untuk memacu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sektor ekspor komoditas perkebunan baik hasil pengolahan dan hasil panen.

2.1.3.5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan

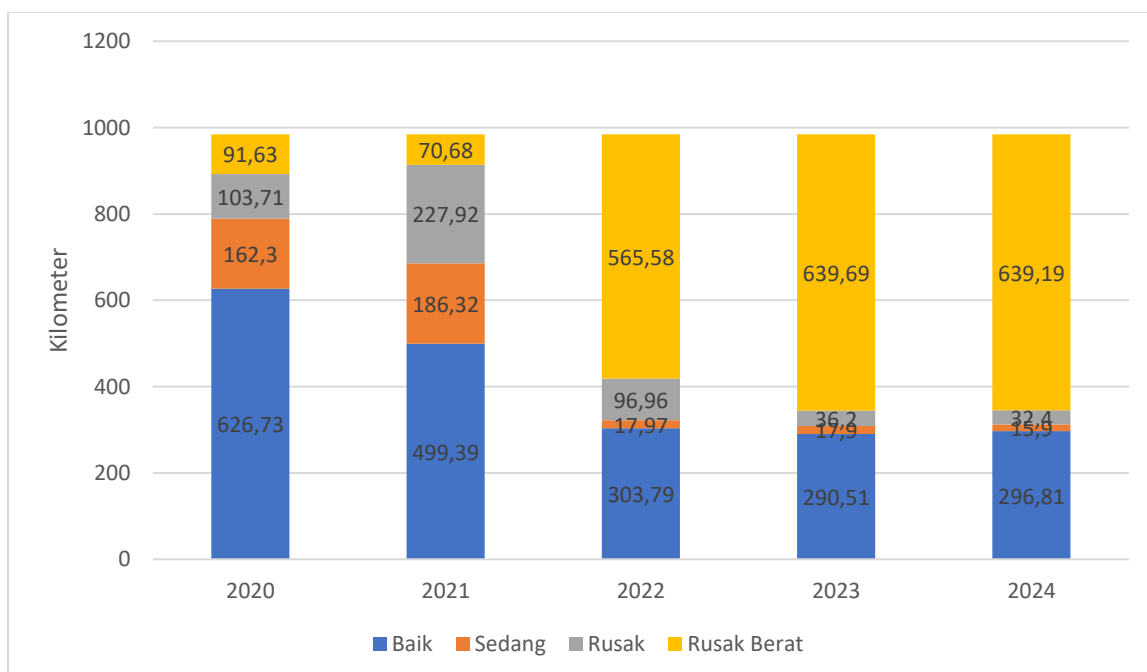
Fasilitas dan infrastruktur wilayah memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui konektivitas, efisiensi, dan produktivitas, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki focus perhatian untuk melaksanakan serangkaian peningkatan signifikan dalam kualitas dan kuantitas infrastruktur baik di perkotaan maupun perdesaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal ini mencakup pengembangan fasilitas publik, infrastruktur transportasi, infrastruktur tenaga listrik, infrastruktur telekomunikasi infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan sanitasi, akan ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup penduduk.

a. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Infrastruktur Jalan dan Jembatan Infrastruktur jalan merupakan sarana fisik yang sangat penting dalam mendukung mobilisasi penduduk dalam hal kegiatan produksi, distribusi dan sosial lainnya. Jalan merupakan infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota itu sendiri. Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat infrastruktur jalan sepanjang 1089,301 km yang terdiri dari 105 km jalan negara atau sekitar 10% panjang jalan keseluruhan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dibawah pengawasan langsung oleh pemerintah pusat sedangkan sisanya sepanjang 984,31 km merupakan jalan kabupaten atau sekitar 90% panjang jalan keseluruhan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Grafik 2.26 Panjang Jalan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Km) Tahun 2024

Sumber: Labuhanbatu Selatan Dalam Angka Tahun 2025

Grafik 2.27 Kondisi Jalan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Angka, diolah

Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten di Labuhanbatu Selatan tahun 2020-2024 tercatat secara konsisten selama 3 (tiga) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan pada kondisi jalan yang rusak. Kondisi jalan baik-sedang tinggi terjadi pada tahun 2020-2021 yang mencapai 63,67-80,16%. Namun pada tahun 2022 hingga 2024 kondisi jalan rusak-rusak berat mengalami kenaikan signifikan. Kondisi jalan ini mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pergerakan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, ekonomi serta keselamatan pengendara di jalan. Sehingga hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melakukan perbaikan kondisi jalan terutama pada jalur strategis pergerakan masyarakat dan ekonomi

Pengembangan infrastruktur yaitu pembangunan dan pemeliharaan jalan kolektor 2 dan kolektor 3 yang menghubungkan kawasan strategis, pembangunan jalan bebas hambatan ruas Labuhanbatu-Labuhanbatu selatan hingga melalui Provinsi Riau.

b. Infrastruktur Transportasi

Berdasarkan kondisi geografis, Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengandalkan transportasi darat maupun kereta api untuk kebutuhan mobilisasi. Data Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Angka Tahun 2024 bahwa layanan transportasi eksisting hanya Angkutan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Tabel 2.73 perusahaan dan armada angkutan umum yang memiliki izin trayek di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022

Jenis Angkutan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Armada
Bus Angkutan AKDP	2	29
Bus Angkutan antar Desa Dalam Kabupaten	-	-

Sumber: BPS Labuhanbatu Selatan dalam Angka, 2024

Dalam menunjang peningkatan layanan transportasi, Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan melakukan pembangunan Simpul transportasi berupa terminal (tipe B dan tipe C) serta stasiun kereta api yang menghubungkan Labuhanbatu-Labuhanbatu Selatan-Provinsi Riau. Potensi daya saing fasilitas dari sisi perhubungan diharapkan akan mendukung mobilitas penduduk dan barang. Terlebih

infrastruktur transportasi dapat menjadi nadi pergerakan manusia dan barang dari dan ke Kabupaten Labuhanbatu Selatan terutama pada jalur antar provinsi yaitu Provinsi Riau dalam memasok bahan industri berbasis hasil perkebunan.

c. Infrastruktur Jaringan Listrik dan Internet

Peningkatan infrastruktur energi listrik untuk memberikan pasokan listrik yang stabil dan terjangkau, melalui pengembangan jaringan transmisi interkoneksi Sumatera Utara, pembangunan jaringan jaringan SUTET Rantauprapat-New Garuda Sakti (Riau) yang mengalir Kecamatan Silangkitang, Kotapinang dan Kecamatan Torgamba serta pembangunan gardu induk di PKL Kotapinang. Pengembangan infrastruktur energi listrik ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan terpenuhinya kebutuhan listrik untuk kebutuhan pelayanan dasar maupun aktivitas ekonomi produktif.

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi akan dipercepat untuk mendukung transformasi digital dan memperluas akses terhadap layanan digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan infrastruktur telekomunikasi melalui penataan lokasi Menara telekomunikasi selular dan BTS, pemanfaatan jaringan terrestrial system nirkabel untuk menjangkau wilayah *blankspot* (wilayah berbukit dan terpencil) dan menambah jaringan telekomunikasi di pusat permukiman perdesaan.

Melalui pemenuhan infrastruktur yang resilien dan adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana tersebut, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berupaya menjadi wilayah yang unggul. Pemerataan pembangunan infrastruktur perlu diperhatikan dengan menghitung luas daerah dengan jumlah penduduk, sehingga setiap kecamatan mendapatkan layanan kebutuhan dasar secara merata. Investasi dalam infrastruktur ini diharapkan akan membawa dampak multiplier bagi perekonomian dan ketangguhan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui pembangunan infrastruktur yang merata, mendorong pertumbuhan industri dan sektor jasa, serta meningkatkan daya tarik wilayah untuk investor dan pekerja yang berkualitas. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan menjadi pondasi dalam mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang kompetitif dan berdaya saing pada tahun 2045.

Kondisi Rumah tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilihat menggunakan beberapa indikator seperti penanganan sampah, pemenuhan sarana, prasarana dan utilitas perumahan serta pemukiman yang tidak kumuh. Persentase penanganan sampah pada tahun 2021 sudah mencapai 60,01% dengan capaian setiap tahun 2021-2024 mengalami tren positif yang terus meningkat setiap tahunnya dengan target capaian sebesar 60,65% pada tahun 2024. Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan utilitas perumahan dalam kondisi baik memiliki target sebesar 76% dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 telah mencapai 78,50%. Demikian pula dengan pemukiman yang tidak kumuh, terus mengalami peningkatan dari 70,50% pada tahun 2021 dan mencapai 73% pada tahun 2024.

Tabel 2.74 Indikator Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase penanganan sampah	60,01	60,16	60,58	60,65
Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan utilitas perumahan	76	76,50	77	78,50
Persentase pemukiman yang tidak kumuh	70,50	71	71,50	73

Sumber: LKIP, 2024

Capaian rumah tangga dengan akses hunian layak berdasarkan data periode 2020-2024 mengalami fluktuasi yang relatif mengalami penurunan. Tahun 2020 capaian rumah tangga dengan akses hunian layak sebesar 68,84% mengalami penurunan ditahun selanjutnya 2021 menjadi 65,8%, namun tahun 2022-2023 mengalami kenaikan beruntun yaitu 69,33% dan 73,9% kemudian mengalami penurunan Kembali pada tahun 2024 menjadi 64,7%. Fluktuasi capaian rumah tangga dengan akses hunian layak dipengaruhi oleh pengadaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan perilaku hidup sehat dari masyarakat Labuhanbatu Selatan. Peningkatan hunian layak ini dapat ditingkatkan tidak hanya mengandalkan sumber pembiayaan pemerintah, dapat juga diwujudkan melalui hasil kolaborasi antara Pemerintah Labuhanbatu Selatan dengan pemerintah provinsi, pusat, desa dan peran swasta dengan pemanfaatan CSR dan BAZNAS. Program yang disasar juga dapat langsung dilakukan untuk perbaikan rumah tidak layak huni hingga

pembangunan baru rumah.

Dalam rangka pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga perlu difokuskan pada pembangunan di wilayah perdesaan. Pembangunan desa dilakukan untuk dapat meningkatkan kemandirian desa. **Desa Mandiri** merupakan desa yang memiliki kapasitas dalam mengelola aset dan sumber daya lokal yang sesuai dengan kewenangannya secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sampai dengan tahun 2024, capaian tingkat kemandirian desa di Labuhanbatu Selatan tercatat terdapat 14 desa berkembang dari 52 desa berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024. Klasifikasi desa berdasarkan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengklasifikasikan tingkat kemandirian desa menjadi 5 (lima) tingkatan, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Namun demikian Labuhanbatu Selatan secara bertahap akan menargetkan transformasi peningkatan setiap desa menjadi lebih baik setiap tahunnya melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, peningkatan perekonomian lokal melalui optimalisasi potensi lokal dan penguatan peran lembaga keuangan, peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, peningkatan penyediaan kebutuhan layanan dasar di desa, dan beberapa faktor lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan desa.

2.1.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama tahun 2018-2022 mengalami kenaikan hingga mencapai 8,37%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan konsumsi rumah tangga per kapita tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Selain itu, perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat yang terbentuk akibat ilmu pengetahuan dan teknologi serta membaiknya kondisi ekonomi masyarakat.

Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita lebih banyak ditopang oleh pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan per kapita terhadap pengeluaran

konsumsi rumah tangga per kapita selama tahun 2022-2023 rata-rata sebesar 44,76%. Akan tetapi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita perlu dilihat juga melalui golongan pengeluaran perkapita, yang dibagi berdasarkan rentang pengeluaran Rp 300.000 s.d > Rp.1.500.000. Berdasarkan data golongan pengeluaran perkapita sebulan Kabupaten Labuhanbatu Selatan cukup didominasi pada kelas menengah ke atas, hal ini sedikit dapat menunjukkan bahwa meskipun secara agregat pengeluaran rata-rata di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah mengalami peningkatan namun didominasi dari kelompok penduduk yang berpendapatan menengah hingga tinggi saja. Sehingga pemerataan rencana pembangunan dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan wilayah dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Tabel 2.75 Penduduk Berdasarkan Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2024

Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah)	Presentase Penduduk
< 150.000	-
150.000-199.999	-
200.000-299.999	-
300.000-499.999	-
500.000-749.000	8,21
750.000-999.999	26,69
1.000.000-1.499.999	45,38
> 1.500.000	19,71

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2025

a. Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis Pajak dan Retribusi Daerah menjadi pilar pokok pendapatan daerah. Pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan pajak daerah yang dapat dipungut tidak terdampak sehingga dapat dilaksanakan pada pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak

penerangan jalan umum, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal serupa juga untuk jenis retribusi daerah, di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terbagi menjadi tiga (3) jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu tidak mengalami perubahan ketentuan.

Tabel 2.76 Target dan Realisasi Penerimaan Rutin Bersumber dari Pajak Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Ribu Rupiah), 2024

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Persentase
1	Pajak			
	Pajak Hotel	312.000.000	318.123.252	101,96%
	Pajak Restoran dan Rumah Makan	900.000.000	845.268.061	93,92%
	Pajak Hiburan	13.923.000	10.760.000	77,28%
	Pajak Reklame	880.000.000	373.193.091	42,41%
	Pajak Penerangan Jalan	17.600.000.000	17.244.034.226	97,98%
	Pajak Mineral bukan logam dan bebatuan	117.000.000	40.975.000	35,02%
	Pajak sarang Burung wallet	585.000.000	17.700.000	3,03%
2	Pajak Parkir	40.950.000	25.115.000	61,33%
	Pajak air tanah	2.000.000.000	851.378.946	42,57%
	PBB Perdesaan dan Perkotaan	6.366.511.406	3.371.930.464	58,62%
	Bea Perolehan Hak atas	14.801.550.248	5.012.481.799	33,86%

	tanah dan Bangunan			
Jumlah/Total		43.616.934.654	28.470.959.839	65,28%

Sumber : Labuhanbatu Selatan dalam Angka 2025

Kondisi stabilitas ekonomi makro Labuhanbatu Selatan diproyeksikan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro stabilitas, pro pertumbuhan dan pro pemerataan. Gambaran tersebut ditunjukkan dengan data **Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB** yang selama lima tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 karena perkembangan ekonomi nasional yang kurang stabil sebagai imbas dari adanya pandemi Covid-19 sehingga rasio pajak mencapai 0,08. Tahun 2021 merupakan awal masa pemulihan berbagai aspek kehidupan pasca pandemi Covid-19 meskipun demikian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) cukup berdampak pada perekonomian masyarakat sehingga realisasi rasio pajak mengalami sedikit pergerakan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 0,09. Pemulihan ekonomi mulai pada tahun 2022 dan 2023 dimana rasio pajak tumbuh positif namun pertumbuhan PDRB cukup besar sehingga rasio pajak mengalami koreksi menjadi 0,08. Demikian juga dengan tahun 2024 dikarenakan laju pertumbuhan PDRB lebih tinggi lagi, sehingga rasio pajak menurun sebesar 0,07. Berdasarkan data tersebut rasio pajak terhadap PDRB Labuhanbatu Selatan tidak terlalu signifikan, hal ini menjadi indikasi dari masih rendahnya kepatuhan masyarakat dan swasta untuk membayar pajak dan kondisi ekonomi yang didorong dari pertumbuhan sektor unggulan yang cukup tinggi. Sehingga dalam mendorong peningkatan rasio pajak terhadap PDRB perlu dilakukan melalui kebijakan yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

b. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sektor koperasi, usaha kecil dan menengah menjadi salah satu sektor dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berdasarkan data tercatat adanya pertumbuhan jumlah usaha di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada tahun 2006 tercatat 20.100 unit dan peningkatan pada tahun 2016 mencapai 23.400 (16,71%). Pertumbuhan yang cukup tinggi ini

mengindikasikan perkembangan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan melebihi pertumbuhan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.77 Pertumbuhan Jumlah Usaha di Provinsi Sumatera Utara

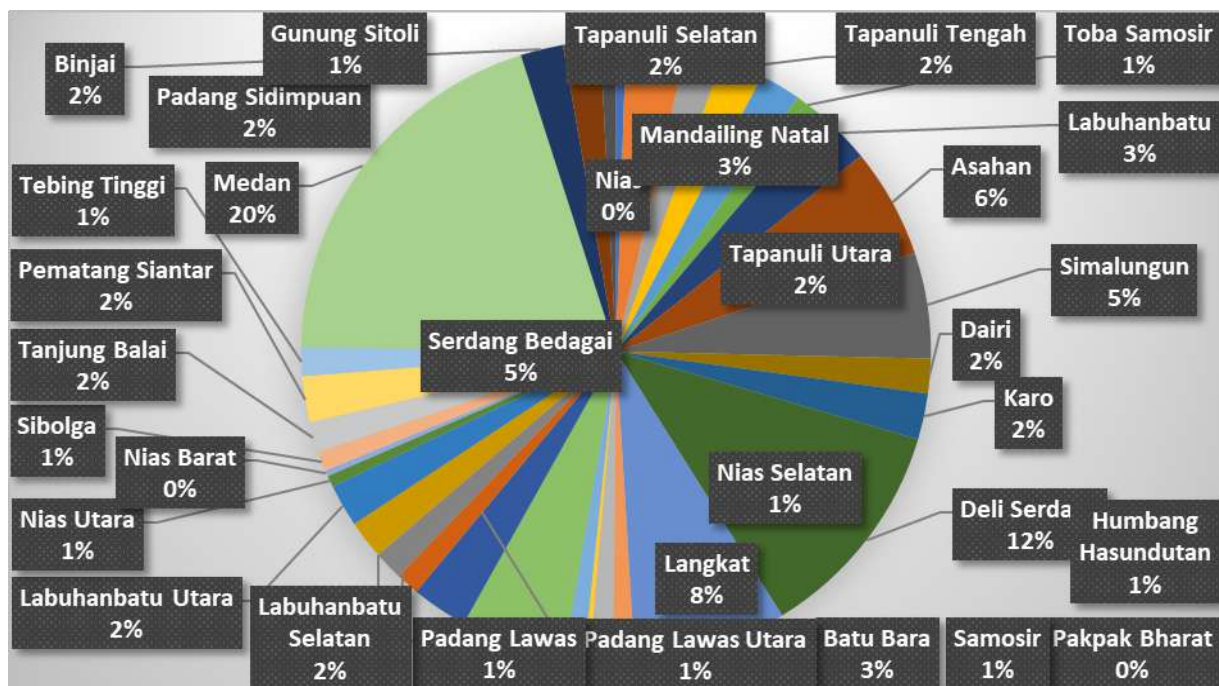
Kabupaten/Kota	2006	2016	Pertumbuhan %
Nias	7,8	5,7	-26,92
Mandailing Natal	26,8	37,1	38,43
Tapanuli Selatan	17,2	22,4	30,23
Tapanuli Tengah	24,8	25,8	4,03
Tapanuli Utara	21	25	19,10
Toba Samosir	12,8	15,4	20,31
Labuhanbatu	31,2	36,4	16,67
Asahan	51,9	67,2	29,48
Simalungun	57,7	65	12,65
Dairi	17,4	21,7	24,71
Karo	23,6	28,5	20,76
Deli Serdang	135,9	136,8	0,66
Langkat	88,5	92,8	4,86
Nias Selatan	16,4	12,7	-22,56
Humbang Hasundutan	11,6	13,8	18,97
Pakpak Bharat	1,5	3,6	140
Samosir	7,9	11,9	50,63
Serdang Bedagai	50,4	63,5	25,99
Batu Bara	32,5	33,9	4,31
Padang Lawas Utara	10,5	14,7	40,00
Padang Lawas	12,6	17,5	38,89

Kabupaten/Kota	2006	2016	Pertumbuhan %
Labuhanbatu Selatan	20,1	23,4	16,71
Labuhanbatu Utara	24,2	25,4	4,96
Nias Utara	9,1	6,7	-25,97
Nias Barat	4,1	3,7	-9,76
Sibolga	10,6	11,2	5,66
Tanjung Balai	16,6	18,9	13,86
Pematang Siantar	27,0	28,0	3,70
Tebing Tinggi	14,1	17,1	21,28
Medan	222,1	234,4	5,54
Binjai	23,4	26,3	12,39
Padang Sidempuan	17,7	22,8	28,81
Gunung Sitoli	7,6	8,9	17,11
Sumatera Utara	1.056,5	1.178,2	11,53

Sumber: BPS Sensus Ekonomi 2016

Selain pertumbuhan jumlah usaha, persebaran usaha juga memiliki peran dalam pemerataan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berdasarkan data yang tercatat, persebaran usaha yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara masih terhitung kecil yaitu hanya 2% dan sangat jauh jika dibandingkan dengan Kota Medan yang persebaran usaha mencapai 19,9% pada tahun 2016.

Grafik 2.28 Persebaran Usaha Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2016



Sumber: BPS Sensus Ekonomi 2016

Berdasarkan pertumbuhan dan persebaran usaha di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, penyerapan tenaga kerja menjadi penting dalam memberdayakan sumberdaya manusia di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki proporsi paling tinggi mencapai 99,16% pada tahun 2016 setara dengan 23.215 unit usaha. Berdasarkan data tercatat penyerapan tenaga mencapai 50.217 orang atau sekitar 89,30% dari total tenaga kerja. Sedangkan jumlah usaha menengah dan besar (UMB) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2016 mencapai 196 unit usaha atau sekitar 0,84% dari total unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 6.014 orang atau sekitar 10,70% dari total tenaga kerja. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa sektor perdagangan dan UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan didominasi oleh sektor UMK sebagai penggerak utama perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Jumlah usaha di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2016 mayoritas bergerak di sektor usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan jumlah usaha sebanyak 12.502 unit usaha yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 22.815 orang. Walaupun jumlah usaha di sektor perdagangan

jumlahnya banyak, namun kemampuan dalam menyerap tenaga kerja masih kecil yaitu rata-rata hanya 2 orang pekerja per usaha yang jika dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja sektor industri yang mampu menyerap rata-rata 4 orang pekerja per usaha.

Lapangan usaha perdagangan besar dan kecil, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor usaha yang paling dominan dari total UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016 yang mampu menyerap unit usaha mencapai 53,4% disusul oleh sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang mampu menyerap unit usaha sebesar 191%.

Sedangkan sektor pertambangan, energi pengelolaan air dan limbah merupakan sektor yang paling sedikit menyerap unit usaha UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016 yaitu hanya sebesar 0,2% yang disusul oleh sektor aktivitas keuangan dan asuransi yang mampu menyerap unit usaha sebesar 0,4%.

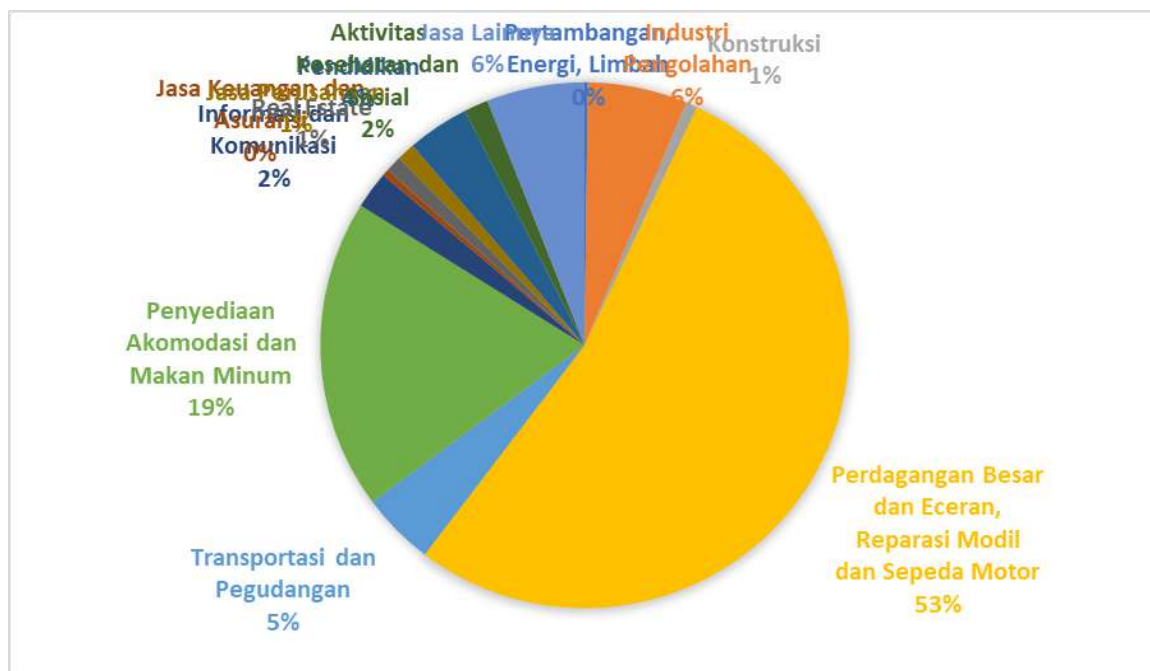
Tabel 2.78 Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Lapangan Usaha UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Lapangan Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah TK
Pertambangan, Energi, Limbah	41	80
Industri Pengolahan	1.438	6.230
Konstruksi	158	1.134
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Modil dan Sepeda Motor	12.502	22.815
Transportasi dan Pegudangan	1.050	1.478
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.474	8.035
Informasi dan Komunikasi	544	820
Jasa Keuangan dan Asuransi	101	968
Real Estate	223	278
Jasa Perusahaan	256	682

Lapangan Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah TK
Pendidikan	880	8.435
Aktivitas Kesehatan dan Sosial	340	1.913
Jasa Lainnya	1.404	2.432
TOTAL	23.411	55.300

Sumber: BPS Sensus Ekonomi 2016

Grafik 2.30 Persebaran Lapangan Usaha UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016



Sumber: BPS Sensus Ekonomi 2016

Tabel 2.79 Indikator UMKM yang dibina di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Indikator	2016	2017	2018
Jumlah UKM yang dibina (unit UKM)	278	315	367
Presentase UKM yang mendapatkan pembinaan kewirausahaan (%)	31.2	19.1	14.5

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Jumlah UKM yang dibina oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus mengalami peningkatan, yang tercatat pada tahun 2016 Jumlah UKM yang dibina sebanyak 278 buah, pada tahun 2017 meningkat menjadi 315 buah dan pada tahun 2018 kembali bertambah hingga mencapai 367 buah. Namun disisi lain Persentase UKM yang mendapatkan pembinaan kewirausahaan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 Persentase UKM yang mendapatkan pembinaan kewirausahaan mencapai 31,2%, pada tahun 2017 menurun menjadi 19,1% dan pada tahun 2018 kembali menurun menjadi hanya 14,5%. Sehingga perlu mejadi perhatian agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan optimal sesuai dengan jumlah UKM yang dibina.

c. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) Konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; serta (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Tabel 2.80 Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah ketersediaan pangan utama (ton)	-	-	36.516	39.439	35.429	34.379	35.103	32.450
Jumlah konsumsi pangan utama (ton)	-	-	20.791,47	20.353,33	31.767,93	31.729,22	31.100,25	29.675,77
Ketersediaan pangan utama terhadap	-	-	1,7563	1,9377	1,1152	1,0853	1,1287	1,094

jumlah konsumsi pangan utama (ton)								
Pola Pangan Harapan	86	87	88	89	90	-	-	-
Presentase Desa Rawan Pangan	10	9	8	7	6	-	-	-

Sumber: RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026

Berdasarkan data tersebut jumlah ketersediaan pangan utama terhadap jumlah konsumsi pangan utama terpenuhi, bahkan mengalami surplus yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi devisa daerah (data tahun 2018-2023). Data tersebut selaras dengan nilai pola pangan harapan dan presentasee desa rawan pangan yang terus mengalami peningkatan kualitas pemenuhan pangan daerah, sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi. Berdasarkan data 2023 untuk jumlah ketersediaan pangan utama mengalami penurunan, sehingga perlu menjadi perhatian untuk dapat menjaga pemanfaat dan guna lahan yang difungsikan sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

2.1.3.7. Daya Saing Iklim Investasi

Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, iklim investasi menjadi perhatian untuk dapat menarik dan mempertahankan investasi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi local. Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menatap arah pertumbuhan ekonomi yang dinamis, perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa iklim investasi yang ada tidak hanya kondusif tetapi juga kompetitif di tingkat regional maupun nasional. Hal tersebut dipengaruhi dengan aspek-aspek yang mendukung, seperti indeks ketentraman dan ketertiban serta indeks daya saing daerah. Berikut ini akan diuraikan mengenai berbagai aspek yang menjadi indikator penting dalam penilaian dan peningkatan iklim investasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1) Pemberian Kemudahan, Fasilitas dan Insentif bagi Penanam Modal

Pemberian kemudahan, fasilitas dan insentif bagi kegiatan penanaman modal merupakan strategi yang cukup efektif dalam meningkatkan angka investasi. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengambil langkah untuk meningkatkan jumlah investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi non fasilitas. Untuk mencapai tujuan pemberian kemudahan, fasilitas dan insentif bagi penanaman modal, maka sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Indikator yang mengukur kinerja peningkatan investasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah peningkatan jumlah investor PMDN dan PMA.

Tabel 2.81 Jumlah Investor PMA dan PMDN Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ΣInvestor PMA	7	8	9	10	11	12
ΣInvestor PMDN	43	44	45	46	47	48

Sumber: RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026

Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016 s.d 2021 terus mengalami kenaikan konsisten setiap tahunnya. Semangat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai daerah yang maju dan berkelanjutan perlu memperhatikan Langkah-langkah strategis dalam peningkatan jumlah investasi guna peningkatan ekonomi wilayah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penanaman modal seperti peningkatan layanan perizinan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan perizinan, dan peningkatan promosi dan kerja sama investasi. Selain itu perlu diikuti dengan pemenuhan energi yang mencukupi untuk aktivitas produksi, peningkatan SDM yang akan diserap sebagai pekerja serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha. Upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2) Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks ketentraman dan keamanan memainkan peran strategis dalam memberikan gambaran daya saing iklim investasi sebuah daerah. Ketentraman dan

keamanan yang tinggi sering kali diindikasikan oleh rendahnya tingkat kriminalitas, stabilitas sosial-politik, dan efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor ini secara langsung mempengaruhi persepsi dan keputusan investor untuk mengeluarkan modal di wilayah tersebut.

Daerah yang mampu menunjukkan tingkat ketentraman dan keamanan yang tinggi memiliki nilai jual tinggi bagi investor, sebab risiko terkait gangguan operasional bisnis, kerugian akibat kriminalitas, dan ketidakpastian hukum bisa diminimalisir. Dengan demikian, aktivitas dari investasi yang dilakukan lebih terlindungi dan perolehan keuntungannya lebih terjamin. Dalam lingkungan yang aman dan tertib, transaksi ekonomi dapat berjalan lancar, tenaga kerja menjadi lebih produktif, dan biaya-biaya tidak terduga terkait dengan keamanan dapat ditekan.

Sebaliknya, daerah dengan indeks ketentraman dan keamanan yang rendah mungkin akan berjuang lebih keras untuk dapat meyakinkan investor untuk menjangkau investasi asing dan domestik. Investor akan lebih cenderung menghindari wilayah dengan risiko tinggi terhadap aset dan sumber daya manusianya, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap potensi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Tabel 2.82 Kinerja Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016-2020

Aspek	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	91.9	62.03	85.6	90	95

Sumber: RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026

Berdasar data tabel di atas, kinerja program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan capaian prosentase keamanan dan ketertiban mengalami fluktuasi yang positif. Tahun 2017 nilai keamanan mencapai 62.03% dan meningkat menjadi 95% pada tahun 2020. Ini menandakan capaian yang signifikan dari kondisi keamanan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan dengan kondusifitas tersebut menjadi salah satu faktor peningkatan minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaras dengan data jumlah investor PMA dan PMDN yang meningkat setiap tahunnya.

2.1.3.8. Transformasi Digital

Masyarakat digital merupakan masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan teknologi digital pada semua aktivitas secara elektronik dan tanpa kertas menjadi hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital pada semua lini kehidupannya mulai dari produksi, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya.

Berdasarkan pengembangan dari “G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy”, kerangka kerja IMDI terdiri dari empat pilar, yaitu:

1) Infrastruktur dan ekosistem;

Merupakan pilar yang menjadi landasan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital pada masyarakat. Di negara berkembang seperti Indonesia, keterbatasan jangkauan, kualitas, dan biaya internet menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan manfaat digitalisasi. Pilar ini menekankan pentingnya kesetaraan akses untuk membangun ekosistem digital yang inklusif. Sementara itu, ekosistem pembelajaran berperan vital dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan tuntutan dunia digital.

2) Keterampilan Digital;

Pilar ini berperan sebagai alat dalam mencapai pembangunan digital yang lebih inklusif. Dalam IMDI, pilar keterampilan mencakup literasi digital dan keterampilan digital dasar yang mempertimbangkan indikator dari *Digital Literacy Global Framework* milik UNESCO⁸. Untuk mendapatkan pengukuran indeks yang lebih inklusif, pilar ini dihitung berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan untuk mengamati ada tidaknya kesenjangan antara kelompok yang berbeda

3) Pemberdayaan; dan

Kegiatan yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan. Pilar ini menyoroti pengembangan usaha serta peranan sharing economy dalam proses digitalisasi. Keberadaan platform digital menawarkan peluang ekonomi baru, kesempatan pendapatan yang lebih tinggi kepada masyarakat, kualitas hidup yang lebih baik, dan inklusi

keuangan. Baik sebagai produsen maupun konsumen, masyarakat berperan sentral dalam keberlangsungan pemberdayaan ekonomi digital.

4) Pekerjaan.

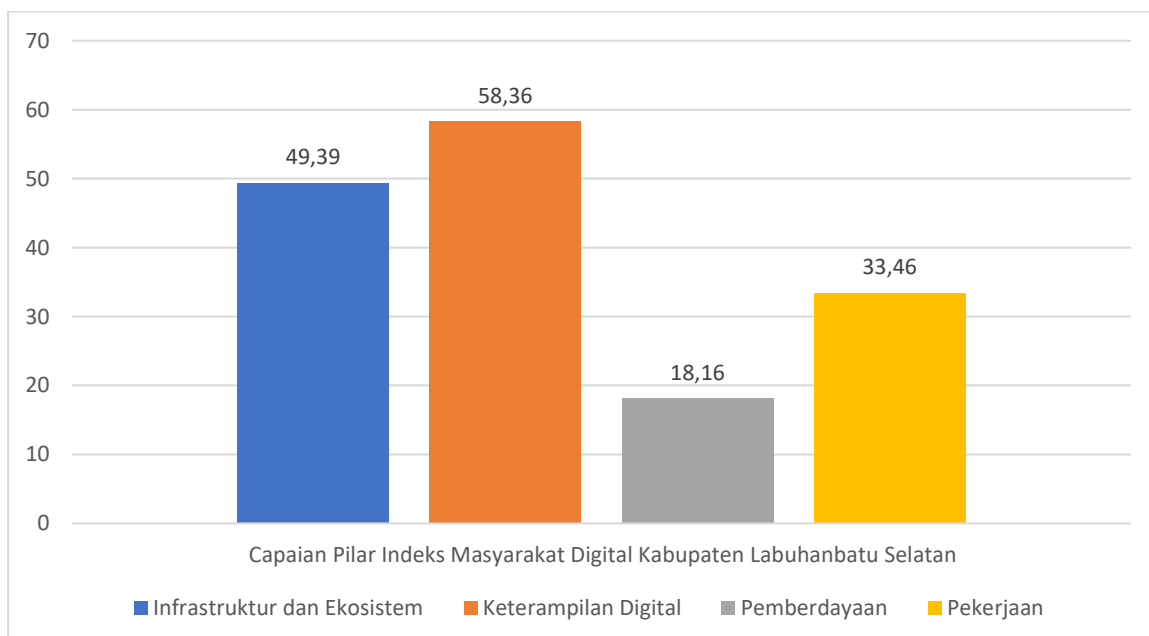
Pilar ini terdiri dari keterampilan digital yang banyak dibutuhkan dan kemampuan pekerja dalam menggunakan teknologi digital terkait pekerjaan. Dengan demikian, permintaan dan penawaran merupakan elemen utama dalam pilar ini. Indikator-indikator yang digunakan akan menangkap keterampilan digital yang diperlukan untuk melakukan aktivitas kerja, tugas, atau pekerjaan masa depan terkait teknologi.

Tabel 2.83 IMDI Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022-2024

Aspek	2022	2023	2024
Indeks Masyarakat Digital	24,50	38,03	39,44

Sumber: IMDI, 2024

Grafik 2.31 Capaian Pilar Indeks Masyarakat Digital Kab. Labuhanbatu Selatan 2024



Sumber: IMDI, 2024

Berdasarkan nilai Indeks Masyarakat Digital Kab. Labuhanbatu Selatan 2022-2024 terus menunjukkan tren positif dalam pencapaiannya, tercatat terus

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan capaian tiap pilar dapat diketahui bahwa secara ketersediaan infrastruktur dan ekosistem penggunaan digital dalam keseharian sudah cukup tinggi, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan pengguna untuk akses digital. Selain itu pilar keterampilan menunjukkan nilai tertinggi, Hal ini menunjukkan bahwa saat ini masyarakat digital Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah cukup terampil dalam penggunaan perangkat digital secara umum, namun belum optimal dalam pemanfaatannya ke arah yang produktif secara ekonomi.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan yang berkualitas. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja pembangunan. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pada tahun 2023 dalam rangka mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, telah ditetapkan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023, perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Tabel 2.84 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023-2024

Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
		2023	2024
Perencanaan Kinerja	30	16,11	17,16

Pengukuran Kinerja	30	10,76	11,73
Pelaporan Kinerja	15	9,16	10,43
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	10,73	11,04
Nilai Hasil Evaluasi	100	46,76	50,36
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C	CC

Sumber: Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/89/AA.05/2024

Berdasarkan data capaian Indeks RB tahun 2023-2024, nilai IRB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah CC, namun demikian angka reformasi birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus mengalami perbaikan. Berdasarkan nilai tersebut, menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam proses akselerasi peningkatan indeks reformasi birokrasi melalui perencanaan dan evaluasi pembangunan untuk memasukkan introspeksi dan perbaikan sistematis dalam tata kelola pemerintahan kota dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan berkualitas.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi suatu keharusan dalam rangka mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang kapabel; dan pelayanan publik yang prima. Tata kelola pemerintahan yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai cara untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum, pemerintahan daerah, dan sistem peradilan, maka telah dilakukan langkah-langkah perbaikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta bebas pungutan-pungutan liar terutama di sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Indeks Pelayanan Publik merupakan sebuah alat ukur atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Indeks ini mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi.

Berdasarkan satu data Kemenpan RB tahun 2021 nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah D. Berdasarkan nilai tersebut pelayanan publik Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih tergolong rendah dan perlu melakukan perbaikan dan peningkatan meliputi pemerataan pada setiap aspek SDM aparatur, sarana dan prasarana pemberian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencapai tata kelola Pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa di seluruh Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Keberhasilan dalam mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung yang telah berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu faktor utama adalah komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program strategis yang berorientasi pada peningkatan akses serta efektivitas layanan publik. Selain itu, adanya sistem monitoring dan evaluasi yang diterapkan secara berkala juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan, karena memungkinkan pemerintah untuk segera mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan yang ada. Pemanfaatan teknologi dalam layanan publik turut menjadi pendukung utama keberhasilan ini. Digitalisasi layanan telah mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan dengan lebih cepat dan efisien. Kemudahan ini semakin diperkuat dengan adanya koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait, sehingga pelayanan yang diberikan lebih terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Hal ini selaras dengan nilai IMDI Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 yang menunjukkan bahwa capaian pada pilar infrastruktur dan ekosistem memungkinkan untuk dapat melakukan transformasi layanan masyarakat melalui digital berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan ekosistem serta pilar keterampilan digital yang menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah cukup terampil dalam penggunaan perangkat digital secara umum.

Selain itu upaya peningkatan pelayanan publik, didorong melalui peningkatan tipologi dinas dan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraa system

pemerintahan berbasis elektronik. Peningkatan tipologi dinas dilakukan dengan adanya perubahan struktur organisasi dinas dengan menambah SDM mumpuni untuk dapat memenuhi tuisi OPD terkait yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selain itu akan berimplikasi terhadap besaran anggaran untuk operasionalisasi pelayanan dinas dimaksud. Dalam hal pelayanan terhadap publik secara efektif dan efisien, penggunaan pelayanan berbasis elektronik dengan basis satu data menjadi inovasi daerah dalam pemberian layanan yang mudah dan terintegrasi.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan. Indeks ini penting untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Penyediaan SPBE ini juga akan menunjang dan berdampak pada kinerja pelayanan publik dan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan satu data KemenpanRB tahun 2024, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berhasil mendapatkan skor Indeks SPBE dengan skor 1,94 yang masuk kategori Cukup. Keberhasilan ini menggambarkan upaya pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam meningkatkan tata kelola dan manajemen SPBE, termasuk pengelolaan risiko, keamanan informasi, manajemen data, dan audit teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam upaya meningkatkan komitmen daerah dalam mengadopsi praktik pemerintahan yang efisien, efektif, dan berkesinambungan berbasis teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih perlu melakukan penguatan yang bersifat mendasar untuk dapat memperkuat SPBE secara merata di setiap kecamatan melalui penyediaan infrastruktur internet dan server, peningkatan kapasitas SDM dan inovasi melalui integrasi sistem data yang memudahkan akses masyarakat dalam mengakses layanan antar OPD. Hal ini berkaca pada nilai IMDI Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, dengan capaian pilar Infrastruktur dan ekosistem berada di angka 49,39% Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat layanan pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan komunitas digital atau akademisi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih banyak warga yang beralih menggunakan layanan elektronik dalam mengurus administrasi pemerintahan. Hal ini juga untuk dapat meningkatkan nilai IMDI untuk penguatan pada pilar kemampuan

digital, pilar pemberdayaan serta pilar pekerjaan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mengakses pelayanan umum. Selain itu, penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung transformasi digital juga sangat diperlukan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan terkait digitalisasi berjalan efektif dengan adanya sistem evaluasi berkala terhadap implementasi SPBE.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia menjadi salah satu indikator yang menunjang kondusifitas dan ketangguhan wilayah. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan demokrasi juga dapat diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mampu mewujudkan amanat rakyat. Capaian tersebut dapat tergambar dari penegakan perd.

Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah operasi yang bersifat pembinaan. Penegakan Perda dan Perbup untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga hal ini akan mendukung pelaksanaan pembangunan. Peningkatan profesionalisme aparatur dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat, keamanan lingkungan. Hal ini dalam rangka mencapai peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sedangkan untuk mencapai target tersebut akan dilakukan melalui kebijakan Meningkatkan profesionalisme aparatur dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat, keamanan lingkungan.

Dalam hal pelaksanaan kewenangan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam daerah kabupaten, dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tabel 2.85 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk (%)	2,6	2,9	3,2	3,2	3,2

2	Rasio Jumlah Linma Per10.000 penduduk (%)	0	0	0	0	0

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024

Tabel 2.86 Data Jumlah Pelanggaran Perda Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pelanggaran	5	6	7	10	10
2	Pelanggaran Sidang ditempat	0	0	0	0	0
3	Pelanggaran Sidang di PN	0	0	0	0	0

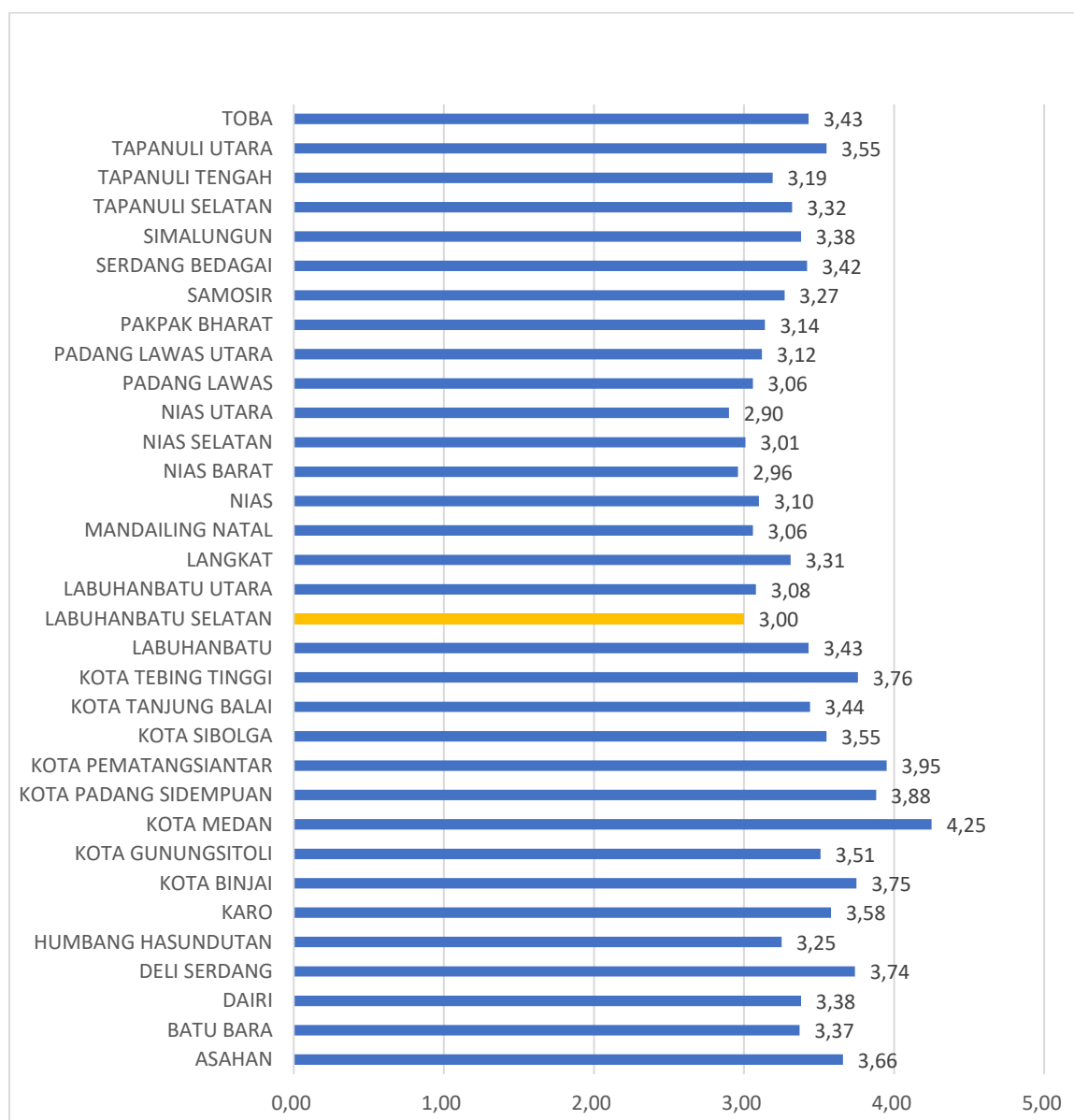
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024

Dalam implementasi Hak Asasi Manusia diantaranya mendukung **Capaian Aksi HAM** yang kegiatan ini adalah penjabaran lebih lanjut dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang berfokus pada 4 (empat) peningkatan hak-hak kelompok rentan dan marjinal yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat. Berdasarkan data, Capaian Aksi HAM Pemerintah Labuhanbatu Selatan tahun 2024 sebesar 81,7 atau mendapat kategori sangat baik. Peningkatan nilai capaian aksi HAM Labuhanbatu Selatan agar dapat terus ditingkatkan melalui perencanaan kebijakan yang berpihak pada hak-hak kelompok rentan dan marjinal yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.

Dari sisi penerapan demokrasi substansial di Labuhanbatu Selatan, dapat diukur dengan indikator **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**. Indeks Demokrasi Indonesia Labuhanbatu Selatan pada tahun 2024 mencapai angka 75,11 termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan data tersebut capaian variabel berkaitan terjaminnya kesetaraan, dimana partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik, khususnya melalui lembaga perwakilan mengalami peningkatan yang cukup. Selain itu terkait dengan aspek kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat, maupun kebebasan berkeyakinan mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu banyak. begitu juga pada aspek kebebasan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja dan pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Labuhanbatu Selatan.

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Salah satu indikator yang digunakan dalam menggambarkan ketangguhan dan daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Nilai IDSD Labuhanbatu Selatan pada tahun 2024 sebesar 3, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2,7. Jika dibandingkan dengan IDSD Provinsi yang sebesar 3,71, nilai IDSD Labuhanbatu Selatan pada tahun 2024 masih lebih rendah. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan nilai IDSD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, nilai IDSD Labuhanbatu Selatan tahun 2024 berada pada capaian yang tergolong rendah.

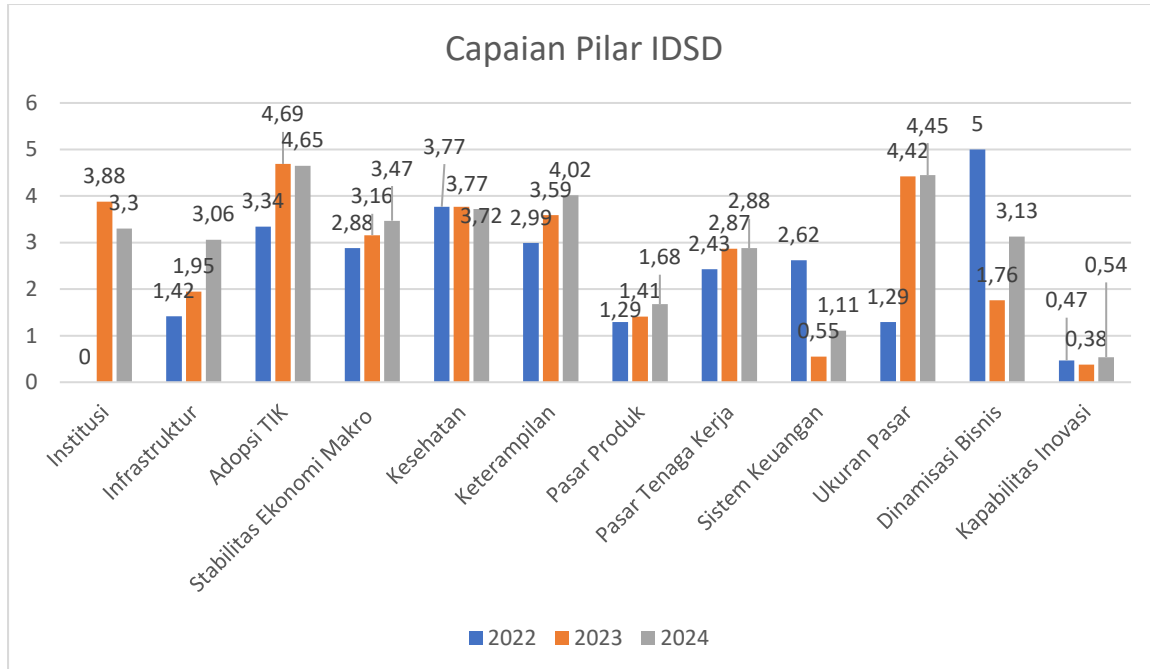
Grafik 2.32 Indeks Daya Saing Daerah Kab/Kota Sumatera Utara 2022-2024

Sumber: BRIN, 2025

Berdasarkan skor komponen pembentuk IDSD, capaian pada tahun 2024 pada komponen lingkungan pendukung meliputi infrastruktur, komponen sumber daya manusia meliputi keterampilan, Kesehatan dan pasar tenaga kerja serta komponen ekosistem inovasi meningkat dari tahun 2023. Komponen pasar meliputi pasar produk, ukuran pasar, system keuangan dan dinamisasi bisnis mengalami peningkatan pada tahun 2024. Nilai komponen pasar memiliki nilai tertinggi dikarenakan pilar pasar pasar produk, ukuran pasar, dan system keuangan secara merata mengalami kenaikan dengan capaian 4,45. Adapun komponen ekosistem

inovasi paling rendah karena pilar dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi memiliki nilai capaian rendah.

Grafik 2.33 Capaian Pilar IDSD Labuhanbatu Selatan 2022-2024



Sumber: BRIN, 2025

2.1.4.4. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja urusan pemerintahan daerah digambarkan bersarkan capaian Indikator Kinerja Kunci dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir. Kinerja makro ekonomi dan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam 5 (lima) terakhir menunjukkan progres (perbaikan) yang konsisten hampir untuk semua indikator: nilai IPM yang semakin membaik, PDRB yang selalu meningkat, angka pengangguran yang menurun, pertumbuhan yang relatif stabil, inflasi yang terjaga, angka kemiskinan yang selalu berkurang, indeks gini yang semakin kecil dan PAD yang selalu meningkat. Namun secara nilai perlu dicatat bahwa hampir semua indikator masih tergolong dalam kategori cukup rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2020-2024

No.	Indikator Makro	Capaian Kinerja Awal (2020)	Capaian pada tahun berjalan	Penyebab dan Rekomendasi
1	IPM	72,86	75,11	IPM menunjukkan peningkatan setiap tahun. Menunjukkan peningkatan dari sisi Pendidikan, Kesehatan dan kemampuan masyarakat yang terus ditingkatkan
2	Tingkat Kemiskinan	8,34	7,73	Tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus mengalami tren penurunan. Saat ini Kabupaten Labuhanbatu Selatan sedang kembali meningkatkan perekonomian dan menurunkan angka kemiskinan
3	TPT	5,68	3,24	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Capaian tingkat pengangguran terbuka terus membaik dan menjadi acuan pemerintah untuk terus mendorong pembukaan lapangan kerja baru dengan diikuti pelatihan keterampilan.
4	Pertumbuhan Ekonomi	0,8	4,89	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus mengalami perbaikan setelah pandemic Covid19 yang berlangsung sejak 2019-2022. Namun berdasarkan data

				pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan cenderung stagnan
5	Ketimpangan Pendapatan	0,193	0,212	Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Koefisien Gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan. Koefisien Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan	18.899	124,52	PDRB Perkapita atas dasar harga konstan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami sedikit pelambatan karena faktor pandemic Covid19 yang berlangsung sejak 2019-2022 dan saat ini sedang masa transisi untuk pertumbuhan.
7	PDRB Perkapita Atas	28.198	41.909	PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten

	Dasar Harga Berlaku			Labuhanbatu Selatan mengalami sedikit pelambatan karena faktor pandemic Covid19 yang berlangsung sejak 2019-2022 dan saat ini sedang masa transisi untuk pertumbuhan

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami dua kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Di antara penyesuaian tersebut adalah pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di sejumlah bidang agar adil, rasional, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Selanjutnya, Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Definisi ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Pengelolaan keuangan daerah adalah istilah kolektif untuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam mengelola keuangan daerah, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, ekonomis, efisien, dan tertib. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan ditentukan oleh seberapa baik pengelolaan keuangan daerah menyelesaikan inisiatif yang telah dimulai. Pengelolaan keuangan mencakup pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan, pengeluaran, dan pendanaan daerah. Memaksimalkan pendapatan dari sumber internal dan

meminimalkan pendapatan dari dana transfer akan membuat daerah menjadi lebih mandiri dan berkembang. Tingkat kompetensi keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga dapat diketahui dengan melihat kondisi kinerja keuangan daerah, termasuk kinerja keuangan masa lalu dan prinsip-prinsip pengelolaannya.

2.2.1. Kinerja Keuangan Daerah Sebelumnya

Salah satu unsur daerah yang tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pembiayaan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dijabarkan secara kuantitatif dalam APBD, yang disusun dalam suatu struktur yang menguraikan tugas pokok dan fungsi berdasarkan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil masyarakat dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, salah satu instrumen kebijakan yang digunakan di daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat adalah APBD. Menganalisis pelaksanaan APBD selama lima (5) tahun diperlukan untuk mengkaji pengelolaan keuangan daerah dan memberikan gambaran mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pelaksanaan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus memahami berbagai tujuan keuangan, pengeluaran, dan pendapatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum kita dapat mengkaji manajemen keuangan daerah. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menentukan kerangka kerja keuangan di masa depan dengan memperhitungkan peluang dan tantangan yang akan muncul. Kinerja keuangan dan realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2020-2024 disajikan beserta gambaran kinerja keuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara keseluruhan, sebagai dasar untuk menentukan pertumbuhan rata-rata. Sementara itu, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dipilih sebagai tahun dasar karena adanya perubahan yang disebabkan oleh penerapan kebijakan keuangan daerah sebagai respon dari wabah Covid-19. Di dalamnya terdapat proyeksi keuangan untuk lima tahun ke depan, yaitu 2025-2029.

Adapun komponen-komponen APBD adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan Daerah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dirinci ke dalam Belanja

Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Peraturan daerah, yang dikeluarkan setiap tahun, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah menjadi dasar untuk hal ini. Selanjutnya, kita akan membahas seberapa baik pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan sebelumnya. Akan ada dua kategori untuk hal ini: pendapatan asli daerah dan penerimaan pembiayaan di bawah kategori kinerja pendapatan daerah, serta pengeluaran pembiayaan dan belanja daerah di bawah kategori kinerja belanja daerah.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

1) Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah

Pada dasarnya, penganggaran adalah membandingkan anggaran yang diharapkan (yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran) dengan anggaran aktual. Perbandingan yang sama antara pendapatan dan realisasi anggaran serta pengeluaran dan realisasi anggaran adalah tujuan dari APBN/APBD. Dalam lingkup APBD, pengeluaran pembiayaan ditambah dengan belanja daerah merupakan pengeluaran daerah, sedangkan penerimaan pembiayaan ditambah dengan pendapatan daerah merupakan pendapatan daerah. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah, struktur pendapatan dan belanja daerah yang dijelaskan pada bagian ini akan diterapkan. Sub-bab pendapatan daerah akan menyajikan kinerja realisasi dan rata-rata peningkatan pendapatan keuangan dan pendapatan daerah. Selanjutnya, akan dilakukan perhitungan prakiraan untuk lima tahun ke depan, dari tahun 2025 hingga 2029.

2) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah didefinisikan sebagai semua dana yang diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah, dan lain-lain pendapatan yang diakui sebagai penambah nilai ekuitas dana yang menjadi hak Daerah dalam periode satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menggantikan Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas: (i) Pendapatan Asli Daerah; (ii) Pendapatan Transfer; (iii) Pendapatan Daerah Lain yang Sah. Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.88 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 – 2024

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	Persentase	+ / (-)
2020	881.948.050.771,00	861.754.899.294,60	97,71	- 20.193.151.476,40
2021	912.137.567.081,00	939.476.497.742,38	103,00	27.338.930.661,38
2022	904.878.777.549,00	919.303.211.450,98	101,59	14.424.433.901,98
2023	987.326.560.558,00	982.118.225.151,37	99,47	- 5.208.335.406,63
2024	976.025.987.138,00	946.332.965.571,58	96,96	- 29.693.021.566,42

Sumber: Diolah dari LKPJ Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Adapun rincian target dan realisasi untuk masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam Tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.89 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
1.	Pendapatan Daerah Tahun 2020			
	a. PAD	62.591.251.032,00	55.858.593.110,60	89,24
	b. Pendapatan Transfer	665.974.783.749,00	641.993.802.038,00	96,40
	c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	153.382.015.990,00	163.902.504.146,00	106,86
	Jumlah	881.948.050.771,00	861.754.899.294,60	

No	Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
2.	Pendapatan Daerah Tahun 2021			
	a. PAD	68.733.071.752,00	63.254.710.984,38	92,03
	b. Pendapatan Transfer	806.302.812.053,00	834.506.485.758,00	103,50
	c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	37.101.683.276,00	41.715.301.000,00	112,44
	Jumlah	912.137.567.081,00	939.476.497.742,38	
3.	Pendapatan Daerah Tahun 2022			
	a. PAD	61.652.362.901,00	59.867.478.675,98	97,10
	b. Pendapatan Transfer	843.226.414.648,00	859.435.732.775,00	101,92
	c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0	28.724.286.386,98	100
	Jumlah	904.878.777.549,00	948.027.497.837,96	
4.	Pendapatan Daerah Tahun 2023			
	a. PAD	69.612.910.536,00	64.945.075.068,37	93,29
	b. Pendapatan Transfer	917.713.650.022,00	917.173.150.083,00	99,94
	c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	23.838.240.554,00	29.987.257.809,37	125,79
	Jumlah	1.011.164.801.112,00	1.012.105.482.960,74	
5.	Pendapatan Daerah Tahun 2024			
	a. PAD	74.505.439.540,00	63.130.072.207,58	84,73
	b. Pendapatan Transfer	893.747.871.598,00	874.328.501.137,00	97,83
	c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	7.772.676.000,00	8.874.392.227,00	114,17
	Jumlah	976.025.987.138,00	946.332.965.571,58	

Sumber: Diolah dari LKPJ Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Berdasarkan data yang disajikan di atas, kinerja pendapatan daerah secara keseluruhan terlihat cukup stabil antara tahun 2020 dan 2024. Hasilnya, selama lima

tahun sebelumnya, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara umum cukup konsisten dan memenuhi target, meskipun sedikit fluktuatif. Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki kinerja pendapatan terbaiknya pada tahun 2022, ketika realisasi pendapatan daerah mencapai 104,77% dari target pada tahun tersebut. Pencapaian ini ditopang oleh Pendapatan Transfer yang melebihi target sebesar 101,92%. Selanjutnya, pencapaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 97,10%, dan target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 100%.

Selanjutnya, Kabupaten Labuhanbatu Selatan meraih capaian kinerja pendapatan daerah terbaik kedua di tahun 2021, dengan realisasi 103% dari target pendapatan daerah. Hasil tersebut ditopang oleh realisasi Pendapatan Transfer yang mencapai kontribusi nominal sebesar 103,50%. Bersamaan dengan itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai 97,10% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 112,44%. Kemudian, tahun 2024 memiliki kinerja pendapatan daerah terendah, yaitu sebesar 96,96%.

Saat ini, pendapatan transfer masih merupakan porsi terbesar dari pendapatan daerah. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama lima tahun sebelumnya harus dihitung untuk menghasilkan estimasi pendapatan daerah di masa depan. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.90 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata pertumbuhan
	Pendapatan	861.754.899.2 94,60	939.476.497.7 42,38	919.303.211.4 50,98	982.118.225.1 53,37		0,60%
1	Pendapatan Asli Daerah	55.858.593.11 0,60	63.254.710.98 4,38	59.867.478.67 5,98	64.945.075.06 8,37	63.130.072.20 7,58	3,40%
	Pajak Daerah	21.573.399.37 4,23	27.866.360.27 3,00	26.711.754.86 6,00	29.710.530.16 1,00	28.470.959.83 9,00	8,02%
	Retribusi Daerah	6.305.968.280 ,00	1.851.466.208 ,00	1.703.013.119 ,00	2.335.188.528 ,00	1.881.897.292 ,00	-15,24%

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata pertumbuhan
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.526.718.661,00	2.083.016.316,00	2.728.424.304,00	2.912.098.570,00	3.556.982.513,40	24,08%
	Lain - Lain PAD yang Sah	26.452.506.795,37	31.453.868.187,38	28.724.286.386,98	29.987.257.809,37	29.220.232.563,18	2,97%
2.	Pendapatan Transfer	755.548.026.184,00	834.506.485.758,00	859.435.732.775,00	917.173.150.085,00	874.328.501.137,00	2,27%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	641.993.802.038,00	787.049.332.477,00	788.119.271.080,00	830.116.681.404,00	825.800.403.198,00	3,83% -
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.765.967.364,00	\			94.400.729.000,00	
	Dana Alokasi Umum	479.785.624.000,00				518.138.303.047,00	
	Dana Alokasi Khusus	126.442.210.674,00				152.733.467.151,00	
	Dana Desa			56.978.087.000,00	59.337.613.000,00	60.527.904.000,00	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	74.517.419.012,00	-	-	-		
	Dana Penyesuaian Dana Otonomi Khusus	74.517.419.012,00					
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	39.036.805.134,00	47.457.153.281,00	71.316.461.695,00	87.056.468.681,00	48.528.097.939,00	8,5%
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.036.805.134,00		54.131.152.952,00	60.157.153.281,00	48.528.097.939,00	-1,02%
	Bantuan Keuangan			17.185.308.743,00	26.899.315.400,00		

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata pertumbuhan
	Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	-					
3.	Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah	50.348.280.00 0,00	41.715.301.00 0,00	-	-	8.874.392.22 7,00	
	Pendapatan Hibah	50.348.280.00 0,00					
	Pendapatan Lainnya						

Sumber: Diolah dari LKPJ Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Data yang mencakup tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan dalam perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Namun secara persentase, capaian pendapatan masih dalam angka yang memuaskan

3) Penerimaan Pembiayaan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendapatan daerah adalah total penerimaan pembiayaan ditambah dengan realisasi pendapatan daerah. Penerimaan pembiayaan yang sudah terealisasi selama lima tahun sebelumnya hanya SiLPA Penggunaan dan Penerimaan Pinjaman. Perkembangan penerimaan pembiayaan dan pendapatan daerah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini, sebagai berikut.

Tabel 2.91 Rata-Rata Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan
1.	Penerimaan Pembiayaan	74.394.348.6 41,02	101.258.076.8 42,94	177.962.509 .858,32	159.363.6 10.518,24	134.492.786.97 5,31	21,45%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun Sebelumnya	74.394.348.6 41,02	101.258.076.8 42,94	177.962.509 .858,32	159.363.6 10.518,24	134.492.786.97 5,31	21,45%

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan
	Pinjaman Dalam Negeri						
	Penerimaan Kembali Piutang						
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.00 0,00	2.000.000.000 ,00	2.000.000.0 00,00	2.239.900. 000,00	2.500.000.000, 00	5,90%
	Penyertaan Modal Daerah/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.00 0,00	2.000.000.000 ,00	2.000.000.0 00,00	2.239.900. 000,00	2.500.000.000, 00	5,90%
3	Pembiayaan Netto	72.394.348.6 41,02	99.258.076.84 2,94	175.962.509 .858,32	157.123.7 10.518,24	131.992.786.97 5,31	21,92%
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Sumber: Diolah dari LKPJ Kabupaten Labuhanbatu Selatan

4) Kinerja Realsasi Pengeluaran Daerah

Jumlah penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dikenal dengan istilah belanja daerah plus pembiayaan. Di sisi lain, sistematika APBD menggabungkan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ke dalam keuangan daerah. Sistematika APBD pada umumnya menghitung pendapatan dikurangi belanja, menghasilkan surplus dan defisit. Penggunaan surplus dan defisit ini, atau penyediaan pembiayaan, menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, yang merupakan bagian dari penerimaan pembiayaan tahun berikutnya, akan menggantikan peran SiLPA. Tinjauan terhadap belanja dan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama tiga tahun terakhir, serta proyeksi untuk lima tahun mendatang, disajikan pada subbab berikutnya.

5) Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dianggap sebagai Belanja Daerah, demikian pula dengan pengeluaran lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dicatat sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang merupakan kewajiban Daerah dalam periode satu tahun anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005, menjadi dasar dari penjelasan ini. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ada empat kategori untuk pembagian belanja daerah: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dengan memberikan nilai yang sama pada pelaporannya, klasifikasi ini akan menjamin bahwa penganggaran di masa depan akan dapat diperbandingkan dan meningkatkan kualitas informasi yang diberikan.

Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional pemerintah daerah yang memberi manfaat segera, sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja operasional Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami pertumbuhan rata-rata terbesar dengan 64,44%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih berkuat dengan pengeluaran rutin sehingga perlu dilakukan pertimbangan yang matang untuk meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu serius dalam meningkatkan infrastruktur daerah agar dapat memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat dan daerah sebagai tujuan industri dan investasi, yang terlihat dari alokasi anggaran yang lebih besar untuk belanja modal.

Tabel 2.92 Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Belanja Daerah											
1.	Belanja Operasi	539.942.626.837,00	64,83	587.612.223.925,00	68,27	586.193.713.980,00	62,63	647.504.326.056,78	64,44	711.452.200.951,00	89,18
	Belanja Pegawai	309.084.181.826,00	37,11	323.191.562.837,00	37,55	310.411.153.933,00	33,17	319.187.079.651,00	31,77	376.467.955.344,00	88,13
	Belanja Barang dan Jasa	193.654.913.781,00	23,25	241.204.175.088,00	28,02	257.531.625.047,00	27,52	285.681.193.321,24	28,43	288.029.713.668,00	89,31
	Belanja Hibah	37.203.531.230,00	4,47	22.906.486.000,00	2,66	17.890.935.000,00	1,91	42.001.053.084,54	4,18	46.279.531.939,00	98,19

No	Uraian	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
	Belanja Subsidi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	310.000.000,00	0,04	360.000.000,00	0,04	635.000.000,00	0,06	675.000.000,00	70,68
2.	Belanja Modal	136.042.412.265,68	16,33	146.677.444.323,00	17,04	226.709.54103,06	24,22	237.425.862.140,88	23,63	171.985.365.671,00	94,73
	Belanja Modal Tanah		-	259.150.000,00	0,03	-	-	550.000.000,00	0,05	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	48.231.368.249,00	5,60	46.738.007.594,00	4,99	43.075.376.645,00	4,29	25.848.290.336,00	84,66
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	27.815.365.509,00	3,23	20.931.895.941,06	2,24	32.549.482.472,14	3,24	22.164.188.500,00	94,90
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	70.328.892.885,00	8,17	151.995.750.834,00	16,24	153.253.080.784,74	15,25	117.599.437.929,00	96,98
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	42.667.680,00	0,00	7.043.886.834,00	0,75	7.997.922.239,00	0,80	6.369.898.906,00	99,52
	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	-	-	-	0,00	3.550.000,00	99,50
3.	Belanja Tidak Terduga	47.599.703.995,00	0,01	213.596.557,00	0,02	1.015.284.375,00	0,11	578.690.592,00	0,06	17.980.000,00	0,59
	Belanja Tidak Terduga	47.599.703.995,00	0,01	213.596.557,00	0,02	1.015.284.375,00	0,11	578.690.592,00	0,06	17.980.000,00	0,59
4.	Belanja Transfer	109.306.427.995,00	12,85	126.268.799.922,00	14,67	121.983.571.233,00	13,03	119.240.269.904,64	11,87	122.934.935.928,00	97,85
	Belanja Bagi Hasil	1.884.035.991,00		6.166.702.26900	0,72	2.117.638.790,00	0,23	2.550.928.743,00	0,25	2.338.070.536,00	50,36

No	Uraian	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
	Belanja Bantuan Keuangan	107.422.392.00 4,00	12,8 5	120.102.097.6 53,00	13,9 5	119.865.932.44 3,00	12,81	116.689.341.1 61,64	11,6 1	120.596.865 .392,00	99,67
	Total Belanja Daerah	832.891.171.09 2,68	100, 00	860.772.064.7 27,00	100, 00	935.902.110.79 1,06	100, 00	1.004.749.148 .694,30	100,0 0	1.006.390.4 82.550,00	90,83

Sumber: Diolah dari LKPJ Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tabel di atas menggambarkan bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam merealisasikan belanja daerah, dimana setiap tahun tingkat penyerapannya terus meningkat/ Selain itu, belanja modal juga terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah meningkatkan kinerja realisasi belanja modal, terutama yang terkait dengan peningkatan infrastruktur daerah, sehingga dapat memberikan dampak yang besar bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Informasi yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan kebijakan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang terutama difokuskan untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan menyediakan lebih banyak dana untuk proyek-proyek modal, barang, dan jasa dibandingkan dengan belanja lainnya. Belanja modal lebih tinggi daripada jenis belanja lainnya. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyumbang persentase terbesar dari kedua jenis belanja tersebut secara keseluruhan, maka dapat dikatakan bahwa belanja modal didedikasikan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan pelayanan publik. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.93 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
	Belanja Daerah						
	Belanja Operasi	539.942.62 6.837,00	587.612.223. 925,00	586.193.71 3.980,00	647.504.32 6.056,78	711.452.200.95 1,00	4,76%

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
1.	Belanja Pegawai	309.084.18 1.826,00	323.191.562. 37,00	310.411.15 3.933,00	319.187.07 9.651,00	376.467.955.34 4,00	1,03%
	Belanja Barang dan Jasa	193.654.91 3. 781,00	241.204.175. 088,00	257.531.62 5.047,00	285.681.19 3.321,24	288.029.713.66 8,00	10,21%
	Belanja Hibah	37.203.531. 2 30,00	22.906.486.0 00,00	17.890.935 .000,00	42.001.053. 0 84,54	46.279.531.939, 00	3,08%%
	Belanja Subsidi		-	-	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	310.000.000, 00	360.000.00 0,00	635.000.00 0,00	675.000.000,00	58,45%
2.	Belanja Modal	136.042.41 2. 265,68	146.677.444. 323,00	226.709.54 1.203,06	237.425.86 2.140,88	171.985.365.67 1,00	20,30%
	Belanja Modal Tanah		259.150.000, 00	-	550.000.00 0,00	0,00	45,80%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		48.231.368.2 49,00	46.738.007. 594,00	43.075.376. 645,00	25.848.290.336, 00	-3,82%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		27.815.365.5 09,00	20.931.895. 941,06	32.549.482. 472,14	22.164.188.500, 00	5,38%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		70.328.892.8 85,00	151.995.75 0.834,00	153.253.08 0.784,74	117.599.437.92 9,00	37,62%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		42.667.680,0 0	7.043.886.8 34,00	7.997.922.2 39,00	6.369.898.906,0 0	3.87%
	Belanja Modal Aset Lainnya			-		3.550.000,00	
3.	Belanja Tidak Terduga	47.599.703. 995,00	213.596.557, 00	1.015.284.3 75,00	578.690.59 2,00	17.980.000,00	-78,34%
	Belanja Tidak Terduga	47.599.703. 995,00	213.596.557, 00	1.015.284.3 75,00	578.690.59 2,00	17.980.000,00	-78,34%

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
4.	Belanja Transfer	109.306.427.995,00	126.268.799.922,00	121.983.571.233,00	119.240.269.904,64	122.934.935.928,00	2,27%
	Belanja Bagi Hasil	1.884.035.991,00	6.166.702.269,00	2.117.638.790,00	2.550.928.743,00	2.338.070.536,00	10,82%
	Belanja Bantuan Keuangan	107.422.392.004,00	120.102.097.653,00	119.865.932.443,00	116.689.341.161,64	120.596.865.392,00	2,08%
Total Belanja Daerah		948.922.810.032,96	832.891.171.092,68	860.772.064.727,00	1.004.749.148.694,30	1.006.390.482.550,00	1,44%

Sumber: Diolah dari LKPJ Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa antara tahun 2020 dan 2024, realisasi belanja operasional memiliki peningkatan rata-rata 4,76% per tahun. Demikian pula dengan belanja modal yang memiliki pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 20,30% per tahun.

6) Kinerja Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Informasi tentang bagaimana pengeluaran pembiayaan direalisasikan untuk menghitung berapa banyak surplus anggaran saat ini yang harus digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah yang bersifat wajib. Pengeluaran daerah terdiri dari pengeluaran pembiayaan di samping elemen-elemen lainnya. Tabel berikut ini menampilkan statistik pengeluaran pembiayaan yang direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan perkembangannya selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.94 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata pertumbuhan
Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan						
- Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.239.900.000,00	2.500.000.000,00	6,25%

Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata pertumbuhan
- Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
-Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	
- Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	
- Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	

Sumber: Diolah dari LKPJ Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tabel di atas mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum menerapkan kebijakan alokasi anggaran untuk mendukung belanja, khususnya untuk kebijakan penyertaan modal yang biasanya selalu ada di hampir semua pemerintah daerah di Indonesia, selama tiga tahun terakhir. Secara umum, dividen atau keuntungan lain dari penyertaan modal pada perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah.

2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, kebijakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebelumnya tentang pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai evaluasi tambahan atas capaian kinerja pelaksanaan APBD lima tahun sebelumnya. Kemudian, dengan menelaah kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama lima tahun sebelumnya, maka dapat dijabarkan praktik pengelolaan keuangan secara historis yang terkait dengan persentase penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

Persentase anggaran yang digunakan dikorelasikan dengan realisasi dan persentase biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan aparatur. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui anggaran yang diperlukan untuk operasional aparatur serta kebijakan yang harus diikuti agar aparatur

dapat berfungsi secara efektif. Berikut ini adalah data realisasi belanja selama tiga tahun terakhir untuk memenuhi kebutuhan aparatur Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tabel 2.95 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	309.084.181. 826,00	323.191.562. 837,00	310.411.153. 933,00	319.187.079. 651,00	376.467.955. 344,00
1.	Total Pengeluaran					
2.	Total Realisasi Belanja	948.922.810.0 32,96	832.891.171.0 92,68	860.772.064.7 27,00	1.004.749.148 .694,30	1.006.390.482 .550,00
	Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000 ,00	2.000.000.000 ,00	2.000.000.000, 00	2.239.900.000 ,00	2.500.000.000 ,00
	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Apratur Terhadap Total Pengeluaran (%)	32,50%	38,71%	35,98%	34,02%	37,40%

Jumlah nominal dan persentase belanja aparatur terus mengalami tren peningkatan. Hal ini perlu menjadi perhatian serius karena pada tahun 2027, diproyeksikan untuk belanja pegawai setiap daerah tidak boleh melebihi 30% dari total belanja APBD.

2.2.3. Neraca Keuangan Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu komponen laporan keuangan wajib yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan ini memegang peranan krusial bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai landasan dalam pengambilan keputusan strategis guna mengelola sumber daya ekonomi daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, meliputi aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada periode pelaporan. Data tersebut memberikan gambaran mengenai likuiditas dan fleksibilitas keuangan pemerintah daerah.

Penyajian informasi keuangan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas atas pengelolaan kekayaan daerah. Perkembangan Neraca Daerah selama lima tahun terakhir beserta rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, evaluasi kinerja Neraca Daerah dalam perencanaan keuangan daerah dilakukan melalui analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan kas pemerintah daerah dalam membiayai operasional pemerintahan dan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas bertujuan mengukur kecukupan aset dan ekuitas daerah dalam menutup kewajiban jangka panjang. Sementara itu, rasio aktivitas menganalisis kecepatan konversi piutang dan persediaan menjadi kas atau layanan publik. Hasil analisis ketiga rasio tersebut untuk Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam lima tahun terakhir disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.96 Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	ASET					
	A. Aset Lancar	151.681.331.35 6,54	224.154.380.96 1,54	188.169.275.29 7,34	204.781.104.82 6,89	141.451.000.63 4,50
	B. Investasi Jangka Panjang	8.760.100.000,0 0	10.760.100.000,00	12.760.100.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	C. Aset Tetap	1.436.828.222.1 48,51	1.457.772.591.3 75,20	1.516.956.730.9 63,56	1.587.170.462.3 02,42	1.626.446.585.5 45,73
	D. Aset Lainnya	28.876.798.935, 14	28.912.401.722, 90	30.944.800.809, 64	44.575.781.961, 89	32.492.231.143, 15
	JUMLAH ASET	1.626.146.452.4 40,19	1.721.599.474.0 59,64	1.748.830.907.0 70,54	1.851.527.349.0 91,20	1.815.389.817.3 23,38
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	19.998.775.307, 00	15.728.017.972, 00	1.669.077.056,0 0	6.853.359.119,5 0	6.306.457.305,1 1
	B. Kewajiban	-	-	-	-	-

	n Jangka Panjang					
	JUMLAH KEWAJIBAN	19.998.775.307,00	15.728.017.972,00	1.669.077.056,00	6.853.359.119,50	6.306.457.305,11
	EKUITAS					
	Ekuitas	1.606.147.677.133,19	1.705.871.456.087,64	1.747.161.830.014,54	1.844.673.989.971,70	1.816.471.860.590,27
3	JUMLAH EKUITAS	1.606.147.677.133,19	1.705.871.456.087,64	1.747.161.830.014,54	1.844.673.989.971,70	1.816.471.860.590,27
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.626.146.452.440,19	1.721.599.474.059,64	1.748.830.907.070,54	1.851.527.349.091,20	1.822.778.317.895,38

Selama lima tahun terakhir, kondisi keuangan pemerintah daerah menunjukkan perubahan yang cukup menarik. Total kekayaan daerah mengalami kenaikan dari Rp1.626 triliun di tahun 2020 menjadi Rp1.815 triliun di tahun 2024, meskipun sempat mencapai angka tertinggi Rp1.851 triliun di tahun 2023. Kenaikan ini terutama didorong oleh bertambahnya aset tetap seperti bangunan dan infrastruktur, yang tumbuh secara konsisten setiap tahun. Namun, dana likuid (aset lancar) justru turun cukup besar di tahun 2024 dibandingkan 4 tahun sebelumnya. Di sisi kewajiban, pemerintah daerah terlihat sangat berhati-hati dalam mengelola utang. Utang jangka pendek berhasil diturunkan secara signifikan dari Rp 19.99 Miliar di tahun 2020 menjadi hanya Rp 6.306 Miliar di tahun 2024.

Selain itu, kekayaan bersih daerah terus meningkat dari Rp1.606 triliun di tahun 2020 menjadi Rp1.816 triliun di tahun 2024, meskipun ada sedikit penurunan di tahun terakhir. Artinya, setelah semua kewajiban dibayar, pemerintah daerah masih memiliki kekayaan yang cukup besar. Adapun hal lain yang menarik, kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek justru semakin kuat. Di tahun 2020, dana likuid bisa menutup utang jangka pendek sebanyak 7 kali lipat, sementara di tahun 2024 bisa menutup hingga 22 kali lipat. Namun, penurunan dana likuid di tahun 2024 perlu diperhatikan karena bisa mempengaruhi kelancaran operasional pemerintah.

Secara keseluruhan, kondisi keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sangat stabil dengan kekayaan yang terus bertambah dan utang yang semakin berkurang. Pemerintah daerah tampaknya lebih memilih untuk membangun infrastruktur dan mengurangi ketergantungan pada utang. Tantangannya adalah

bagaimana menjaga keseimbangan antara memiliki cukup dana likuid untuk operasional sehari-hari sambil terus mengembangkan aset jangka panjang.

2.2.3. Kerangka Pendanaan

a. Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Tingkat pertumbuhan rata-rata pada tabel sebelumnya untuk setiap komponen pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih optimis. Komponen PAD tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 1%, yang merupakan tingkat pertumbuhan yang cukup baik. Oleh karena itu, proyeksi harus dimodifikasi untuk menghasilkan nilai yang tidak terlalu optimis dan lebih realistis berdasarkan angka persentase yang diperoleh. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam prioritas perencanaan keuangan. Oleh karena itu, untuk melakukan proyeksi hanya mengakui tingkat pertumbuhan sebesar 50% memperkirakan pendapatan. Penurunan dan pelonggaran pendapatan dari pendapatan transfer juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya, target untuk pajak dan retribusi daerah juga harus disesuaikan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu memperhatikan UU HKPD yang disahkan pada tahun 2022 dan mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini menawarkan banyak manfaat bagi daerah dengan membawa sejumlah reformasi penting. Pertama, undang-undang ini membuat sistem transfer dari pemerintah pusat ke daerah menjadi lebih mudah dipahami dan lebih transparan, Dimana berdasarkan kinerja dan kebutuhan unik daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan lebih banyak. Kedua, UU ini menekankan pentingnya daerah untuk memaksimalkan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk optimalisasi retribusi dan pajak daerah, serta penetapan peraturan yang jelas untuk penggunaan sumber daya aset di daerah untuk meningkatkan pendapatan. Ketiga, peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui program-program edukasi dan bantuan teknologi dari pemerintah pusat, serta insentif fiskal bagi daerah yang berhasil meningkatkan pembangunan. Selain itu, penerapan sistem keuangan berbasis teknologi informasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui audit keuangan yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih baik untuk mencegah korupsi.

Manfaat yang dapat diperoleh daerah dari pelaksanaan undang-undang ini termasuk berkurangnya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat serta kemandirian fiskal, yang dicapai melalui peningkatan pengelolaan keuangan dan PAD yang lebih tinggi. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran juga akan meningkat melalui pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan, dengan alokasi yang lebih terfokus sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Daerah dapat meningkatkan standar pelayanan publik dengan meningkatkan kapasitas fiskal dan efisiensi anggaran, dengan penekanan pada inisiatif yang secara langsung memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah pusat akan memberikan insentif kepada daerah yang secara efektif meningkatkan kinerja keuangan dan pembangunan mereka. Insentif ini kemudian dapat digunakan untuk mendanai lebih banyak kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan yang lebih baik, akuntabel, dan transparan juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yang pada akhirnya mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam rangka meningkatkan potensi pertumbuhan daerah melalui berbagai kolaborasi dan inovasi, daerah juga didorong untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan keuangan dan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dan daerah lain.

Tabel 2.97 Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Tahun 2025-2029

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN DAERAH					
1. Pendapatan Asli Daerah	148.965.261.332,60	237.726.775.870,60	249.542.575.371,60	299.495.597.365,00	344.138.802.038,00
a. Pajak Daerah	78.238.010.899,60	99.276.211.399,60	94.892.010.900,60	108.845.032.894,00	112.863.242.896,00
b. Hasil Retribusi Daerah	21.070.267.920,00	42.793.581.958,00	48.993.581.958,00	62.993.581.958,00	86.993.581.958,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.656.982.513,00	37.656.982.513,00	45.656.982.513,00	62.656.982.513,00	71.281.977.184,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.000.000.000,00	58.000.000.000,00	60.000.000.000,00	65.000.000.000,00	73.000.000.000,00
2. Pendapatan Transfer	968.052.855.912,40	1.122.052.855.912,40	1.128.465.100.900,40	1.169.495.107.336,00	1.252.334.086.307,00
a. Transfer Pemerintah Pusat	913.724.560.242,40	1.067.724.560.242,40	1.074.136.805.230,40	1.105.166.811.666,00	1.180.005.790.637,00

1) Dana Perimbangan	845.095.623 .542,40	977.095.623 .542,40	983.507.868 .530,40	1.013.537.8 74.966,00	1.074.552.8 74.966,00
a) Dana Transfer Umum	688.923.448 .542,40	755.923.448 .542,40	755.923.448 .542,40	773.953.454 .978,00	833.953.454 .978,00
(1) DBH	121.489.532 .700,00	143.489.532 .700,00	143.489.532 .700,00	143.489.532 .700,00	143.489.532 .700,00
(a) Bagi Hasil Pajak	83.956.976. 700,00	95.956.976. 700,00	95.956.976. 700,00	95.956.976. 700,00	95.956.976. 700,00
(B) Bagi Hasil Bukan Pajak	37.532.556. 000,00	47.532.556. 000,00	47.532.556. 000,00	47.532.556. 000,00	47.532.556. 000,00
(2) DAU	567.433.915 .842,40	612.433.915 .842,40	612.433.915 .842,40	630.463.922 .278,00	690.463.922 .278,00
b) Dana Transfer Khusus	156.172.175 .000,00	221.172.175 .000,00	227.584.419 .988,00	239.584.419 .988,00	240.599.419 .988,00
(1) DAK Fisik	10.982.306. 000,00	42.982.306. 000,00	40.982.306. 000,00	41.982.306. 000,00	40.997.306. 000,00
(2) DAK Non Fisik.	145.189.869 .000,00	178.189.869 .000,00	186.602.113 .988,00	197.602.113 .988,00	199.602.113 .988,00
2) Dana Insentif Daerah	7.956.846.7 00,00	9.956.846.7 00,00	9.956.846.7 00,00	9.956.846.7 00,00	14.780.825. 671,00
3) Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Dana Desa	60.672.090. 000,00	80.672.090. 000,00	80.672.090. 000,00	81.672.090. 000,00	90.672.090. 000,00
b. Transfer Antar-Daerah	54.328.295. 670,00	54.328.295. 670,00	54.328.295. 670,00	64.328.295. 670,00	72.328.295. 670,00
1) Pendapatan Bagi Hasil	54.328.295. 670,00	54.328.295. 670,00	54.328.295. 670,00	64.328.295. 670,00	72.328.295. 670,00
2) Bantuan Keuangan.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.408.553.9 74,00	9.408.553.9 74,00	9.408.553.9 74,00	25.408.553. 974,00	32.408.553. 974,00
a. Hibah	0	0	0	0	0
b. Dana Darurat	0	0	0	0	0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	9.408.553.9 74,00	9.408.553.9 74,00	9.408.553.9 74,00	25.408.553. 974,00	32.408.553. 974,00
Jumlah Pendapatan Daerah	1.126.426.6 71.219,00	1.369.188.1 85.757,00	1.387.416.2 30.246,00	1.494.399.2 58.675,00	1.628.881.4 42.319,00
Belanja Daerah	1.164.740.6 23.215,00	1.439.002.1 37.753,00	1.453.230.1 82.242,00	1.573.213.2 10.671,00	1.709.695.3 94.315,00
1. Belanja Operasi	821.982.176 .846,10	912.382.176 .846,10	915.472.176 .846,10	967.572.176 .846,10	1.017.876.0 76.846,10
a. Belanja Pegawai;	474.272.511 .033,00	504.272.511 .033,00	505.272.511 .033,00	540.272.511 .033,00	580.272.511 .033,00
b. Belanja Barang dan Jasa	325.185.474 .013,10	380.185.474 .013,10	381.185.474 .013,10	395.185.474 .013,10	402.189.374 .013,10
c. Belanja Bunga;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d. Belanja Subsidi;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Belanja Hibah; dan	21.913.691. 800,00	26.913.691. 800,00	27.913.691. 800,00	29.913.691. 800,00	31.913.691. 800,00
f. Belanja Bantuan Sosial.	610.500.000 ,00	1.010.500.0 00,00	1.100.500.0 00,00	2.200.500.0 00,00	3.500.500.0 00,00
2. Belanja Modal	182.013.733 .028,50	357.875.247 .566,50	367.513.292 .055,50	426.396.320 .484,50	516.574.604 .128,50
a. Belanja Tanah;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	18.337.714. 478,20	28.871.414. 978,20	28.833.214. 478,20	38.833.214. 478,20	58.833.214. 478,20
c. Belanja Bangunan dan Gedung	36.891.416. 340,00	98.891.416. 340,00	99.045.416. 341,00	121.060.816 .344,00	171.079.026 .346,00
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	119.111.737 .176,30	220.439.551 .214,30	230.961.796 .202,30	255.829.424 .628,30	274.989.498 .270,30
e. Belanja Aset Tetap lainnya.	7.672.865.0 34,00	9.672.865.0 34,00	8.672.865.0 34,00	10.672.865. 034,00	11.672.865. 034,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya.					
3. Belanja Tidak Terduga	18.327.679. 377,00	18.327.679. 377,00	18.327.679. 377,00	18.327.679. 377,00	18.327.679. 377,00
4. Belanja Transfer	142.417.033 .963,40	150.417.033 .963,40	151.917.033 .963,40	160.917.033 .963,40	156.917.033 .963,40
a. Belanja Bagi Hasil;	8.254.888.9 84,00	12.254.888. 984,00	13.254.888. 984,00	18.254.888. 984,00	15.254.888. 984,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	134.162.144 .979,40	138.162.144 .979,40	138.662.144 .979,40	142.662.144 .979,40	141.662.144 .979,40
PEMBIAYAAN DAERAH	38.313.951. 996,00	69.813.951. 996,00	65.813.951. 996,00	78.813.951. 996,00	80.813.951. 996,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.313.951. 996,00	69.813.951. 996,00	65.813.951. 996,00	78.813.951. 996,00	80.813.951. 996,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	38.313.951. 996,00	69.813.951. 996,00	65.813.951. 996,00	78.813.951. 996,00	80.813.951. 996,00
Pencairan Dana Cadangan					
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	38.313.951. 996,00	69.813.951. 996,00	65.813.951. 996,00	78.813.951. 996,00	80.813.951. 996,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, analisis terhadap realisasi pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat juga dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran yang sering terjadi biasanya berupa pengeluaran daerah yang memiliki prioritas tinggi dan bersifat wajib. Pengeluaran yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah setiap tahun dikenal sebagai pengeluaran periodik yang bersifat wajib dan mengikat. Bunga dan pengeluaran terkait lainnya termasuk dalam kategori pengeluaran ini, bersama dengan gaji dan tunjangan staf dan anggota dewan.

Tabel 2.98 Rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Total Belanja Wajib dan Mengikat	832.891.17 1.092,68	860.772.064.7 27,00	1.080.841.287 .407,00	1.004.749.148 .694,30	1.006.390.482 .550,00
	Belanja Operasi	539.942.62 6.837,00	587.612.223.9 25,00	714.413.257.1 11,00	647.504.326.0 56,78	711.452.200.9 51,00
	Belanja Modal	136.042.41 2.265,68	146.677.444.3 23,00	239.263.821.0 55,00	237.425.862.1 40,88	171.985.365.6 71,00
	Belanja Tak Terduga	47.599.703. 995,00	213.596.557,0 0	4.447.000.000 ,00	578.690.592,0 0	17.980.000,00
	Belanja Transfer	109.306.42 7.995,00	126.268.799.9 22,00	122.717.209.2 41,00	119.240.269.9 04,64	122.934.935.9 28,00
2.	Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	1.760.100.0 0 0,00	2.000.000.00 0,00	2.000.000.00 0,00	2.239.900.000 ,00	2.500.000.000, 00
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.760.100.0 0 0,00	2.000.000.00 0,00	2.000.000.00 0,00	2.239.900.000 ,00	2.500.000.000, 00

	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Utang					
	- Pemberian Pinjaman					
	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga					
	Jumlah					

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bagian perkiraan pendapatan, tahun dasar untuk anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan untuk proyeksi 2025 adalah APBD tahun 2024. Perkiraan belanja tahun 2025 dihitung dengan menggunakan informasi dari RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024. Penyesuaian yang dilakukan terhadap alokasi anggaran belanja dengan kebijakan refocusing anggaran juga penting untuk menentukan layak atau tidaknya alokasi anggaran tersebut pada tahun 2025. Pertumbuhan tersebut di atas dikalikan dengan prakiraan sebelumnya untuk menentukan proyeksi belanja tidak langsung untuk tahun-tahun hingga tahun 2029.

Tabel 2.99 Rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Uraian	Tahun Dasar (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Total Belanja Wajib dan Mengikat	1.100.131.147.113,31	1.058.939.816.989,00	1.164.740.623.215,00	1.439.002.137.753,00	1.453.230.182.242,00	1.573.213.210.671,00	1.709.695.394.315,00
Belanja Operasi	711.452.200.951,00	779.099.479.954,00	821.982.176.846,10	912.382.176.846,10	915.472.176.846,10	967.572.176.846,10	1.017.876.076.846,10
Belanja Modal	171.985.365.671,00	130.945.140.574,00	182.013.733.028,50	357.875.247.566,50	367.513.292.055,50	426.396.320.484,50	516.574.604.128,50
Belanja Tidak Terduga	17.980.000,00	18.327.679.377,00	18.327.679.377,00	18.327.679.377,00	18.327.679.377,00	18.327.679.377,00	18.327.679.377,00
Belanja Transfer	122.934.935.928,00	130.567.517.084,00	142.417.033.963,40	150.417.033.963,40	151.917.033.963,40	160.917.033.963,40	156.917.033.963,40

Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000	8.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.500.000.000	8.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0		0	0	0	0	0
Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0		0	0	0	0	0
Pembiayaan Pinjaman	0		0	0	0	0	0
Pembiayaan Hutang Kepada Pihak Ketiga	0		0	0	0	0	0
Jumlah	1.102.631.147.113,31	1.066.939.816.989,00	1.164.740.623.215,00	1.439.002.137.753,00	1.453.230.182.242,00	1.573.213.210.671,00	1.709.695.394.315,00

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi tersebut di atas, total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.058.939.816.989,00. Kemudian, diperkirakan akan meningkat hingga tahun 2030, yaitu sebesar Rp 1.709.695.394.315,00. Terhusus untuk Belanja Pegawai, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, total anggaran belanja yang bisa digunakan adalah maksimal 30% pertahun 2027.

b. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Selain mengalokasikan dana untuk pengeluaran daerah lainnya dan pengeluaran berkala yang bersifat wajib dan mengikat, tujuan dari kerangka pendanaan ini adalah untuk memastikan jumlah total kapasitas keuangan daerah

yang akan digunakan untuk mendukung program-program pembangunan jangka menengah daerah dan prioritas utama untuk lima tahun ke depan, yang akan berakhir pada tahun 2029.

Proyeksi pendapatan daerah perlu dihitung untuk mendapatkan perkiraan jumlah total penerimaan kas daerah. Dengan demikian, akan dapat diketahui kemampuan sesungguhnya dari kapasitas keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Seluruh penerimaan kas daerah yang riil, termasuk pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, dikurangkan dari keseluruhan pengeluaran untuk mendapatkan prognosa kemampuan keuangan daerah yang sebenarnya untuk lima tahun ke depan.

Tabel 2.100 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 – 2029

No	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan Daerah	1.034.625.864.993,00	1.126.426.671.219,00	1.369.188.185.757,00	1.387.416.230.246,00	1.494.399.258.675,00	1.628.881.442.319,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	
3.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	32.313.951.996,00	38.313.951.996,00	69.813.951.996,00	65.813.951.996,00	78.813.951.996,00,00	80.813.951.996,00
	Total Penerimaan	1.066.939.816.989,00	1.164.740.623.215	1.439.002.137.753,00	1.453.230.182.242,00	1.573.213.210.671,00	1.709.695.394.315,00
	Dikurangi						
1.	Total Belanja dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	1.058.939.816.989,00	1.164.740.623.215,00	1.439.002.137.753,00	1.453.230.182.242,00	1.573.213.210.671,00	1.709.695.394.315,00

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	8.000.000.000,00	-	-	-	-	-

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan

2.3.1. Permasalahan

Kesenjangan aspirasi (*aspiration gap*) merupakan perbedaan antara target pembangunan yang telah ditetapkan dengan pencapaian aktual saat ini. Hal ini menggambarkan sejauh mana tujuan-tujuan yang dicanangkan dalam perencanaan pembangunan belum terwujud dalam kondisi nyata di lapangan. Sementara itu, kesenjangan ekspektasi (*expectation gap*) mengacu pada selisih antara kinerja pembangunan yang diproyeksikan dengan realisasi yang telah terlaksana. Kedua jenis kesenjangan ini menjadi indikator penting yang menunjukkan efektivitas proses perencanaan dan implementasi pembangunan daerah.

Evaluasi menyeluruh terhadap berbagai permasalahan pembangunan menjadi komponen esensial dalam proses identifikasi dan perumusan isu-isu strategis. Hasil evaluasi tersebut kemudian berfungsi sebagai landasan kokoh dalam penyusunan program dan kegiatan yang dirancang secara khusus untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Tanpa adanya analisis yang komprehensif terhadap kedua kesenjangan tersebut, perencanaan pembangunan berisiko tidak tepat sasaran dan tidak mampu menjawab kebutuhan aktual masyarakat.

Pemahaman yang akurat dan mendalam terhadap kesenjangan aspirasi dan ekspektasi memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan. Dengan menganalisis secara cermat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan, pengambil kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan spesifik daerah. Pendekatan ini menjamin bahwa alokasi sumber daya pembangunan dilakukan berdasarkan prioritas yang jelas dan terukur.

Dengan mengintegrasikan analisis kesenjangan ke dalam kerangka perencanaan strategis, para pemangku kepentingan dapat mengalokasikan sumber

daya secara lebih optimal dan mengidentifikasi prioritas pembangunan yang memerlukan perhatian khusus. Proses ini memungkinkan terciptanya sinergi antara berbagai sektor pembangunan dan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan bersifat holistik dan terintegrasi. Selain itu, analisis kesenjangan juga membantu dalam memetakan potensi dan kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan daerah.

Pendekatan sistematis dalam analisis kesenjangan tidak hanya memperkuat akuntabilitas dalam proses pembangunan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur, tingkat keberhasilan berbagai program dan kegiatan pembangunan dapat dinilai secara objektif. Hal ini menciptakan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil dan berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

Melalui evaluasi berkelanjutan terhadap kesenjangan aspirasi dan ekspektasi, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian strategis yang diperlukan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, implementasi, dan hasil pembangunan. Proses adaptasi yang berkelanjutan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, pendekatan ini akan mendorong terciptanya pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, berikut rekapitulasi permasalahan dan akar masalah pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan:

1. Permasalahan Kondisi Geografi

- Tantangan Aksesibilitas & Biaya Konstruksi Mahal

Labuhanbatu Selatan terdiri atas dataran rendah hingga perbukitan (ketinggian 0–500m dpl), menyebabkan akses infrastruktur mahal dan sulit bagi kecamatan terpencil seperti Sungai Kanan. Dari 1,089km jalan, 90% merupakan jalan kabupaten; sejak 2022, proporsi jalan rusak meningkat signifikan sehingga memperburuk biaya dan waktu pembangunan serta mobilitas ekonomi.

- Wilayah Rawan Bencana Alam

Tinggi Wilayah sekitar DAS Barumun (Kampung Rakyat, Kotapinang, Torgamba) rawan banjir dan gerakan tanah terutama saat curah hujan tinggi (rata-rata 137–353mm/bln, 20–31 hari hujan/bln). Indeks Risiko Bencana pada 2020–2024 tetap tinggi (131,2), sementara kapasitas daerah masih tergolong rendah sehingga mitigasi perlu diperkuat.

- Benturan Kepentingan Pemanfaatan Lahan

Perkebunan kelapa sawit mendominasi (74,95% lahan, 240,923ha), menekan pertanian pangan. Penyusutan luas dan penurunan produksi padi dan jagung >50% dalam 3 tahun terakhir menunjukkan alih fungsi lahan menyebabkan kerentanan pangan, banjir, dan menurun daya dukung lingkungan. Penataan ruang belum optimal untuk menjaga ekosistem dan produktivitas.

2. Permasalahan Kondisi Demografi

- a. Pertumbuhan Penduduk Masih Tinggi

Jumlah penduduk naik dari 277,673 (2010) ke 336,577 jiwa (2024), dengan laju pertumbuhan 0,64–1,92%/tahun. Tekanan pada pelayanan dasar, proyek fasilitas publik, dan kebutuhan pangan meningkat progresif, terutama di Torgamba dan Kotapinang.

- b. Distribusi Penduduk Tidak Merata

Torgamba dan Kotapinang menampung mayoritas penduduk dan aktivitas ekonomi, sedangkan kecamatan lain tertinggal. Ketimpangan ini mengakibatkan disparitas dalam akses layanan dasar, pembangunan, dan partisipasi sosial ekonomi.

- c. Tingginya Migrasi Keluar Usia Produktif

Banyak anak muda bermigrasi karena lapangan kerja lokal terbatas. Tahun 2024, pekerja “keluarga/tak dibayar” dan “usaha sendiri” masing-masing 17,334 dan 25,103 orang; sektor formal hanya serap 45,85% tenaga kerja. Indikasi dominasi ekonomi informal tetap kuat.

d. Lapangan Kerja Informal Masih Mendominasi

Hampir separuh penduduk bekerja di sektor informal, terutama pertanian dan usaha skala kecil. Rendahnya pendidikan formal (SD–SMA: 91,29% angkatan kerja) memperkuat tren ini dan mempersulit transisi ke ekonomi modern yang lebih produktif.

3. Permasalahan Kesejahteraan

a. Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja

Dominasi pekerja berpendidikan rendah, penurunan hasil pertanian utama (padi, jagung), dan rendahnya diversifikasi usaha menyebabkan produktivitas tenaga kerja dan nilai tambah ekonomi masih stagnan.

b. Daya Saing Perekonomian Belum Optimal

Industri Pengolahan Menurun: Kontribusi turun dari 43,95% ke 40,89% di PDRB 2020–2024. Ekonomi Kreatif Lemah: UKM bertambah, namun pembinaan turun (hanya 14,5% UKM mendapat pembinaan, 2018). Pariwisata Tak Kompetitif: Pariwisata didukung objek wisata alam/buatan, namun jumlah akomodasi/rumah makan stagnan 2020–2024 akibat faktor eksternal seperti pandemi. Investasi Sektor Riil Kurang Menarik: Investor PMA hanya naik dari 7 (2016) ke 12 (2021), PMDN stagnan (48 investor pada 2021), belum ada terobosan signifikan.

c. Tingginya Disparitas Kemiskinan Desa-Kota

Tingkat kemiskinan 2024 menurun menjadi 7,73%, dari 8,34% tahun 2020, tetapi disparitas desa-kota dan kelompok rentan tetap lebar. Garis kemiskinan meningkat tiap tahun (Rp404.819 menjadi Rp533.535/kapita/bulan 2020–2024), sehingga masyarakat rentan dapat jatuh kembali ke dalam kemiskinan saat terjadi guncangan ekonomi.

4. Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Budaya

a. Pelayanan Kesehatan Belum Merata dan Berkualitas

Rasio tenaga medis dan fasilitas kesehatan lebih besar di daerah pusat. Di 2024, hanya ada 3 RS, 17 puskesmas, 319 posyandu. Kasus gizi buruk dan masalah akses air/sanitasi belum sepenuhnya tuntas.

- b. Pendidikan Belum Merata/Berkualitas APK SMA rendah (61,58% pada 2024), rata-rata lama sekolah 8,93 tahun (2023)—di bawah provinsi. Pendidikan vokasi dan teknologi masih sangat terbatas.
- c. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kurang Inklusif
Tidak semua keluarga terjangkau jaminan sosial; penyaluran bansos belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan.
- d. Demokrasi dan Kesenjangan Sipil Rendah
Rasio Satpol PP & Linmas 3,2/10.000 penduduk (2023), pelanggaran perda cenderung stagnan, partisipasi pengawasan publik minim.
- e. Nilai Keagamaan Inklusif Kurang Terbangun
Kerukunan cukup baik; program lintas agama masih perlu diperkuat untuk inklusivitas di semua lini kehidupan.
- f. Krisis Peran Keluarga & Perlindungan Sosial Dasar
Program keluarga sejahtera dan perlindungan anak/gender belum merata; muncul gejala krisis nilai dan ketahanan sosial keluarga.
- g. Ketimpangan Gender Masih Tinggi
Indeks ketimpangan gender >0,5 pada 2022, partisipasi perempuan di sektor publik naik (dari 25% di 2016 ke 40% di 2021) tapi belum setara laki-laki.
- h. Budaya Lokal dan Jati Diri Mulai Tergeser
Pengaruh budaya luar makin kuat, pelestarian bahasa, seni, dan cagar budaya belum optimal. Program pembinaan budaya harus ditingkatkan.

5. Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan

- a. Kesenjangan Infrastruktur Antardaerah Tinggi
Fasilitas pendidikan dan kesehatan terpusat di kota, belum merata hingga kecamatan terpencil. Sanitasi & pemukiman layak huni masih tantangan (persentase rumah tidak kumuh 73% pada 2024, namun sanitasi belum merata). Listrik & Energi belum merata—wilayah terpencil masih minim akses. Transportasi & konektivitas belum memadai, jalan kabupaten rusak bertambah, menyebabkan perlambatan mobilitas dan ekonomi. Infrastruktur

digital belum menjangkau semua daerah; Indeks Masyarakat Digital baru 39,44 di 2024, jauh di bawah rata-rata nasional.

b. Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Kurang Optimal

Risiko bencana (banjir, longsor, kebakaran hutan) tinggi, kapasitas penanganan masih lemah. Penanganan sampah hanya 60,65%; kualitas air sungai rentan polusi, emisi GRK, dan kerusakan lahan akibat alih fungsi lahan dan ekspansi perkebunan. Keanekaragaman hayati menurun, luas vegetasi hutan tersisa 18,606ha (2022), kawasan budidaya makin meluas.

6. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Kinerja Tata Kelola Membaik Namun Belum Optimal

Nilai IRB naik ke CC pada 2024: reformasi birokrasi membaik tapi akuntabilitas, efektivitas, evaluasi pembangunan dan layanan publik masih harus diperkuat.

b. Transformasi Digital Pelayanan Publik Belum Merata

Indeks SPBE dan pelayanan digital jauh dari target. Kapasitas dan infrastruktur SDM digital masih belum memadai untuk seluruh kecamatan dan OPD. Layanan berbasis elektronik satu data harus segera dipercepat agar tercapai pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan di seluruh wilayah.

2.3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar serta berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun arah pembangunan daerah dalam jangka menengah. Isu strategis menjadi landasan utama dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang efektif, berkelanjutan, serta selaras dengan prioritas nasional dan regional. Identifikasi isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, baik pada tingkat global, nasional, regional, maupun lokal, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi dinamika pembangunan daerah. Dengan demikian, perumusan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat lebih terarah, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi.



Gambar. 2.30 Pembagian Isu Strategis Pembangunan

2.3.2.1 Isu Global

Beberapa isu global yang signifikan telah diidentifikasi sebagai faktor krusial dalam penyusunan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, meliputi:

1. Ekonomi Global

Ekonomi global merupakan sistem yang saling terkoneksi melalui perdagangan internasional, investasi lintas negara, dan aliran modal yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi global yang terus berfluktuasi dipengaruhi oleh kebijakan moneter negara-negara maju, ketegangan perdagangan, dan berbagai krisis yang terjadi seperti pandemi dan konflik geopolitik. Ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat dengan adanya ketegangan perdagangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang berdampak pada rantai pasok global. Selain itu, peningkatan suku bunga oleh bank sentral utama dunia seperti Federal Reserve AS dalam upaya memerangi inflasi telah menciptakan tekanan tambahan pada ekonomi negara berkembang melalui penguatan dolar dan arus modal keluar.

Perekonomian global juga dihadapkan pada tantangan ketimpangan yang makin melebar antara negara maju dan berkembang. Distribusi kekayaan yang tidak

merata ini mengakibatkan berbagai permasalahan sosial dan politik di banyak negara. Data dari Oxfam menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di dunia memiliki kekayaan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan 6,9 miliar orang lainnya. Selain itu, sistem keuangan global yang semakin terintegrasi membuat gejolak ekonomi di satu wilayah dapat dengan cepat menyebar ke wilayah lain, sebagaimana terlihat pada krisis keuangan 2008 dan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Resesi yang dipicu pandemi mengakibatkan kontraksi ekonomi global sebesar 3,1% pada tahun 2020, dengan pemulihan yang tidak merata antar negara dan sektor.

Transformasi digital dalam ekonomi global telah memunculkan model bisnis baru dan mengubah pola perdagangan tradisional. E-commerce, ekonomi berbagi, dan teknologi finansial telah membuka peluang baru sekaligus menciptakan tantangan bagi para pelaku usaha konvensional. Nilai transaksi e-commerce global mencapai \$5,7 triliun pada tahun 2022 dan diproyeksikan terus tumbuh dengan CAGR 14,7% hingga 2027. Selain itu, pergeseran ke arah ekonomi hijau dan berkelanjutan juga mempengaruhi pola investasi dan kebijakan ekonomi di berbagai negara seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan. Investasi global dalam ekonomi rendah karbon mencapai rekor \$1,1 triliun pada tahun 2022, dengan sebagian besar ditujukan untuk energi terbarukan, mobilitas listrik, dan efisiensi energi.

Integrasi ekonomi regional seperti melalui ASEAN Economic Community, European Union, dan berbagai perjanjian perdagangan bebas lainnya telah membentuk lanskap ekonomi baru dengan mengurangi hambatan perdagangan dan memfasilitasi pergerakan barang, jasa, dan tenaga kerja. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang mulai berlaku pada Januari 2022 membentuk blok perdagangan terbesar di dunia, mencakup 30% populasi global dan 30% PDB dunia. Meskipun demikian, sentimen proteksionisme juga menguat di beberapa negara sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global dan kekhawatiran akan hilangnya lapangan kerja domestik. Trend ini terlihat dari peningkatan tarif dan hambatan non-tarif, serta upaya relokasi rantai pasok strategis ke dalam negeri atau ke negara-negara sekutu terdekat (friend-shoring).

Sebagai daerah yang ekonominya bertumpu pada sektor perkebunan kelapa sawit dan karet, fluktuasi harga komoditas global secara langsung mempengaruhi

pendapatan petani dan pendapatan asli daerah Labuhanbatu Selatan. Ketika harga minyak sawit mentah (CPO) turun di pasar internasional, hal ini berdampak pada menurunnya kesejahteraan petani sawit dan berkurangnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Pada tahun 2023, volatilitas harga CPO yang mencapai US\$900-1.300 per ton telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi sekitar 70% penduduk kabupaten yang bergantung pada sektor perkebunan. Kebijakan perdagangan internasional, seperti pembatasan impor CPO oleh Uni Eropa terkait isu keberlanjutan melalui EU Deforestation Regulation (EUDR), juga memberikan tekanan pada industri kelapa sawit di daerah ini, mendorong perlunya sertifikasi RSPO/ISPO dan praktik perkebunan yang lebih berkelanjutan. Diversifikasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas primer, dengan potensi pengembangan industri hilir berbasis CPO seperti oleokimia dan produk turunan karet yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dan lebih tahan terhadap fluktuasi harga global.

2. Sustainable Development Goals (SDGs) Sebagai Kelanjutan Dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda global yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan tenggat waktu pencapaian pada tahun 2030. Berbeda dengan MDGs yang lebih berfokus pada negara berkembang, SDGs bersifat universal dan berlaku untuk semua negara, baik negara maju maupun berkembang. Progress report terbaru dari PBB menunjukkan bahwa dunia berada di jalur yang tidak memadai untuk mencapai sebagian besar target SDGs pada tahun 2030, dengan hanya sekitar 12% target yang menunjukkan kemajuan sesuai rencana. Pandemi COVID-19, konflik geopolitik, dan krisis iklim telah memperlambat atau bahkan membalikkan kemajuan yang telah dicapai sebelumnya.

SDGs mencerminkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan global. Tujuannya mencakup pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, pendidikan berkualitas, akses pada energi bersih, penanganan perubahan iklim, hingga perdamaian dan kelembagaan yang kuat. Pendekatan ini mengakui bahwa isu-isu pembangunan

saling terkait dan memerlukan solusi yang holistik, tidak bisa diatasi secara terpisah-pisah. Sebagai contoh, upaya pengentasan kemiskinan (SDG 1) berkaitan erat dengan ketahanan pangan (SDG 2), kesehatan (SDG 3), pendidikan (SDG 4), dan akses terhadap air bersih (SDG 6). Demikian pula, target penanganan perubahan iklim (SDG 13) tidak dapat dipisahkan dari upaya menjamin akses energi bersih (SDG 7) dan pola konsumsi-produksi yang berkelanjutan (SDG 12).

Implementasi SDGs membutuhkan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pendanaan juga menjadi aspek krusial, dengan estimasi kebutuhan investasi global mencapai \$5-7 triliun setiap tahunnya untuk mencapai target-target SDGs. Kesenjangan pendanaan ini semakin melebar pasca pandemi COVID-19, dengan negara-negara berpendapatan rendah dan menengah menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat peningkatan utang publik. Mobilisasi sumber daya domestik, bantuan pembangunan resmi, investasi swasta, serta mekanisme pendanaan inovatif seperti blended finance, impact investing, dan green bonds diperlukan untuk mencapai target-target yang ambisius dalam SDGs. Peran sektor swasta menjadi semakin penting, dengan inisiatif seperti Business & Sustainable Development Commission yang menghitung potensi nilai pasar sebesar \$12 triliun per tahun yang bisa diciptakan melalui bisnis yang sejalan dengan SDGs.

Pemantauan dan evaluasi kemajuan SDGs dilakukan melalui 231 indikator yang telah disepakati secara global. Data yang akurat dan tepat waktu menjadi fondasi penting dalam mengukur pencapaian dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih. Namun, banyak negara masih menghadapi tantangan dalam kapasitas pengumpulan dan analisis data, terutama untuk indikator-indikator yang baru diperkenalkan dalam kerangka SDGs. Revolusi data untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan big data, penginderaan jauh, dan citizen-generated data, menawarkan solusi potensial untuk mengatasi kesenjangan data ini. SDGs juga mendorong pelaporan sukarela melalui Voluntary National Reviews (VNRs) yang dipresentasikan oleh negara-negara anggota PBB dalam High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF). Hingga tahun 2023, lebih dari 180 negara telah menyampaikan setidaknya satu VNR, menunjukkan komitmen global terhadap agenda SDGs.

Kritik terhadap kerangka SDGs juga muncul dari berbagai pihak, mulai dari kekhawatiran akan terlalu ambisiusnya target-target yang ditetapkan, kelemahan dalam mekanisme akuntabilitas, hingga pertanyaan tentang sejauh mana SDGs menantang struktur kekuasaan global yang mendasari ketimpangan pembangunan. Beberapa pengamat juga mempertanyakan pendekatan "triple bottom line" (ekonomi, sosial, lingkungan) yang mengasumsikan kompatibilitas antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan tanpa secara fundamental menantang model pertumbuhan ekonomi konvensional. Di tengah kritik ini, SDGs tetap menjadi kerangka rujukan utama dalam diskursus pembangunan global, dengan berbagai aktor dari pemerintah, bisnis, hingga masyarakat sipil yang menyelaraskan strategi mereka dengan agenda 2030 ini.

Dalam konteks Labuhanbatu Selatan, SDGs telah menjadi kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuan terkait pengentasan kemiskinan (SDG 1), ketahanan pangan (SDG 2), pendidikan berkualitas (SDG 4), dan pengelolaan ekosistem darat (SDG 15) menjadi prioritas mengingat karakteristik wilayah dan tantangan pembangunan yang dihadapi. Berdasarkan data BPS 2022, angka kemiskinan di Labuhanbatu Selatan masih mencapai 9,2%, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 68,3, di bawah rata-rata nasional 72,9. Implementasi SDGs mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi pendekatan pembangunan yang lebih terintegrasi dan inklusif, memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan dan pemerataan sosial. Tantangan utama dalam implementasi SDGs di kabupaten ini adalah keterbatasan kapasitas fiskal dan teknis, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Program-program inovatif seperti Desa Peduli SDGs, kemitraan dengan perusahaan perkebunan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) yang terarah, serta pelibatan aktif masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) menjadi strategi kunci untuk mempercepat pencapaian SDGs di tingkat lokal.

3. Pertumbuhan Penduduk & Urbanisasi Global

Pertumbuhan penduduk global terus berlanjut meskipun dengan laju yang semakin melambat, dengan proyeksi populasi dunia mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050 dan puncaknya sekitar 10,4 miliar pada tahun 2080 sebelum mulai menurun.

Namun, pola pertumbuhan ini sangat bervariasi antar wilayah; beberapa negara di Afrika dan Asia masih mengalami pertumbuhan pesat, sementara negara-negara maju di Eropa dan Asia Timur justru menghadapi penurunan populasi dan penuaan penduduk. Dinamika demografis yang beragam ini menciptakan tantangan yang berbeda-beda, mulai dari tekanan pada sumber daya dan layanan dasar di daerah dengan pertumbuhan tinggi, hingga masalah tenaga kerja dan jaminan sosial di negara dengan populasi yang menua. Sub-Sahara Afrika diproyeksikan menyumbang lebih dari setengah pertumbuhan populasi global hingga 2050, dengan Nigeria diperkirakan menjadi negara terpadat ketiga di dunia pada 2050, sementara populasi China diproyeksikan akan menurun hingga 31,4% pada akhir abad ini.

Urbanisasi menjadi salah satu trend demografis paling signifikan, dengan lebih dari 55% populasi dunia kini tinggal di wilayah perkotaan, dan angka ini diproyeksikan mencapai 68% pada 2050. Perpindahan masif dari desa ke kota didorong oleh pencarian peluang ekonomi yang lebih baik, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas, serta perubahan struktural dalam perekonomian dari berbasis pertanian menuju industri dan jasa. Kota-kota besar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, namun juga menghadapi tantangan berat terkait permukiman kumuh, kemacetan, polusi, dan ketimpangan sosial. Menurut UN-Habitat, hampir 1 miliar orang tinggal di permukiman kumuh perkotaan, dengan mayoritas berada di Asia dan Afrika. Di sisi lain, konsep kota cerdas (smart cities) dan pembangunan perkotaan berkelanjutan mendapat momentum, dengan inovasi teknologi seperti Internet of Things (IoT), analitik data, dan infrastruktur hijau yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup perkotaan.

Migrasi internasional semakin intensif dengan sekitar 281 juta orang (3,6% populasi global) tinggal di luar negara kelahirannya pada 2020, meningkat dari 173 juta pada tahun 2000. Tren ini didorong oleh faktor ekonomi, politik, konflik, dan perubahan iklim. Arus migrasi ini merubah komposisi demografis baik di negara asal maupun tujuan, menciptakan tantangan integrasi sosial dan budaya, namun juga membawa manfaat ekonomi melalui pengiriman remitansi dan transfer pengetahuan. Remitansi global mencapai \$626 miliar pada tahun 2022, jauh melebihi bantuan pembangunan resmi, menjadikannya sumber pendanaan eksternal yang vital bagi banyak negara berkembang. Migrasi terkait iklim juga meningkat, dengan estimasi 216 juta orang bisa terpaksa bermigrasi secara internal di negaranya sendiri akibat

dampak perubahan iklim pada 2050 jika tidak ada tindakan mitigasi yang memadai. Kebijakan migrasi menjadi isu yang semakin penting dan seringkali kontroversial dalam politik domestik di banyak negara, terutama di tengah meningkatnya sentimen nasionalis dan anti-migran.

Perubahan struktur keluarga dan pola fertilitas juga menjadi fenomena global, dengan tren menuju keluarga yang lebih kecil, penundaan usia pernikahan dan kelahiran anak pertama, serta meningkatnya jumlah rumah tangga yang dipimpin oleh wanita. Transisi demografis ini dipengaruhi oleh peningkatan tingkat pendidikan, partisipasi wanita dalam angkatan kerja, urbanisasi, serta akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Total Fertility Rate (TFR) global telah menurun dari 5 kelahiran per wanita pada tahun 1950 menjadi 2,3 pada tahun 2021, mendekati tingkat replacement level sebesar 2,1. Penurunan fertilitas ini, dikombinasikan dengan peningkatan harapan hidup, mengakibatkan populasi yang menua (*aging population*) di banyak negara, terutama di kawasan Eropa dan Asia Timur. Jepang, Italia, dan Korea Selatan memimpin dalam proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas, dengan implikasi serius terhadap sistem pensiun, layanan kesehatan, dan dinamika angkatan kerja.

Di Labuhanbatu Selatan, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi lokal menciptakan tekanan pada ketersediaan lahan dan infrastruktur perkotaan. Dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,8% per tahun (di atas rata-rata nasional 1,1%), populasi kabupaten ini diproyeksikan meningkat dari 354.000 jiwa pada 2022 menjadi sekitar 420.000 jiwa pada 2030. Konversi lahan pertanian menjadi permukiman dan kawasan komersial telah mengubah lanskap spasial daerah ini, dengan area terbangun meningkat sekitar 15% dalam dekade terakhir. Hal ini menciptakan tantangan dalam perencanaan tata ruang dan penyediaan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Migrasi penduduk dari daerah sekitar untuk bekerja di sektor perkebunan dan industri pengolahan hasil pertanian telah meningkatkan kebutuhan akan perumahan, transportasi publik, dan fasilitas sosial. Pertumbuhan kawasan perkotaan utama seperti Kota Pinang dan Kotapinang telah menciptakan ketimpangan spasial, dengan desa-desa terpencil masih tertinggal dalam hal aksesibilitas dan infrastruktur dasar. Selain itu, struktur demografis yang didominasi penduduk usia produktif (sekitar 65% penduduk berusia 15-64 tahun) membuka peluang "bonus demografi" yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

lokal jika diimbangi dengan investasi yang memadai di bidang pendidikan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja berkualitas terutama di sektor hilir perkebunan dan ekonomi digital.

4. Disrupsi Teknologi Global

Disrupsi teknologi global ditandai dengan percepatan inovasi yang mengubah secara fundamental cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Revolusi Industri 4.0 yang dicirikan oleh konvergensi teknologi digital, fisik, dan biologis telah memunculkan teknologi transformatif seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), robotika, dan bioteknologi. Kemajuan dalam kecerdasan buatan menjadi sangat signifikan, dengan model bahasa besar (LLMs) seperti ChatGPT dan Claude yang mampu melakukan percakapan kompleks, menghasilkan konten, dan memecahkan masalah dengan cara yang semakin menyerupai kemampuan manusia. Teknologi-teknologi ini tidak hanya mengotomatisasi pekerjaan rutin tetapi juga mulai mengambil alih tugas kognitif yang sebelumnya hanya bisa dilakukan manusia, mendorong transformasi struktural dalam pasar tenaga kerja global. Menurut McKinsey Global Institute, hingga 375 juta pekerja (14% angkatan kerja global) mungkin perlu beralih kategori pekerjaan pada 2030 akibat otomatisasi, sementara World Economic Forum memproyeksikan 85 juta pekerjaan akan hilang dan 97 juta pekerjaan baru akan tercipta pada 2025 akibat pergeseran dalam pembagian kerja antara manusia dan mesin.

Digitalisasi ekonomi berlangsung dengan cepat melalui pertumbuhan e-commerce, ekonomi platform, dan layanan berbasis aplikasi yang mengubah model bisnis tradisional. Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple, Amazon, Google, dan Alibaba telah menjadi pemain dominan dalam ekonomi global, bahkan melampaui nilai pasar perusahaan-perusahaan di sektor tradisional. Kapitalisasi pasar lima perusahaan teknologi terbesar (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, dan Meta) mencapai lebih dari \$8 triliun pada 2023, melebihi PDB banyak negara besar. Ekonomi platform yang menghubungkan pembeli dan penjual secara langsung telah menciptakan efisiensi pasar yang signifikan namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait monopoli dan persaingan usaha. Sementara inovasi teknologi membuka peluang pertumbuhan dan efisiensi, juga menciptakan tantangan regulasi baru terkait monopoli digital, perpajakan, perlindungan data, dan hak-hak pekerja dalam ekonomi

gig. Uni Eropa telah memimpin dalam regulasi teknologi melalui legislasi seperti GDPR untuk perlindungan data, Digital Markets Act untuk mengatasi praktik anti-persaingan, dan AI Act untuk mengatur aplikasi kecerdasan buatan berisiko tinggi.

Kesenjangan digital menjadi perhatian serius, dimana akses dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital terdistribusi secara tidak merata antara negara maju dan berkembang, antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antar kelompok sosial ekonomi. Data International Telecommunication Union (ITU) menunjukkan bahwa 2,7 miliar orang (sekitar 34% populasi global) masih tidak memiliki akses internet pada 2022, dengan sebagian besar berada di negara berpendapatan rendah. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan yang sudah ada dalam hal pendapatan, kesempatan pendidikan, dan akses layanan. Inisiatif global untuk menjembatani kesenjangan digital menjadi semakin penting, termasuk ekspansi infrastruktur broadband, penurunan biaya perangkat dan akses internet, serta pengembangan literasi digital. Investasi dalam infrastruktur digital dan literasi teknologi menjadi kunci untuk memastikan manfaat revolusi digital dapat dinikmati secara inklusif.

Teknologi juga mengubah cara pemerintahan dan partisipasi politik melalui inisiatif e-government, media sosial, dan platform crowdsourcing. Di satu sisi, teknologi digital menawarkan potensi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Estonia menjadi contoh unggulan dengan 99% layanan pemerintahnya tersedia secara online, menghemat sekitar 1.400 tahun waktu kerja setiap tahunnya. Di sisi lain, juga memunculkan tantangan baru seperti penyebaran disinformasi, manipulasi politik, dan kekhawatiran terkait pengawasan massal serta pelanggaran privasi. Teknologi digital telah menjadi arena pertarungan geopolitik, dengan negara-negara besar seperti AS, Tiongkok, dan Uni Eropa bersaing untuk mendominasi teknologi strategis seperti 5G, semi konduktor, dan kecerdasan buatan. Regulasi teknologi global semakin terfragmentasi dengan pendekatan berbeda antara model "digital sovereignty" Eropa, pendekatan laissez-faire AS, dan model kontrol negara Tiongkok, mencerminkan pandangan berbeda tentang hak digital, privasi, dan peran pemerintah dalam mengatur ruang digital.

Disrupsi teknologi memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Labuhanbatu Selatan. Penerapan teknologi pertanian presisi (precision agriculture) berpotensi meningkatkan produktivitas dan efisiensi perkebunan sawit dan karet yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Penggunaan drone untuk pemetaan lahan, sensor IoT untuk pemantauan kondisi tanah dan tanaman, serta aplikasi digital untuk manajemen rantai pasok dapat meningkatkan hasil panen hingga 15-20% sekaligus mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida. Digitalisasi juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal melalui platform e-commerce, namun hal ini mensyaratkan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas internet yang masih menjadi kendala di beberapa wilayah pedesaan. Data menunjukkan bahwa penetrasi internet di kabupaten ini baru mencapai 62%, di bawah rata-rata Sumatera Utara (73%), dengan disparitas signifikan antara area perkotaan dan pedesaan. Dalam sektor pemerintahan, teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui sistem e-government, meskipun kesenjangan digital dan rendahnya literasi teknologi di sebagian masyarakat perlu diatasi untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Program pelatihan keterampilan digital untuk generasi muda, penguatan infrastruktur komunikasi hingga ke tingkat desa, serta inkubasi startup lokal yang berfokus pada solusi teknologi untuk sektor pertanian dan perkebunan menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat transformasi digital bagi pembangunan daerah.

5. Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global telah menjadi salah satu tantangan paling mendesak yang dihadapi umat manusia, dengan bukti ilmiah yang semakin kuat mengenai peningkatan suhu rata-rata global, kenaikan permukaan laut, dan meningkatnya frekuensi serta intensitas cuaca ekstrem. Laporan terbaru dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa aktivitas manusia telah mengakibatkan pemanasan global sekitar 1,1°C dibandingkan era pra-industri, dengan proyeksi akan mencapai atau melampaui 1,5°C dalam beberapa dekade mendatang jika tidak ada tindakan drastis untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah pengukuran modern, dengan suhu rata-rata global 1,48°C di atas level pra-industri. Pemanasan global yang dipercepat ini telah mengakibatkan mencairnya es di kutub dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dimana Arktik kehilangan 13% tutupan es per dekade, sementara

lapisan es Greenland dan Antartika menyumbang kenaikan permukaan laut sebesar 1,2 mm per tahun.

Dampak perubahan iklim sudah terasa di berbagai belahan dunia, mulai dari gelombang panas yang mematikan, kebakaran hutan yang meluas, banjir dahsyat, hingga kekeringan berkepanjangan yang mengancam ketahanan pangan dan ketersediaan air. Menurut laporan dari World Meteorological Organization, jumlah bencana terkait cuaca telah meningkat lima kali lipat dalam 50 tahun terakhir. Ekosistem natural seperti terumbu karang, hutan hujan tropis, dan daerah kutub mengalami tekanan berat, mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi jasa ekosistem yang vital bagi kesejahteraan manusia. Sekitar 50% terumbu karang dunia telah hilang dalam beberapa dekade terakhir, sementara wilayah Amazon mengalami deforestasi yang mengancam fungsinya sebagai "paru-paru dunia". Komunitas yang paling rentan, terutama di negara berkembang, menanggung beban dampak yang tidak proporsional meskipun kontribusi mereka terhadap emisi historis relatif kecil. Menurut Bank Dunia, perubahan iklim berpotensi mendorong lebih dari 130 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem pada 2030 dan memaksa perpindahan internal hingga 216 juta orang pada 2050 jika tidak ada tindakan yang memadai.

Kesepakatan Paris 2015 menandai titik balik dalam upaya global mengatasi perubahan iklim, dengan komitmen hampir seluruh negara di dunia untuk membatasi pemanasan global di bawah 2°C, bahkan berupaya untuk 1,5°C dibandingkan level pra-industri. Untuk mencapai target ini dibutuhkan transisi besar dari ekonomi berbasis bahan bakar fosil menuju energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, perubahan pola konsumsi dan produksi, serta pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Namun, kesenjangan antara komitmen yang ada dengan upaya yang diperlukan masih cukup besar. Nationally Determined Contributions (NDCs) yang diajukan negara-negara hingga saat ini, jika diimplementasikan sepenuhnya, diproyeksikan masih akan menghasilkan pemanasan sekitar 2,4-2,7°C pada akhir abad ini. COP28 di Dubai pada 2023 menghasilkan kesepakatan bersejarah untuk "transition away from fossil fuels," meskipun tanpa menyebutkan secara eksplisit "phasing out" yang lebih tegas, mencerminkan kompleksitas politik dan ekonomi dalam transisi energi global.

Pendanaan iklim dan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang menjadi isu krusial dalam diplomasi iklim internasional. Mobilisasi 100 miliar dolar AS per tahun yang dijanjikan negara maju untuk mendukung mitigasi dan adaptasi di negara berkembang belum terpenuhi sepenuhnya, dengan realisasi sekitar 83 miliar dolar pada 2020. Kebutuhan pendanaan iklim yang sebenarnya jauh lebih besar, dengan estimasi mencapai 1 triliun dolar tahunan untuk negara berkembang pada 2030. Sementara itu, konsep keadilan iklim (climate justice) semakin mengemuka, menekankan perlunya pengakuan terhadap tanggung jawab historis negara-negara industrialisasi awal dan prinsip "common but differentiated responsibilities" dalam upaya global mengatasi krisis iklim. Loss and Damage Fund yang disepakati pada COP27 dan diopersasionalkan pada COP28 merupakan pengakuan atas kebutuhan untuk mengatasi kerugian dan kerusakan yang sudah tidak dapat diadaptasi atau dimitigasi, meskipun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan terkait pendanaan dan tata kelola.

Perubahan iklim memberikan ancaman serius bagi Labuhanbatu Selatan yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu berpotensi mengganggu produktivitas tanaman kelapa sawit dan karet, dua komoditas utama daerah ini. Data dari BMKG menunjukkan peningkatan suhu rata-rata sebesar 0,8°C dalam tiga dekade terakhir di wilayah ini, sementara curah hujan tahunan menunjukkan variabilitas yang semakin tinggi. Studi Institut Pertanian Bogor memproyeksikan produktivitas kelapa sawit di Sumatera Utara berpotensi menurun hingga 15-30% pada 2050 akibat perubahan iklim jika tidak ada adaptasi yang memadai. Risiko banjir meningkat di beberapa wilayah akibat curah hujan ekstrem, seperti yang terjadi pada 2022 ketika banjir bandang merendam 5 kecamatan dan mengakibatkan kerugian ekonomi sekitar Rp75 miliar. Sementara itu, kekeringan mengancam ketersediaan air bersih dan irigasi di wilayah lainnya, terutama selama periode El Niño. Kondisi ini mendorong perlunya strategi adaptasi seperti pengembangan varietas tanaman tahan iklim, diversifikasi komoditas pertanian, manajemen air terpadu, serta sistem peringatan dini bencana. Beberapa program adaptasi yang telah diinisiasi meliputi pembangunan embung air untuk mengatasi kekeringan, pengembangan sistem irigasi hemat air, serta agroforestri yang menggabungkan tanaman perkebunan dengan pohon peneduh untuk mengurangi risiko kekeringan dan erosi. Di sisi lain, isu mitigasi perubahan iklim juga

menimbulkan tekanan bagi praktik perkebunan kelapa sawit untuk mengurangi emisi dari konversi lahan gambut dan deforestasi, mendorong adopsi standar keberlanjutan seperti RSPO dan ISPO yang semakin menjadi prasyarat akses pasar internasional.

6. Sumber Energi Alternatif

Perkembangan sumber energi alternatif menjadi salah satu tren global yang paling signifikan dalam upaya transisi menuju ekonomi rendah karbon dan mengatasi krisis energi. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, panas bumi, dan bioenergi mengalami pertumbuhan pesat dalam dua dekade terakhir, didukung oleh penurunan biaya yang dramatis dan kebijakan yang kondusif di banyak negara. Kapasitas terpasang energi terbarukan global mencapai 3.372 GW pada 2022, dengan penambahan rekor sebesar 295 GW (40% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya). Khususnya untuk tenaga surya fotovoltaik dan tenaga angin, biaya telah turun lebih dari 80% sejak 2010, menjadikannya sumber listrik baru termurah di banyak bagian dunia, bahkan lebih murah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil. Biaya energi surya telah turun dari \$378/MWh pada 2010 menjadi \$36/MWh pada 2022, membuatnya menjadi sumber energi termurah di sebagian besar pasar global. Kebijakan pemerintah termasuk feed-in tariff, renewable portfolio standards, dan lelang energi terbarukan, dikombinasikan dengan komitmen Net Zero dari 196 negara, telah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk akselerasi investasi energi terbarukan.

Transformasi sistem energi global tidak hanya mencakup sumber pembangkitan listrik, tetapi juga elektrifikasi sektor yang tradisional bergantung pada bahan bakar fosil seperti transportasi dan industri. Kendaraan listrik mengalami adopsi yang pesat, dengan penjualan global mencapai 14 juta unit pada 2022 (mewakili 14% penjualan mobil baru global), meningkat dari hanya 120.000 unit pada 2012. Banyak negara telah mengumumkan larangan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil baru dalam beberapa dekade mendatang, dengan Norwegia menargetkan 2025, Inggris 2030, dan Uni Eropa 2035. Sementara itu, hidrogen hijau (green hydrogen) yang diproduksi dari elektrolisis air menggunakan energi terbarukan muncul sebagai opsi menjanjikan untuk mendekarbonisasi industri berat dan transportasi jarak jauh yang sulit dielektrifikasi. Investasi global dalam hidrogen hijau mencapai \$1,4 miliar pada 2022, dengan proyeksi meningkat drastis menjadi \$150 miliar pada 2025, didorong

oleh kebijakan seperti US Inflation Reduction Act dan EU Green Deal Industrial Plan yang menawarkan insentif signifikan untuk pengembangan teknologi ini.

Teknologi penyimpanan energi, terutama baterai, menjadi komponen kritis dalam transisi energi untuk mengatasi sifat intermiten dari beberapa sumber energi terbarukan seperti surya dan angin. Kapasitas penyimpanan baterai grid-scale global meningkat hampir tiga kali lipat dalam tiga tahun terakhir, mencapai 30 GW pada 2022. Inovasi dalam teknologi baterai lithium-ion dan alternatif lainnya telah menurunkan biaya penyimpanan energi dari \$1.200/kWh pada 2010 menjadi sekitar \$151/kWh pada 2022, dengan proyeksi akan mencapai \$100/kWh pada 2025, titik di mana kendaraan listrik mencapai paritas harga dengan kendaraan konvensional tanpa subsidi. Selain lithium-ion, teknologi baterai alternatif seperti sodium-ion, solid-state, dan flow batteries menjanjikan peningkatan dalam kepadatan energi, keamanan, dan keberlanjutan. Selain itu, pengembangan jaringan listrik pintar (smart grid) dan teknologi respons permintaan (demand response) membuka peluang untuk pengelolaan energi yang lebih fleksibel dan efisien, memungkinkan integrasi yang lebih besar dari sumber energi terbarukan yang variabel ke dalam grid.

Meskipun tren menuju energi terbarukan semakin kuat, transisi energi global menghadapi tantangan kompleks terkait akses energi yang merata, keamanan pasokan, dan keterjangkauan. Sekitar 760 juta orang di dunia masih tidak memiliki akses listrik dasar, terutama di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan. Sementara itu, ketergantungan pada mineral kritis seperti lithium, kobalt, nikel, dan elemen tanah jarang untuk teknologi energi bersih menciptakan tantangan baru terkait keamanan rantai pasok dan dampak lingkungan dari pertambangan. Harga lithium, misalnya, mengalami volatilitas ekstrem, meningkat 700% antara 2021-2022 sebelum turun drastis pada 2023. Pendekatan "transisi yang adil" (just transition) menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa komunitas dan pekerja yang bergantung pada industri bahan bakar fosil tidak ditinggalkan dalam proses transformasi energi. Program retooling dan reskilling untuk pekerja, diversifikasi ekonomi wilayah berbasis batubara, serta mekanisme perlindungan sosial menjadi elemen penting dalam strategi transisi yang adil yang diadopsi oleh berbagai negara.

Perkembangan energi alternatif membuka peluang baru bagi Labuhanbatu Selatan untuk memanfaatkan potensi biomassa dari limbah kelapa sawit sebagai

sumber energi terbarukan. Dengan produksi CPO sekitar 500.000 ton per tahun, kabupaten ini menghasilkan sekitar 1,1 juta ton limbah padat berupa tandan kosong, cangkang, dan fiber, serta 1,5 juta m³ limbah cair (POME) yang berpotensi menghasilkan biogas. Pemanfaatan tandan kosong, cangkang, dan limbah cair (POME) dari pabrik kelapa sawit dapat menghasilkan listrik dan biogas melalui teknologi pembangkit listrik tenaga biomassa dan biodigester, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mengatasi masalah limbah industri. Studi kelayakan menunjukkan bahwa limbah kelapa sawit di kabupaten ini berpotensi menghasilkan listrik hingga 30 MW, cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 75.000 rumah tangga. Dua pabrik kelapa sawit terbesar di kabupaten ini telah mengimplementasikan sistem pembangkit listrik tenaga biogas dengan kapasitas total 4 MW, mengurangi emisi CO₂ sekitar 25.000 ton per tahun. Selain itu, posisi geografis di daerah tropis dengan rata-rata penyinaran matahari 5-6 jam per hari memberikan potensi untuk pengembangan energi surya skala kecil hingga menengah, terutama untuk menjangkau area terpencil yang belum terhubung dengan jaringan listrik nasional. Program desa mandiri energi yang menggabungkan panel surya untuk penerangan dan pompa air bertenaga surya untuk irigasi telah diimplementasikan di tiga desa percontohan, meningkatkan produktivitas pertanian dan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan energi terbarukan lokal dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam instalasi dan pemeliharaan sistem energi terbarukan, mengurangi biaya energi jangka panjang, dan berkontribusi pada target nasional energi bersih.

7. Geopolitik dan Geoekonomi Kawasan

Lanskap geopolitik dan geoekonomi global sedang mengalami transformasi fundamental dengan munculnya tatanan dunia multipolar yang ditandai oleh persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan militer global telah menggeser keseimbangan kekuasaan, terutama di kawasan Indo-Pasifik, menstimulasi berbagai respons dari negara-negara di kawasan tersebut. PDB Tiongkok telah mencapai sekitar 70% PDB AS pada 2023 (berdasarkan nilai tukar pasar), naik dari hanya 12% pada tahun 2000. Dalam aspek militer, anggaran pertahanan Tiongkok meningkat secara konsisten dengan rata-rata 7% per tahun selama dekade terakhir, mencapai \$225 miliar pada 2023. Inisiatif Belt and Road (BRI) Tiongkok yang ambisius telah memperluas pengaruh ekonomi dan strategi Beijing di Asia, Afrika, dan bahkan Eropa, dengan

investasi kumulatif mencapai \$1 triliun sejak diluncurkan pada 2013, namun juga memunculkan kekhawatiran tentang "diplomasi jebakan utang" dan dominasi infrastruktur vital oleh perusahaan Tiongkok. Sebagai respons, AS dan sekutunya telah meluncurkan inisiatif tandingan seperti Build Back Better World (B3W) dan Global Gateway dari Uni Eropa, meskipun dengan skala pendanaan yang lebih terbatas.

Regionalisme dan blok perdagangan menjadi fitur penting dalam arsitektur ekonomi global, dengan perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Asia-Pasifik yang mencakup 30% PDB global, African Continental Free Trade Area (AfCFTA) di Afrika yang membentuk pasar tunggal dengan 1,3 miliar konsumen, dan upaya revitalisasi integrasi di Amerika Latin dan Karibia. Blok-blok ekonomi regional ini mencerminkan pergeseran dari multilateralisme global yang dipimpin oleh institusi seperti WTO menuju pendekatan regional dan plurilateral dalam mengatur perdagangan dan investasi. WTO sebagai badan global pembuat aturan perdagangan menghadapi krisis eksistensial dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang terhambat dan negosiasi putaran Doha yang macet. Pandemi COVID-19 dan disrupsi rantai pasok yang menyertainya telah mempercepat trend ini, dengan banyak negara yang berupaya membangun ketahanan ekonomi regional sebagai tanggapan terhadap kerentanan globalisasi. Konsep "friendshoring" (memindahkan produksi ke negara-negara sekutu) dan "nearshoring" (memindahkan produksi lebih dekat ke pasar konsumen) semakin populer, mengubah arsitektur rantai pasok global yang telah terbentuk selama dekade terakhir.

Kompetisi untuk mengamankan sumber daya strategis seperti mineral kritis untuk teknologi hijau (lithium, kobalt, nikel), teknologi semi-konduktor, dan supremasi teknologi digital semakin intensif antar negara-negara besar. Lima negara menguasai lebih dari 80% cadangan lithium global (Bolivia, Argentina, Chile, Australia, China), sementara China mendominasi pemrosesan mineral kritis dengan kapasitas lebih dari 70% untuk kobalt dan lithium. Kontrol atas rantai pasok teknologi kunci menjadi arena baru persaingan geopolitik, dengan negara-negara menerapkan berbagai instrumen dari subsidi industri hingga pembatasan ekspor dan kontrol investasi asing. AS telah mengalokasikan \$52 miliar melalui CHIPS Act untuk revitalisasi industri semi-konduktor domestik, sementara Uni Eropa menargetkan 20% produksi chip global

pada 2030 melalui European Chips Act. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang yang kaya sumber daya menghadapi tantangan dan peluang baru untuk menegosiasikan kesepakatan yang lebih menguntungkan dengan kekuatan global yang bersaing memperebutkan akses ke sumber daya mereka. Indonesia, misalnya, menggunakan posisinya sebagai produsen nikel terbesar di dunia untuk mendorong kebijakan hilirisasi dan menarik investasi asing dalam industri baterai dan kendaraan listrik.

Ancaman keamanan non-tradisional seperti terorisme, kejahatan transnasional, keamanan siber, dan keamanan maritim semakin mendapat perhatian dalam agenda geopolitik regional. Serangan siber global meningkat 38% pada 2022 dibanding tahun sebelumnya, dengan biaya kerusakan yang diproyeksikan mencapai \$10,5 triliun pada 2025. Di Asia Tenggara khususnya, sengketa teritorial di Laut China Selatan, dimana China mengklaim hampir 90% wilayah berdasarkan "nine-dash line" yang ditentang oleh Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, menjadi flashpoint potensial. Isu keamanan maritim terkait perompakan dan penyelundupan, terlihat dari sekitar 100 insiden perompakan tahunan di Selat Malaka dan Laut Sulu, serta ancaman ekstremisme kekerasan menjadi perhatian bersama. Respons kolektif melalui mekanisme regional seperti ASEAN, namun juga melalui aliansi bilateral dan minilateral seperti QUAD (AS, Jepang, India, Australia) dan AUKUS (Australia, Inggris, AS), menjadi semakin penting dalam menghadapi kompleksitas tantangan keamanan kontemporer. Penguatan kapasitas lembaga multilateral regional seperti ASEAN Regional Forum, ASEAN Defense Ministers Meeting Plus, dan East Asia Summit menjadi krusial untuk mengelola tensi geopolitik dan membangun arsitektur keamanan regional yang inklusif.

Dinamika geopolitik dan geoekonomi kawasan berdampak pada Labuhanbatu Selatan terutama melalui kebijakan perdagangan dan investasi. Sebagai daerah penghasil komoditas ekspor seperti minyak sawit dan karet, ketegangan perdagangan dan perubahan kebijakan impor negara tujuan seperti India, Tiongkok, dan Uni Eropa secara langsung mempengaruhi harga dan permintaan pasar. Kebijakan Uni Eropa melalui EU Deforestation Regulation (EUDR) yang efektif diterapkan pada 2024 mensyaratkan produk kelapa sawit harus bebas deforestasi, menghadirkan tantangan sekaligus dorongan untuk praktik perkebunan berkelanjutan di kabupaten ini. Sementara itu, perlambatan ekonomi Tiongkok yang membeli sekitar 30% ekspor

CPO Indonesia berpotensi menurunkan permintaan dan harga. Investasi asing, terutama dari perusahaan Malaysia dan Singapura dalam sektor perkebunan dan pengolahan, juga dipengaruhi oleh hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tersebut dan stabilitas kawasan secara keseluruhan. Tercatat investasi asing di kabupaten ini mencapai Rp2,7 triliun pada 2022, didominasi sektor perkebunan, pengolahan hasil pertanian, dan energi terbarukan. Posisi geografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan akses ke Selat Malaka (melalui Pelabuhan Tanjung Balai sekitar 150 km) memberikan potensi untuk pengembangan koridor ekonomi regional, terutama jika terhubung dengan jaringan infrastruktur yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun ASEAN. Program pembangunan jalan tol Medan-Riau yang akan melewati wilayah ini dan peningkatan kapasitas pelabuhan di pantai timur Sumatera akan memperkuat konektivitas dengan pasar regional, meningkatkan daya saing produk lokal. Dalam konteks keamanan non-tradisional, tantangan seperti penyelundupan komoditas dan obat terlarang melalui jalur perbatasan darat dan laut memerlukan kerjasama keamanan lintas wilayah yang lebih efektif.

8. Ketahanan Pangan Global

Ketahanan pangan global menghadapi tantangan kompleks dari berbagai faktor yang saling terkait, termasuk perubahan iklim, pertumbuhan populasi, perubahan pola konsumsi, konflik geopolitik, dan disrupsi rantai pasok. Menurut laporan *State of Food Security and Nutrition in the World* (2023), sekitar 735 juta orang menghadapi kelaparan kronis, sementara 2,3 miliar orang (29,6% populasi global) mengalami ketidakamanan pangan moderat hingga parah. Pandemi COVID-19 dan konflik di Ukraina—sebagai lumbung gandum dunia—telah memperberat situasi ini, dengan Indeks Harga Pangan FAO meningkat 50% antara 2020-2022 sebelum menurun moderat pada 2023. Volatilitas harga pangan global yang tinggi berdampak disproportional pada negara berpendapatan rendah yang sangat bergantung pada impor pangan, dengan beberapa negara Afrika dan Timur Tengah mengalokasikan hingga 40% pengeluaran rumah tangga untuk makanan.

Ketergantungan global terhadap sejumlah kecil komoditas pangan utama (gandum, beras, jagung, dan kedelai) menciptakan kerentanan dalam sistem pangan. Empat tanaman ini menyediakan hampir 60% kalori yang dikonsumsi manusia secara

global, dengan produksi terkonsentrasi di beberapa negara eksportir utama. Serangan hama, penyakit tanaman, atau kondisi cuaca ekstrem di wilayah produsen utama dapat menyebabkan guncangan pasokan yang signifikan. Selain itu, intensifikasi pertanian dengan input tinggi telah berkontribusi pada degradasi lahan, dengan FAO memperkirakan 33% lahan pertanian dunia terdegradasi moderat hingga parah, mengancam produktivitas jangka panjang. Perubahan iklim diproyeksikan akan menurunkan hasil pertanian secara global sebesar 10-25% per dekade, dengan dampak paling parah di wilayah tropis yang seringkali memiliki kapasitas adaptasi terbatas.

Transformasi sistem pangan global menuju keberlanjutan dan ketahanan telah menjadi agenda prioritas internasional, tercermin dari UN Food Systems Summit 2021 dan berbagai inisiatif multilateral. Pendekatan "food systems approach" menekankan keterkaitan antara produksi, distribusi, konsumsi, dan pengelolaan limbah pangan, mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Inovasi pertanian seperti pertanian presisi, teknologi penginderaan jauh, seleksi genomik, dan bioteknologi menawarkan potensi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi jejak lingkungan. Sementara itu, konsep "agroekologi" yang mengintegrasikan pengetahuan tradisional dengan ilmu modern untuk mengoptimalkan interaksi biologis dalam ekosistem pertanian menarik perhatian sebagai pendekatan alternatif terhadap model pertanian industrial.

Perdebatan tentang ketahanan pangan juga bersinggungan dengan isu kedaulatan pangan, yang menekankan hak masyarakat dan negara untuk menentukan sistem pangan mereka sendiri. Gerakan La Via Campesina yang mewakili lebih dari 200 juta petani kecil global telah menjadi advokat utama kedaulatan pangan, menantang dominasi korporasi agribisnis multinasional dalam rantai nilai pangan global. Di sisi lain, pendekatan "trade not aid" menekankan perdagangan bebas komoditas pertanian sebagai mekanisme untuk meningkatkan ketahanan pangan global, meskipun kebijakan proteksionis di sektor pertanian tetap lazim di banyak negara. Sementara itu, perhatian pada gizi dan diet sehat semakin menjadi fokus kebijakan pangan dengan meningkatnya masalah ganda malnutrisi: 768 juta orang kekurangan gizi kronis sementara 1,9 miliar orang dewasa mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, mendesak transformasi tidak hanya dalam cara kita memproduksi pangan tetapi juga jenis pangan yang diproduksi.

Ketahanan pangan global berimplikasi signifikan bagi Labuhanbatu Selatan yang memiliki karakteristik unik sebagai sentra produksi perkebunan namun masih menghadapi tantangan ketahanan pangan lokal. Dengan 65% lahan pertanian dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet yang berorientasi ekspor, kabupaten ini menghadapi dilema "food vs. fuel" dalam pemanfaatan lahan. Menurut Dinas Ketahanan Pangan daerah, tingkat swasembada pangan pokok (beras) kabupaten hanya mencapai 65%, sementara untuk protein dan sayuran mencapai 70-75%, menciptakan ketergantungan pada impor dari kabupaten tetangga. Tren harga pangan global yang volatil mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi 9,2% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam merespons tantangan ini, pemerintah kabupaten telah mengembangkan program diversifikasi pangan lokal berbasis umbi-umbian dan sagu, pengembangan lumbung pangan desa, serta integrasi sawit-ternak yang memanfaatkan lahan di antara tanaman sawit untuk budi daya ternak dan tanaman pangan. Model pertanian terpadu ini telah meningkatkan ketahanan pangan 12 desa percontohan sekaligus memberikan pendapatan tambahan bagi petani sawit. Kebijakan pembatasan konversi lahan pangan menjadi perkebunan juga diterapkan untuk memastikan keseimbangan antara komoditas ekspor dan produksi pangan lokal.

9. Kesehatan Global dan Pandemi

Kesehatan global dan ancaman pandemi telah menjadi isu strategis yang semakin mendesak, terutama pasca COVID-19 yang menghantam sistem kesehatan dan ekonomi global dengan dampak belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 700 juta orang dan menyebabkan lebih dari 6,9 juta kematian (angka resmi, dengan estimasi kematian berlebih yang jauh lebih tinggi), menunjukkan kerentanan kolektif kita terhadap ancaman patogen baru. Pandemi ini juga mengekspos kesenjangan besar dalam sistem kesehatan global: negara-negara berpendapatan tinggi dengan 16% populasi dunia mengamankan 70% dosis vaksin pada tahap awal distribusi, sementara banyak negara berpendapatan rendah harus menunggu berbulan-bulan untuk memulai kampanye vaksinasi mereka. Fenomena ini telah memperkuat urgensi untuk membangun arsitektur kesehatan global yang lebih adil dan responsif, termasuk reformasi World Health Organization (WHO) dan pengembangan perjanjian pandemi internasional yang lebih kuat.

Beban penyakit global mengalami transisi kompleks, dengan penyakit tidak menular (non-communicable diseases/NCDs) seperti penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, dan gangguan pernapasan kronis kini menjadi penyebab utama kematian global. NCDs menyebabkan 74% kematian global (41 juta orang) setiap tahunnya, dengan 85% kematian prematur terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah. Sementara itu, penyakit menular tradisional seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria tetap menjadi tantangan signifikan di banyak wilayah Global South, menciptakan "beban ganda" penyakit yang membebani sistem kesehatan. Resistensi antimikroba (AMR) juga muncul sebagai ancaman kesehatan global yang serius, dengan estimasi menyebabkan 4,95 juta kematian pada 2019 dan berpotensi menjadi penyebab utama kematian global pada 2050 jika tidak ditangani. Perubahan iklim semakin memperburuk tantangan kesehatan melalui perluasan wilayah penyakit yang ditularkan vektor, gelombang panas yang lebih sering dan intens, serta risiko ketahanan pangan dan air bersih.

Kemajuan teknologi kesehatan membuka peluang baru namun juga menimbulkan tantangan regulasi dan akses. Pengembangan vaksin mRNA yang revolusioner, diagnostik point-of-care, terapi genetik, dan aplikasi kecerdasan buatan dalam diagnostik dan pengembangan obat menjanjikan transformasi dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Genome sequencing yang lebih cepat dan murah memungkinkan deteksi dini patogen baru dan pendekatan personalized medicine. Namun, inovasi ini seringkali tidak tersedia secara merata; 80% perangkat medis global digunakan oleh 20% populasi dunia. Kesenjangan digital dalam kesehatan (digital health divide) juga menjadi perhatian seiring dengan meluasnya adopsi telemedicine dan digital health platforms, yang sementara meningkatkan akses di beberapa wilayah, berpotensi memperlebar kesenjangan kesehatan bagi populasi tanpa akses teknologi digital. Perdebatan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (TRIPS) versus kebutuhan akses terhadap obat-obatan esensial terus berlanjut, dengan tekanan meningkat untuk reformasi sistem inovasi farmasi global.

Global health diplomacy semakin mendapatkan perhatian sebagai komponen penting dalam hubungan internasional, dengan aktor tradisional seperti WHO dan organisasi multilateral lainnya kini beroperasi dalam ekosistem yang lebih kompleks yang melibatkan yayasan filantropi besar (seperti Bill & Melinda Gates Foundation), inisiatif public-private partnership (seperti GAVI dan Global Fund), serta pemain baru

seperti Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Kesiapsiagaan pandemi menjadi prioritas keamanan nasional dan global pasca COVID-19, dengan peningkatan investasi dalam sistem pengawasan (surveillance), kapasitas laboratorium, dan infrastruktur kesehatan masyarakat. Kesehatan global juga semakin terpolitisasi, terlihat dari "diplomasi masker" dan "diplomasi vaksin" selama pandemi COVID-19, menunjukkan bagaimana bantuan kesehatan dapat menjadi instrumen soft power dalam persaingan geopolitik. Seiring dengan ini, pendekatan "One Health" yang mengakui keterhubungan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan mendapatkan pengakuan lebih luas, terutama dalam konteks pencegahan penyakit zoonosis yang menjadi sumber sebagian besar pandemi modern.

Kesehatan global dan isu pandemi memberikan pelajaran berharga dan tantangan baru bagi Labuhanbatu Selatan. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan dengan 7.240 kasus terkonfirmasi dan 218 kematian, serta kontraksi ekonomi sebesar 2,7% pada 2020. Selain dampak kesehatan langsung, pandemi juga mengakibatkan gangguan pada layanan kesehatan rutin seperti imunisasi (penurunan cakupan dari 85% menjadi 71%) dan program pengendalian tuberkulosis dan HIV. Infrastruktur kesehatan kabupaten yang terdiri dari 2 rumah sakit, 17 puskesmas, dan 65 pusat kesehatan desa menghadapi tekanan berat selama puncak pandemi, menunjukkan kebutuhan untuk penguatan ketahanan sistem kesehatan lokal. Profil kesehatan daerah menunjukkan transisi epidemiologi dengan peningkatan penyakit tidak menular seperti hipertensi (prevalensi 18,6%) dan diabetes (prevalensi 7,3%), namun tetap menghadapi tantangan penyakit menular seperti tuberkulosis (case notification rate 178/100.000 penduduk) dan malaria di beberapa kecamatan. Pola perkebunan monokultur yang luas juga menciptakan risiko kesehatan spesifik terkait penggunaan pestisida dan limbah industri perkebunan. Program-program inovatif pasca-pandemi meliputi peningkatan sistem surveilans berbasis digital yang terintegrasi hingga tingkat desa, penguatan kapasitas laboratorium puskesmas untuk deteksi patogen prioritas, dan pengembangan cadangan logistik kesehatan darurat. Kemitraan dengan perusahaan perkebunan juga diperkuat untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi pekerja perkebunan dan masyarakat sekitar melalui program corporate social responsibility bidang kesehatan.

10. Keamanan Siber dan Transformasi Digital

Keamanan siber telah berkembang dari isu teknis menjadi prioritas keamanan nasional dan internasional seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat, ekonomi, dan infrastruktur kritis pada sistem digital. Serangan siber global menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, meningkat 38% pada 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rata-rata 1 organisasi diserang setiap 39 detik. Biaya ekonomi dari kejahatan siber diproyeksikan mencapai \$10,5 triliun secara global pada 2025, melebihi nilai perdagangan narkoba global dan mewakili transfer kekayaan terbesar dalam sejarah. Aktor ancaman siber semakin beragam, mencakup kelompok kriminal terorganisir, hacker yang disponsori negara (state-sponsored hackers), hacktivists, dan insider threats. Jenis serangan juga semakin canggih, dengan ransomware menjadi ancaman dominan yang meningkat 13% pada 2022, melebihi peningkatan lima tahun sebelumnya digabungkan. Serangan pada infrastruktur kritis seperti jaringan listrik, sistem air, layanan kesehatan, dan sistem transportasi menunjukkan potensi dampak serangan siber melampaui domain digital ke dunia fisik.

Dimensi geopolitik keamanan siber semakin menonjol dengan aktivitas siber agresif menjadi domain baru persaingan antarnegara. Operasi pengaruh digital (digital influence operations), kampanye disinformasi, dan serangan pada infrastruktur pemilu telah mengancam proses demokratis di berbagai negara. Sementara itu, "perang proksi siber" (cyber proxy wars) memungkinkan negara-negara untuk melakukan operasi ofensif dengan deniability yang masuk akal. Arsitektur keamanan siber global masih dalam tahap perkembangan, dengan berbagai forum multilateral seperti UN Group of Governmental Experts on Cybersecurity, Open-Ended Working Group, dan inisiatif regional seperti EU Cybersecurity Strategy dan ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy yang berupaya mengembangkan norma dan aturan dalam perilaku negara di dunia maya. Fragmentasi dalam pendekatan regulasi siber juga terlihat, dengan model keamanan siber "digital sovereignty" ala Rusia-China yang menekankan kontrol negara atas internet dalam yurisdiksi mereka, kontras dengan pendekatan "multi-stakeholder" Barat yang lebih menekankan peran sektor swasta dan masyarakat sipil dalam tata kelola internet.

Transformasi digital yang dipercepat oleh pandemi COVID-19 telah mengubah fundamental bagaimana masyarakat berinteraksi, berbisnis, dan mengakses layanan

publik, namun juga memperluas permukaan serangan (attack surface) dan multiplier efek dari kerentanan siber. Adopsi massal teknologi cloud, Internet of Things (IoT), 5G, dan sistem kecerdasan buatan menciptakan tantangan keamanan baru. Hingga 2025, diproyeksikan akan ada 55,7 miliar perangkat IoT terhubung, namun banyak yang memiliki perlindungan keamanan minimal. Sektor keuangan mengalami transformasi radikal melalui fintech, cryptocurrency, dan Central Bank Digital Currencies (CBDCs), dengan lebih dari 100 negara dalam berbagai tahap eksplorasi atau implementasi CBDC. Identitas digital menjadi fondasi interaksi online, dengan program identitas digital nasional diterapkan di lebih dari 60 negara. Sementara ini meningkatkan inklusi dan efisiensi, juga menciptakan risiko terkait privasi, pengawasan massal, dan pencurian identitas berskala besar.

Ketergantungan pada rantai pasok teknologi global menciptakan kerentanan baru, dengan serangan rantai pasok seperti SolarWinds (2020) menunjukkan bagaimana satu titik kerentanan dapat mempengaruhi ribuan organisasi. Kesenjangan talenta keamanan siber juga semakin akut, dengan estimasi 3,5 juta posisi keamanan siber tidak terisi secara global pada 2025. Dalam merespons tantangan ini, pendekatan "zero trust" semakin diadopsi, mengganti model keamanan perimeter tradisional dengan prinsip "never trust, always verify" untuk semua pengguna dan sistem, baik internal maupun eksternal. Kecerdasan buatan dan machine learning menjadi komponen penting dalam strategi keamanan siber modern, memungkinkan deteksi anomali dan respons otomatis terhadap ancaman dalam waktu nyata. Sementara itu, teknologi kuantum menciptakan paradigma baru dalam kriptografi, dengan komputasi kuantum berpotensi memecahkan algoritma enkripsi tradisional, mendorong pengembangan kriptografi pasca-kuantum (post-quantum cryptography). Kesadaran akan pentingnya "cyber hygiene" dan pelatihan kesadaran keamanan siber juga meningkat, mengakui bahwa faktor manusia tetap menjadi titik lemah utama dalam banyak pelanggaran keamanan.

Keamanan siber dan transformasi digital memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mewujudkan visi "smart regency" yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dengan peningkatan layanan pemerintahan elektronik seperti sistem informasi desa terintegrasi, e-planning, dan portal layanan publik terpadu, permukaan serangan siber daerah semakin luas. Pada 2022, tercatat 12 insiden keamanan siber di institusi

pemerintah daerah, termasuk 4 kasus ransomware dan 8 kasus phishing, mengakibatkan gangguan layanan dan potensi kebocoran data. Infrastruktur teknologi informasi kabupaten yang belum optimal dengan rasio 1:8 antara staf IT bersertifikasi keamanan siber dan jumlah institusi pemerintah menciptakan kerentanan sistemik. Transformasi digital sektor pertanian dan perkebunan melalui adopsi IoT untuk pemantauan lahan, aplikasi mobile untuk petani, dan sistem ketelusuran (traceability) produk pertanian membuka peluang peningkatan produktivitas namun mensyaratkan pengamanan data dan sistem yang memadai. Strategi keamanan siber daerah yang baru dikembangkan mencakup peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan wajib keamanan siber bagi ASN, pembangunan Security Operation Center (SOC) tingkat kabupaten, penyusunan protokol respons insiden siber, serta kemitraan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk pendampingan teknis. Seiring dengan percepatan digitalisasi, kabupaten ini juga menghadapi tantangan kesenjangan digital dengan penetrasi internet yang belum merata (62% dibanding rata-rata nasional 73%) dan keterampilan digital yang bervariasi, mendorong implementasi program literasi digital yang menjangkau hingga tingkat desa untuk memastikan transformasi digital yang inklusif dan aman.

11. Krisis Air Global

Krisis air global merupakan salah satu tantangan eksistensial paling mendesak yang dihadapi umat manusia, dengan implikasi luas terhadap ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan keamanan regional. Secara global, 2,2 miliar orang kekurangan akses ke air minum yang dikelola secara aman, sementara 4,2 miliar kekurangan layanan sanitasi yang memadai. Kelangkaan air fisik (physical water scarcity) semakin parah dengan 17 negara—mewakili seperempat populasi dunia—menghadapi stres air sangat tinggi dimana lebih dari 80% pasokan air yang tersedia digunakan setiap tahun. Perubahan iklim memperburuk situasi melalui perubahan pola presipitasi, peningkatan frekuensi dan intensitas kekeringan, serta percepatan pencairan gletser yang mengancam sumber air tawar di banyak wilayah. UNESCO memproyeksikan bahwa pada 2050, hingga 5,7 miliar orang akan hidup di area dengan kelangkaan air setidaknya satu bulan per tahun, sementara permintaan global untuk air diproyeksikan meningkat 20-30% pada 2050 dibanding level saat ini.

Polusi air menjadi tantangan global yang semakin serius, dengan 80% air limbah global dibuang tanpa pengolahan memadai ke lingkungan. Polutan konvensional seperti patogen dan nutrisi berlebih (eutrofikasi) kini diperburuk oleh kontaminan baru termasuk mikroplastik (ditemukan bahkan di air minum dalam botol dan air keran), sisa farmasi, dan forever chemicals seperti PFAS. Pencemaran air tanah oleh arsenik, fluoride, dan nitrat juga mengancam sumber air minum vital di banyak wilayah. Pada saat yang sama, degradasi ekosistem air tawar berlanjut dengan kecepatan mengkhawatirkan; populasi spesies air tawar telah menurun 84% sejak 1970, menurun dua kali lebih cepat dibanding spesies darat atau laut. Kerusakan ekosistem riparian dan lahan basah mengurangi penyangga alami terhadap banjir dan kekeringan, kapasitas penyaringan air alami, dan habitat keanekaragaman hayati.

Ketidaksetaraan dalam akses air menjadi isu keadilan lingkungan dan hak asasi manusia yang mendesak. PBB telah mengakui akses ke air bersih dan sanitasi sebagai hak asasi manusia pada 2010, namun implementasi praktisnya tetap bervariasi. Perempuan dan anak perempuan secara khusus terdampak oleh kelangkaan air, dengan estimasi secara kolektif menghabiskan 200 juta jam setiap hari mengumpulkan air, mengurangi waktu untuk pendidikan, aktivitas produktif, dan rekreasi. Sementara itu, privatisasi layanan air menjadi isu kontroversial dengan pendukungnya menekankan efisiensi dan kapasitas investasi sektor swasta, sementara kritikus mengkhawatirkan pengabaian terhadap masyarakat miskin dan daerah terpencil yang kurang menguntungkan secara komersial. Model alternatif seperti kemitraan publik-swasta dan pengelolaan berbasis komunitas menawarkan pendekatan hibrid yang berupaya menyeimbangkan efisiensi dengan ekuitas.

Tata kelola air lintas batas menjadi tantangan geopolitik yang semakin penting dengan 310 cekungan sungai dan 592 akuifer yang dibagi antara dua negara atau lebih. Sekitar 60% aliran sungai global melewati perbatasan nasional, menciptakan potensi konflik dan kebutuhan untuk kerja sama. Sementara "perang air" yang diprediksi sebelumnya belum terwujud dalam skala besar, ketegangan terkait sumber daya air semakin meningkat di beberapa wilayah seperti Cekungan Nil (antara Etiopia, Mesir, dan Sudan), Sungai Mekong (antara China dan negara-negara hilir), dan basin Tigris-Euphrates (antara Turki, Suriah, dan Irak). Dalam menghadapi krisis air global, pendekatan inovatif seperti solusi berbasis alam (nature-based solutions), daur ulang

air (water recycling), desalinasi energi terbarukan, dan teknologi digital untuk manajemen air (smart water management) menawarkan jalur potensial menuju ketahanan air. Water stewardship yang melibatkan kolaborasi multi-pemangku kepentingan, termasuk perusahaan multinasional yang berkomitmen terhadap "water neutrality" atau "water positivity" dalam operasi mereka, juga semakin mendapatkan daya tarik sebagai pendekatan untuk mengatasi tantangan air global.

Pengaruh terhadap Kabupaten Labuhanbatu Selatan: Krisis air global memberikan tantangan spesifik bagi Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memiliki karakteristik hidrologis unik dengan dua sungai besar (Sungai Barumon dan Batang Pane) namun menghadapi persoalan distribusi dan kualitas air. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan hanya 72% penduduk memiliki akses ke air minum yang layak, sementara cakupan sanitasi dasar mencapai 68%. Transformasi ekologis akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit secara signifikan mengubah rezim hidrologi daerah ini, dengan debit puncak (peak discharge) saat hujan lebat meningkat hingga 35% dibandingkan dua dekade lalu, sementara aliran dasar (base flow) saat musim kemarau menurun hingga 28%, menciptakan risiko banjir dan kekeringan yang lebih tinggi. Analisis kualitas air di beberapa titik sungai menunjukkan penurunan kualitas dengan peningkatan BOD, COD, dan residu pestisida akibat limbah pabrik kelapa sawit dan praktik pertanian intensif. Kompetisi penggunaan air antara sektor perkebunan, industri pengolahan, dan kebutuhan domestik semakin intensif, terutama selama musim kemarau. Dalam merespons tantangan ini, pemerintah kabupaten telah mengembangkan Rencana Induk Pengelolaan Sumber Daya Air yang mengintegrasikan konservasi daerah aliran sungai (DAS), pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih, dan pengelolaan limbah terpadu. Program-program inovatif meliputi rehabilitasi 500 hektar hutan riparian sebagai zona penyangga sungai, pengembangan 25 embung desa untuk menampung air hujan, serta kemitraan dengan perusahaan perkebunan untuk mengadopsi praktik pengelolaan air berkelanjutan termasuk zero discharge dan daur ulang air dalam proses produksi minyak sawit.

12. Migrasi dan Pengungsi Global

Migrasi dan pengungsi global telah menjadi salah satu isu geopolitik dan kemanusiaan paling signifikan abad ke-21, dengan implikasi mendalam terhadap

politik domestik, hubungan internasional, dan pembangunan ekonomi. Pada 2022, jumlah pengungsi global mencapai rekor 32,5 juta orang, sementara pengungsi internal (internally displaced persons) mencapai 62,5 juta, dan total populasi migran internasional mencapai 281 juta (3,6% populasi dunia). Konflik berkepanjangan di Suriah, Afghanistan, Sudan Selatan, Myanmar, dan Ukraina telah menciptakan krisis pengungsi berskala besar, sementara instabilitas politik, kekerasan, dan kemiskinan kronis di berbagai wilayah mendorong migrasi ireguler. Perubahan iklim semakin menjadi pendorong penting perpindahan penduduk, dengan Bank Dunia memproyeksikan hingga 216 juta orang dapat bermigrasi secara internal akibat dampak iklim pada 2050 jika tidak ada tindakan mitigasi yang memadai. "Climate refugees" menghadapi ketidakjelasan status hukum, karena Konvensi Pengungsi 1951 tidak secara eksplisit mengakui perubahan iklim sebagai dasar untuk pengakuan status pengungsi.

Respons global terhadap migrasi dan krisis pengungsi mencerminkan ketegangan antara kedaulatan nasional, keamanan perbatasan, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Global Compact for Migration (2018) dan Global Compact on Refugees (2018) mewakili upaya untuk memperkuat tata kelola migrasi global, meski bersifat non-mengikat secara hukum. Beberapa wilayah mengadopsi pendekatan restriktif terhadap migrasi dengan pengetatan kontrol perbatasan, pembangunan tembok dan pagar, dan eksternalisasi manajemen migrasi melalui kesepakatan dengan negara transit atau asal. Kebijakan ini seringkali menimbulkan keprihatinan terkait hak asasi manusia, dengan migran dan pencari suaka menghadapi risiko penahanan yang berkepanjangan, pemisahan keluarga, dan penolakan terhadap proses suaka yang adil. Sementara itu, praktik penyelundupan manusia dan perdagangan manusia semakin canggih, dengan jaringan kriminal transnasional mengeksploitasi kerentanan migran dan memanfaatkan celah dalam pengawasan perbatasan.

Dimensi ekonomi dari migrasi global mencakup kontribusi signifikan terhadap pembangunan, dengan remitansi global mencapai \$626 miliar pada 2022, lebih dari tiga kali lipat dari bantuan pembangunan resmi global. Di beberapa negara seperti El Salvador, Haiti, dan Nepal, remitansi mewakili lebih dari 20% PDB. Sementara itu, migran mengisi kesenjangan tenaga kerja penting di negara-negara tujuan, terutama dalam sektor-sektor yang menghadapi penuaan populasi dan penurunan angkatan

kerja domestik. Brain drain versus brain gain menjadi pertimbangan penting, dengan beberapa negara asal mengembangkan program "brain circulation" untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan investasi diaspora. Rancangan migrasi sirkular dan kemitraan keterampilan yang dikelola dengan baik menawarkan potensi untuk memaksimalkan manfaat migrasi baik bagi negara asal, tujuan, maupun para migran sendiri, meskipun implementasinya masih terbatas.

Narasi publik dan politik tentang migrasi telah menjadi sangat terpolarisasi di banyak negara, dengan migrasi menjadi isu pembelah dalam pemilihan di Eropa, Amerika Utara, dan tempat lain. Partai-partai populis sayap kanan seringkali memanfaatkan ketakutan tentang "invasi" migran dan ancaman terhadap identitas nasional, sementara pendukung kebijakan migrasi yang lebih terbuka menekankan manfaat ekonomi dan kultural dari keragaman. Media sosial dan disinformasi yang ditargetkan memperburuk polarisasi ini, dengan algoritma yang cenderung memperkuat bias yang sudah ada dan echo chambers. Integrasi sosial dan ekonomi migran menjadi tantangan kebijakan jangka panjang yang krusial, dengan bukti menunjukkan bahwa kebijakan proaktif dalam pelatihan bahasa, pendidikan, pengakuan kualifikasi, dan anti-diskriminasi sangat menentukan hasil integrasi. Kota-kota seringkali memimpin dalam inovasi kebijakan integrasi, bahkan ketika pemerintah nasional menerapkan retorika anti-migran, mencerminkan peran utama pemerintah lokal sebagai "first responders" dalam penerimaan dan integrasi migran.

Meskipun tidak menjadi tujuan utama migrasi internasional, Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami dinamika migrasi internal yang signifikan terkait dengan perkembangan industri perkebunan kelapa sawit. Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekitar 12% penduduk kabupaten merupakan migran dari kabupaten lain di Sumatera Utara dan provinsi tetangga seperti Riau dan Aceh, yang datang untuk bekerja di perkebunan dan pabrik pengolahan sawit. Pola migrasi musiman juga terlihat dengan peningkatan sekitar 5.000 pekerja tidak tetap selama musim panen raya kelapa sawit. Urbanisasi lokal berlangsung dengan laju 3,2% per tahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional, menciptakan tekanan pada infrastruktur dan layanan dasar di pusat-pusat perkotaan seperti Kotapinang. Dari perspektif emigrasi, kabupaten ini juga menjadi pengirim pekerja migran ke Malaysia dan Singapura, dengan sekitar 1.800 pekerja migran terdaftar pada 2022, sebagian besar bekerja di sektor perkebunan dan konstruksi. Remitansi dari pekerja migran ini

berkontribusi sekitar Rp45 miliar per tahun terhadap ekonomi lokal. Tantangan integrasi sosial muncul dengan adanya potensi konflik terkait akses lahan dan sumber daya antara penduduk asli dan pendatang, terutama di wilayah pengembangan perkebunan baru. Pemerintah kabupaten telah mengembangkan program pengelolaan migrasi yang mencakup sistem pendataan migran yang lebih akurat, mediasi konflik berbasis masyarakat, pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran, dan perlindungan hak-hak pekerja migran melalui kerjasama dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) untuk mengurangi risiko perdagangan manusia dan eksploitasi.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak terlepas dari konteks kebijakan nasional dan tantangan yang dihadapi Indonesia secara keseluruhan. Beberapa isu strategis nasional yang relevan meliputi:

1. Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Indonesia diproyeksikan mengalami puncak bonus demografi pada periode 2020-2030, dimana sekitar 70% penduduk berada pada usia produktif. Kondisi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan tenaga kerja yang berlimpah.

Dalam memaksimalkan bonus demografi, Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja dan mendorong inovasi serta kewirausahaan. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa penduduk usia produktif memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas dan kesempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi dapat berubah menjadi bencana demografi. Tingginya angkatan kerja tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja akan meningkatkan pengangguran, yang berpotensi menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang komprehensif untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi ini.

Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal distribusi penduduk yang tidak merata. Pulau Jawa masih menjadi pusat konsentrasi penduduk, sementara daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua masih relatif jarang penduduknya. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi dan penyediaan infrastruktur.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai daerah yang relatif baru di Sumatera Utara, memiliki komposisi penduduk yang didominasi oleh usia produktif. Hal ini memberikan peluang bagi daerah tersebut untuk mengembangkan ekonomi lokalnya, terutama di sektor perkebunan dan pertanian. Namun, tantangan utamanya adalah menciptakan lapangan kerja yang cukup dan berkualitas untuk menampung angkatan kerja yang terus bertambah. Kecenderungan urbanisasi juga mengancam ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal, sekaligus membuka peluang investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.

2. Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan merujuk pada kemampuan alam untuk mendukung kegiatan manusia dan menyerap dampak dari aktivitas tersebut. Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah, menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan. Eksploitasi berlebihan terhadap hutan, tambang, dan sumber daya laut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, erosi tanah, dan pencemaran air.

Perubahan iklim global semakin memperburuk kondisi lingkungan di Indonesia. Naiknya permukaan air laut mengancam wilayah pesisir, sementara perubahan pola cuaca menyebabkan bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang lebih sering dan intens. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim ini, yang dapat mengancam ketersediaan air bersih, produksi pangan, dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, termasuk restorasi ekosistem, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan energi terbarukan. Namun, implementasi

kebijakan tersebut sering terkendala oleh koordinasi antar sektor yang kurang efektif, kapasitas pemerintah daerah yang terbatas, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya pelestarian lingkungan.

Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Praktik-praktik kearifan lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun sering kali memiliki prinsip-prinsip keberlanjutan yang patut dilestarikan dan diintegrasikan dengan pendekatan modern dalam pengelolaan lingkungan.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki luas perkebunan kelapa sawit yang signifikan, yang menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah tersebut. Namun, ekspansi perkebunan sawit yang tidak terkendali dapat mengancam keberadaan hutan alam dan keanekaragaman hayati. Daerah ini juga dilewati oleh beberapa sungai penting, termasuk Sungai Barumun, yang menghadapi ancaman pencemaran dari aktivitas industri dan rumah tangga. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, termasuk mendorong praktik perkebunan berkelanjutan, melindungi kawasan hutan yang tersisa, dan mengelola daerah aliran sungai secara terpadu untuk mencegah banjir dan menjaga kualitas air.

3. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan di Jakarta, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, banjir, dan penurunan tanah. Perpindahan pusat pemerintahan ini juga dimaksudkan untuk mendorong pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di bagian timur Indonesia.

IKN didesain sebagai kota pintar dan berkelanjutan, dengan konsep pengembangan yang memadukan teknologi modern dan pelestarian lingkungan. Perencanaan kota ini mencakup infrastruktur yang ramah lingkungan, sistem transportasi terintegrasi, dan pemanfaatan energi terbarukan. Pemerintah juga berkomitmen untuk meminimalkan dampak lingkungan dari pembangunan kota baru ini, termasuk dengan mempertahankan 75% dari wilayah IKN sebagai kawasan hijau.

Pembangunan IKN melibatkan investasi yang sangat besar dan berpotensi menarik tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga di provinsi-provinsi sekitarnya melalui efek multiplier. Namun, tantangan utama dalam pembangunan IKN adalah memastikan bahwa proyek ini tidak justru menciptakan ketimpangan baru atau mengorbankan pembangunan di daerah lain.

Aspek sosial budaya juga menjadi perhatian dalam pembangunan IKN. Pemerintah perlu memastikan bahwa kota baru ini dapat mengakomodasi keberagaman budaya Indonesia dan memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati manfaatnya. Proses relokasi aparatur sipil negara dan keluarganya juga membutuhkan perencanaan yang matang untuk meminimalkan dampak sosial.

Meskipun Kabupaten Labuhanbatu Selatan terletak jauh dari lokasi IKN, perpindahan ibu kota dapat memberikan dampak tidak langsung bagi daerah ini. Redistribusi anggaran pembangunan nasional dapat mempengaruhi alokasi dana untuk Sumatera Utara, termasuk Labuhanbatu Selatan. Di sisi lain, fokus pembangunan di kawasan timur Indonesia dapat membuka peluang bagi daerah-daerah di Sumatera untuk memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di bagian barat Indonesia. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu mengantisipasi perubahan ini dengan mengembangkan strategi pembangunan yang memanfaatkan potensi lokalnya, terutama di sektor pertanian dan perkebunan, serta meningkatkan konektivitas dengan pusat-pusat ekonomi regional.

4. Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN)

Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) merupakan faktor krusial dalam meningkatkan daya saing nasional dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengembangkan ekosistem IPTEKIN yang kondusif, tercermin dari rendahnya investasi riset dan pengembangan yang hanya sekitar 0,3% dari PDB, jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Keterbatasan infrastruktur penelitian, kurangnya sinergi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan industri, serta terbatasnya jumlah peneliti berkualitas menjadi hambatan utama dalam pengembangan IPTEKIN di Indonesia. Selain itu,

sistem pendidikan nasional belum sepenuhnya mendukung pembentukan pola pikir inovatif dan keterampilan berpikir kritis yang dibutuhkan untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas IPTEKIN, seperti pengembangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), peningkatan anggaran riset, dan insentif bagi kolaborasi riset antara akademisi dan industri. Namun, tantangan implementasi masih besar, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, keberlanjutan pendanaan, dan penciptaan ekosistem yang mendukung komersialisasi hasil penelitian.

Indonesia perlu memperkuat posisinya dalam rantai nilai inovasi dengan mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang-bidang strategis seperti keanekaragaman hayati, ekonomi digital, dan energi terbarukan. Pemanfaatan teknologi juga penting untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan, termasuk ketahanan pangan, perubahan iklim, dan kesehatan masyarakat.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki potensi untuk memanfaatkan IPTEKIN dalam mengembangkan sektor pertanian dan perkebunannya. Penerapan teknologi pertanian modern dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan sawit dan karet yang menjadi andalan ekonomi daerah. Namun, keterbatasan akses terhadap lembaga penelitian dan perguruan tinggi menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah daerah perlu membangun kemitraan dengan universitas dan lembaga penelitian di Sumatera Utara untuk mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pengembangan kapasitas digital juga penting untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah.

5. Mempercepat Proses Eliminasi Kemiskinan Ekstrim

Eliminasi kemiskinan ekstrim menjadi prioritas pembangunan nasional Indonesia, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Meskipun Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan dalam dua dekade terakhir, masih terdapat kantong-kantong kemiskinan ekstrim di berbagai daerah, terutama di wilayah timur Indonesia dan daerah pedesaan. Pandemi COVID-19 juga telah memperburuk kondisi ini, dengan mendorong jutaan orang kembali ke garis kemiskinan.

Strategi percepatan eliminasi kemiskinan ekstrim mencakup perbaikan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Pemerintah telah mengembangkan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk membantu rumah tangga miskin. Namun, tantangan masih ditemui dalam hal ketepatan sasaran, koordinasi antar program, dan keberlanjutan pendanaan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal juga menjadi kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas masyarakat miskin, akses terhadap permodalan, dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal. Mengintegrasikan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat dalam pembangunan ekonomi juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal.

Inovasi dalam pendekatan eliminasi kemiskinan diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan struktural. Ini termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki sistem pendataan dan penyaluran bantuan, serta pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam perencanaan dan evaluasi program pengentasan kemiskinan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil juga penting untuk memobilisasi sumber daya dan memastikan efektivitas program.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih menghadapi tantangan kemiskinan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat ekonomi. Meskipun memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas, distribusi manfaat ekonomi dari sektor ini belum merata. Banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh perkebunan dengan penghasilan rendah dan tidak stabil. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi, termasuk pemberdayaan petani kecil, pengembangan ekonomi berbasis komunitas, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Diversifikasi ekonomi juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor perkebunan dan menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat.

6. Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Rendah

Deindustrialisasi dini mengacu pada fenomena penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja sebelum negara mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi. Indonesia mengalami gejala deindustrialisasi dini sejak awal 2000-an, dengan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang menurun dari sekitar 30% menjadi kurang dari 20%. Fenomena ini berbahaya karena sektor manufaktur tradisional menjadi pendorong utama pertumbuhan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja dalam proses pembangunan ekonomi.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap deindustrialisasi dini di Indonesia antara lain persaingan global yang semakin ketat (terutama dari China), infrastruktur yang tidak memadai, birokrasi yang rumit, serta ketergantungan pada ekspor komoditas primer. Hal ini menyebabkan Indonesia cenderung terjebak dalam pola spesialisasi pada aktivitas ekonomi dengan nilai tambah rendah dan produktivitas rendah.

Sementara itu, sektor pertanian Indonesia juga menghadapi masalah produktivitas yang rendah. Meskipun menyerap sekitar 30% tenaga kerja, kontribusi sektor ini terhadap PDB hanya sekitar 14%. Hal ini menunjukkan kesenjangan produktivitas yang besar dibandingkan sektor lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas pertanian antara lain fragmentasi lahan, terbatasnya akses terhadap teknologi dan input modern, infrastruktur pedesaan yang kurang memadai, serta keterbatasan akses pasar dan modal.

Untuk mengatasi masalah deindustrialisasi dini, pemerintah perlu mengembangkan strategi industrialisasi yang berfokus pada peningkatan nilai tambah, pengembangan industri berbasis teknologi, dan penguatan rantai nilai domestik. Ini termasuk kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur, promosi investasi di sektor-sektor strategis, dan pengembangan kapasitas inovasi. Sementara itu, untuk meningkatkan produktivitas pertanian, diperlukan modernisasi melalui mekanisasi, adopsi teknologi tepat guna, konsolidasi lahan, perbaikan infrastruktur pedesaan, dan penguatan lembaga petani.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan menghadapi tantangan serupa dalam hal produktivitas pertanian yang rendah. Meskipun memiliki lahan perkebunan yang luas,

produktivitas rata-rata masih di bawah potensi optimalnya. Banyak petani kecil yang kesulitan mengakses teknologi modern, input berkualitas, dan pasar yang menguntungkan. Sementara itu, sektor industri pengolahan, terutama pengolahan hasil perkebunan seperti kelapa sawit dan karet, belum berkembang secara optimal. Pemerintah daerah perlu mendorong investasi pada industri hilir yang berbasis pada sumber daya lokal, seperti pengolahan CPO dan produk turunannya, untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Program peningkatan kapasitas petani, akses terhadap teknologi pertanian, dan konsolidasi lahan juga penting untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan.

7. Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor potensial yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Kekayaan alam, keragaman budaya, dan sejarah yang panjang memberikan modal besar bagi pengembangan pariwisata, sementara kreativitas dan keragaman tradisi menjadi landasan bagi berkembangnya ekonomi kreatif. Sebelum pandemi COVID-19, pariwisata menyumbang sekitar 4,1% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 12,7 juta tenaga kerja.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengembangan destinasi-destinasi pariwisata super prioritas seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Strategi pengembangan pariwisata mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, promosi destinasi, serta penguatan keterlibatan masyarakat lokal. Namun, tantangan masih ditemui dalam hal aksesibilitas, standarisasi layanan, dan keberlanjutan lingkungan.

Ekonomi kreatif, yang mencakup subsektor seperti kuliner, fashion, kerajinan, film, musik, dan aplikasi digital, juga memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Badan Ekonomi Kreatif (yang kini terintegrasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) mencatat bahwa kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB mencapai sekitar 7,4% dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor tradisional. Pengembangan ekosistem yang mendukung kreativitas dan inovasi, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual, akses terhadap pembiayaan, dan pengembangan pasar, menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi ekonomi kreatif.

Integrasi antara pariwisata dan ekonomi kreatif dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan. Produk ekonomi kreatif dapat memperkaya pengalaman wisatawan dan meningkatkan pengeluaran mereka, sementara pariwisata menyediakan pasar bagi produk-produk kreatif. Kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, komunitas kreatif, dan akademisi, menjadi penting untuk mengembangkan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki potensi wisata yang belum dioptimalkan, termasuk wisata alam seperti area hutan dan aliran sungai, serta wisata budaya berbasis komunitas lokal. Pengembangan sektor pariwisata dapat menjadi alternatif ekonomi yang menjanjikan di samping perkebunan. Dalam konteks ekonomi kreatif, kabupaten ini memiliki potensi pengembangan produk kerajinan dan kuliner khas lokal yang dapat dipasarkan kepada wisatawan dan pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi dan mengembangkan destinasi wisata unggulan, meningkatkan infrastruktur pendukung, serta membangun kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola pariwisata dan mengembangkan produk ekonomi kreatif. Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat juga penting untuk memasukkan potensi wisata Labuhanbatu Selatan dalam peta pariwisata regional dan nasional.

8. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi ekonomi laut yang sangat besar. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 99.000 kilometer dan luas perairan mencapai 5,8 juta km², Indonesia memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang beragam, termasuk perikanan, terumbu karang, rumput laut, bioteknologi kelautan, dan potensi energi terbarukan dari laut. Namun, pemanfaatan potensi ekonomi laut ini belum optimal, dengan kontribusinya terhadap PDB nasional masih di bawah 30%.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dengan fokus pada peningkatan konektivitas maritim, pengembangan industri kelautan dan perikanan, pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan, serta penguatan keamanan maritim. Beberapa program strategis telah dikembangkan, seperti pembangunan pelabuhan perikanan, modernisasi armada nelayan,

pengembangan wisata bahari, dan perlindungan ekosistem laut. Namun, implementasi program-program tersebut masih menghadapi kendala, termasuk koordinasi antar sektor yang lemah, infrastruktur yang tidak memadai, dan praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan ekonomi laut adalah illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang menyebabkan kerugian ekonomi signifikan bagi Indonesia. Pemerintah telah mengambil langkah tegas melalui kebijakan penenggelaman kapal asing illegal dan penguatan pengawasan maritim. Namun, luasnya wilayah perairan Indonesia menjadikan pengawasan dan penegakan hukum di laut sebagai tantangan yang kompleks.

Pendekatan berkelanjutan dalam pemanfaatan ekonomi laut menjadi kunci untuk memastikan bahwa sumber daya kelautan dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Ini mencakup pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, perlindungan kawasan konservasi laut, pengembangan marikultur yang ramah lingkungan, serta mitigasi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut. Pelibatan masyarakat pesisir dan nelayan tradisional dalam pengelolaan sumber daya laut juga penting untuk memastikan distribusi manfaat yang lebih merata.

Meskipun tidak memiliki garis pantai langsung, Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki potensi perikanan air tawar yang dapat dikembangkan melalui budidaya ikan di sungai dan danau yang ada di wilayahnya. Sungai Barumon dan anak-anak sungainya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan. Selain itu, Labuhanbatu Selatan dapat memanfaatkan posisinya sebagai daerah yang dekat dengan Selat Malaka untuk mengembangkan industri pengolahan hasil laut yang diperoleh dari kabupaten tetangga yang memiliki akses langsung ke laut. Pemerintah daerah perlu membangun kemitraan dengan kabupaten pesisir sekitarnya untuk mengembangkan rantai nilai perikanan yang terintegrasi, serta meningkatkan infrastruktur pendukung seperti cold storage dan pasar ikan modern untuk mendukung distribusi hasil perikanan.

9. Percepatan Penanganan Stunting

Stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, dengan angka sekitar 24,4% pada tahun 2021,

meskipun telah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dampak stunting tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas saat dewasa, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia telah menjadikan penanganan stunting sebagai prioritas nasional dan menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Strategi percepatan penanganan stunting dilakukan melalui pendekatan multi-sektor, yang mencakup intervensi gizi spesifik (seperti pemberian makanan tambahan, suplementasi vitamin dan mineral, imunisasi), dan intervensi gizi sensitif (seperti perbaikan sanitasi, akses air bersih, pendidikan, dan peningkatan pendapatan keluarga).

Implementasi program-program penanganan stunting menghadapi tantangan di berbagai tingkatan. Pada tingkat nasional, tantangan meliputi koordinasi antar kementerian/lembaga, alokasi anggaran yang memadai, dan sistem monitoring evaluasi yang efektif. Pada tingkat daerah, tantangan mencakup kapasitas pemerintah daerah, ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas, dan infrastruktur kesehatan yang tidak merata. Pada tingkat masyarakat, rendahnya kesadaran tentang gizi dan praktik pengasuhan yang tepat, serta faktor sosial budaya yang mempengaruhi pola makan dan perilaku kesehatan.

Pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas, menjadi kunci keberhasilan percepatan penanganan stunting. Pendekatan inovatif seperti penggunaan teknologi digital untuk monitoring pertumbuhan anak, edukasi masyarakat berbasis komunitas, dan skema pembiayaan berbasis kinerja juga berpotensi mempercepat penurunan prevalensi stunting di Indonesia.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih menghadapi tantangan terkait stunting, dengan prevalensi yang mungkin lebih tinggi di daerah-daerah terpencil dan komunitas dengan status sosial ekonomi rendah. Tantangan utama termasuk akses terbatas terhadap layanan kesehatan berkualitas, masalah sanitasi dan air bersih, serta pola asuh dan praktik pemberian makan anak yang kurang optimal. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan program penanganan stunting ke dalam rencana pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader

posyandu, serta memastikan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang merata di seluruh wilayah. Kolaborasi dengan perkebunan besar yang beroperasi di daerah tersebut juga dapat menjadi strategi untuk mobilisasi sumber daya dalam penanganan stunting, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

10. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Menurut data International Labour Organization (ILO), produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya sekitar sepertiga dari Malaysia dan seperlima dari Singapura. Rendahnya produktivitas ini menjadi salah satu faktor yang membatasi daya saing Indonesia dalam ekonomi global dan menghambat peningkatan pendapatan per kapita.

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia antara lain kualitas pendidikan dan pelatihan yang belum memadai, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri (skills mismatch), infrastruktur yang kurang memadai, serta adopsi teknologi yang rendah di berbagai sektor. Struktur ekonomi Indonesia yang masih didominasi oleh sektor informal dengan produktivitas rendah juga berkontribusi pada rendahnya produktivitas agregat.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, termasuk reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan ekosistem inovasi, promosi adopsi teknologi, dan perbaikan infrastruktur. Program-program seperti Kartu Prakerja juga dikembangkan untuk memperbaiki keterampilan tenaga kerja, terutama dalam konteks transformasi digital. Namun, tantangan masih ditemui dalam implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, termasuk koordinasi antar pemangku kepentingan, kualitas pelaksanaan program, dan evaluasi dampak.

Dalam konteks persaingan global, peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi semakin penting dengan adanya otomatisasi dan digitalisasi yang berpotensi menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin dan berulang. Indonesia perlu mempersiapkan angkatan kerjanya untuk beradaptasi dengan perubahan ini melalui pengembangan keterampilan yang relevan dengan ekonomi masa depan, seperti literasi digital, pemecahan masalah kompleks, kreativitas, dan kecerdasan emosional.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan menghadapi tantangan produktivitas tenaga kerja terutama di sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Banyak petani dan pekerja perkebunan yang masih menggunakan metode tradisional dengan tingkat efisiensi rendah. Tingkat pendidikan yang relatif rendah dan terbatasnya akses terhadap pelatihan keterampilan juga menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program peningkatan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk pelatihan teknis pertanian dan perkebunan modern, keterampilan manajerial untuk petani kecil, dan literasi digital. Kemitraan dengan perusahaan perkebunan besar dalam pengembangan kapasitas petani plasma juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, perbaikan infrastruktur pendukung seperti jalan, irigasi, dan telekomunikasi juga penting untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi.

11. Optimalisasi Alokasi Anggaran Wajib dan Strategi Efisiensi Belanja Negara

Belanja wajib (*mandatory spending*) adalah pengeluaran daerah yang telah diatur dalam undang-undang. Tujuan dari belanja wajib ini adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antar daerah. Berdasarkan PMK No. 24/2024 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, ditetapkan bahwa daerah harus mengalokasikan minimal 20% anggaran untuk pendidikan, 40% untuk infrastruktur, dan Belanja Pegawai tidak boleh melebihi 30%. Hal ini berarti hanya tersisa sekitar 10% anggaran untuk pembiayaan di luar belanja wajib, termasuk untuk memenuhi janji kampanye kepala daerah terpilih. Ketetapan ini harus dilaksanakan oleh Daerah paling lambat pada tahun 2027.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada tanggal 22 Januari 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kemudian diikuti dengan Surat Menkeu No. S-37/MK.02/2025 mengenai pemangkasan anggaran pada 16 kategori belanja di kementerian dan lembaga sebagai upaya efisiensi yang juga akan berdampak pada daerah. Meskipun Inpres dan surat Menkeu ini hanya berlaku untuk tahun 2025, situasi serupa mungkin terjadi pada tahun-tahun mendatang mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil secara umum.

Pemangkasan anggaran ini juga akan mempengaruhi dana transfer ke Daerah, yang berarti APBD Pemerintah daerah yang masih sangat bergantung pada Dana transfer Pemerintah Pusat akan mengalami "tekanan", sehingga berpotensi mengganggu kinerja dalam memenuhi ketentuan belanja wajib tersebut.

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

Pulau Sumatera menempati posisi strategis dalam peta pembangunan Indonesia dan dihadapkan pada beragam tantangan pembangunan yang membutuhkan penanganan komprehensif. Sebagai pulau terbesar kedua di Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Sumatera berpotensi menjadi penggerak utama ekonomi nasional, namun masih menghadapi berbagai isu strategis yang perlu diatasi.

1. Infrastruktur dan Konektivitas

Konektivitas dan infrastruktur menjadi tantangan fundamental dalam percepatan pembangunan Sumatera. Proyek jalan tol Trans-Sumatera yang membentang sepanjang 2.749 kilometer terdiri dari koridor utama sepanjang 1.889 kilometer dan koridor pendukung sepanjang 860 kilometer telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan tingkat penyelesaian mencapai 92% pada pertengahan tahun 2024 berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan infrastruktur antar provinsi di Sumatera, terutama dalam hal jalan, pelabuhan, dan transportasi umum yang menghubungkan wilayah-wilayah terpencil. Kondisi infrastruktur jalan di Sumatera Utara berdasarkan data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa 72,5% jalan berada dalam kondisi baik, angka ini masih berada di bawah target nasional sebesar 85%. Keterbatasan infrastruktur yang memadai berdampak langsung pada terhambatnya mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa.

2. Disparitas Ekonomi

Disparitas ekonomi menjadi isu serius di wilayah Sumatera. Kesenjangan pembangunan ekonomi antar provinsi dan antara wilayah pesisir dengan pedalaman masih cukup tinggi. Data BPS tahun 2023 mencatat tingkat kemiskinan di Sumatera sebesar 9,85%, dengan variasi yang signifikan antar provinsi. Provinsi Aceh dan Bengkulu memiliki tingkat kemiskinan tertinggi mencapai 15,3% dan 14,7%,

sementara Kepulauan Riau dan Bangka Belitung berada pada kisaran 5,3% dan 4,8%. Target laju pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak tercapai di beberapa provinsi menunjukkan adanya hambatan struktural dalam perekonomian. Daya beli masyarakat belum optimal akibat ketimpangan pendapatan dan terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang layak.

3. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Pengembangan KEK menjadi strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera, namun masih menghadapi kendala implementasi. Beberapa KEK seperti di Sei Mangkei (Sumatera Utara) dan Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan) masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk menarik investasi. Tingkat okupansi kawasan industri di KEK Sei Mangkei baru mencapai 45%, jauh di bawah target 80% yang ditetapkan. Permasalahan ketersediaan energi, air bersih, dan akses transportasi masih menjadi kendala utama. Optimalisasi KEK memerlukan pendekatan terintegrasi yang melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

4. Pengelolaan Sumber Daya alam

Pengelolaan sumber daya alam menjadi isu strategis bagi keberlanjutan pembangunan Sumatera. Provinsi-provinsi di Sumatera kaya akan sumber daya seperti minyak bumi, gas alam, batubara, dan hasil hutan, namun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan yang berkelanjutan dan distribusi manfaat yang merata. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa cadangan minyak di Sumatera diperkirakan hanya bertahan hingga 15-20 tahun mendatang. Ketergantungan tinggi terhadap ekstraksi sumber daya alam tanpa pengembangan industri hilir yang memadai menyebabkan rendahnya nilai tambah yang diperoleh daerah. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola sumber daya alam yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat lokal. PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengumumkan penemuan cadangan minyak di Padang Pancuran, Sumatera Selatan pada akhir tahun 2024, dengan total sumber daya yang dapat dipulihkan mencapai 143 juta barel minyak (MMBO) dan 1,7 triliun kaki kubik (TCF) gas. Pada tahun 2024, PHE menemukan total 652 juta barel setara minyak (MMBOE), meningkat 34% dari tahun sebelumnya.

5. Lingkungan dan Keberlanjutan

Keberlanjutan lingkungan menjadi perhatian serius di Pulau Sumatera. Deforestasi akibat perluasan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan merupakan tantangan besar, terutama di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Berdasarkan data 2023, tingkat deforestasi dan degradasi hutan di Sumatera mencapai sekitar 91.248 hektar. Kebakaran hutan dan lahan gambut juga menjadi isu tahunan yang serius, dengan dampak kabut asap yang meluas hingga ke negara tetangga. Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat 62.800 kasus infeksi saluran pernapasan akut terkait kabut asap pada tahun 2023. Penegakan hukum lingkungan yang lemah, tumpang tindih perizinan, dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penyebab yang perlu segera diatasi.

Alih fungsi lahan menjadi perkebunan monokultur dan pemukiman mengancam keberagaman hayati Sumatera. Penurunan kualitas air dan udara akibat aktivitas industri dan pertambangan tanpa izin semakin memperburuk kondisi lingkungan, sementara kerusakan terumbu karang di wilayah pesisir mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan tradisional. Penurunan debit air sungai di beberapa daerah aliran sungai utama di Sumatera menjadi indikator terganggunya siklus hidrologi akibat degradasi hutan dan alih fungsi lahan. Pelestarian lingkungan di Sumatera memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

6. Pengelolaan Wilayah Maritim

Pengelolaan wilayah maritim menjadi tantangan tersendiri bagi Sumatera sebagai pulau dengan garis pantai yang panjang. Pengelolaan potensi kelautan, perikanan, dan perlindungan ekosistem pesisir menjadi isu penting, terutama di Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa tingkat degradasi ekosistem mangrove di pesisir timur Sumatera mencapai 47%, sementara praktik penangkapan ikan ilegal masih marak terjadi di perairan Kepulauan Riau dan Selat Malaka. Pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan, perlindungan hak-hak nelayan tradisional, dan penanganan pencemaran laut menjadi prioritas dalam pengelolaan wilayah maritim Sumatera.

7. Ketahanan Bencana

Ketahanan bencana menjadi isu krusial bagi Sumatera yang terletak di zona tektonik aktif. Sumatera sangat rentan terhadap gempa bumi dan tsunami, seperti yang terjadi di Aceh (2004) dan Sumatera Barat (2009). Berdasarkan pemetaan risiko bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 78% wilayah pesisir barat Sumatera berada pada kategori risiko tinggi hingga sangat tinggi terhadap tsunami. Banjir dan tanah longsor sering terjadi terutama pada musim penghujan akibat tingginya curah hujan dan berkurangnya daerah resapan air. Penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas tanggap darurat, dan pengembangan infrastruktur tahan bencana menjadi prioritas untuk meminimalisir dampak bencana alam. Ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan.

8. Permasalahan Tata Ruang

Permasalahan tata ruang di Pulau Sumatera membutuhkan penanganan yang lebih serius. Pengendalian tata ruang wilayah belum berjalan optimal, ditandai dengan munculnya permukiman pada kawasan yang seharusnya menjadi zona penyangga atau kawasan lindung. Perencanaan tapal batas wilayah yang belum tuntas menyebabkan konflik antardaerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, proses pemekaran wilayah yang terjadi di beberapa kabupaten belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga berpotensi menciptakan kesenjangan pembangunan baru.

9. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sektor potensial yang belum dioptimalkan di Sumatera. Meskipun memiliki potensi besar seperti Danau Toba di Sumatera Utara, Pantai Carocok di Sumatera Barat, dan warisan budaya Aceh, sektor pariwisata belum berkembang optimal dibanding destinasi lain di Indonesia. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera hanya menyumbang 18% dari total kunjungan wisatawan ke Indonesia. Infrastruktur pendukung pariwisata yang belum memadai, pemasaran yang belum efektif, serta kurangnya integrasi antar destinasi wisata menjadi kendala pengembangan sektor ini. Potensi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal seperti tenun

Songket Palembang, batik Jambi, dan kuliner khas Sumatera juga belum dikelola secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

10. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menjadi tantangan strategis bagi Pulau Sumatera dalam menghadapi pertumbuhan populasi dan perubahan iklim. Meskipun memiliki lahan subur yang luas, produktivitas pertanian pangan di beberapa wilayah Sumatera masih di bawah potensi optimalnya. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat swasembada beras di Sumatera baru mencapai 83%, sementara ketergantungan terhadap impor komoditas pangan strategis lainnya masih tinggi. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian dan sumber pendapatan utama bagi 42,3% penduduk pedesaan menghadapi tantangan produktivitas yang signifikan, dengan kesenjangan hasil panen antara petani skala kecil dan perkebunan besar mencapai 38%. Diversifikasi produksi pangan dan penguatan rantai pasok pertanian yang efisien menjadi penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

11. Konflik Sosial dan Politik

Konflik sosial dan politik menjadi tantangan tersendiri di beberapa wilayah Sumatera. Beberapa daerah seperti Aceh memiliki sejarah konflik dan masih menghadapi tantangan dalam implementasi otonomi khusus dan perdamaian berkelanjutan. Konflik sosial dan sengketa lahan menjadi persoalan yang mengakar di berbagai wilayah. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria, terdapat 127 konflik lahan di Sumatera sepanjang tahun 2023 dengan luas area konflik mencapai 420.000 hektar. Konflik ini umumnya melibatkan masyarakat adat, perusahaan perkebunan, dan pihak pemerintah, dengan akar masalah berupa tumpang tindih klaim kepemilikan lahan, perizinan yang tidak transparan, dan pengabaian hak-hak masyarakat adat. Keadilan sosial dan pendekatan dialogis menjadi kunci dalam penyelesaian konflik untuk menjaga stabilitas dan kohesi sosial.

12. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia menjadi isu fundamental untuk meningkatkan daya saing Sumatera. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompetitif masih menjadi tantangan di seluruh provinsi di Sumatera. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan

menengah atas di Sumatera masih berkisar pada angka 72,5%, dengan disparitas yang signifikan antar kabupaten. Kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menjadi isu serius. Berdasarkan hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), rata-rata skor literasi dan numerasi siswa di daerah terpencil Sumatera 32% lebih rendah dibandingkan siswa di perkotaan. Data BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara sebesar 5,28% pada tahun 2023, dengan kesenjangan keterampilan sebagai faktor utama penyebabnya.

13. Layanan Kesehatan dan Kualitas Hidup

Pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Sumatera. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan rasio tenaga medis terhadap penduduk di Sumatera masih di bawah standar WHO, terutama di daerah perdesaan dan terpencil. Puskesmas dan rumah sakit rujukan belum tersebar merata, dengan jarak tempuh ke fasilitas kesehatan terdekat di beberapa wilayah mencapai lebih dari 25 kilometer. Angka kematian ibu dan balita di beberapa kabupaten di Sumatera masih di atas rata-rata nasional. Belum optimalnya pemenuhan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah menyebabkan munculnya pemukiman kumuh di perkotaan, sementara belum terpenuhinya ketersediaan air bersih di beberapa wilayah berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat.

14. Konektivitas Digital

Konektivitas digital menjadi prasyarat dalam mendorong transformasi ekonomi di era digital. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa Sumatera, penetrasi internet mencapai 77,35%, menyumbang 20,69% dari total pengguna internet di Indonesia, dengan kesenjangan digital yang signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pengembangan ekonomi digital, e-commerce, dan industri kreatif di Sumatera terhambat oleh keterbatasan konektivitas ini. Pemerataan infrastruktur digital menjadi kunci untuk membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan daya saing regional di era digital.

15. Pengembangan Industri Hilir

Pengembangan industri hilir menjadi tantangan strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal Sumatera. Selama ini, sebagian besar komoditas unggulan

Sumatera seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan hasil tambang diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa tingkat pengolahan produk kelapa sawit di Sumatera baru mencapai 40% dari total produksi. Keterbatasan infrastruktur pendukung industri, akses terhadap teknologi, dan keterampilan tenaga kerja menjadi hambatan dalam pengembangan industri hilir.

16. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi menjadi isu strategis dalam mendukung daya saing regional Sumatera. Berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, rata-rata skor pemerintah daerah di Sumatera baru mencapai 63,5 dari skala 100. Perizinan usaha yang panjang, pelayanan publik yang belum terintegrasi, serta kapasitas aparatur daerah yang belum optimal menghambat iklim investasi dan pengembangan usaha di Sumatera.

Penanganan isu-isu strategis tersebut memerlukan pendekatan komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan. Program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses terhadap layanan dasar berkualitas perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera. Fokus khusus perlu diberikan pada pengembangan infrastruktur yang merata, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam mengatasi kompleksitas tantangan pembangunan dan mewujudkan potensi Pulau Sumatera sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2.3.2.4 Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pembangunan kualitas dan daya saing sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan modal manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup sepanjang siklus kehidupan, yang akan menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing global.

Sektor kesehatan menghadapi tantangan peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan dan gizi, pengendalian penyakit, penguatan sistem ketahanan kesehatan, serta peningkatan responsivitas pelayanan di seluruh wilayah. Sektor pendidikan perlu mengoptimalkan bonus demografi untuk memenuhi kebutuhan SDM berkualitas yang mendukung pembangunan multi-sektor. Sistem perlindungan sosial adaptif diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dan memperluas perlindungan menyeluruh bagi seluruh penduduk berdasarkan tingkat kerentanan dengan prinsip keadilan dan inklusivitas.

Sistem demokrasi masih bersifat prosedural, ditandai dengan belum kuatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil, belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik, ketimpangan akses informasi dan komunikasi publik, masih adanya politik uang dan politisasi SARA, serta belum maksimalnya sistem kaderisasi partai politik.

Nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi fundamental dalam pembangunan kualitas SDM. Keluarga berperan sebagai institusi utama dalam internalisasi nilai positif dan pembangunan karakter. Kebijakan pemerintah harus berperspektif gender dan inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lansia, untuk memastikan pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

2. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pengembangan pariwisata membutuhkan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang melalui pembangunan jalan, bandara, dan transportasi publik terintegrasi. Penyediaan fasilitas pendukung berkualitas seperti akomodasi, kuliner, dan pusat informasi wisata menjadi faktor penting meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan.

Penguatan ekonomi kreatif menjadi kunci pendukung sektor pariwisata, dengan UMKM bidang kerajinan, kuliner khas, dan seni pertunjukan memerlukan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi ekonomi kreatif melalui e-commerce dan promosi media sosial perlu diperkuat untuk memperluas jangkauan pasar produk lokal, sehingga tidak hanya mendukung pariwisata tetapi juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.

Fokus pengembangan sektor ini harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal untuk kebermanfaatan jangka panjang. Edukasi mengenai ekowisata dan pengelolaan sampah di kawasan wisata juga harus ditingkatkan.

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Merata dan Berkeadilan

Penyediaan infrastruktur masih menghadapi berbagai tantangan seperti luasnya permukiman kumuh, terbatasnya akses air minum dan sanitasi layak, serta belum optimalnya infrastruktur pengelolaan sumber daya air dan penanganan banjir. Cakupan hunian layak yang terintegrasi dengan akses air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah masih rendah. Kawasan perkotaan di Sumatera Utara mengalami perkembangan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*), sementara perumahan swadaya memerlukan perhatian khusus karena tingginya risiko bencana.

Layanan ketenagalistrikan masih menghadapi kekurangan pasokan daya di beberapa sistem dan daerah perbatasan, serta pulau terluar. Fleksibilitas operasi belum optimal terutama di luar waktu beban puncak. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem terisolasi, dengan sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk distribusi daya secara menyeluruh.

Jangkauan jaringan seluler belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan produktif, meskipun infrastruktur telekomunikasi sudah cukup merata. Penyediaan pelayanan dasar belum merata, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Permasalahan spesifik meliputi penyediaan air bersih, irigasi, penanganan banjir, dan abrasi, dengan jumlah kejadian bencana banjir yang tinggi terutama di Metropolitan Medan.

Kapasitas prasarana air baku belum memenuhi target pelayanan rumah tangga, perkotaan, dan industri. Meskipun ketersediaan air secara total masih surplus, beberapa wilayah seperti Kota Tanjungbalai, Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, dan Serdang Bedagai mengalami defisit air. Degradasi daerah hulu akibat deforestasi dan alih fungsi lahan semakin mengancam keberlanjutan ketersediaan air.

Kualitas lingkungan dipengaruhi oleh pengelolaan sampah dan sanitasi yang belum optimal, tercermin dari rendahnya jumlah perusahaan bersertifikasi SNI ISO 14001 dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai. Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring pertumbuhan penduduk, mengharuskan peningkatan kapasitas pengelolaan limbah cair, lumpur tinja, dan limbah B3.

4. Pembangunan Antar Daerah serta Desa-Kota

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota belum optimal dalam menciptakan rantai nilai yang mendorong pemerataan ekonomi. Kawasan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo) masih menghadapi masalah permukiman kumuh, akses air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan, serta keterbatasan transportasi massal. Permasalahan ini muncul akibat urbanisasi tidak terkendali dan konsentrasi pertumbuhan ekonomi di pusat bisnis dan perdagangan, yang menjadi daya tarik migrasi penduduk.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Investasi berbasis lahan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, terutama dalam menjamin kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Tantangan pengelolaan SDA meliputi adaptasi perubahan iklim, pengawasan deforestasi dan kebakaran hutan, harmonisasi hubungan manusia-satwa liar, peningkatan akses dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan dan kelompok marginal, serta optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan.

Ketahanan pangan terancam oleh defisit air di beberapa wilayah meskipun secara umum Sumatera Utara masih surplus air dan pangan. Keanekaragaman hayati tinggi menjadi penopang ketersediaan pangan, namun jasa lingkungan penyediaan pangan di wilayah barat Sumatera Utara masih rendah. Kerentanan terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

Emisi gas rumah kaca dan intensitas energi primer masih tinggi, sementara upaya penyerapan emisi di wilayah perkotaan minim, terlihat dari belum terpenuhinya penerapan green waste dan ruang terbuka hijau. Dampak perubahan iklim semakin

parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim, dengan 2% wilayah sangat rentan.

Potensi bencana tinggi terdapat di beberapa wilayah seperti banjir di pantai utara Kabupaten Langkat hingga Labuhanbatu Selatan, dan kekeringan di beberapa kabupaten lainnya. Kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana masih rendah, sementara jasa lingkungan untuk pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah, terutama di pantai timur Sumatera Utara dan kepulauan Nias. Mengingat dominasi bencana hidrometeorologi, upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim sangat diperlukan bersama dengan peningkatan daya dukung lingkungan dan kapasitas masyarakat.

6. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur konektivitas dan sistem logistik yang belum optimal berpotensi menghambat aktivitas ekonomi melalui tingginya biaya logistik dari wilayah produsen menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Diperlukan upaya peningkatan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, penurunan biaya logistik, pengurangan ekonomi biaya tinggi, serta pemerataan akses di seluruh wilayah. Aksesibilitas daerah mencakup ketersediaan fasilitas perhubungan darat, laut, dan udara, termasuk jaringan jalan raya, kereta api, angkutan sungai dan danau, serta penyeberangan.

7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif

Sumatera Utara menghadapi dua tantangan utama dalam tata kelola: meningkatkan kapabilitas dan integritas pemerintahan, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Penguatan kapabilitas berfokus pada transisi dari reformasi birokrasi umum menuju reformasi birokrasi tematik, penyempurnaan proses bisnis adaptif berbasis teknologi informasi, serta pengembangan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan nilai-nilai inti.

Isu tata kelola lainnya meliputi pemanfaatan teknologi informasi dalam deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi diharapkan dapat mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

2.3.2.5 Isu Strategis dalam Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

1. Sumber Daya Manusia, Kualitas Kependudukan, dan Penguatan Budaya. Aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengelolaan kependudukan, dan penguatan budaya menjadi isu utama yang menuntut upaya serius untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tantangan utama berupa tingginya persentase pekerja berpendidikan rendah, laju pertumbuhan penduduk yang masih signifikan, kasus stunting yang cukup tinggi, dan mulai tergesernya budaya lokal oleh arus modernisasi. Penanggulangan masalah ini memerlukan intervensi kebijakan yang terpadu, mulai dari pemerataan fasilitas dasar, program perbaikan gizi, hingga revitalisasi pelestarian budaya daerah.
 - a. Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Penurunan Stunting. Penanganan stunting (26,4%) dan kasus balita gizi buruk memerlukan intervensi terpadu: edukasi gizi, peningkatan cakupan fasilitas kesehatan, serta distribusi tenaga kesehatan yang merata di semua kecamatan.
 - b. Pemerataan dan Mutu Pendidikan. Capaian APK SMA 61,58% dan rata-rata lama sekolah 8,93 tahun mengindikasikan perlunya akses pendidikan menengah dan vokasi, peningkatan mutu guru, serta perluasan bantuan bagi siswa miskin dan terpencil.
 - c. Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Kewirausahaan. Mayoritas angkatan kerja tamatan SD–SMA (91,29%), lapangan kerja informal tinggi, menuntut peningkatan pelatihan vokasi, pengembangan UMK, dan link & match pendidikan dengan dunia industri/agroindustri lokal.
 - d. Perlindungan Anak, Pengarusutamaan Gender, dan Inklusi Sosial. Ketimpangan gender ($>0,5$), partisipasi perempuan yang baru 40% di pelayanan publik, menuntut pemberdayaan perempuan, peningkatan perlindungan anak, dan layanan sosial berbasis keluarga.
 - e. Penguatan Identitas Budaya dan Kerukunan. Pengaruh budaya luar, menurunnya kegiatan pelestarian seni/adat/cagar budaya membutuhkan

revitalisasi program budaya berbasis komunitas serta penguatan dialog lintas agama dan etnis.

2. **Perekonomian dan Sumber Daya Alam.** Pembangunan sektor perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam berfokus pada penguatan struktur ekonomi daerah agar tidak terlalu bergantung pada sektor primer, khususnya perkebunan kelapa sawit dan hasil pertanian. Upaya diversifikasi ekonomi—melalui pengembangan industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta peningkatan nilai tambah komoditas lokal—merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi. Alih fungsi lahan dan tekanan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup juga menjadi perhatian khusus untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
 - a. **Diversifikasi Ekonomi dan Pengembangan Hilirisasi** Dominasi sektor sawit/karet berdampak pada rentannya ekonomi terhadap fluktuasi global. Pengembangan industri pengolahan, ekonomi kreatif, dan sektor pariwisata adalah kunci untuk memperkuat struktur ekonomi.
 - b. **Ketahanan dan Surplus Pangan** Meskipun masih surplus, luasan lahan pangan berkurang di Kotapinang—perlu intervensi ketat menjaga lahan pangan dan mengoptimalkan lahan surplus untuk produksi lokal.
 - c. **Investasi dan Daya Saing Daerah** Pertumbuhan investor PMA dan PMDN stagnan. Butuh kemudahan perizinan, promosi investasi kawasan strategis, dan pemberdayaan UKM sebagai sektor penyangga ekonomi lokal.
 - d. **Pengelolaan SDA dan Alih Fungsi Lahan** Luas perkebunan sawit mencapai 74,95%, menyebabkan tekanan pada lahan pangan dan lingkungan. Tata ruang berbasis konservasi dan ekonomi berkelanjutan menjadi prioritas.
3. **Infrastruktur Publik yang Memadai dan Merata.** Penyediaan infrastruktur publik yang memadai dan merata di seluruh wilayah menjadi fondasi utama akselerasi pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Masih tingginya ketimpangan akses jalan, air bersih, listrik, sanitasi, dan infrastruktur digital menuntut upaya percepatan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah tertinggal. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan mendorong produktivitas,

meningkatkan konektivitas, serta memperkuat basis pelayanan publik yang efisien dan efektif.

- a. Konektivitas Jalan dan Jembatan Jalan kabupaten (984km, 90%) rusak bertambah setiap tahun. Pembangunan dan pemeliharaan ruas strategis menjadi kunci akselerasi pemulihan ekonomi.
 - b. Akses Air Bersih dan Sanitasi Capaian air minum layak (90,47%) dan sanitasi (84,85%) harus ditingkatkan, khususnya di perifer, agar layanan dasar setara dengan wilayah maju di provinsi.
 - c. Pemerataan Listrik dan Infrastruktur Digital Elektrifikasi dan Indeks Masyarakat Digital (39,44) masih rendah, memperlemah peluang ekonomi digital dan inklusi layanan publik di wilayah pedesaan.
 - d. Penunjang Pariwisata dan Perdagangan Keterbatasan akomodasi dan rumah makan menyebabkan ekonomi wisata stagnan; revitalisasi objek wisata dan integrasi dengan sektor UMKM sangat diperlukan.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Berintegritas, Profesional, dan Melayani. Tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, profesional, dan melayani masyarakat secara optimal menjadi prasyarat utama pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah. Kinerja birokrasi yang mulai menunjukkan perbaikan menandakan adanya ruang bagi percepatan reformasi birokrasi melalui penguatan sistem digital, evaluasi kinerja yang berkelanjutan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.
- a. Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks RB baru CC, SPBE rendah. Dibutuhkan percepatan digitalisasi transaksi, penguatan SDM aparatur, dan pelayanan terintegrasi satu data.
 - b. Evaluasi Perencanaan dan Akuntabilitas Pengukuran kinerja dan pelaporan masih lemah. Penguatan sistem monitoring-evaluasi kinerja wajib agar pembangunan efisien dan transparan.
 - c. Inovasi Pelayanan Publik Kolaborasi multisektor, pemberdayaan desa, dan tipologi dinas berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
5. Hukum yang Berkeadilan, Keamanan Sosial, dan Regulasi yang Adaptif. Penegakan hukum yang berkeadilan, jaminan keamanan sosial, serta adaptasi

regulasi terhadap dinamika sosial perlu diperkuat demi mewujudkan stabilitas daerah. Tantangan yang dihadapi berupa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan, rasio aparat penegak ketertiban yang terbatas, dan perlindungan kelompok rentan yang belum optimal. Untuk itu, inovasi kebijakan dan penguatan koordinasi antar-lembaga menjadi krusial dalam menciptakan ekosistem sosial yang aman dan berkeadilan.

- a. Pencegahan Konflik dan Penguatan Keamanan Sosial Rasio Satpol PP/Linmas 3,2/10.000 penduduk, pelanggaran perda stagnan, membutuhkan pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, edukasi demokrasi substantif, dan penanganan kasus hukum secara inklusif.
 - b. Penegakan Hukum Adaptif dan Perlindungan Kelompok Rentan Inovasi regulasi yang pro-perempuan dan pro-anak—termasuk akses bantuan hukum dan perlindungan sosial.
6. Ekosistem Berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan ekosistem berkelanjutan menjadi isu urgen di tengah makin tingginya tekanan terhadap sumber daya alam. Diperlukan langkah nyata dalam pengendalian bencana, pelestarian kawasan hutan, pengelolaan sampah yang terintegrasi, pengendalian emisi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim yang telah mulai dirasakan di berbagai kecamatan.
- a. Pengelolaan Risiko Bencana dan Adaptasi Iklim Indeks Risiko Bencana terus tinggi (131,20), kapasitas adaptasi rendah. Penguatan mitigasi: embung, penghijauan, perlindungan DAS, dan edukasi siaga bencana.
 - b. Pelestarian Hutan, Air, dan Keanekaragaman Hayati Vegetasi hutan hanya 8,16% (2022), luas suaka alam berkurang akibat sawit/budidaya. Tata ruang berbasis kawasan lindung dan pemulihan ekosistem perlu digiatkan.
 - c. Pengelolaan Sampah dan Limbah Penanganan sampah baru 60,65%, TPA mendekati penuh, perlu perluasan sistem pengelolaan dan pendidikan masyarakat untuk perilaku ramah lingkungan.
7. Pembangunan Daya Saing Usaha Daerah. Pengembangan daya saing usaha daerah, khususnya pada UMKM, pariwisata, dan industri kreatif juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan membuka peluang kerja

baru. Dukungan berupa kemudahan akses pembiayaan, pelatihan, promosi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan usaha akan mempercepat transformasi ekonomi lokal menuju ekonomi berbasis inovasi dan nilai tambah.

- a. Peningkatan Kapasitas dan Inovasi UKM/UMK Jumlah UKM dibina naik (278 ke 367, 2016–2018), tapi persentase pembinaan turun ke 14,5%. Butuh peningkatan kualitas pelatihan, akses pasar, dan digitalisasi UMKM.
- b. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah wisatawan dan objek wisata stagnan, menuntut promosi, inovasi paket wisata, dan peningkatan standar fasilitas pendukung.
- c. Penguatan Ekosistem Bisnis dan Iklim Investasi Pembenahan sistem kemudahan usaha, perizinan online, dan kolaborasi dengan swasta untuk pengembangan kawasan industri dan agrowisata.

2.3.3. Kajian Atas Dokumen Perencanaan

2.3.3.1 Kajian Atas Dokumen RPJMN 2025-2029

Dokumen RPJMN 2025-2029 berfungsi sebagai acuan induk perencanaan untuk seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Dokumen ini juga menjadi pedoman integral dalam penyusunan perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. RPJMN 2025-2029 mengusung visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan semangat kebersamaan, melanjutkan fondasi yang telah dibangun pemerintah sebelumnya demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

Visi tersebut diwujudkan melalui Delapan Misi Presiden yang dikenal sebagai Delapan Asta Cita:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta mengintensifkan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan Asta Cita ini dijabarkan ke dalam 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor, disertai 8 langkah-langkah konkret berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins, diantaranya:

Tabel 2.101 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

17 Program Prioritas Presiden RPJMN 2025-2029	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi 5. Pemberantasan kemiskinan 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian

7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat 8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4. Membangun sekolah sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah sekolah yang perlu renovasi 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

16.Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	

**Visi RPJMN 2025–2029 adalah
"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**



Gambar 2.1. Visi RPJMN 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029 ini juga termuat arah pembangunan kewilayahan. Adapun penyelarasan arah pembangunan kewilayahan untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam RPJMN 2025-2029 antara lain:

**Tabel 2.102 Penyelarasan arah pembangunan kewilayahan
untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam RPJMN 2025-2029**

No.	Aspek Arah Pembangunan Kewilayahan	Penyelarasan RPJMN 2025-2029
1.	Optimalisasi Potensi Wilayah	Komoditas perkebunan potensial: Pengembangan perkebunan kelapa sawit dan karet yang menjadi andalan Labuhanbatu Selatan dengan pendekatan berkelanjutan

		▪ Ketahanan pangan: Diversifikasi tanaman pangan lokal dan peningkatan produktivitas lahan pertanian ▪ Energi: Pemanfaatan potensi bioenergi dari limbah kelapa sawit ▪ Bahan tambang: Pengelolaan sumber daya tambang secara berkelanjutan ▪ Lokasi geografis strategis: Pengembangan infrastruktur konektivitas untuk memaksimalkan posisi di Pantai Timur Sumatera
2.	Pengembangan Bioindustri dan Industri Maritim	▪ Pembangunan klaster industri pengolahan sawit dan karet terintegrasi ▪ Pengembangan industri hilir berbasis komoditas lokal ▪ Peningkatan nilai tambah produk perikanan dan kelautan
3.	Penguatan Sektor Pertanian-Agroindustri	▪ Modernisasi pertanian dengan teknologi dan digitalisasi ▪ Pembangunan sistem rantai pasok pertanian yang efisien ▪ Peningkatan kapasitas petani dan pelaku agroindustri lokal
4.	Pengembangan Pariwisata	▪ Pengembangan destinasi ekowisata berbasis sumber daya alam lokal ▪ Pelestarian dan promosi budaya Melayu dan Batak sebagai daya tarik wisata ▪ Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata berkelanjutan
5.	Pembangunan Perkotaan Berkualitas dan Berkelanjutan	▪ Penataan ruang wilayah yang terintegrasi ▪ Pengembangan infrastruktur perkotaan yang ramah lingkungan ▪ Peningkatan kualitas permukiman dan sanitasi
6.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan EBT	▪ Implementasi praktik produksi bersih di industri pengolahan ▪ Pengembangan pembangkit listrik berbasis biomassa dari limbah sawit ▪ Konservasi kawasan hutan dan lahan gambut
7.	Peningkatan Kontribusi Ekonomi	▪ Peningkatan investasi di sektor unggulan daerah ▪ Pengembangan UMKM berbasis komoditas lokal ▪ Penguatan kelembagaan ekonomi dan keuangan daerah

2.3.3.2 Kajian Atas Dokumen RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2017-2037

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD dan RPJPD harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dan tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri No. 86 Tahun 2017).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang bertujuan untuk mendorong efisiensi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang ditetapkan dalam RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi), meliputi Kota Pinang. Rencana Struktur Ruang juga mencakup Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi:

- a) Langga Payung di Kecamatan Sungai Kanan.
- b) Cikampak di Kecamatan Torgamba.
- c) Aek Goti di Kecamatan Silangkitang.
- d) Tanjung Medan di Kecamatan Kampung Rakyat.

Selain itu, terdapat beberapa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang meliputi:

- a) Desa Simatahari di Kecamatan Kotapinang.
- b) Desa Perkebunan Teluk Panji di Kecamatan Kampung Rakyat.
- c) Desa Pinang Damai di Kecamatan Torgamba.
- d) Desa Huta Godang di Kecamatan Sungai Kanan.
- e) Desa Mandalasena di Kecamatan Silangkitang.

Pusat Pelayanan Lingkungan ini berperan penting dalam memastikan pelayanan dasar tersedia hingga ke lingkungan-lingkungan kecil.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2017-2037 adalah sebagai berikut:

1) Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan bagian dari rencana pola ruang yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting. Kawasan lindung terdiri dari:

a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan sebagai wilayah tangkapan air, pencegahan bencana banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah seluas $\pm 7.051,73$ Ha (tujuh ribu lima puluh satu koma tujuh tiga hektar) di Kecamatan Sungai Kanan.

b. Kawasan yang Memberi Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan ini meliputi luas seluruh kawasan hutan seluas $\pm 41.803,31$ Ha (empat puluh satu ribu delapan ratus tiga koma tiga satu hektar) yang berada di Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Torgamba, dan Kecamatan Kotapinang.

c. Kawasan Perlindungan Setempat

Meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan danau atau waduk, kawasan sempadan mata air, dan RTH kawasan perkotaan. Kawasan sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter di kiri-kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan sungai kecil yang berada di luar permukiman. Untuk sungai di kawasan permukiman, sempadan sungai berupa jalan inspeksi antara 10-15 meter. Kawasan sempadan sungai Kabupaten yang ditetapkan meliputi Sungai Barumon, Sungai Kanan, Aek Raso, Aek Kabaro, Aek Tasik, dan sungai kecil lainnya. Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan sebesar 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk, yang meliputi Danau/Situ Seberang yang terdapat di Kecamatan Torgamba.

d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Kawan ini mencakup suaka alam, pelestarian alam yang bersifat alami, dan cagar budaya yang dilindungi.

e. Kawasan Rawan Bencana

Pola ruang kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan bencana geologi, kawasan rawan masa gerakan tanah/tanah longsor, kawasan rawan zona patahan aktif, dan kawasan rawan banjir/banjir bandang. Kawasan rawan bencana geologi meliputi seluruh kecamatan di kabupaten dan termasuk zona kerawanan tingkat menengah. Kawasan rawan gerakan tanah/tanah longsor meliputi Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Kampung Rakyat. Kawasan rawan banjir/banjir bandang meliputi Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Torgamba, dan Kecamatan Kampung Rakyat.

2) Kawasan Budi Daya

a. Kawasan Hutan Produksi

Terletak di Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Kotapinang, dan Kecamatan Torgamba dengan luas $\pm 29.054,89$ Ha (dua puluh sembilan ribu lima puluh empat koma delapan sembilan hektar).

b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas: Terletak di Kecamatan Sungai Kanan dengan luas $\pm 3.596,27$ Ha.

c. Kawasan Pertanian:

1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, meliputi Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan seluas lebih kurang 27,70 Ha; Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan seluas lebih kurang 10,10 Ha; Desa Mampang Kecamatan Kotapinang seluas lebih kurang 65,12 Ha; Desa Pasir Tuntung/Hadundung Kecamatan Kotapinang seluas lebih kurang 75 Ha.

2) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura yang diarahkan di semua kecamatan.

3) Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 240.302,43 Ha diarahkan sesuai dengan kesesuaian lahannya, meliputi: kelapa sawit

di seluruh kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan; karet tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan; kakao di Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Torgamba, dan Kecamatan Silangkitang; kopi di Kecamatan Sungai Kanan; pinang di Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Silangkitang.

- 4) Kawasan peternakan diarahkan pada peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas di semua kecamatan, meliputi: pada daerah perkebunan di seluruh kecamatan dikembangkan ternak sapi dan kambing; pada wilayah perkotaan dan daerah penyangga perkotaan dikembangkan ternak unggas seperti ayam dan itik.

d. Kawasan Perikanan

Pola ruang kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan perikanan tangkap, budidaya perikanan, dan ikan air tawar. Kawasan perikanan tangkap meliputi Kecamatan Kampung Rakyat dan Kecamatan Kotapinang. Kawasan perikanan budidaya tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan pengolahan ikan air tawar tersebar di seluruh kecamatan.

e. Kawasan Pertambangan

Meliputi pertambangan rakyat dan pertambangan besar. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertambangan, meliputi: potensi dolomit pada Kecamatan Kotapinang; dan potensi arsen dan bauksit di Kecamatan Kotapinang dan Kecamatan Silangkitang.

f. Kawasan Industri

- 1) Industri besar berbasis perkebunan meliputi pabrik crumb rubber, pabrik pengolahan CPO yang tersebar di semua kecamatan.
- 2) Kawasan peruntukan industri menengah, industri kecil, dan rumah tangga untuk mendukung perekonomian masyarakat berada di semua kecamatan, meliputi industri makanan dan minuman, anyaman, bengkel, furnitur, kilang padi, dan jasa.

g. Kawasan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan.

- 1) Kawasan peruntukan pariwisata alam antara lain meliputi: Taman Wisata Holiday Resort di Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba, Lumpatan Tali-Tali Desa Marsonja Kecamatan Sungai Kanan, Pemandian Alam Pandayangan Indah di Desa Mandalasena, Kecamatan Silangkitang, Danau Permata di Kelurahan Kotapinang, Air Panas Desa Sei Meranti, Pemandian Balkap Desa Hajoran, Pantai Keceper Desa Sampean, Danau Patempel Desa Sabungan, Danau Rawa-Rawa Desa Sabungan, Air Terjun Aek Kulim Desa Mandalasena, Sampuran Silalahi Desa Mandalasena, Goa Kelelawar di Kecamatan Sungai Kanan, Danau Sisalak Desa Tanjung Medan, Agro Wisata Mampang Desa Mampang, Sampuran RJ Mandalasena Desa Mandalasena, Danau PT. Tolan 3 Desa Perlabian
- 2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi wisata sejarah Istana Kota Bahran di Kecamatan Kotapinang, Peninggalan Kerajaan Pinang Awan di Kecamatan Torgamba, dan Peninggalan Kerajaan Huta Godang di Kecamatan Sungai Kanan.
- 3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan antara lain meliputi: Bumi Perkemahan PT. Asam Jawa di Kecamatan Torgamba, Wisata Alam Simatahari Desa Simatahari, Kolam Renang dan Bumi Perkemahan Telaga Asri di Kelurahan Kotapinang, Danau Pagaran Padang Desa Asam Jawa, Taman Waterpark Pesona Cikampak, Taman Wisata Kolam Renang Mentari Cikampak, Taman Wisata Kolam Renang Happy Park Cikampak, Taman Wisata Kolam Pancing dan Cafe Melly Cikampak., Taman Wisata Tambak Mini Aek Batu, Taman Wisata Green Land FQ Asam Jawa, Parmerah Anugrah Sandrina (PAS) Sabungan, Taman Wisata Pantai Go Desa Binanga.

h. Kawasan Permukiman

Terdiri atas permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan diarahkan pada ibukota kabupaten yaitu Kotapinang,

dan ibukota kecamatan yaitu Langga Payung, Cikampak, Silangkitang, dan Tanjung Medan. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan diarahkan pada desa-desa yang telah ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi Simatahari, Perkebunan Normark, Perkebunan Teluk Panji, Pinang Damai, Huta Godang, dan Aek Kulim, serta di luar kawasan permukiman perkotaan.

i. Kawasan Peruntukan Lainnya

Terdiri atas kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan serta pelayanan kesehatan lanjutan. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan serta pelayanan kesehatan berupa Koramil dan Rumah Sakit di Kelurahan Kotapinang.



Kabupaten
Labuhanbatu
Selatan



BAB 3

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah



www.labuhanbatuselatankab.go.id/

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi Pembangunan

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai. Visi pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Visi Pembangunan

Makna dari Visi Pembangunan “Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern” tidak dapat terlepas dari pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Sepuluh tahun terakhir ini pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dinilai positif oleh masyarakat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Berbagai macam pencapaian positif dan penghargaan diperoleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Makna “SEMAKIN” yang disematkan dalam Visi Pembangunan di RPJMD ini mengandung nilai dan semangat untuk pencapaian pembangunan 5 tahun kedepan lebih baik dari yang ada saat ini. Tentu ini menjadi tantangan besar yang harus dijawab oleh pemerintahan saat ini. Dalam titik nol kondisi Labuhanbatu Selatan yang relatif lebih maju saat ini, maksud dari kata “Semakin” ini harus dimaknai sebagai kondisi yang lebih. Lebih dalam hal kebaikan di bidang pembangunan.

Adapun makna dari visi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Labuhanbatu Selatan periode 2025-2029, sebagai berikut:

1. **Maju wilayahnya** ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas, memiliki SDM yang maju, memiliki ekonomi yang berkelanjutan, dan tentunya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
2. **Orientasinya pelayanan prima** ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dengan mengedepankan efektifitas, efisiensi, serta digitalisasi.
3. **Dekat dengan warganya** ditandai dengan penguatan budaya dan kearifan lokal yang mengedepankan gotong royong.
4. **Ekonominya kuat** ditandai dengan pertumbuhan perekonomian yang meningkat dari sektor-sektor unggulan daerah.
5. **Reformasi birokrasinya berdampak** ditandai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasinya berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan pembangunan dan sekaligus mempercepat pertumbuhan perekonomian yang ada di daerah.
6. **Nyaman untuk semua** ditandai dengan wilayah yang aman dari kejahatan dan memiliki lingkungan yang lestari sehingga dapat memberikan kenyamanan tempat tinggal bagi masyarakat.

Makna dari setiap visi pembangunan ini telah disesuaikan dan sangat berkaitan dengan visi dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga pembangunan yang dilakukan memiliki keselarasan serta berdampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Selanjutnya dalam merealisasikan visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut di atas, maka diperlukan sasaran visi daerah yang dirumuskan menjadi 5 (lima) yang telah disesuaikan dengan sasaran pada visi RPJMN 2025-2029 dan disesuaikan dengan karakteristik daerah. Adapun sasaran pada visi RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai berikut:



Gambar 3.2 Sasaran Visi

Adapun indikator dan target untuk mengukur sasaran pada visi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2025-2029 tersebut, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Sasaran Visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Sasaran Visi	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB Per Kapita (RP Juta)	125,72	135,67	145,52	154,25	160,13	174,46
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,10	5,30	5,70	6,20	6,80	7,10
	Kontribusi PDRB Industri (%)	12,5	13,0	13,6	14,2	14,8	15,5
Pengentasan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan yang Menurun (%)	7,2	6,5	5,8	5,1	4,5	4,0
	Rasio Gini	0,202	0,195	0,190	0,185	0,180	0,175
Peningkatan Daya Saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,80	77,60	78,40	79,20	81,00	84,80

Sasaran Visi	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penurunan Emisi GRK menuju net zero emission	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,21	76,38	76,55	76,72	76,89	77,07
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik	89	91	93	95	97	99
	Nilai SAKIP yang Meningkat	50,36	62,50	65,20	70,05	75,20	80,15
	Nilai Indeks RB yang meningkat	70.00	73.00	76.00	80.00	83.00	85.00

Sasaran Visi Labuhanbatu Selatan telah selaras dengan sasaran utama RPJMN karena telah memuat sasaran Peningkatan Pendapatan per Kapita, Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Daya Saing SDM, Penurunan Emisi GKR menuju net zero emission, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Adapun kontribusi sasaran visi Labuhanbatu Selatan terhadap sasaran utama RPJMN dapat dilihat berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebagai alat ukur terhadap kontribusi dari masing-masing sasaran visi.

Selanjutnya sasaran visi telah memiliki relevansi dengan target dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB provinsi serta tingkat kesenjangan. Relevansi sasaran visi ditandai dengan telah ditetapkannya indikator pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB Industri pada sasaran visi Peningkatan Pendapatan Per Kapita. Hal yang sama juga terkait relevansi sasaran visi ditandai dengan indikator tingkat kemiskinan yang menurun dan rasio gini pada sasaran visi Pengentasan Kemiskinan. Dengan masing-masing indikator pada setiap sasaran visi Labuhanbatu Selatan tersebut, maka akan memiliki kontribusi terhadap peningkatan PDRB dan penurunan tingkat kesenjangan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

3.2. Misi Pembangunan

Misi adalah rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Misi yang dibawa oleh Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada. Dalam Pilkada waktu lalu Bupati dan Wakil Bupati

terpilih menetapkan 8 Misi untuk mewujudkan Visi pembangunannya, kedelapan misi tersebut adalah:

- 1) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat.
- 2) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif.
- 4) Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman, Tentram, Damai, dan Nyaman untuk Hidup maupun Beraktivitas.
- 5) Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya untuk Menciptakan Lingkungan yang Lestari dan Berbudaya.
- 6) Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata, Adil, dan Menciptakan Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas Tinggi.
- 7) Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya ditujukan untuk Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Publik yang Berkualitas, Memadai dan Merata.
- 8) Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya Berkesinambungan, Berkadilang, Bermartabat.

Untuk kepentingan menyusun desain perencanaan pembangunan jangka menengah yang baik, maka pemahaman terhadap kerangka berpikir Visi-Misi Kepala Daerah menjadi penting. Kerangka pikir tersebut dapat terlihat jelas dalam konstruksi Visi-Misi kepala daerah sebagai berikut:



Gambar 3.3. Konstruksi Visi Misi Kepala Daerah

Dalam konteks manajemen strategis, untuk memudahkan menyusun arsitektur kinerja pembangunan, maka Misi kepala daerah diatas dilakukan transformasi menjadi Misi Pembangunan. Transformasi ini dilakukan dengan tidak menghilangkan makna dan substansi dari Misi Kepala Daerah yang dibawa pada saat pilkada. Transformasi ini dilakukan dengan cara membaca ekstraksi dari makna misi dan melakukan *clustering* dengan mempertimbangkan bidang dan fungsi dari terjemahan misi tersebut.

TRANSFORMASI MISI KEPALA DAERAH KE MISI PEMBANGUNAN



Gambar 3.4. Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan

Dengan memperhatikan proses transformasi Misi Kepala Daerah terpilih kepada Misi Pembangunan Daerah, maka Misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat.

Peningkatan daya saing SDM merupakan kunci dari percepatan pembangunan. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan masyarakat di Labuhanbatu Selatan agar dapat bersaing dengan daerah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Misi peningkatan dan pemerataan daya saing ini akan difokuskan pada:

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- SDM yang unggul akan menjadi kunci utama dalam pembangunan berbagai aspek di Labuhanbatu Selatan.
- Dengan meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan moral masyarakat, Labuhanbatu Selatan dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
- Masyarakat yang cerdas dan terampil akan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan industri dan teknologi.

b. Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

- Pemerataan pembangunan akan membantu mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Labuhanbatu Selatan.
- Dengan adanya akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, masyarakat di seluruh wilayah bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.
- Ketimpangan dalam pembangunan bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial, sehingga pemerataan menjadi kunci untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

c. Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

- Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan mampu berkontribusi lebih baik dalam pembangunan daerah.
- Akses layanan kesehatan yang lebih baik akan mengurangi angka kematian, meningkatkan harapan hidup, dan menciptakan generasi yang lebih kuat secara fisik dan mental.
- Gizi yang baik dan pola hidup sehat akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan belajar anak-anak serta produktivitas tenaga kerja.

d. Menjaga Identitas Budaya dan Moralitas Masyarakat

- Nilai-nilai budaya lokal perlu dijaga agar tidak tergerus oleh modernisasi yang tidak sesuai dengan karakter masyarakat.
- Masyarakat yang berbudaya akan lebih memiliki rasa kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial yang tinggi.
- Pendidikan berbasis moral akan menghasilkan generasi yang memiliki akhlak baik, menjunjung tinggi etika, dan mampu menjadi pemimpin yang berintegritas di masa depan.

e. Meningkatkan Prestasi dan Daya Saing Daerah

- Mendorong prestasi di berbagai bidang (pendidikan, olahraga, seni, dan ekonomi) akan membantu meningkatkan citra Labuhanbatu Selatan sebagai daerah yang maju dan inovatif.
- Prestasi yang tinggi akan menarik lebih banyak investasi, meningkatkan pariwisata, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
- Dengan daya saing yang meningkat, Labuhanbatu Selatan bisa menjadi salah satu daerah terdepan di Sumatera Utara, baik dalam pembangunan SDM maupun sektor ekonomi lainnya.

2) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Transformasi ekonomi menjadi pilar penting dalam perubahan pembangunan di Labuhanbatu Selatan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu pentingnya transformasi dan penguatan struktur ekonomi di Labuhanbatu Selatan dengan mengandalkan sektor-sektor utama yang menjadi potensi daerah. Secara lebih spesifik misi ini difokuskan pada:

a. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi berarti mengubah dan meningkatkan struktur ekonomi agar lebih kuat, berkelanjutan, dan tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Ini mencakup:

- **Diversifikasi ekonomi** Labuhanbatu Selatan perlu mengoptimalkan potensi sawit yang dimiliki agar dapat memberikan efek besar dan menyeluruh terhadap sektor lainnya.
- **Meningkatkan nilai tambah** pembangunan ekonomi di Labuhanbatu Selatan harus mampu mendorong hilirisasi industri, seperti pengolahan hasil pertanian dan perkebunan agar bernilai lebih tinggi sebelum dijual.
- **Pemanfaatan teknologi dan inovasi**, dilakukan melalui adopsi teknologi baru dalam pertanian, perikanan, dan industri agar lebih efisien dan produktif.

b. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal

Labuhanbatu Selatan memiliki potensi besar dalam beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak ekonomi secara berkelanjutan, antara lain:

- **Pertanian dan Perkebunan:** Dilakukan dengan melalui pengembangan tanaman unggulan seperti sawit, nenas, kakao, karet, dan hortikultura, serta meningkatkan kesejahteraan petani dengan akses modal dan pasar yang lebih baik.
- **Kehutanan:** Mendorong pengelolaan hutan secara lestari untuk menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi.

- **Pariwisata:** Mengembangkan ekowisata dan wisata budaya untuk menarik wisatawan serta meningkatkan pendapatan daerah.
- **Peternakan:** Meningkatkan produksi peternakan dengan pendekatan modern agar lebih produktif dan berkelanjutan.
- **Bio Industri:** Memanfaatkan sumber daya hayati (biomassa) untuk menghasilkan produk bernilai tambah, seperti bahan bakar, bahan kimia, makanan, dan obat-obatan. Pengembangan bioindustri sangat penting untuk mencapai keberlanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dikembangkan dalam bio industri.

3) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif.

Misi ini berfokus pada perbaikan dan penguatan pondasi tata kelola pemerintahan yang kuat, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan yang prima. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam misi ini, adalah:

a. Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh

Tata kelola pemerintahan yang tangguh berarti pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini mencakup:

- **Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan:** Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara) agar lebih produktif dan inovatif dalam melayani masyarakat.
- **Mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi:** Digitalisasi pelayanan publik untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
- **Meningkatkan ketahanan birokrasi:** Pemerintahan harus mampu menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan regulasi, krisis ekonomi, dan bencana, dengan kebijakan yang cepat dan tepat.

- **Peningkatan pelayanan publik:** Memastikan semua layanan pemerintahan, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan bantuan sosial, berjalan dengan cepat dan tanpa hambatan.

b. Pemerintahan yang Berintegritas

Integritas dalam pemerintahan berarti menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab, tanpa korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Ini mencakup:

- **Transparansi dalam pengelolaan anggaran dengan** menggunakan anggaran daerah secara ekonomis, efisien dan efektif, transparan, bertanggungjawab agar masyarakat tahu bagaimana uang mereka digunakan.
- **Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan** mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan agar kebijakan yang dibuat benar-benar untuk kepentingan rakyat.
- **Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dengan** mengoptimalkan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah dan pelayanan publik.
- **Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara** dengan memberikan gaji dan tunjangan yang layak, diharapkan ASN lebih fokus dalam bekerja dan tidak tergoda untuk melakukan korupsi.

4) Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya.

Misi ini menekankan pentingnya menjaga keamanan di lingkungan masyarakat dan membangun kelestarian lingkungan. Beberapa penting yang menjadi fokus misi ini adalah:

a. Pengelolaan Lingkungan yang Aman bagi Masyarakat

Pengelolaan lingkungan yang aman bagi masyarakat merupakan wujud dari pemerintah selalu ada dalam menjaga keamanan bagi semua. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sangat penting karena memiliki

peran krusial dalam membentuk fondasi yang kokoh untuk perkembangan fisik, mental, dan emosional. Hal ini mencakup:

- Merumuskan kebijakan yang berfokus pada pencegahan kejahatan dan peningkatan keamanan.
- Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program keamanan.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan cara-cara mencegah kejahatan.
- Membangun kerjasama yang kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
- Menerapkan hukum secara adil dan konsisten untuk mencegah dan menindak kejahatan

b. **Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu**

Pengelolaan lingkungan yang terpadu berarti mengelola sumber daya alam secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*), seperti pemerintah, masyarakat, dan industri. Hal ini mencakup:

- **Pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan** guna mencegah deforestasi dan degradasi lahan akibat aktivitas perkebunan, pertambangan, dan perumahan.
- **Pengendalian pencemaran lingkungan** guna menekan pencemaran air, udara, dan tanah dari industri dan aktivitas domestik agar lingkungan tetap sehat.
- **Peningkatan tata kelola sampah dan limbah** melalui penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- **Pemanfaatan energi ramah lingkungan** guna mendorong penggunaan energi terbarukan, dan ekonomi hijau seperti tenaga surya dan biogas, guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

- **Mendukung ekonomi berbasis lingkungan** dengan mendorong usaha yang berbasis ekowisata, pertanian organik, dan industri hijau yang tidak merusak alam.

5) Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata dengan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik Berkualitas dan Mengedepankan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, dan Bermartabat.

Misi ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi infrastruktur fisik dan digital secara merata dalam rangka rangka memperkuat konektivitas antar wilayah. Misi ini akan berfokus pada:

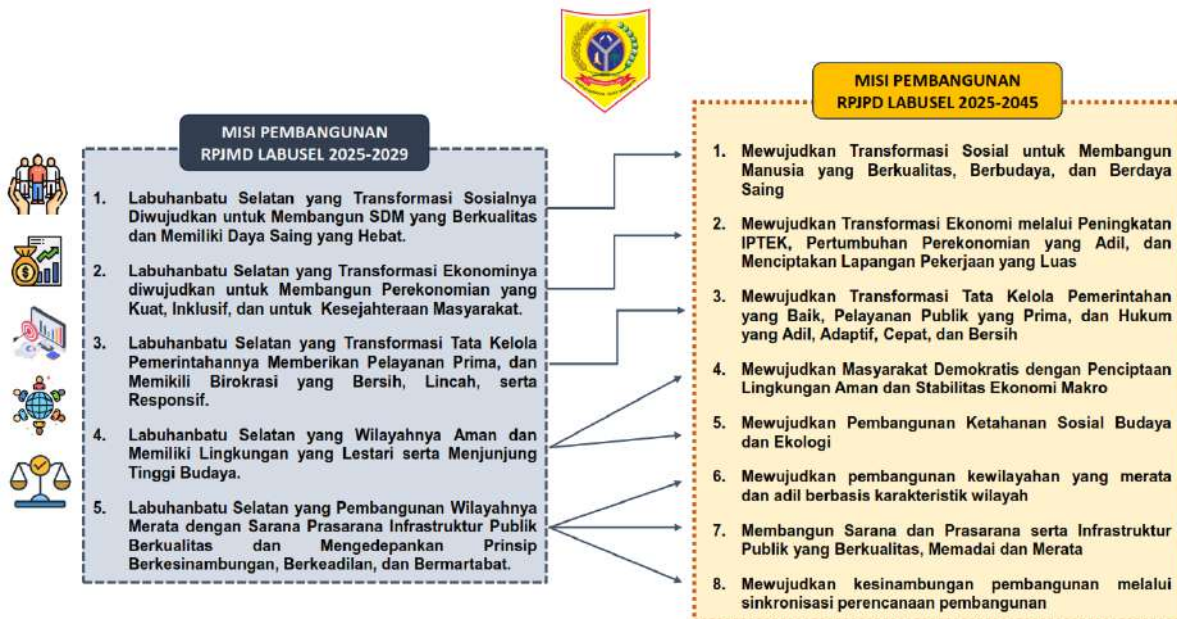
- a. **Pembangunan Jalan dan transportasi** dapat dilakukan dengan memperbaiki jalan, jembatan, serta sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas ke daerah terpencil.
- b. **Penyediaan listrik dan air bersih** dengan memastikan seluruh masyarakat, termasuk di pedesaan, memiliki akses listrik yang stabil dan air bersih yang cukup.
- c. **Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan** dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sekolah, puskesmas, serta rumah sakit agar pelayanan kepada masyarakat lebih merata.
- d. **Pembangunan perumahan dan sanitasi** dengan menyediakan hunian yang layak dan sistem pembuangan limbah yang baik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- e. Mendorong penggunaan teknologi digital dalam sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM agar lebih kompetitif di pasar nasional maupun global.

3.2.1. Sinkronisasi RPJMD Labuhanbatu Selatan dengan RPJPD Labuhanbatu Selatan Periode 2025-2045, RPJMD Provinsi dan RPJMN Periode 2025-2029

Misi pembangunan yang telah dirumuskan juga telah disinkronisasi dengan misi pembangunan yang terdapat pada dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan daerah. Berikut disampaikan sinkronisasi tersebut. Dokumen perencanaan yang dijadikan referensi kemudian disinkronisasi antara lain RPJPD Labuhanbatu Selatan Periode 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2025, RPJMN 2025-2029.

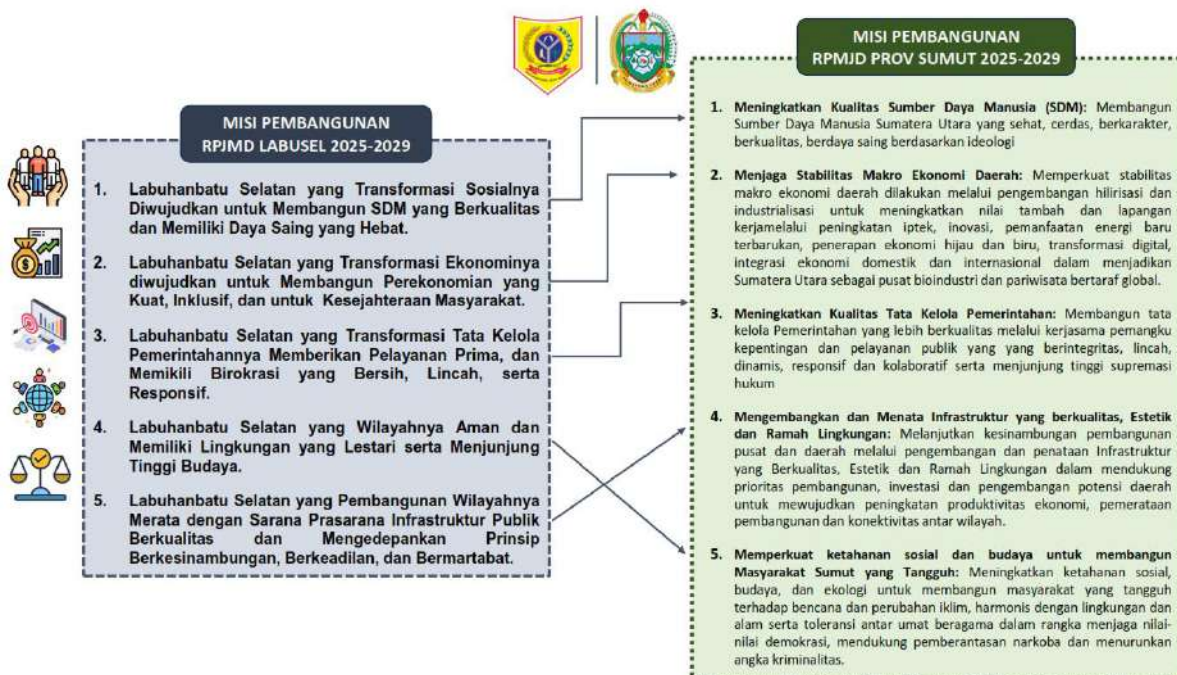
Sinkronisasi ini menjadi hal yang sangat penting agar proses pembangunan dari level nasional, provinsi, sampai daerah dapat terkoordinasi dengan baik sehingga pencapaian pembangunan dapat cepat terealisasi. Adapun rincian sinkronisasi antar misi dalam dokumen perencanaan dimaksud, disampaikan sebagai berikut:

1) Sinkronisasi Misi Pembangunan RPJMD Kab. Labuhanbatu Selatan 2025-2029 dengan RPJPD Kab. Labuhanbatu Selatan 2025-2045:



Gambar 3.5 Sinkronisasi RPJMD dengan RPJPD Labusel

2) Sinkronisasi Misi Pembangunan RPJMD Kab. Labuhanbatu Selatan 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029:



Gambar 3.6 Sinkronisasi RPJMD Labusel dengan RPJMD Sumut

3) Sinkronisasi Misi Pembangunan RPJMD Kab. Labuhanbatu Selatan 2025-2029 dengan RPJMN (Asta Cita) 2025-2029:

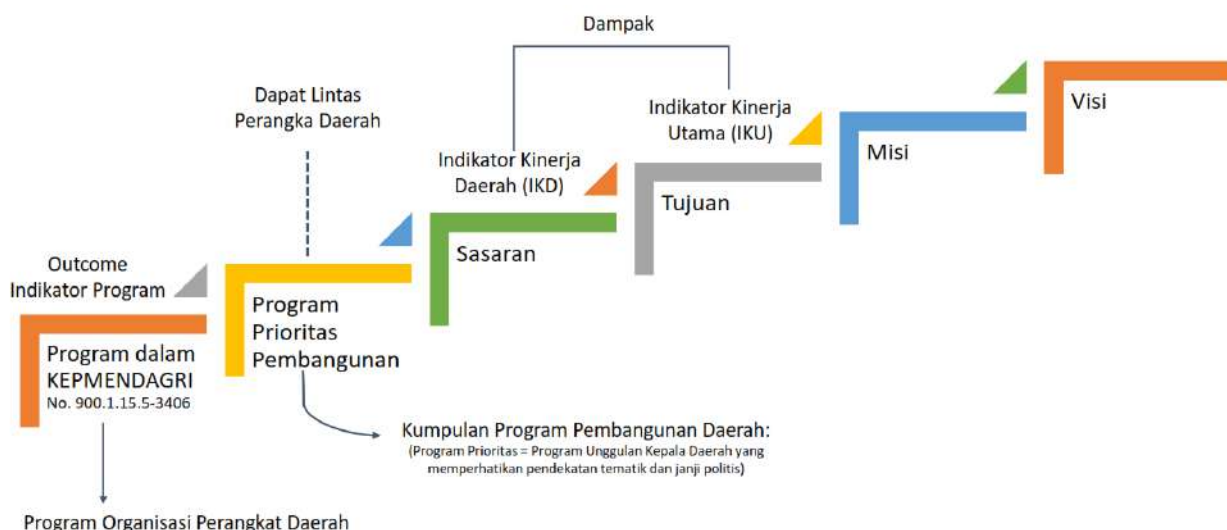


Gambar 3.7 Sinkronisasi RPJMD Labusel dengan RPJMN / Asta Cita

Misi pembangunan diatas selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka berpikir pencapaian misi dalam bentuk cascading tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD ini. Cascading pencapaian Misi Pembangunan Daerah ini menunjukkan langkah-langkah intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang. Serta menunjukkan ukuran keberhasilan intervensi tersebut serta siapa yang harus melakukan intervensi tersebut. Kerangka ini disusun untuk memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis sektoral (Renstra Perangkat Daerah) yang harus tetap terhubung dan terintegrasi dengan RPJMD ini.

3.3. Tujuan dan Sasaran

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan arsitektur kinerja berupa alir visi misi hingga program. Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merepresentasikan atau tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah measurable yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan bupati dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD



Gambar 3.8. Linieritas Visi, Misi Tujuan, Sasaran, dan Program

Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan logframe Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Gambaran cascading diatas menunjukkan gambaran pola intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang dan disertai dengan indikator keberhasilan yang melekat didalamnya.

3.3.1. Tujuan I: Mewujudkan Transformasi Sosial yang Diwujudkan Untuk Peningkatan Kualitas SDM dengan Pemberian Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Adaptif

Perencanaan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, serta penguatan karakter bangsa. Fokusnya adalah membentuk SDM unggul, adaptif, dan inovatif agar mampu menghadapi tantangan global serta mendorong terjadinya transformasi sosial yang berkeadilan. Sasaran yang dituju adalah meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan merata, dan meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif.

3.3.2. Tujuan II: Mewujudkan Penguatan Transformasi Ekonomi Yang Diwujudkan Untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan Jaminan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Perencanaan pembangunan ekonomi menitikberatkan pada diversifikasi sektor ekonomi, pemberdayaan UMKM, penguatan investasi, serta pemerataan akses terhadap peluang usaha. Tujuannya menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sasaran yang dituju adalah terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor unggulan, meningkatnya kinerja dan daya saing industri pengolahan, dan meningkatnya pemerataan pembangunan ekonomi.

3.3.3. Tujuan III: Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan, Pelayanan Publik yang Prima, dan Memiliki Birokrasi Yang Bersih, Lincah, serta Responsif

Perencanaan difokuskan pada reformasi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi pelayanan publik. Hal ini dilakukan agar tata kelola pemerintahan lebih efisien, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menciptakan birokrasi yang bersih dan terpercaya. Sasaran yang dituju adalah menguatnya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah, serta responsif, serta meningkatnya kapasitas keuangan daerah

3.3.4. Tujuan IV: Mewujudkan Lingkungan Yang Aman Dan Memiliki Lingkungan Yang Lestari Serta Menjunjung Tinggi Kearifan Lokal Berbasis Budaya

Perencanaan pembangunan diarahkan pada penguatan sistem keamanan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Tujuannya menciptakan harmoni antara pembangunan, pelestarian lingkungan, dan penghargaan terhadap identitas budaya. Sasaran yang dituju adalah terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan, meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ramah lingkungan, dan terciptanya kelestarian budaya lokal.

3.3.5. Tujuan V: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Penyediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik yang Layak Dengan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, Dan Bermartabat

Perencanaan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur yang merata antarwilayah, peningkatan konektivitas, serta pemerataan akses pelayanan dasar. Prinsip keberlanjutan dan keadilan dijadikan landasan agar pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil dengan tetap menjaga martabat masyarakat. Sasaran yang dituju adalah meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur dasar.

Tujuan, sasaran, dan indikator memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Adapun maaf utamanya, sebagai berikut:

- a. Penetapan tujuan pembangunan akan memberikan manfaat dalam penyusunan RPJMD Labuhanbatu Selatan yaitu: 1) Memberikan arah yang jelas; 2) Memfokuskan upaya pencapaian output dan outcome; 3) Membangun akuntabilitas.
- b. Penetapan sasaran pembangunan akan memberikan manfaat dalam penyusunan RPJMD Labuhanbatu Selatan yaitu: 1) Memperjelas langkah-langkah dalam mencapai tujuan; 2) Memudahkan pemantauan; 3) Meningkatkan efisiensi.
- c. Penetapan indikator pembangunan akan memberikan manfaat dalam penyusunan RPJMD Labuhanbatu Selatan yaitu: 1) Mengukur kemajuan

pembangunan; 2) Mengevaluasi efektivitas dari program dan kebijakan; 3) Membuat penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan.

Tabel 3.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Target**Visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029: “Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern”**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat	Mewujudkan Transformasi Sosial Yang Diwujudkan Untuk Peningkatan Kualitas SDM Dengan Pemberian Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,11	76,80	77,60	78,40	79,20	81,00	84,80
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,71	73,01	73,31	73,61	73,91	74,21	74,51
			Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	90,75	91,05	92,75	93,50	94,25	95,30	96,55
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	92,96	99	99	99	100	100	100
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	22	20,5	19	17,5	16	14,5	13
		Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	55.03	57.03	60.03	62.53	65.03	67.53	70.03
			Rata-rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	65.04	66.14	67.24	68.34	69.44	70.54	71.64
			Rata-rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	49.89	52.79	55.69	58.59	61.49	64.39	67.29
			Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	59.22	60.72	62.22	63.72	65.22	66.72	68.22

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Rata-Rata lama sekolah	9,19	9,50	10,14	10,60	11,10	11,40	11,80
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,53	13,73	13,93	14,13	14,33	14,53	14,73
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	71,63	71,65	72	72,5	73	73,5	80,1
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	58,84	59	60	62	64	67	70
		Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan	7,73	7,2	6,5	5,8	5,1	4,5	4,0
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	74,78	75,95	76,13	76,29	76,32	76,52	76,71
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	54	55	56	57	58	59	60
Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan Penguatan Transformasi Ekonomi Yang Diwujudkan Untuk Membangun Perekonomian Yang Kuat, Inklusif, Dan Jaminan Untuk Kesejahteraan Masyarakat		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,89	5,10	5,30	5,70	6,20	6,80	7,10
			Tingkat Pengangguran Terbuka	3,24	3,20	3,12	3,07	3,02	2,88	2,76
			Gini Rasio	0,212	0,202	0,195	0,190	0,185	0,180	0,175
		Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor unggulan	Tingkat Inflasi	3,36	3,35	3,35	3,34	3,34	3,33	3,33
			PDRB Per Kapita	124,52	125,72	135,67	145,52	154,25	160,13	174,46
			Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB		18	20	21,5	23	24,8	26,5
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0,75	0,80	0,90	1,20	1,88	2,54	3,20
		Meningkatnya kinerja dan daya saing	Rasio PDRB Industri Pengolahan	40,89	42,45	43,97	44,48	47,00	47,52	49,04

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		industri pengolahan								
		Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,84	11,05	12,75	13,45	14,14	15,84	16,54
			Persentase Desa Mandiri		1,40	1,92	1,92	3,85	3,85	5,77
Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincih, serta Responsif	Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan, Pelayanan Publik Yang Prima, Dan Memiliki Birokrasi Yang Bersih, Lincih, Serta Responsif		Indeks Pelayanan Publik	87,2	89	91	93	95	97	99
			Indeks Reformasi Birokrasi	52,97	70	73	76	80	83	85
		Menguatnya Birokrasi yang Profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincih, serta responsif	Indeks SPBE	1,93	2,10	2,22	2,34	2,45	2,55	2,65
			Indeks Reformasi Hukum	87.98	89.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
			Indeks Demokrasi Indonesia	75.11	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00	83.00
			Indeks Inovasi Daerah	18,02	20	23	26	29	32	34
		Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	2,91	3,10	3,22	3,34	3,46	3,58	3,70
			Indeks Akses Keuangan Daerah	2,26	2,39	2,45	2,52	2,58	2,64	2,68
Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya	Mewujudkan Lingkungan Yang Aman Dan Memiliki Lingkungan Yang Lestari Serta Menjunjung Tinggi Kearifan Lokal Berbasis Budaya		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100	100	100	100	100	100	100
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70.28	76.21	76.38	76.55	76.72	76.89	77.07
		Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di	50	52	54	56	58	60	62

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Area Tempat Tinggalnya							
		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan	Indeks Risiko Bencana	13.120	13.120	12.152	12.656	11.876	11.256	11.678
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah		12	13,2	17	21	26	32
			Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah		9	11	14,5	18,5	23	28
		Terciptanya Kelestarian Budaya Lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0
Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata dengan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik Berkualitas dan Mengedepankan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, dan Bermartabat	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Penyediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik Yang Layak Dengan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, Dan Bermartabat		Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	30,15	30,50	31,10	31,50	31,90	32,30	32,70
		Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur dasar	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	70	72	74	76	78	80	82
			Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	22	25	30	35	40	45	50
			Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	88	88,5	89	89,5	90	90,5	91

Tabel 3.3. Penyeragaman Sasaran Pembangunan/ Indikator Makro RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029		
	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,10	6,80
2.	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78,4	115,3	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78,4	115,3	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	125,72	160,13
3.	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Kab (%)	3,66	3,66
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 – 7,46	2,82 – 3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 – 7,46	2,82 – 3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	7,2	4,5
5.	Rasio Gini	0,303 - 0,305	0,287 - 0,291	Rasio Gini	0,303 - 0,305	0,287 - 0,291	Rasio Gini	0,202	0,180
6.	Indeks Modal Manusia	0,54	0,57	Indeks Modal Manusia	0,54	0,57	Indeks Pembangunan Manusia	76,80	81,00

7.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	16.88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	16.88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76.21	76.89
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 – 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 – 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,20	2,88

3.4. Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan permasalahan, isu strategis, visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) Tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

3.4.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perumusan strategi hasil analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), SWOT dipilih untuk dirumuskan menjadi rumusan strategi yang disesuaikan dengan permasalahan dan rumusan visi, misi, tujuan sasaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3.4.2. Arah Kebijakan

Perumusan arah kebijakan harus mempertimbangkan strategi sebagai landasan utamanya. Setiap arah kebijakan dirancang untuk mendukung implementasi strategi tersebut. Penyusunan arah kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah perlu berpedoman pada visi dan misi kepala daerah terpilih, dengan mempertimbangkan seluruh potensi, peluang, tantangan, serta ancaman yang mungkin terjadi sepanjang masa jabatan. Penting untuk mempersiapkan langkah antisipatif terhadap segala kemungkinan, baik positif maupun negatif, yang berhubungan dengan isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan wilayah.

Pelaksanaan arah kebijakan bisa dilakukan dalam kurun waktu satu tahun, namun ada juga yang memerlukan waktu lebih panjang. Yang terpenting, seluruh arah kebijakan harus menjadi prioritas serta sasaran pembangunan daerah yang terpadu, mampu memberdayakan seluruh potensi daerah dan pemerintah, serta memanfaatkan setiap peluang yang tersedia. Arah kebijakan ini akan menjadi dasar dalam penetapan program pembangunan yang lebih operasional guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Setelah melalui proses penilaian dan perumusan, maka strategi yang dipilih untuk pencapaian visi, misi, program, sebagai berikut:

ST.1 Penguatan sistem pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang terintegrasi dengan memperhatikan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan

Komitmen daerah dalam pengembangan sumber daya manusia melalui penguatan sistem pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang terintegrasi merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan Labuhanbatu Selatan. Dengan memperhatikan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan, penguatan SDM akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, meningkatkan daya saing daerah, serta memastikan kesejahteraan masyarakat yang merata. Pendekatan holistik dalam pengembangan SDM mencakup aksesibilitas pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, jaminan pelayanan kesehatan yang menjangkau hingga daerah terpencil, dan sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Strategi pembangunan yang tepat untuk Labuhanbatu Selatan harus mengimplementasikan integrasi tiga pilar utama: pertama, peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan daerah, termasuk pengembangan pendidikan vokasi dan keterampilan praktis; kedua, penguatan sistem kesehatan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan infrastruktur kesehatan, ketersediaan tenaga medis, dan layanan kesehatan preventif hingga ke wilayah terpencil; dan ketiga, pengembangan sistem perlindungan sosial adaptif yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan mengurangi kesenjangan sosial. Implementasi ketiga pilar ini harus mempertimbangkan karakteristik geografis dan sosial-ekonomi kabupaten yang beragam antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Keberhasilan transformasi sosial di Labuhanbatu Selatan akan bergantung pada integrasi sistem pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dengan potensi ekonomi daerah serta penguatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Koordinasi lintas sektor antara dinas pendidikan, kesehatan, dan sosial perlu diperkuat untuk menciptakan layanan terpadu yang efektif dan efisien. Dengan menyelaraskan pengembangan kompetensi masyarakat melalui pendidikan berkualitas, menjamin derajat kesehatan optimal, dan memberikan jaring pengaman sosial yang memadai, Labuhanbatu Selatan dapat mewujudkan

masyarakat yang memiliki kesejahteraan ekonomi dan ketahanan sosial untuk menghadapi dinamika pembangunan regional dan global.

Berikut merupakan arah kebijakan dalam Penguatan sistem pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang terintegrasi dengan memperhatikan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan:

1. Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan yang inklusif dan berkeadilan melalui program beasiswa tepat sasaran bagi pelajar tidak mampu dan berprestasi serta optimalisasi angka partisipasi sekolah;
2. Mengembangkan kesehatan dan status gizi peserta didik secara komprehensif dan berkelanjutan melalui program makan gizi seimbang gratis untuk anak sekolah;
3. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik melalui percepatan sertifikasi dan sistem insentif yang terukur bagi guru formal maupun non-formal, termasuk guru mengaji, guru ibadah, dan guru seniman; dan
4. Memperluas cakupan jaminan sosial yang adaptif dan terintegrasi bagi seluruh lapisan masyarakat serta memperkuat pengembangan sumber daya manusia yang berakhlak mulia berbasis nilai-nilai agama.

ST.2 Pengembangan sektor ekonomi unggulan berbasis teknologi dan inovasi dengan mendorong investasi, penguatan UMKM, dan diversifikasi sumber ekonomi daerah

Pembangunan infrastruktur ekonomi yang terintegrasi dengan teknologi digital menjadi fondasi utama transformasi ekonomi Labuhanbatu Selatan. Peningkatan konektivitas melalui pembangunan jalan, jembatan, dan sistem transportasi cerdas akan membuka akses pasar digital yang lebih luas serta mendukung distribusi hasil produksi ke berbagai wilayah. Investasi pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis teknologi dan inovasi yang selaras dengan kebutuhan industri 4.0 akan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi digital.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki potensi signifikan untuk mewujudkan transformasi ekonomi berbasis teknologi dan inovasi melalui optimalisasi sektor-sektor unggulannya. Sebagai daerah dengan basis ekonomi perkebunan kelapa sawit dan karet, kabupaten ini perlu mengembangkan ekosistem inovasi yang mendukung hilirisasi industri dengan teknologi modern, penguatan UMKM digital, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi. Penerapan teknologi dalam rantai nilai komoditas unggulan akan menciptakan nilai tambah yang signifikan dan membuka peluang kerja baru di sektor-sektor berbasis pengetahuan dan teknologi, memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Keberhasilan transformasi ekonomi Labuhanbatu Selatan juga bergantung pada implementasi tata kelola digital dan reformasi birokrasi yang mendukung ekosistem inovasi dan investasi. Digitalisasi proses perizinan, peningkatan transparansi melalui platform digital, dan penerapan teknologi informasi terintegrasi dalam pelayanan publik akan meningkatkan efisiensi investasi dan mendorong pertumbuhan startup lokal. Transformasi berbasis teknologi ini harus memperhatikan prinsip berkelanjutan melalui adopsi teknologi hijau dan pengelolaan sumber daya alam berbasis IoT dan AI, sehingga pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan dengan tetap mendorong inovasi untuk kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

Berikut merupakan arah kebijakan dalam Pengembangan sektor ekonomi unggulan berbasis teknologi dan inovasi dengan mendorong investasi, penguatan UMKM, dan diversifikasi sumber ekonomi daerah:

1. Mengembangkan kawasan pariwisata terpadu dan berkelanjutan melalui pembangunan strategis fasilitas modern seperti mall, wisata air, dan objek wisata lainnya yang menjadi penggerak ekonomi baru dengan melibatkan masyarakat lokal;
2. Intensifikasi Hilirisasi produk unggulan daerah berbasis inovasi dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas rantai pasok, dan memperkuat daya saing ekonomi lokal;

3. Mengoptimalkan daya tarik investasi dan pengembangan infrastruktur pendukung sektor pariwisata melalui kemitraan pemerintah-swasta dan promosi daerah yang terintegrasi;
4. Mewujudkan ekosistem ekonomi inklusif dan merata dengan memaksimalkan potensi khas daerah, penguatan kapasitas UMKM, dan pemerataan kesempatan usaha di seluruh wilayah.

ST.3 Implementasi sistem *e-government* dan reformasi birokrasi menyeluruh dengan memperkuat kapasitas aparatur, pengawasan, dan sistem pelayanan publik yang terintegrasi

Implementasi sistem e-government di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi landasan utama transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang berkualitas, terintegrasi, dan mudah diakses. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan pengembangan aplikasi terintegrasi akan mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan. Penguatan kapasitas aparatur sipil negara perlu dilakukan melalui pelatihan intensif teknologi informasi, peningkatan kompetensi digital, dan pengembangan budaya kerja berbasis elektronik. Sistem penilaian kinerja berbasis merit dan penempatan pegawai sesuai keahlian digital akan mendorong terciptanya birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Reformasi birokrasi menyeluruh di Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Sebagai kabupaten yang relatif baru hasil pemekaran, Labuhanbatu Selatan perlu memperkuat fondasi kelembagaan digital untuk mengoptimalkan potensi daerah dan mengatasi kesenjangan pelayanan publik. Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi prioritas melalui implementasi sistem pengawasan elektronik yang real-time dan terintegrasi. Optimalisasi fungsi Inspektorat dengan dukungan teknologi pengawasan akan memperkuat pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Pembentukan zona integritas dan wilayah bebas korupsi yang dipantau secara elektronik akan membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik terintegrasi melalui standardisasi prosedur digital yang jelas, sederhana, dan terukur menjadi fokus utama.

Pembangunan pusat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) berbasis teknologi informasi memfasilitasi akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah dari satu portal terintegrasi. Debirokrasi dan deregulasi perizinan usaha secara elektronik menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Implementasi sistem pengaduan masyarakat online yang terintegrasi akan meningkatkan partisipasi publik dalam pemantauan kualitas pelayanan. Pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) elektronik dan analisis big data akan memastikan pelayanan publik senantiasa responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Transformasi digital tata kelola pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan memerlukan penguatan koordinasi virtual lintas sektor dan sinergi antar lembaga melalui platform terintegrasi untuk mengatasi ego sektoral. Pengembangan sistem perencanaan terintegrasi dengan penganggaran berbasis kinerja secara elektronik akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan big data dan sistem informasi terpadu sebagai fondasi pengambilan kebijakan menghasilkan kebijakan publik berkualitas yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui platform partisipasi digital dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif. Transformasi digital tata kelola ini menjadi katalisator percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, serta perwujudan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Berikut merupakan arah kebijakan Implementasi sistem e-government dan reformasi birokrasi menyeluruh dengan memperkuat kapasitas aparatur, pengawasan, dan sistem pelayanan publik yang terintegrasi:

1. Mengimplementasikan secara penuh sistem merit dalam manajemen kepegawaian dengan parameter yang terukur untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas tinggi, dan berkinerja optimal;

2. Mengembangkan ekosistem *digital governance* yang transparan dan akuntabel melalui revitalisasi website informasi publik dan pengembangan sistem informasi terintegrasi berbasis data;
3. Menciptakan inovasi pelayanan publik terpadu berkualitas tinggi melalui gebrakan layanan umum yang mensinergikan RSUD, Disdukcapil, dan BPJS dengan standar pelayanan prima;
4. Mengoptimalkan efisiensi proses administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan dengan pendekatan satu pintu, teknologi digital, dan pelayanan proaktif, dengan perhatian khusus pada pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan.

ST.4 Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memadukan sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki potensi strategis untuk mewujudkan wilayah yang aman, lestari, dan berbudaya melalui pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sebagai daerah dengan kekayaan sumber daya alam berupa perkebunan, hutan, dan aliran sungai, kabupaten ini memerlukan sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat untuk mencegah degradasi ekosistem akibat ekspansi perkebunan dan aktivitas ekonomi tidak berkelanjutan. Implementasi Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang dipadukan dengan kearifan lokal menjadi prioritas utama mengingat kondisi geografis yang berbatasan dengan beberapa kabupaten di Sumatera Utara dan potensi konflik terkait pengelolaan sumber daya alam. Pelibatan aktif masyarakat adat, kelompok tani, dan komunitas lokal dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan melalui revitalisasi lembaga adat dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dapat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang partisipatif. Selain itu, pelestarian nilai-nilai kearifan lokal seperti "Lubuk Larangan" (kawasan sungai yang dilindungi), "Rimba Larangan" (hutan adat), dan praktik pertanian tradisional perlu diintegrasikan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam untuk menciptakan keseimbangan ekologis dan identitas daerah yang berkelanjutan.

Strategi pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus mencakup sistem keamanan lingkungan terpadu yang berbasis masyarakat. Pengembangan Pamswakarsa (pengamanan swakarsa) lingkungan yang melibatkan tokoh adat, pemuda, dan kelompok masyarakat dalam menjaga kawasan hutan, daerah aliran sungai, dan lahan gambut menjadi krusial mengingat dominasi sektor perkebunan kelapa sawit dan karet dalam struktur ekonomi daerah. Pembentukan kelompok patroli lingkungan desa yang diperkuat dengan kearifan lokal "Marsialap Ari" (gotong royong) dapat mencegah perambahan hutan, pembakaran lahan, dan pencemaran sungai. Pendayagunaan pengetahuan tradisional tentang tanda-tanda alam dan sistem peringatan dini bencana yang dimiliki masyarakat lokal akan memperkuat ketahanan lingkungan. Pengembangan kawasan konservasi partisipatif dan ekowisata berbasis masyarakat akan memberikan nilai ekonomi pada upaya pelestarian lingkungan sekaligus membuka alternatif pendapatan berkelanjutan. Edukasi lingkungan yang mengintegrasikan kearifan lokal tentang hubungan manusia dengan alam bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi komponen penting untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat menjadi fondasi sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat yang efektif. Dokumentasi dan revitalisasi praktik-praktik tradisional masyarakat Melayu Labuhanbatu Selatan dalam menjaga keseimbangan alam, seperti ritual "Mangido Udan" (meminta hujan) dan "Tolak Bala" (menolak bencana) dapat memperkuat ketahanan ekologis wilayah. Pembentukan forum komunikasi lintas pemangku kepentingan yang melibatkan lembaga adat, kelompok tani, perusahaan perkebunan, dan pemerintah akan menciptakan mekanisme penyelesaian konflik sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Pengembangan peraturan desa (Perdes) tentang perlindungan lingkungan yang mengadopsi hukum adat dan sanksi sosial tradisional akan meningkatkan efektivitas penegakan aturan di tingkat lokal. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang dipadukan dengan pengetahuan lokal dalam sistem pemantauan lingkungan partisipatif dapat menciptakan model pengelolaan sumber daya alam yang adaptif dan responsif. Pendekatan terpadu yang mengintegrasikan sistem

keamanan lingkungan berbasis masyarakat dengan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal ini akan menciptakan fondasi yang kokoh bagi Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tumbuh menjadi daerah percontohan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan di Sumatera Utara.

Berikut merupakan arah kebijakan dalam Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memadukan sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal:

1. Mengembangkan sistem manajemen risiko bencana terpadu dan adaptif dengan memperkuat Kader Peduli Paret (Tim Pembasmi Banjir) sebagai ujung tombak mitigasi banjir berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat;
2. Mewujudkan lingkungan berkualitas tinggi melalui pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan berkelanjutan Ruang Publik Terbuka Hijau yang terintegrasi dengan penataan kota;
3. Melestarikan dan merevitalisasi nilai-nilai budaya serta kearifan lokal melalui program pemberdayaan komunitas adat, pembinaan sistematis kegiatan suku-suku, serta dokumentasi komprehensif bekerja sama dengan sejarawan dan para tokoh adat;
4. Menciptakan ekosistem lingkungan yang aman, nyaman, dan lestari dengan pendekatan kolaboratif seluruh pemangku kepentingan serta penerapan teknologi ramah lingkungan.

ST.5 Pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik yang terintegrasi dengan memperhatikan konektivitas antar wilayah, pemerataan akses pelayanan dasar, dan pengembangan kawasan strategis ekonomi

Kabupaten Labuhanbatu Selatan menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan pembangunan kewilayahan yang terintegrasi dengan infrastruktur berkualitas. Sebagai daerah hasil pemekaran, kabupaten ini masih mengalami kesenjangan konektivitas antara pusat kota dengan daerah pedesaan dan terpencil. Kondisi geografis yang beragam dengan kawasan perkebunan yang luas, daerah aliran sungai, dan beberapa wilayah yang relatif terisolasi memerlukan pendekatan pembangunan infrastruktur yang terpadu dan saling terhubung. Jaringan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik di beberapa kecamatan perlu

ditingkatkan kualitas dan jangkauannya untuk menciptakan konektivitas yang menjamin pemerataan akses layanan dasar dan mendukung pengembangan kawasan strategis ekonomi. Strategi pembangunan infrastruktur terintegrasi harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan potensi bencana alam seperti banjir yang sering terjadi di beberapa wilayah saat musim hujan. Pendekatan pembangunan berbasis keadilan spasial yang memperhatikan kebutuhan masing-masing wilayah sesuai dengan karakteristik dan potensinya menjadi kunci untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah yang berkesinambungan.

Pengembangan infrastruktur transportasi terintegrasi menjadi prioritas utama untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan kabupaten, jalan kecamatan, hingga jalan desa yang saling terhubung dalam satu sistem jaringan akan membuka akses merata bagi masyarakat ke pusat-pusat ekonomi, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Perbaikan jembatan dan pengembangan transportasi air di wilayah yang dilalui sungai besar akan menjadi bagian integral dari sistem transportasi multimoda yang terintegrasi. Pengembangan terminal dan prasarana transportasi umum yang terhubung dengan berbagai moda transportasi akan memfasilitasi mobilitas penduduk dan arus logistik yang efisien, sehingga mendukung pertumbuhan kawasan-kawasan strategis ekonomi. Pembangunan infrastruktur transportasi terintegrasi ini didesain dengan memperhatikan aspek keberlanjutan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan sistem mitigasi dampak perubahan iklim, seperti penggunaan material yang tahan terhadap kondisi ekstrem dan sistem drainase terpadu untuk mencegah kerusakan akibat banjir. Prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan konektivitas wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal untuk menjamin pemerataan akses terhadap pusat layanan dan ekonomi.

Penyediaan infrastruktur layanan dasar terintegrasi merupakan komponen penting dalam mewujudkan pemerataan akses layanan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah yang didistribusikan secara proporsional di setiap wilayah dan terhubung dengan sistem transportasi publik akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan berkualitas. Peningkatan fasilitas kesehatan dengan sistem rujukan yang terintegrasi mulai dari puskesmas hingga rumah sakit daerah, dilengkapi dengan peralatan medis

yang memadai dan sistem informasi kesehatan terpadu, akan menjamin ketersediaan layanan kesehatan berkualitas di seluruh wilayah. Pengembangan sistem penyediaan air bersih dan sanitasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui jaringan distribusi yang terkoneksi, termasuk di daerah pedesaan, akan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan secara menyeluruh. Infrastruktur energi, seperti jaringan listrik yang terhubung dengan sistem energi terbarukan lokal, akan mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan kawasan strategis. Penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan internet broadband yang menjangkau hingga daerah terpencil akan mengurangi kesenjangan digital dan mengintegrasikan seluruh wilayah ke dalam satu sistem informasi dan ekonomi digital. Desain fasilitas publik memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak, dengan standar yang konsisten di seluruh wilayah.

Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan strategis ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dirancang secara terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Pengembangan kawasan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung terpadu seperti jalan akses, energi, telekomunikasi, dan pengolahan limbah akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang terhubung dengan kawasan pertanian dan permukiman. Pembangunan sistem pasar yang terintegrasi dari pasar desa hingga pasar modern yang tersebar strategis di seluruh kecamatan dengan memperhatikan aksesibilitas transportasi akan memfasilitasi rantai nilai perdagangan dan meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Pengembangan infrastruktur irigasi dan pengelolaan sumber daya air yang terkoneksi dalam satu sistem daerah aliran sungai akan mendukung produktivitas kawasan-kawasan pertanian dan perkebunan strategis. Pembangunan infrastruktur pariwisata terintegrasi, seperti jalur wisata tematik yang menghubungkan berbagai objek wisata, akomodasi, dan fasilitas pendukung, akan mengembangkan kawasan-kawasan ekonomi berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif. Penyediaan sentra-sentra UMKM yang terhubung dengan pusat pelatihan, pemasaran, dan distribusi akan mendorong pengembangan kawasan ekonomi rakyat yang merata. Infrastruktur ekonomi dikembangkan dengan prinsip keberlanjutan melalui perencanaan terpadu yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor dan

daya dukung lingkungan, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang tangguh dan berkesinambungan.

Implementasi strategi pembangunan infrastruktur terintegrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan memerlukan tata kelola yang terkoordinasi dan berbasis sistem. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan spasial, pelaksanaan terintegrasi, dan pemeliharaan infrastruktur secara terpadu akan menjamin keterpaduan dan berkelanjutan infrastruktur yang dibangun. Pengembangan sistem informasi geografis untuk pemetaan jaringan infrastruktur dan analisis konektivitas akan memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur melalui forum perencanaan terpadu akan meningkatkan sinergi dan memastikan infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan konektivitas antar wilayah. Kemitraan dengan sektor swasta melalui skema kerjasama pemerintah-swasta (public-private partnership) yang terkoordinasi dapat menjadi solusi pembiayaan infrastruktur terintegrasi di tengah keterbatasan anggaran daerah. Koordinasi multilevel dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menyelaraskan program pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan sumber daya dan mempercepat terwujudnya konektivitas yang menyeluruh. Sistem monitoring dan evaluasi terpadu memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar mewujudkan konektivitas antar wilayah, pemerataan akses layanan dasar, dan pengembangan kawasan strategis ekonomi sesuai dengan sasaran pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berikut merupakan arah kebijakan Pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik yang terintegrasi dengan memperhatikan konektivitas antar wilayah, pemerataan akses layanan dasar, dan pengembangan kawasan strategis ekonomi:

1. Mengoptimalkan sistem transportasi dan aksesibilitas antar wilayah melalui program pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan berkala infrastruktur jalan strategis di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten dengan pendekatan berbasis data dan teknologi;

2. Mengimplementasikan program Labusel Terang secara sistematis dan menyeluruh untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur penerangan jalan yang efisien energi dan ramah lingkungan di seluruh wilayah;
3. Memprioritaskan pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar vital seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan layak huni untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat;
4. Mengembangkan infrastruktur strategis terintegrasi yang berorientasi pada konektivitas antar wilayah, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif dengan prinsip berkelanjutan dan berkeadilan.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2025-2029

Visi : Labuhanbatu Selatan yang semakin Modern			
Misi 1: Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T1. Mewujudkan Transformasi Sosial Yang Diwujudkan Untuk Peningkatan Kualitas SDM Dengan Pemberian Akses Pendidikan, Kesehatan, Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif	S1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan S2. Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan merata S3. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Penguatan sistem pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang terintegrasi dengan memperhatikan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan	1. Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan yang inklusif dan berkeadilan melalui program beasiswa tepat sasaran bagi pelajar tidak mampu dan berprestasi serta optimalisasi angka partisipasi sekolah; 2. Mengembangkan kesehatan dan status gizi peserta didik secara komprehensif dan berkelanjutan melalui program makan gizi seimbang gratis untuk anak sekolah; 3. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik

			melalui percepatan sertifikasi dan sistem insentif yang terukur bagi guru formal maupun non-formal, termasuk guru mengaji, guru ibadah, dan guru seniman; dan 4. Memperluas cakupan jaminan sosial yang adaptif dan terintegrasi bagi seluruh lapisan masyarakat serta memperkuat pengembangan sumber daya manusia yang berakhlak mulia berbasis nilai-nilai agama.
Misi 2: Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk Kesejahteraan Masyarakat			
T2. Mewujudkan penguatan transformasi ekonomi yang diwujudkan untuk membangun perekonomian yang kuat, inklusif, dan jaminan untuk kesejahteraan masyarakat	S4. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor unggulan	Pengembangan sektor ekonomi unggulan berbasis teknologi dan inovasi dengan mendorong investasi, penguatan UMKM, dan	1. Mengembangkan kawasan pariwisata terpadu dan berkelanjutan melalui pembangunan strategis fasilitas modern seperti mall, wisata air, dan objek wisata lainnya yang menjadi penggerak

	S5. Meningkatnya kinerja dan daya saing industri pengolahan S6. Meningkatnya pemerataan pembangunan ekonomi	diversifikasi sumber ekonomi daerah	ekonomi baru dengan melibatkan masyarakat lokal; 2. Intensifikasi Hilirisasi produk unggulan daerah berbasis inovasi dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas rantai pasok, dan memperkuat daya saing ekonomi lokal; 3. Mengembangkan hilirisasi dan industrialisasi, peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta pemanfaatan energi baru terbarukan; 4. Mengoptimalkan daya tarik investasi dan pengembangan infrastruktur pendukung sektor pariwisata melalui kemitraan pemerintah-swasta dan promosi daerah yang terintegrasi; 5. Mewujudkan ekosistem ekonomi inklusif dan merata dengan memaksimalkan potensi khas

			daerah, penguatan kapasitas UMKM, dan pemerataan kesempatan usaha di seluruh wilayah.
Misi 3: Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif.			
T3. Mewujudkan penguatan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif	S7. Menguatnya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah, serat responsif S8. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah	Implementasi sistem <i>e-government</i> dan reformasi birokrasi menyeluruh dengan memperkuat kapasitas aparatur, pengawasan, dan sistem pelayanan publik yang terintegrasi	1. Mengimplementasikan sistem merit dalam manajemen kepegawaian dengan parameter yang terukur untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas tinggi, dan berkinerja optimal; 2. Mengembangkan ekosistem digital governance yang transparan dan akuntabel melalui revitalisasi website informasi publik dan pengembangan sistem informasi terintegrasi berbasis data; 3. Menciptakan inovasi pelayanan publik terpadu berkualitas tinggi

			melalui gebrakan layanan umum yang mensinergikan RSUD, Disdukcapil, dan BPJS dengan standar pelayanan prima dalam memudahkan pengadministrasian BPJS dan Pembuatan Akta dan Kartu Keluarga kilat; 4. Mengoptimalkan efisiensi proses administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan dengan pendekatan satu pintu, teknologi digital, dan pelayanan proaktif, dengan perhatian khusus pada pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan. 5. Meningkatkan penerimaan daerah melalui perluasan basis, intensifikasi, dan digitalisasi pemungutan pajak serta retribusi secara efektif dan transparan

Misi 4: Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari Serta Menjunjung Tinggi Budaya

T4. Mewujudkan lingkungan yang aman dan memiliki lingkungan yang lestari serta menjunjung tinggi kearifan lokal berbasis budaya	S9. Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan S10. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ramah lingkungan S11. Terciptanya kelestarian budaya lokal	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memadukan sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal	1. Mengembangkan sistem manajemen risiko bencana terpadu dan adaptif dengan memperkuat Kader Peduli Paret (Tim Pembasmi Banjir) sebagai ujung tombak mitigasi banjir berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat; 2. Mewujudkan lingkungan berkualitas tinggi melalui pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan berkelanjutan Ruang Publik Terbuka Hijau yang terintegrasi dengan penataan kota; 3. Melestarikan dan merevitalisasi nilai-nilai budaya serta kearifan lokal melalui program pemberdayaan komunitas adat, pembinaan sistematis kegiatan suku-suku, serta dokumentasi komprehensif bekerja

			sama dengan sejarahwan dan para tokoh adat; 4. Menciptakan ekosistem lingkungan yang aman, nyaman, dan lestari dengan pendekatan kolaboratif seluruh pemangku kepentingan serta penerapan teknologi ramah lingkungan 5. Penguatan stabilitas sosial, keamanan, dan ketertiban masyarakat
Misi 5: Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata dengan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik Berkualitas dan Mengedepankan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, dan Bermartabat			
T5. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan penyediaan sarana prasarana infrastruktur publik yang layak dengan prinsip berkesinambungan, berkeadilan, dan bermartabat	S12. Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur dasar	Pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik yang terintegrasi dengan memperhatikan konektivitas antar wilayah, pemerataan akses layanan dasar, dan	1. Mengoptimalkan sistem transportasi dan aksesibilitas antar wilayah melalui program pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan berkala infrastruktur jalan strategis di tingkat desa, kecamatan, dan

		pengembangan kawasan strategis ekonomi	kabupaten dengan pendekatan berbasis data dan teknologi; 2. Mengimplementasikan program Labusel Terang secara sistematis dan menyeluruh untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur penerangan jalan yang efisien energi dan ramah lingkungan di seluruh wilayah; 3. Memprioritaskan pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar vital seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan layak huni untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat; 4. Mengembangkan infrastruktur strategis terintegrasi yang berorientasi pada konektivitas antar wilayah, pemerataan

			pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif dengan prinsip berkelanjutan dan berkeadilan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema dan prioritas Daerah pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan arahan yang mengacu dari tema pembangunan tahap kedua pada RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan tema dan prioritas daerah dijadikan acuan skenario tahunan pada RKPD, maka tema pembangunan Tahun 2025-2029 disajikan pada Gambar 3.1 berikut ini.



Gambar 3.9

Tahapan Pembangunan Tahunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Selanjutnya dari pentahapan pembangunan tahunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 tersebut dirumuskan Fokus Prioritas Pembangunan dengan memperhatikan isu strategis dan permasalahan dengan urgensi tinggi. sebagaimana yang dijabarkan di bawah ini:

1. Tahun 2025 - Penguatan Pondasi Sumber Daya Manusia dan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

Fokus Prioritas:

- Implementasi sistem merit dan reformasi birokrasi;
- Perbaikan Website Informasi Publik dan pengembangan *e-government*;
- Perluasan kepemilikan jaminan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat;
- Pemberian beasiswa kepada pelajar tidak mampu dan berprestasi;
- Program makan gizi seimbang gratis untuk anak sekolah;
- Peningkatan kualitas dan sertifikasi tenaga pengajar.

2. Tahun 2026 - Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Optimalisasi Pelayanan Publik

Fokus Prioritas:

- a. Pembangunan, perbaikan, dan perawatan jalan desa, kecamatan dan kabupaten;
- b. Program Labusel Terang (pemerataan infrastruktur penerangan jalan);
- c. Peningkatan Pasar Perkotaan;
- d. Pembangunan TPA baru di wilayah dengan kelayakan tinggi;
- e. Pembangunan dan atau penambahan TPS di seluruh wilayah perkotaan;
- f. Penambahan gerobak/truk sampah;
- g. Pengembangan sistem daur ulang sampah berlokasi di TPA;
- h. Pengembangan pengelolaan limbah bergerak;
- i. Perwujudan pola ruang;
- j. Gebrakan Layanan Umum terintegrasi RSUD, Disdukcapil dan BPJS;
- k. Pembentukan Kader Peduli Paret (Tim Pembasmi Banjir);
- l. Pembangunan Ruang Publik Terbuka Hijau;
- m. Pemberian uang pembinaan untuk Guru Mengaji, Guru Ibadah, dan Guru Seniman.

3. Tahun 2027 - Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan

Fokus Prioritas:

- a. Pembangunan pusat pariwisata terpadu (Mall, Wisata Air, dll);
- b. Penguatan ekosistem pariwisata sebagai penggerak ekonomi;
- c. Intensifikasi hilirisasi produk unggulan daerah;
- d. Pengembangan UMKM berbasis teknologi dan inovasi;
- e. Pemberdayaan dan peningkatan daya saing sektor ekonomi kreatif;
- f. Peningkatan iklim investasi daerah.

4. Tahun 2028 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Kearifan Lokal sebagai Identitas Daerah

Fokus Prioritas:

- a. Penciptaan generasi agamis sesuai agama dan ajaran masing-masing;

- b. Pemberdayaan dan pembinaan kegiatan suku-suku;
- c. Revitalisasi sejarah dan budaya (bekerja sama dengan sejarawan dan para adat);
- d. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
- e. Program pemberdayaan komunitas adat;
- f. Pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal.

5. Tahun 2029 - Penguatan Daya Saing Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan

Fokus Prioritas:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM Digital dan Inovatif
 - Pelatihan intensif digitalisasi untuk Aparatur Sipil Negara.
 - Program magang kerja ke luar daerah/negeri untuk tenaga muda potensial.
 - Pengembangan pusat inovasi dan inkubator bisnis digital di tingkat Kabupaten.
- b. Penguatan Ekonomi Berbasis Teknologi dan Ekosistem Investasi
 - Penyederhanaan prosedur perizinan investasi melalui sistem online terpadu.
 - Pengembangan kawasan industri hijau dan agroindustri modern.
 - Pendirian pusat logistik dan distribusi berbasis teknologi untuk UMKM.
- c. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari dan Ramah Lingkungan
 - Reklamasi lahan pasca tambang dan pertambangan ilegal.
 - Penataan kawasan hutan produksi terbatas dan konservasi.
 - Penerapan zonasi ekologis dalam rencana tata ruang wilayah.
- d. Optimalisasi Infrastruktur Strategis untuk Konektivitas dan Produktivitas
 - Finalisasi jaringan transportasi antar kecamatan dengan akses prioritas.
 - Pengembangan sistem irigasi modern untuk meningkatkan hasil pertanian.
 - Perluasan jaringan internet broadband ke desa-desa tertinggal.
- e. Penguatan Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
 - Pembentukan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi.

- Pelatihan masyarakat dalam mitigasi bencana dan adaptasi iklim.
- Rehabilitasi sungai dan drainase utama untuk antisipasi banjir musiman.
- f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pembangunan
 - Revitalisasi forum-forum partisipasi masyarakat seperti Musrenbang tingkat desa.
 - Pengembangan platform digital partisipasi publik dalam perencanaan anggaran.
 - Melibatkan pemuda dan perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan lokal.

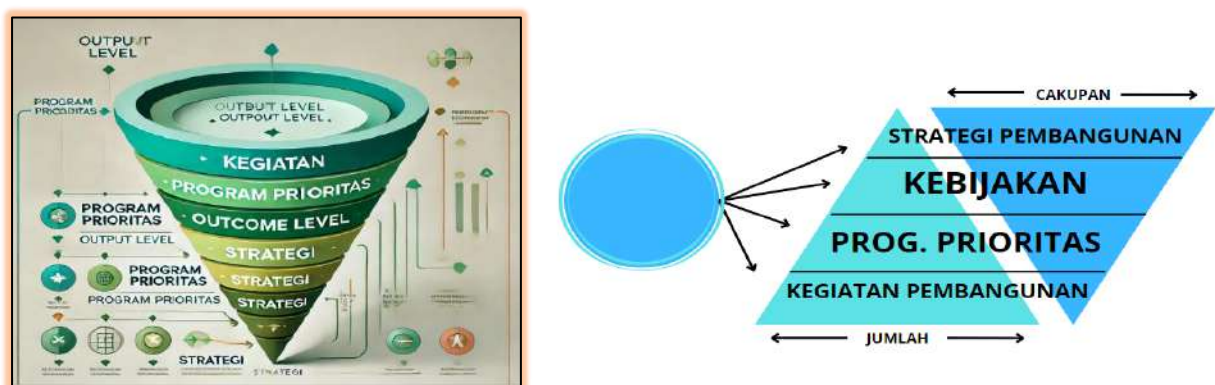
6. Tahun 2030- Mewujudkan Labuhanbatu Selatan sebagai Kabupaten Modern

- a. Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Transparan
 - Implementasi penuh e-government di seluruh OPD;
 - Integrasi sistem pelayanan publik berbasis digital;
 - Penerapan sistem smart city untuk manajemen kota;
 - Optimalisasi big data untuk pengambilan kebijakan.
- b. Ekonomi Modern, Inklusif, dan Berdaya Saing Global
 - Penguatan ekosistem ekonomi digital;
 - Peningkatan hilirisasi industri berbasis teknologi tinggi;
 - Pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi;
 - Penguatan pariwisata modern dengan standar internasional.
- c. Infrastruktur Modern yang Berkelanjutan dan Terintegrasi
 - Finalisasi pembangunan infrastruktur konektivitas antar wilayah;
 - Integrasi sistem transportasi cerdas;
 - Pengembangan energi terbarukan untuk kemandirian energi;
 - Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau dan tata kota berkelanjutan.
- d. SDM Modern, Kompetitif, dan Berkarakter Budaya
 - Peningkatan kualitas SDM dengan kompetensi digital;
 - Revitalisasi budaya lokal dalam konteks modern;
 - Penguatan sistem pendidikan berbasis teknologi dan inovasi;
 - Pengembangan masyarakat yang agamis dan berkarakter.
- e. Lingkungan yang Modern, Lestari, dan Tangguh
 - Implementasi sistem pengelolaan lingkungan berbasis teknologi;

- Pencapaian target lingkungan bersih dan lestari;
- Sistem mitigasi bencana yang terintegrasi dan responsive;
- Penguatan ketahanan lingkungan dan adaptasi perubahan iklim

3.4.3. Program Pembangunan Daerah

Langkah selanjutnya adalah menyelaraskan janji politis dengan program prioritas serta menyinkronkan program pembangunan daerah. Tahap ini krusial dalam perumusan RPJMD karena menghasilkan rencana pembangunan konkret dalam bentuk program prioritas. Perumusan program prioritas mencerminkan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih dan berhubungan langsung dengan janji kampanye Bupati. Janji-janji tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam strategi, kebijakan, program, atau kegiatan sesuai nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Jika janji bersifat mikro pada level output, maka menjadi kegiatan; jika lebih makro pada level outcome, maka menjadi program prioritas; dan jika berskala lebih luas, diterjemahkan ke dalam strategi. Hal ini dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



Gambar 3.10

Definisi janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Di sisi lain, transformasi birokrasi melalui penguatan tata kelola yang bersih dan responsif diwujudkan melalui reformasi sistem pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, serta peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Penyediaan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar, serta memastikan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Selain itu, penguatan peran desa dan peningkatan partisipasi masyarakat secara

terintegrasi menjadi prioritas pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan komunitas, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat 12 (dua belas) Prioritas Pembangunan RPJMD yaitu:

1. Pemberian Beasiswa Kepada Pelajar yang Tidak Mampu dan Berprestasi

Program beasiswa ini perlu menjadi prioritas karena pendidikan adalah fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mobilitas sosial. Banyak pelajar yang berpotensi tinggi terkendala masalah ekonomi, sehingga rentan putus sekolah atau tidak dapat mengembangkan diri secara optimal. Dengan beasiswa, pemerintah daerah tidak hanya mendorong pemerataan akses pendidikan tetapi juga memberikan motivasi bagi pelajar untuk terus berprestasi. Pelaksanaan program harus melibatkan mekanisme seleksi yang transparan, berbasis data sosial ekonomi dan pencapaian akademik/non-akademik. Selain itu, perlu sinergi dengan dunia usaha—lewat CSR, perusahaan setempat, dan lembaga filantropi—untuk memperluas jangkauan manfaat. Program beasiswa bisa dikembangkan ke berbagai jenjang: SD, SMP, SMA, bahkan hingga pendidikan tinggi serta pelatihan keterampilan untuk pelajar kurang mampu, memastikan tidak ada anak Labuhanbatu Selatan tertinggal karena alasan ekonomi.

2. Menciptakan Generasi Agamis Sesuai Agama dan Ajaran Masing-Masing

Fokus pada pembentukan generasi agamis diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, toleransi, serta memperkuat karakter masyarakat sejak dini. Di tengah tantangan globalisasi dan potensi kerawanan sosial, karakter religius menjadi filter penting bagi generasi muda dalam bersikap dan bertindak di masyarakat. Program ini dapat diimplementasikan melalui pelatihan dan pendidikan keagamaan di sekolah, rumah ibadah, serta kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang inklusif untuk semua agama. Pemerintah juga bisa mendukung penyediaan guru agama yang kompeten, membangun ekosistem dialog lintas iman, serta mendukung kegiatan keagamaan di komunitas. Kegiatan ini tidak hanya membangun fondasi spiritual individu, tetapi juga memperkuat harmoni

sosial dan memperkuat Labuhanbatu Selatan sebagai wilayah yang rukun, damai, dan toleran.

3. Pemberian Uang Pembinaan terhadap Guru Mengaji, Guru Ibadah, Guru Seniman, dan Sejenisnya

Guru mengaji, guru ibadah, dan guru seniman berperan sangat penting dalam membina karakter dan kreativitas masyarakat sejak dini, terutama di daerah yang masih rendah akses pembinaan moral dan seni. Mereka adalah ujung tombak dalam menjaga nilai kearifan lokal, religiusitas, dan kreativitas di tengah masyarakat. Uang pembinaan sebagai insentif layak diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan apresiasi atas kerja mereka, yang seringkali bersifat sukarela atau kurang dihargai secara materi. Program ini menciptakan ekosistem yang memotivasi para guru untuk terus berkontribusi dan meningkatkan kualitas pembinaan. Strategi pelaksanaannya bisa dengan penetapan daftar penerima berbasis komunitas/kelurahan serta integrasi ke dalam program keagamaan, pendidikan nonformal, hingga festival seni lokal—menjadikan mereka mitra strategis dalam pembangunan manusia.

4. Pembangunan Tempat Pariwisata (Mall, Wisata Air, dan Sebagainya).

Pengembangan sektor pariwisata secara signifikan membuka peluang ekonomi baru bagi Labuhanbatu Selatan. Potensi alam, budaya, dan kearifan lokal apabila dikemas secara modern dan kreatif akan menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat setempat, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan UMKM. Program pariwisata harus didesain komprehensif dengan integrasi multi-sektor: perencanaan destinasi yang berbasis potensi lokal, pelatihan SDM pariwisata, promosi digital, serta kemitraan dengan dunia usaha dan investor. Tempat wisata seperti mall modern, wisata air, atau ekowisata dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi, rekreasi, dan budaya. Selain itu, model desa wisata atau kolaborasi event budaya dapat memperkuat identitas lokal dan meningkatkan daya saing daerah.

5. Perbaikan Website Informasi Publik

Di era digital, transparansi informasi dan kemudahan akses layanan publik menjadi keharusan untuk tercapainya tata kelola pemerintahan modern. Website informasi publik yang baik memastikan masyarakat bisa mendapatkan berita, dokumen, hingga akses berbagai layanan administrasi secara mudah, cepat, dan efisien. Perbaikan website harus mencakup penguatan konten berkala dan terupdate, fitur interaktif untuk konsultasi dan pengaduan publik, serta keamanan data pribadi masyarakat. Pelibatan komunitas IT lokal dan pelatihan admin jadi aspek penting agar website benar-benar menjadi alat pelayanan, transparansi, dan partisipasi publik. Program ini juga mendukung integrasi layanan digital lintas dinas, mempercepat transformasi digital pemerintahan daerah.

6. Gebrakan Layanan Umum/Mall Pelayanan Publik

Pelayanan umum, khususnya dalam administrasi kependudukan dan layanan kesehatan rumah sakit, adalah cerminan kualitas tata kelola pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Gebrakan seperti kemudahan pengurusan BPJS atau KK/Akta kelahiran membuat masyarakat tidak lagi terbebani birokrasi berbelit. Langkah ini harus diwujudkan dengan sistem layanan terintegrasi, digitalisasi proses administrasi, serta pelatihan dan penambahan petugas layanan yang ramah dan profesional. Kolaborasi antar-instansi, kemudahan layanan satu pintu, serta monitoring rutin kepuasan masyarakat menjadi kunci agar inovasi benar-benar terasa dan berdampak luas. Gebrakan seperti ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

7. Pembangunan, Perbaikan, dan Perawatan Jalan

Konektivitas wilayah melalui pembangunan dan perawatan jalan menjadi kunci utama untuk mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang/jasa, serta akses layanan dasar. Jalan yang layak akan memperlancar aktivitas ekonomi, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, bahkan memperkuat integrasi sosial hingga pelosok. Program jalan harus dilakukan secara periodik dan partisipatif melibatkan perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat dan pemetaan prioritas wilayah kritis. Penggunaan anggaran daerah, DAK, serta

swadaya dan partisipasi masyarakat bisa mempercepat pemenuhan infrastruktur jalan. Pengawasan kualitas, transparansi tender, serta pelibatan masyarakat sebagai pengawas lapangan menjadi strategi untuk memastikan hasil yang berkelanjutan dan merata.

8. Labusel Terang (Pemerataan Lampu Jalan)

Lampu jalan bukan hanya mendukung aktivitas ekonomi pada malam hari, tetapi juga berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerataan lampu jalan sangat penting di wilayah-wilayah pinggiran, desa, dan pusat aktivitas masyarakat agar Labuhanbatu Selatan menjadi lingkungan yang aman dan nyaman sepanjang waktu. Program ini bisa dijalankan dengan pemetaan wilayah kurang penerangan, pengadaan lampu LED hemat energi, bahkan memanfaatkan panel surya di lokasi-lokasi minus jaringan PLN. Keterlibatan BUMDes, dana desa, serta mitra CSR sangat efektif guna mempercepat realisasi program. Selain menjawab kebutuhan dasar, program Labusel Terang juga menjadi simbol kehadiran pemerintah hingga ke tingkat terbawah masyarakat.

9. Pembentukan Kader Peduli Paret (Tim Pembasmi Banjir)

Permasalahan banjir menjadi tantangan berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Labuhanbatu Selatan. Pembentukan Kader Peduli Paret merupakan langkah proaktif menanggulangi banjir secara partisipatif dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan. Program ini meliputi pelatihan teknis kepada kader, pembagian tugas monitoring dan pembersihan rutin saluran air/parit, serta edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Integrasi dengan program sanitasi desa dan sinergi dengan dinas teknis akan memperkuat dampak program. Hadirnya tim pembasmi banjir juga menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana.

10. Pembangunan Ruang Publik Terbuka Hijau

Ruang publik terbuka hijau (RTH) sangat penting bagi kesehatan fisik, psikologis, dan sosial masyarakat. RTH menjadi tempat interaksi sosial lintas generasi, ruang ekspresi seni-budaya, serta ekosistem yang mendukung kelestarian lingkungan dan mitigasi polusi. Pelaksanaan program harus mencakup

perencanaan tata ruang partisipatif, desain taman tematik yang inklusif—ramah anak, lansia, dan difabel—serta pemeliharaan berkelanjutan dengan pelibatan komunitas lokal. RTH juga berfungsi sebagai ruang edukasi ekologi, pusat acara budaya, dan sarana aktivitas sehat masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Peningkatan RTH adalah cerminan kualitas hidup masyarakat modern Labusel.

11. Pemberdayaan dan Pembinaan Kegiatan Suku-Suku

Labuhanbatu Selatan memiliki keberagaman suku dan komunitas yang menjadi aset sosial-budaya penting daerah. Pemberdayaan kegiatan suku dan komunitas mampu memperkuat identitas kebangsaan, mempererat persatuan, serta mencegah potensi konflik. Program pembinaan bisa berupa pelatihan ekonomi kreatif berbasis tradisi lokal, dukungan event budaya, serta fasilitasi ruang ekspresi dan kolaborasi antar-suku. Pemerintah daerah dapat menggandeng akademisi, sejarahwan, dan organisasi adat agar gerakan pemberdayaan tidak sekadar seremonial, melainkan membangun kemandirian komunitas sekaligus membawa kekayaan budaya Labusel ke tingkat nasional.

12. Pemberdayaan Sejarah dan Budaya

Pelestarian sejarah dan budaya adalah investasi masa depan agar Labusel tetap memiliki identitas kuat dalam era globalisasi. Kerja sama dengan sejarahwan, tokoh adat, dan komunitas seni-budaya menjadi esensial agar warisan tak benda daerah terus lestari. Pemberdayaan ini bisa diimplementasikan dengan dokumentasi sejarah lisan dan tertulis, penyelenggaraan festival budaya, pengembangan wisata budaya, serta pengintegrasian budaya lokal dalam kurikulum pendidikan. Pemerintah juga perlu menyediakan dukungan anggaran, regulasi pelestarian, serta mengadopsi teknologi untuk digitalisasi arsip-arsip budaya. Dengan demikian, generasi mendatang dapat tumbuh dengan bangga atas warisan leluhur dan Labuhanbatu Selatan semakin berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

**Tabel 3.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah:
Integrasi Janji Politik dengan Nomenklatur Program**

Misi		Program Unggulan (Janji Kampanye)	Nomenklatur Program Kepmendagri 900.1.15.5-3406	Keterangan
Misi 1	Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat	Pemberian Beasiswa Kepada Pelajar yang tidak mampu dan Berprestasi	Program pengelolaan pendidikan	1. Dinas Pendidikan 2. Sekretariat Daerah
		Menciptakan Generasi Agamis Sesuai agama dan ajaran masing-masing		1. Dinas Pendidikan 2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten
		Pemberian uang Pembinaan terhadap Guru Mengaji, Guru Ibadah, Guru Seniman dan sejenisnya		1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata 3. Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Desa
Misi 2	Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk	Pembangunan Tempat Pariwisata (Mall, Wisata Air dan sebagainya)	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1. Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata
			Program pemasaran pariwisata	2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Misi		Program Unggulan (Janji Kampanye)	Nomenklatur Program Kepmendagri 900.1.15.5-3406	Keterangan
	Kesejahteraan Masyarakat.		Program pelayanan penanaman modal	Terpadu Satu Pintu 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Misi 3	Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif	Perbaikan Website Informasi Publik	Program pengelolaan aplikasi informatika	1. Dinas Komunikasi dan Informatika
		Gebrakan Layanan Umum (Terciptanya Layanan Rumah Sakit Umum yaitu RSUD, Disdukcapil dan BPJS dalam hal: Kemudahan Pengadministrasian BPJS; Pembuatan KK dan Akta terhadap Pasien yang melahirkan keluar dari rumah sakit)	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. BPJS
Misi 4	Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman dan memiliki lingkungan yang lestari serta menjunjung tinggi budaya	Pembangunan Ruang Publik Terbuka Hijau	Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin dan izin Perlindungan	

Misi		Program Unggulan (Janji Kampanye)	Nomenklatur Program Kepmendagri 900.1.15.5-3406	Keterangan
			dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
		Pemberdayaan Sejarah dan Budaya (bekerja sama dengan sejarawan dan para pemangku adat agar budaya Labusel tidak Punah)	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;	1. Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata
			Program pengelolaan arsip	2. Dinas Perpustakaan dan Arsip
Misi 5	Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata dengan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik Berkualitas dan Mengedepankan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, dan Bermartabat	Pembangunan, Perbaikan, dan Perawatan Jalan Desa, Kecamatan dan Kabupaten	Program penyelenggara n jalan	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Labusel Terang (Pemerataan lampu Jalan)	Program penyelenggara n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Pembentukan Kader Peduli Paret (Tim Pembasmi Banjir)	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 3.6. Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
Visi: Labuhan Batu Selatan yang semakin Modern	Misi 1: Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat	Tujuan 1: Mewujudkan penguatan transformasi sosial yang ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM dengan pemberian akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang adaptif	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Sasaran 2 : Terwujudnya layanan pendidikan yang	Outcome 1: Terciptanya masyarakat Labuhan Batu Selatan yang sehat, berpendidikan, dan terlindungi secara sosial, sebagai fondasi SDM yang unggul dan kompetitif	Usia Harapan Hidup (UHH)	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
					Angka kematian ibu (AKI)		
					Angka Kematian Balita (AKB)		
					Bed Occupancy Rate (BOR)	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah
					Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Dinas Kesehatan
					Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Dinas Kesehatan
					Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan
					Harapan Lama Sekolah		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			berkualitas dan merata		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun		
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 tahun		
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-18 tahun (kesetaraan)		
					Indeks Pemerataan Guru	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
					Nilai tingkat kegemaran membaca	Program pembinaan perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
					Indeks pembangunan literasi masyarakat		
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Sasaran 3 : Meningkatnya perlindungan		Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO	Program perlindungan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			sosial yang adaptif		yang mendapatkan layanan komprehensif		Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berprespektif gender dan hak anak sesuai standar	Program peningkatan kualitas keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program pemenuhan hak anak (pha)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Program perlindungan khusus anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					TFR (Angka Kelahiran Total)	Program pengendalian penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (CPR)	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
					Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial
					Persentase korban bencana alam dan sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Program penanganan bencana	Dinas Sosial
					Persentase penyandang disabilitas terlantar	Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
	Misi 2: Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk Kesejahteraan Masyarakat	Tujuan 2: Mewujudkan penguatan transformasi ekonomi yang diwujudkan untuk membangun perekonomian yang kuat, inklusif, dan jaminan untuk kesejahteraan masyarakat	Sasaran 4: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor unggulan	Outcome 2: Terbangunnya struktur perekonomian Labuhan Batu Selatan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta menjamin kesejahteraan secara merata di seluruh wilayah	Rasio Wirausaha Pemuda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Program pemasaran pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Pertumbuhan wirausaha	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
					Pertumbuhan volume usaha koperasi	Program pelayanan izin	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						usaha simpan pinjam	dan Menengah serta Perdagangan
					Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Program pendidikan dan pelatihan koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
					Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
					Tingkat Pengangguran Terbuka	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan
					Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya		
					Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Program penempatan tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan
					Jumlah produksi perikanan tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
					Jumlah produksi perikanan budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Sasaran 5: Meningkatnya kinerja daya saing industri pengolahan		Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Program perencanaan dan pembangunan industri	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
					Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Program hubungan industrial	Dinas Ketenagakerjaan
			Sasaran 6: Meningkatnya pemerataan pembangunan ekonomi		Skor pola pangan harapan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase daerah rentan rawan pangan	Program penanganan kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Program pengawasan keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Peningkatan produksi tanaman pangan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	Program perizinan usaha pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Program penyuluhan pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase Desa Mandiri	Program administrasi pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Realisasi total terhadap target investasi	Program pengembangan iklim penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program pelayanan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Misi 3: Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif	Tujuan 3: Mewujudkan penguatan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif	Sasaran 7: Menguatnya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah, serta responsif	Outcome 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Labuhanbatu Selatan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan publik yang	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah
					Indeks RB yang Meningkat		
					Nilai SAKIP yang Meningkat		
					Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Program perekonomian dan pembangunan	Sekretariat Daerah

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				prima, cepat, dan responsif berbasis teknologi informasi	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
					Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
					Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan		
					Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA		
					Indeks inovasi daerah	Program riset dan inovasi daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
					Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	Program penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat
					Maturitas penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah (SPIP)	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Inspektorat
					Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
					Tingkat ketersediaan arsip	Program pengelolaan arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
					Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
					Cakupan pengatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Indeks Profesionalitas ASN	Program kepegawaian daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	Program kepegawaian daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	Program pengembangan sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Sasaran 8: Meningkatnya kapasitas keuangan daerah		Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Program pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak		
					Indeks Akses Keuangan Daerah	Program perekonomian dan pembangunan	Sekretariat Daerah
					Opini BPK atas Laporan Keuangan	Program pengelolaan keuangan daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase laporan keuangan tepat waktu		
					Persentase penambahan nilai aset tetap	Program pengelolaan barang milik daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase penerapan sistem keuangan berbasis digital	Program pengelolaan pendapatan daerah	Badan Pendapatan Daerah
					Persentase PAD terhadap pendapatan daerah		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
	Misi 4: Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari Serta Menjunjung Tinggi Budaya	Tujuan 4: Mewujudkan lingkungan yang aman dan memiliki lingkungan yang lestari serta menjunjung tinggi kearifan lokal berbasis budaya	Sasaran 9: Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan	Outcome 4: Terciptanya lingkungan wilayah Labuhanbatu Selatan yang aman, lestari, dan berdaya saing, dengan memperkuat pembangunan yang berwawasan lingkungan, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal serta budaya masyarakat	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase perda dan perkara yang ditegakkan		
					Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
					Indeks risiko bencana	Program penanggulangan bencana	
			Persentase penanganan tanggap bencana darurat				
			Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang di tindaklanjuti		Program perencanaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						Kerusakan Lingkungan Hdiup	
					Persentase RTH	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
					Persentase limbah B3 yang terkelola	Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
					Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
					Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Sasaran 11: Terciptanya kelestarian budaya lokal		Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
					Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Program pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
					Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah		
					Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah		
					Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Program pengembangan kebudayaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan		
	Misi 5: Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata	Tujuan 5: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang	Sasaran 12: Meningkatkan akses dan kualitas	Outcome 5: Terwujudnya pembangunan wilayah yang	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
	dengan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik Berkualitas dan Mengedepankan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, dan Bermartabat	merata dan penyediaan sarana prasarana infrastruktur publik yang layak dengan prinsip berkesinambungan, berkeadilan, dan bermartabat	infrastruktur dasar	merata dengan dukungan sarana dan prasarana infrastruktur publik yang layak, berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan bermartabat di seluruh wilayah Labuhanbatu Selatan	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Program penataan bangunan gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Tingkat kemantapan jalan	Program penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Program kawasan permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase permukiman kumuh yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum)	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan

3.4.4. PHTC Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan bertujuan untuk menghasilkan dampak nyata secara cepat dan langsung dirasakan masyarakat. Program ini mengutamakan pemberian beasiswa kepada pelajar yang kurang mampu dan berprestasi, serta peningkatan kualitas layanan umum seperti RSUD, Disdukcapil, dan BPJS untuk memastikan akses yang lebih baik dan pelayanan yang responsif. Perbaikan website informasi publik juga menjadi bagian penting guna mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi yang transparan dan lengkap. Selain itu, pembangunan, perbaikan, dan perawatan jalan serta pemerataan penerangan jalan umum menjadi fokus untuk meningkatkan aksesibilitas dan keselamatan transportasi di wilayah tersebut.

Keberadaan Program Hasil Terbaik Cepat penting karena mempercepat pencapaian perubahan positif yang strategis dan terukur secara efisien. Dengan langkah cepat, masalah mendasar dapat segera diatasi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat lebih cepat. Program ini mendukung pemerataan pelayanan publik dan pembangunan yang inklusif, memperkuat fondasi pembangunan daerah agar lebih modern, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Melalui program ini, diharapkan kualitas hidup warga Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat terus meningkat dengan solusi yang tepat dan berdampak signifikan dalam waktu singkat.

Tabel 3.7 PHTC Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No.	Program PHTC Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Program Sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1-2850	Deskripsi
1	Pemberian Beasiswa Kepada Pelajar yang Tidak Mampu dan Berprestasi	• Program pengelolaan pendidikan • Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pemberian bantuan beasiswa untuk mendukung pendidikan siswa kurang mampu dan berprestasi
2	Gebrakan Layanan Umum (RSUD, Disdukcapil, BPJS)	• Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Program pendaftaran penduduk	Peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan jaminan sosial
3	Perbaikan Website Informasi Publik	Program pengelolaan aplikasi informatika	Pengembangan dan peningkatan sistem digital untuk penyajian informasi publik yang mudah diakses
4	Pembangunan, Perbaikan, dan Perawatan Jalan; Labusel Terang (Pemerataan Lampu Jalan)	• Program penyelenggaraan jalan • Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pembangunan dan pemeliharaan jalan serta pemerataan penerangan jalan umum untuk keselamatan dan kenyamanan masyarakat
5	Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh	• Program kawasan permukiman	Memperbaiki lingkungan permukiman yang tidak layak huni menjadi lebih sehat, aman, dan nyaman dengan melakukan perbaikan fisik, fasilitas publik, serta pemberdayaan masyarakat agar

			kawasan tersebut berfungsi dengan optimal dan berkelanjutan
6	Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Mekanisme mediasi dan rekonsiliasi masyarakat	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral untuk memfasilitasi dialog dan perdamaian antara pihak yang bersengketa, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan mengembalikan harmoni sosial tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan rumit. Mekanisme ini mengedepankan musyawarah dan mufakat, menjaga hubungan baik antara pihak, serta memberikan solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat

3.4.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

- Program Pengelolaan Pendidikan, program ini diarahkan pada perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, serta peningkatan partisipasi pendidikan.

- b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, program ini diarahkan pada perluasan akses pemerataan layanan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Pelaksanaan urusan pendidikan bertujuan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan serta meningkatkan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah di Sumatera Utara. Indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 3.8. SPM Bidang Pendidikan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	• Angka Partisipasi Sekolah (5-6) Tahun • Angka Partisipasi Sekolah (7-15) Tahun • Angka Partisipasi Sekolah (7-18) Tahun (kesetaraan)
Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	• Indeks Pemerataan Guru • Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik

2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, program ini diarahkan pada pemetaan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan; peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia sesuai standar; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan dukungan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, serta kesehatan jiwa; penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan

dan penanganan gizi saat bencana; pemenuhan operasional pelayanan rumah sakit khusus mata, serta peningkatan mutu pelayanan di Rumah sakit.

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pemenuhan obat dan bahan habis pakai.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif preventif.

Pelaksanaan urusan kesehatan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan. Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 3.9. SPM Bidang Kesehatan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	• Angka Kematian Ibu (AKI) • Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	• Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	• Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	• Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan

3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana sarana Sumber Daya Air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan pemeliharaan prasarana sarana SDA; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS); koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, hibah sarana prasarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional, serta peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat.
- d. Program Penataan Bangunan Gedung, program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah.
- e. Program Penyelenggaraan Jalan, program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten meliputi peningkatan jalan, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan penggantian jembatan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antar wilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.
- f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.
- g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.
- h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, program ini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai.

- i. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan program ini diarahkan pada bangunan dan lingkungan sebagai kelanjutan dari penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) melalui analisis kawasan, partisipasi masyarakat, dan pengembangan konsep perancangan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

- a. Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
- b. Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tataruang;
- c. Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman;
- e. Meningkatnya penyediaan Infrastruktur layanan dasar;
- f. Meningkatnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- g. Meningkatnya konektivitas wilayah; dan
- h. Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung secara tertib dan andal.

Tujuan dari urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas. Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 3.10. SPM Bidang Pekerjaan Umum

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	• Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir • Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob • Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum layak minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik
Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan
Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan
Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi

4. Standar Pelayanan Minimal Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pengembangan Perumahan, program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
- Program Kawasan Permukiman, program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana sarana utilitas umum perumahan.
- Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan, program ini diarahkan pada pembinaan penyiapan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program ini diarahkan untuk menyediakan rumah layak huni dan terjangkau, dilengkapi prasarana dan sarana lingkungan yang memadai guna mencegah dan mengurangi kawasan kumuh.

Pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang

perumahan rakyat serta untuk memenuhi akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 3.11. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	• Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni • Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni
Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	• Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	• Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Tercapainya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang terjangkau untuk masyarakat, berkurangnya kawasan permukiman kumuh,	• Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
	serta tersedianya lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan	
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU

5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satgas Linmas.
- Program Penanggulangan Bencana, Program ini diarahkan pada saat tanggap darurat bencana terkait dalam menangani daerah – daerah yang mengalami bencana alam.
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sarana prasarana serta sumber daya manusia.

Pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan

minimal (SPM) bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; serta untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 3.12. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas
	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya
Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
	Meningkatnya penanganan bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
	pada saat pasca bencana	
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	• Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	• Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pemberdayaan Sosial, program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- Program Rehabilitasi Sosial, program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta penyaluran bantuan sosial Kartu Sumut Sejahtera dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).
- Program Penanganan Bencana, program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial

Pelaksanaan urusan sosial ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

- a. Tersedianya Data Fakir Miskin
- b. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
- c. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.
- d. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- e. Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana
- f. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 3.13. SPM Bidang Sosial

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	- Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya - Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya .

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	- Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar - Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
Penanganan Bencana	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana



Kabupaten
Labuhanbatu
Selatan

BAB 4

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



www.labuhanbatuselatankab.go.id

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025–2029 mencakup sejumlah program pembangunan prioritas yang dirancang untuk mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih. Selain itu, dokumen tersebut juga memuat seluruh program yang telah dirumuskan oleh perangkat daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dilengkapi dengan indikator kinerja, pagu indikatif, serta target kinerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah berdasarkan bidang urusannya.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pemerintah daerah perlu menetapkan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebelum menentukan alokasi belanja tahunan dalam periode RPJMD 2025–2029. Kapasitas keuangan ini telah dirumuskan dalam Gambaran Keuangan Daerah dan berfungsi sebagai dasar dalam mengalokasikan dana belanja program pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan.

Penghitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah dilakukan melalui identifikasi seluruh sumber penerimaan daerah serta alokasinya ke berbagai pos anggaran. Berdasarkan hasil analisis kapasitas keuangan tersebut, kemudian disusun Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah untuk lima tahun mendatang. Selanjutnya juga ditampilkan proyeksi pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat dimana komponen anggaran ini menjadi acuan bagi OPD untuk mendapatkan alokasi pagu dalam setiap program-programnya. Gambaran kerangka anggaran ini menjadi acuan dalam menetapkan alokasi belanja program bagi setiap perangkat daerah, sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Tahun 2025-2029

No	Uraian	Tahun Dasar (APBD 2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN							
	A. Pendapatan Asli Daerah	75.245.803.918,00	106.105.872.349,00	148.965.261.332,60	237.726.775.870,60	249.542.575.371,60	299.495.597.365,00	344.138.802.038,00
	B. Pendapatan Transfer	890.986.846.281,00	919.111.438.670,00	968.052.855.912,40	1.122.052.855.912,40	1.128.465.100.900,40	1.169.495.107.336,00	1.252.334.086.307,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.772.676.000,00	9.408.553.974,00	9.408.553.974,00	9.408.553.974,00	9.408.553.974,00	25.408.553.974,00	32.408.553.974,00
	JUMLAH PENDAPATAN	974.005.326.199,00	1.034.625.864.993,00	1.126.426.671.219,00	1.369.188.185.757,00	1.387.416.230.246,00	1.494.399.258.675,00	1.628.881.442.319,00
2	BELANJA							
	A. Belanja Operasi	746.750.691.708,00	779.099.479.954,00	821.982.176.846,10	912.382.176.846,10	915.472.176.846,10	967.572.176.846,10	1.017.876.076.846,10
	B. Belanja Modal	165.977.307.556,00	130.945.140.574,00	182.013.733.028,50	357.875.247.566,50	367.513.292.055,50	426.396.320.484,50	516.574.604.128,50
	C. Belanja Tak Terduga	3.047.948.369,00	18.327.679.377,00	18.327.679.377,00	18.327.679.377,00	18.327.679.377,00	18.327.679.377,00	18.327.679.377,00
	D. Belanja Transfer	124.588.139.123,00	130.567.517.084,00	142.417.033.963,40	150.417.033.963,40	151.917.033.963,40	160.917.033.963,40	156.917.033.963,40
	JUMLAH BELANJA	1.040.364.086.756,00	1.058.939.816.989,00	1.164.740.623.215,00	1.439.002.137.753,00	1.453.230.182.242,00	1.573.213.210.671,00	1.709.695.394.315,00
	SURPLUS/DEFISIT	-66.358.760.557,00	-24.313.951.996,00	-38.313.951.996,00	-69.813.951.996,00	-65.813.951.996,00	-78.813.951.996,00	-80.813.951.996,00

No	Uraian	Tahun Dasar (APBD 2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	PEMBIAY AAN							
	A. Penerimaan Pembiayaan	66.358.760.557,00	32.313.951.996,00	38.313.951.996,00	69.813.951.996,00	65.813.951.996,00	78.813.951.996,00	80.813.951.996,00
	B. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAY AAN NETTO	66.358.760.557,00	24.313.951.996,00	38.313.951.996,00	69.813.951.996,00	65.813.951.996,00	78.813.951.996,00	80.813.951.996,00

Tabel 4.2 Rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Uraian	Tahun Dasar (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Total Belanja Wajib dan Mengikat	1.100.131.147.113,31	1.058.939.816.989,00	1.164.740.623.215,00	1.439.002.137.753,00	1.453.230.182.242,00	1.573.213.210.671,00	1.709.695.394.315,00
Belanja Operasi	789.896.904.037,31	779.099.479.954,00	821.982.176.846,10	912.382.176.846,10	915.472.176.846,10	967.572.176.846,10	1.017.876.076.846,10
Belanja Modal	181.547.462.021,00	130.945.140.574,00	182.013.733.028,50	356.875.247.566,50	367.513.292.055,50	426.396.320.484,50	516.574.604.128,50
Belanja Tidak Terduga	3.047.948.369,00	18.327.679.377,00	18.327.679.377,00	18.327.679.377,00	18.327.679.377,00	18.327.679.377,00	18.327.679.377,00
Belanja Transfer	125.638.832.686,00	130.567.517.084,00	142.417.033.963,40	150.417.033.963,40	151.917.033.963,40	160.917.033.963,40	156.917.033.963,40
Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.500.000.000	8.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0		0	0	0	0	0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0		0	0	0	0	0
Pembelian Pinjaman	0		0	0	0	0	0
Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0		0	0	0	0	0
Jumlah	1.102.631.147.113	1.050.939.816.989	1.164.740.623.215,00	1.439.002.137.753,00	1.453.230.182.242,00	1.573.213.210.671,00	1.709.695.394.315,00

Beberapa program dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga mendukung Program PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat) dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Sumatera Utara sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.3. Dukungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029) 33 Kabupaten/Kota	2025	Tidak ada	Dinas Pendidikan	Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	- Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang akan melanjutkan SLTA - Melakukan edukasi kepada siswa SLTP agar seluruhnya melanjutkan kepada jenjang SLTA
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	2025	Tidak ada	Dinas Kesehatan	1. Dinas Sosial (Pembinaan kepada 2. Dinsos kab/kota untuk melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya), 3. Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Provsu) 3. Diskominfo (Publikasi Kegiatan),	- Dukungan penganggaran APBD Kabupaten/Kota untuk UHC/PBPU yaitu pada Tahun 2025 sebesar 80%, tahun 2026 sebesar 77,5%, tahun 2027 sebesar 75%, tahun 2028 sebesar 72,5%, tahun 2029 dan 2030 sebesar 70%. - Melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya - Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2029	Tidak ada			Kependudukan Kabupaten/Kota)
	2030	Tidak ada			
3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	2025	Tidak ada	Dinas TPH	- Disperindag ESDM (Memfasilitasi kemitraan antara petani dan pelaku usaha) - Diskop UMKM (Mendorong koperasi tani dan mengkoordinasikan ke koperasi merah putih) - PUPR (Perbaikan akses jalan ke sentra produksi dan koordinasi dengan PUPR kab/kota terkait akses jalan) - BUMD Dirga Surya (Skema pembelian hasil pertanian cabai merah ketika harga turun) - Biro Pemotda (fasilitasi kerja sama antar pemerintah daerah) - Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	Disperindag Kabupaten/Kota: Melakukan fasilitasi dan pameran produk cabai kering di tingkat lokal Dinas Pertanian Kabupaten/Kota: Menyiapkan lahan dan kelompok tani (CPCL) serta pendampingan kelompok tani Dinas Koperasi Kabupaten/Kota: Mendorong pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama yang mengelola SDD Total Solar Dry Dome: 70
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
4. Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)	2025	Tidak ada	Dinas Kominfo	DPMPSTP Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Bapenda Disperindag ESDM BPSDM Biro Adpem BUMD: PDAM, Bank Sumut	1. Penyiapan kebijakan/regulasi di tingkat Provinsi/Pemda Kabupaten/Kota. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota. 4. Penentuan lokasi

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
					1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2026	Tidak ada			1. Penyiapan dan penguatan infrastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi
		Tidak ada			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2027	Tidak ada			1. Penyiapan dan penguatan infrastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Tidak ada			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2028	Tidak ada			1. Penyiapan dan penguatan infrastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi
		Tidak ada			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2029	Tidak ada			1. Penyiapan dan penguatan infrastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Tidak ada			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2030	Tidak ada			1. Penyiapan dan penguatan infrastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota. 4. Penentuan lokasi
		Tidak ada			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan.
5 a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	2025	Tidak ada	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/ AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas Perhubungan terkait Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan movev terhadap pelaksanaan dan evaluasi	1. Dukungan penanganan akses jalan dalam koridor pembangunan jalan provinsi yang mendukung kawasan prioritas. 2. Dukungan penyediaan lahan pada rencana pelebaran yang tidak sesuai dengan Ruang Milik Jalan (RUMIJA).
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	2025	tidak ada	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/AMDAL, Dinas TPH melakukan pemataan terhadap kawasan swasembada dan dukungan terhadap irigasi tersier dan kuarter, benih, pupuk, alsintan, penyuluh pertanian. Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas Kominfo untuk publikasi Media	- Dukungan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier - Sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan BUMDes untuk pemeliharaan jaringan irigasi - Pembangunan embung, sumur bor, dan pompanisasi untuk sumber air cadangan. - Digitalisasi sistem irigasi (<i>smart irrigation</i>) berbasis sensor dan aplikasi. - Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi. - Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah	2025	Tidak ada	Dinas PKP	Dinas PUPR terkait dukungan terkait Tata Ruang, Jalan, dan Keciptakarya (sanitasi dan air minum), BPBD koordinasi terhadap Rehab rumah akibat bencana Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi Biro Pemotda (memfasilitasi kerja sama antar Pemerintah	Bupati/Wali Kota: 1. Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = <i>by name by address</i>) 2. SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha 3. SK Pokja Penanganan Kawasan Kumuh
	2026	- Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survei Lokasi di setiap kabupaten/kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI, Bank Sumut dan lain lain) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		ASN Pemerintah Daerah - Perluasan pemasaran dan kepemilikan rumah bagi MBR dan ASN - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Toba, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara		Daerah) Badan Kepegawaian dan BP Tapera untuk penyediaan data ASN yang belum memilik rumah Dinas Kominfo untuk publikasi Media	pada kabupaten/Kota 4. Melakukan sosialisasi kepada MBR dan ASN Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di kab/kota): Pelaksana teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan. Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Ujung tombak identifikasi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan. Badan Kepegawaian dan BP Tapera: Penyediaan data
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
					ASN yang belum memiliki rumah
6. Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui <i>Restorative Justice</i> (PRESTICE).	2025	Tidak ada	Biro Hukum	Dinas PMD Capil (memberikan data/pemetaan desa prioritas kegiatan PRESTICE yaitu desa dengan karakteristik konflik yang tinggi) Diskominfo (Publikasi),	1. Replikasi Kegiatan Prestice pada tingkat Kabupaten/Kota 2. Edukasi dan Sosialisasi PRESTICE di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke level Kecamatan dan Desa. 3. Pendampingan dari bagian hukum kabupaten/kota dari kasus tidak pidana ringan yang ditangani oleh PRESTICE
	2026	- Pembentukan kelembagaan Prestice, Bimbingan Teknis Paralegal Desa dan Edukasi dan Sosialisasi Prestice di 25 kabupaten (Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah, Toba) - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2027	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2028	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2029	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2030	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan. - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			

Tabel 4.4 Dukungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
PP1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL					
1. Pemenuhan 100% Fasilitas Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	2025	Instalasi dan aktivasi pada titik lokasi bekerja sama dengan <i>provider</i> (Tahun 2025) Listrik: 35 Sekolah (8 SMA dan 27 SMK) a. LISTRIK GRATIS Tidak ada	Dinas Pendidikan	Disperindag ESDM (pendampingan terhadap akses listrik), Dinas Kominfo (pendampingan terhadap akses internet dan publikasi kegiatan).	Pembangunan akses jalan yang baik ke sekolah yang akan dibangun akses listrik dan layanan internet.
		Instalasi dan aktivasi pada titik lokasi bekerja sama dengan <i>provider</i> (Tahun 2025) Internet: 66 Sekolah (29 SMA, 34 SMK dan 3 SLB) b. Internet Gratis 29 SMA: SMA Negeri 1 Gunung Sitember Kabupaten Dairi, SMA Negeri 2 Besitang Kabupaten Langkat, SMA Negeri 1 Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Hibala Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 2 Hibala Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Pulau			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Simuk Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 2 Hilimegai Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Susua Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 2 Susua Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 3 Susua Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 4 Susua Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Ulu Susua Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 2 Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Umbunasi Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Idanotae Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Ulu Idanotae Kabupaten Nias Barat, SMA Negeri 1 Mazo Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 2 Mazo Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 2 Hilisalawae Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Boronadu Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Hilimegai Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Dolok Silau Kabupaten Simalungun, SMA Negeri 2 Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Natal, SMA Negeri 1 Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, SMA Negeri 3 Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, SMA Negeri 1 Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, SMA Negeri 2 Alasa Kabupaten Nias Utara, SMA Negeri 2 Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara			
		SMK: tidak ada			
		SLB: tidak ada			
	2026	1.Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2.Pemeliharaan & <i>Maintenance</i>			
	2027	1.Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2.Pemeliharaan & <i>Maintenance</i>			
	2028	1.Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2.Pemeliharaan & <i>Maintenance</i>			
	2029	1.Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2.Pemeliharaan & <i>Maintenance</i>			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2030	1.Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2.Pemeliharaan & <i>Maintenance</i>			
2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK – 2028, Karo/SLB - 2029)	2025	tidak ada	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	2025	Pendataan valid rehab ruang kelas tahun 2026-2029 •Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Aprasial)	Dinas Pendidikan	PUPR (Apraisal/Penilaian Kerusakan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	- Penyediaan lahan/hibah lahan yang diperlukan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Pelaksanaan Fisik Tahap III – 190 Ruang Kelas (2028) di 28 Kabupaten/Kota •Medan, Binjai, Langkat, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara,			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Labuhanbatu Selatan, Simalungun, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padangsidempuan, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah			
	2029	Monitoring, Evaluasi & Pemutakhiran Data (2029)			
	2030	Tidak ada			
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	2025	Pendataan Kebutuhan Ruang Kelas Baru (mendesak), Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap I sebanyak 57 RKB di 15 Kabupaten/Kota •Deli Serdang, Langkat, Dairi, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Simalungun, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Asahan	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	Penyediaan atau hibah Lahan dari kabupaten/kota untuk lokasi Pembangunan RKB sesuai kebutuhan. Pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah.
	2026	Pembangunan Ruang Kelas Baru (mendesak) Tahap II (2026) sebanyak 80 Ruang Kelas Baru di 19 Kabupaten/Kota •Langkat, Binjai, Medan, Dairi, Serdang Bedagai, Batu Bara,			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Asahan, Simalungun, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padangsidempuan, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 4 Unit Sekolah Baru			
	2027	Tidak ada			
	2028	Pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 30 Ruang Kelas Baru di 13 Kabupaten/Kota •Binjai, Langkat, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Asahan, Tanjungbalai, Samosir, Toba, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Sibolga Pembangunan 2 unit Sekolah Baru			
	2029	Tidak ada			
05. Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata	2025	tidak ada	DISNAKER	Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral: Disperindag ESDM bersifat mendukung dan lintas sektor,	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2029-2030	tidak ada		bukan pelaksana utama pelatihan. Maka Disperindag ESDM mendukung proyek strategis BLK, sebagai berikut: • Menjadi penghubung antara pelaku industri/perusahaan dengan Disnaker dan BLK. • Memfasilitasi program magang industri dan penempatan lulus BKL ke industri lokal. • Disperindag ESDM dapat menjadi mitra dalam pengembangan program pelatihan vokasi di BLK melalui fasilitasi pelatihan berbasis proyek industri, penyediaan instruktur ahli dari sektor industri dan akses terhadap bantuan alat pelatihan. Dinas Pendidikan: Dinas Pendidikan memiliki peran dalam proyek strategis ini dalam hal pelatihan kerja, sebagai berikut: • Mendorong sinkronisasi kurikulum SMK/vokasi dengan skema pelatihan BLK agar lulusan SMK lebih siap kerja. • Memastikan kompetensi	Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan sarana dan prasarana pendukung sesuai kewenangan kabupaten 2. Memfasilitasi kerja sama antara BLK dan perusahaan lokal untuk program magang, pelatihan kerja, atau penyerapan tenaga kerja berbasis potensi daerah

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
				lulusan SMK sejalan dengan kebutuhan industri dan program pelatihan BLK. • Mengintegrasikan <i>teaching factory</i> di SMK dengan fasilitas pelatihan BLK untuk menciptakan ekosistem pelatihan <i>dual system</i>. • Mendorong peserta didik SMK mengikuti sertifikasi kompetensi melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terhubung dengan BLK. • Bersama Disnaker, mendata dan menyiapkan guru produktif/tenaga pelatih yang memenuhi standar pelatihan. Dinas Koperasi dan UMKM: • Mengintegrasikan hasil pelatihan BLK dengan program inkubasi usaha UMKM • Membina lulusan BLK agar mampu mengembangkan usaha mandiri berbasis keahlian yang telah diperoleh • Menyediakan pendampingan usaha lanjutan bagi peserta pelatihan BLK yang ingin berwirausaha • Menyediakan ruang inkubasi bisnis di sentra-	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
				sentra UMKM daerah yang terhubung dengan BLK • Membantu lulusan BLK yang berwirausaha dalam promosi dan digitalisasi produk melalui <i>E-commerce</i> dan <i>platform</i> digital UMKM. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: • Menyediakan ruang promosi bagi hasil karya lulusan BLK di sektor kriya, kuliner, dan fesyen etnik melalui festival budaya, <i>event</i> pariwisata, serta <i>platform</i> pemasaran digital. • Menjalin kolaborasi dengan Disnaker untuk mendukung pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat dan budaya lokal melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. • Memberikan dukungan fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi bagi peserta pelatihan BLK untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
				• Bekerja sama dengan Disnaker dalam menyusun kurikulum pelatihan di BLK yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif. - Dinas Sosial: • Menjangkau dan Memberdayakan Kelompok Rentan Sosial. • Integrasi Program Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Kerja. • Bersinergi dengan Disnaker dalam memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan program pelatihan BLK tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan sosial. • Melalui tenaga pekerja sosial, Dinas Sosial dapat melakukan pendampingan bagi peserta pelatihan selama dan setelah masa pelatihan, untuk memastikan mereka mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh, baik untuk bekerja maupun memulai usaha secara mandiri. Badan Kepegawaiaan	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
				Daerah: • BKD berperan dalam mendukung ketersediaan ASN dengan kompetensi teknis dan manajerial yang relevan, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BLK, baik sebagai instruktur, tenaga administrasi, maupun pengelola program pelatihan. • Melakukan pemetaan dan perencanaan kebutuhan SDM aparatur di bidang pelatihan vokasional agar sejalan dengan arah pengembangan BLK, termasuk dalam pengadaan, rotasi, dan pengembangan karier ASN yang ditempatkan di unit-unit pelatihan. • BKD dapat mengintegrasikan program pelatihan teknis fungsional dan manajerial bagi ASN yang bertugas di lingkungan BLK ke dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pelatihan. • Berperan dalam membangun sistem penilaian kinerja yang berbasis <i>output</i> dan dampak, termasuk	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
				mengawasi efektivitas kinerja ASN di BLK dalam menyelenggarakan pelatihan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja. Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	
PP2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI					
6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	2025	1. Inisiasi dan konsolidasi melalui rapat koordinasi tahun 2025 2. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2025 • Provinsi Sumatera Utara	Dispora	Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (pembinaan, edukasi dan sosialisasi kepada pelajar untuk dapat menjadi atlet pelajar) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	- Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan liga olahraga pelajar Sumut untuk cabor sepak bola dan voli - Melaksanakan <i>side event</i> pada saat pelaksanaan liga olahraga (pameran UMKM) dan sejenisnya
	2026	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2026 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2026 • Provinsi Sumatera Utara			
	2027	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2027 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2027 • Provinsi Sumatera Utara			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2028	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2028 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2028 • Provinsi Sumatera Utara			
	2029	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2029 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2029 • Provinsi Sumatera Utara			
	2030	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2030 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2030 Penguatan <i>Legacy</i> & Keberlanjutan Tahun 2030 • Provinsi Sumatera Utara			
7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	2025	Inisiasi konsolidasi melalui pertemuan koordinasi Tahun 2025 • Kota Medan dan Kab. Deli Serdang	Dispora	Dinas pendidikan / Cabang Dinas Pendidikan (Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelajar Difabel untuk dapat mendata dan membina atlet sesuai potensi dan minat siswa) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	NPC Kabupaten/Kota dan Dispora Kabupaten/Kota a memperkuat perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas pelajar di Kabupaten/Kota
	2026	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2026 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2026-			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		2027 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2027	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2027 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2027-2028 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2028	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2028 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2028-2029 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2029	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2029 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		2029-2030 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2030	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2030 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2030 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU					
8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (<i>Sumut e-Health Integration system</i>)	2025	Penyusunan Kajian dan Bisnis Proses Platform e-Health Integration System Tahun 2025 Pembangunan Aplikasi Tahun 2025 <i>Launching</i> Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2025 •33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo (Penyediaan Web, Server dan Publikasi Kegiatan)	-Penyediaan data kepesertaan JKN Kabupaten/Kota -Sosialisasi dan edukasi platform kepada faskes tingkat Kabupaten/Kota

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2026	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2027	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2027 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2028	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2028 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2029	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2029 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2030	Tidak ada			
9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen	2025	Tidak ada	Dinas Kesehatan	Badan Kepegawaian (Pelaksanaan assesmen kompetensi dokter spesialis	-Menyediakan data dokter umum yang memenuhi

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	2026	Tidak ada		sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian kab/kota agar Dokter Spesialis yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja) Biro Pemotda (Fasilitasi Penyusunan Dokumen kerja sama dengan USU dan UGM) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis dan Mengidentifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah - Menyiapkan surat komitmen bersama dengan para Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa peserta dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat - Menentukan jenis spesialis yang paling dibutuhkan - Kesiapan Sarana dan Prasarana RSUD - Surat Penugasan & Dukungan Legal Formal - penyediaan
	2027	Tidak ada			
	2028	- Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan Medis Merata) Tahun 2025-2030 •RSUD Kabupaten Batu Bara, RSUD Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah Kabupaten Serdang Bedagai, RSUD Tuan Rondahaim di Kabupaten Simalungun, RSUD Salak di Kabupaten Pakpak Bharat, RSUD Parapat Kabupaten Simalungun, RSUD Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, RSUD Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, RSUD Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, RSUD Dr. Djasamen			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Saragih Kota Pematangsiantar, RSUD Dr. FL Tobing Kota Sibolga, RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai Kota Binjai, RSUD Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Lanjutan 2027 : 9 Orang, Lanjutan 2026 : 8 Orang, Lanjutan 2022 : 21 orang			Akomodasi dokter residen
	2029	Tidak ada			
	2030	- Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan Medis Merata) Tahun 2025-2030 •Kabupaten/Kota yang terintervensi pada tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029			
10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	2025	Tidak ada	Dinas Kesehatan	PUPR (Manajemen Konstruksi, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Penyediaan Lahan dan Dokumen Legalitas - Menyediakan tenaga non-
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2029	Tidak ada			medis, mendukung rekrutmen tenaga kesehatan, dan pemeliharaan fasilitas Koordinasi Lintas Pemerintahan
	2030	Tidak ada			
PP4 PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN					
11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).	2025	Tidak ada	Dinas Sosial	Disperindag dan Dinas Koperasi UMKM (Dukungan Pelatihan dan Pendampingan bagi sasaran kegiatan Mapro yaitu KUBE dan UEP, fasilitasi keikutsertaan Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif Mapro dalam pameran/expo yang dilaksanakan oleh Dinas) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Dukungan peninjauan calon penerima bantuan agar tepat sasaran. Dukungan koordinasi penyiapan kegiatan pelatihan bagi calon penerima bantuan di kab/kota. Replikasi kegiatan serupa di kab/kota masing-masing.
	2026	-Pendataan dan penetapan penerima manfaat (KK/KUBE) -Pembuatan Bank Data pensasaran masyarakat miskin sebanyak 200 KK (40 KUBE) di 4 Kabupaten/Kota: Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Toba, Padang Lawas Utara, Dairi serta 200 KK (UEP) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Nias			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	2025	Identifikasi kebutuhan dan lokasi sasaran (IHK, P3KE, desa rentan pangan, dan wilayah 3T); Penentuan komoditas & harga jual; Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Pasar Murah Bergerak (PMB); Koordinasi dan Kemitraan dengan TPID, BULOG, CSR, Distributor, Pengusaha daerah/koperasi/BUMEDes, Pemerintah Kabupaten/Kota; Penentuan jadwal & titik lokasi; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)	DISPERIN DAG ESDM	• Dinas TPH : Data pangan strategis dan penyediaan stok • Dinas Perhubungan : Transportasi logistik • Dinas Sosial : Data P3KE by <i>name by address</i> (untuk menentukan titik titik PMB dilakukan) • Dinas Koperasi & UMKM : Pelibatan UMKM dan Koperasi dalam penyediaan stok • Biro Perekonomian: pelibatan TPID untuk menghitung dampak terhadap pengendalian inflasi • Dinas Kominfo: Publikasi Pelaksanaan • Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat: Pengawasan Pelaksanaan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan (Tahun 2025-2030): 1. Pendataan kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin; 2. Pendataan jumlah KUMKM penyedia Bahan Kebutuhan Pokok; 3. Pengawasan distribusi dan harga bahan
		Lokasi: Medan (kontributor inflasi), Pematangsiantar (kota IHK), Padangsidimpuan (akses terbatas), Gunungsitoli (kemiskinan ekstrem), Simalungun (penyangga distribusi), Labuhanbatu Selatan (wilayah miskin), Tapanuli Selatan (wilayah rawan harga), Langkat (rawan lonjakan harga dan distribusi), Tapanuli Utara (akses			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		geografis sulit), Deli Serdang (wilayah IHK), Humbang Hasundutan (terpencil), Binjai (urban miskin), Toba (hinterland), Serdang Bedagai (penyangga pangan), Asahan (daerah padat penduduk)			kebutuhan pokok; 4. kerja sama antar kabupaten dalam penyediaan Bahan Kebutuhan Pokok 5. Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan; 6. Monitoring dan evaluasi
	2026	Konsolidasi kelembagaan, integrasi sistem informasi daerah; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)			
		Lokasi: Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Tapanuli Tengah (akses terbatas), Nias Barat (isolasi logistik), Humbang Hasundutan (wilayah dataran tinggi), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Dairi (wilayah perbatasan), Kab. Batu Bara (wilayah pesisir), Toba (hinterland), Samosir (wilayah tertutup), Labuhanbatu Selatan (kemiskinan tinggi), Nias Selatan (akses sulit), Tapanuli Tengah (rawan logistik), Tapanuli Tengah Utara (wilayah sulit distribusi), Tapanuli Tengah (akses dan harga tinggi), Langkat (distribusi padat dan IHK)			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2027	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota			
		Tidak ada			
	2028	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota			
		Tidak ada			
	2029	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota			
		Tidak ada			
	2030	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota			
		Medan (pusat IHK), Tebing Tinggi (akses perdagangan), Pematangsiantar (wilayah urban), Padangsidimpuan (akses logistik terbatas), Gunungsitoli (pulau terluar), Dairi (wilayah perbatasan), Tapanuli Tengah (kontributor inflasi lokal), Toba (pariwisata dan pertanian), Mandailing Natal (daerah rawan kemiskinan), Nias Barat (akses sulit), Labuhanbatu Selatan (wilayah miskin), Humbang Hasundutan (akses dataran tinggi), Langkat (wilayah distribusi utama), Samosir			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		(pulau tengah danau), Serdang Bedagai (penyangga Medan)			
13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	2025	1. Pendataan dan verifikasi 2. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (Pekerja rentan yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar) sebanyak 21.000 (APBD dan DBH Sawit) 3. Penguatan peran dan komitmen kabupaten/kota dalam pembiayaan dan regulasi (MoU Pemprovsu dengan Kabupaten dan Kota) -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2)	DISNAKER	- Dinas Sosial - Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima termasuk dalam kategori penerima bantuan. - Pendataan dan Validasi Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS.	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Mendukung pelaksanaan agar bisa mencapai target <i>Universal Coverage Jamsostek</i> (UCJ) sebesar 60% sesuai RPJMD 2025-2029 2. Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan
	2026	Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil - Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas - Menyediakan data kependudukan yang valid (NIK, KK, KTP) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan. - Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan	
	2027	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.646			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara administratif. • Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS. • Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.	3. Pengalokasian DBH sawit dan APBD dengan persentase pembagian 80 persen kab/kota dan 20 persen provinsi utk perlindungan pekerja rentan miskin ekstrem desil 1 dan 2
	2028	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.647 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2029	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2030	1. Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota		• BPJS Ketenagakerjaan berperan menyelenggarakan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Perlindungan atas risiko kecelakaan selama bekerja. • Jaminan Kematian (JKm): Santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal.	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		2. Evaluasi menyeluruh dan pencapaian target cakupan 60% UCJ -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara		• Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan jangka panjang bagi pekerja saat pensiun. • Jaminan Pensiun (JP): Penghasilan berkala untuk pekerja setelah pensiun. • Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK. • Kominfo: Publikasi Kegiatan	
14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	2025	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi		PUPR (Dokumen apraisal, pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Disnaker (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan Kerja bagi sasaran Penghuni Panti) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- kab/kota mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja - Kabupaten/Kota bersama Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan
	2026	Penyusunan dokumen apraisal/penilaian kerusakan bekerja sama dengan Dinas PUPR Penyusunan dokumen perencanaan (jasa konsultan perencanaan) untuk 13 panti sosial Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2027	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit) 1.PSAR Anak Tanjung Morawa (Kabupaten Deli Serdang) 2.PS Lansia Kisaran (Kabupaten Asahan) 3.PS Gepeng Binjai (Kota Binjai) 4.PS Lansia TRW Pematangsiantar (Kota Pematangsiantar) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			penerima manfaat.
	2028	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit) 1.PS Tuna Susila & Tuna Laras Berastagi (Kabupaten Karo) 2.PS Padangsidempuan (Kota Padangsidempuan) 3.PS Siborong-borong (Kabupaten Tapanuli Tengah) 4.PS Tebing Tinggi (Kota Tebing Tinggi) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		yang akan memasuki masa terminasi			
	2029	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (5 unit) 1.PS Anak Sidikalang-Kabanjahe (Kabupaten Dairi & Kabupaten Karo) 2.PS Lausimomo-Hutasalem (Kab.Karo & Kabupaten Toba) 3.PS Anak Gunungsitoli (Kota Gunungsitoli) 4.PS Eks Kusta Belidahan-Sicanang (Kota Medan) 5.PS Pinangsori (Kabupaten Tapanuli Tengah) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2030	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
PP 5 PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH					
15. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan pariwisata	2025	KEK Pertanian: Tidak ada	DISBUDPA REKRAF	• Bappelitbang: Menyelaraskan rencana	2025: Dukungan kab/kota untuk

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		KEK Pariwisata: Tidak ada	DAN DINAS KETAPAN G TPH	pengajuan KEK Pariwisata dan Pertanian dengan RPJMD, RTRW, RPJPD, dan RIPPARNAS/RIPPARDA, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Dinas Lingkungan Hidup: Kajian AMDAL dan pengelolaan lingkungan • Dinas Ketenagakerjaan: Peningkatan <i>Capacity Building</i> Pariwisata dan Pertanian • Dinas Pendidikan: Penguatan Vokasi SMK Pariwisata dan Pertanian • Dinas PUPR: Percepatan Perda RTRW Perubahan, sinkronisasi lokasi KEK pada RTRW • Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan • Biro Hukum: Penetapan Regulasi Perda/Pergub • DPMPTSP: fasilitasi perizinan	Pengembangan KEK Pariwisata Koordinasi terkait rencana pengajuan DPSP Danau Toba menjadi KEK 2026: • Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba dan Penetapan Lokasi • Penetapan Pebup RTRW; Kesesuaian Dokumen RTRW dan RDTR 2027: • Penyediaan Lahan (Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KEK dalam hal terdapat lahan yang belum dibebaskan) • Peningkatan infrastruktur kewenangan
	2026	KEK Pertanian: Tidak ada			
		KEK Pariwisata: Tidak ada			
	2027	KEK Pertanian: Tidak ada			
		KEK Pariwisata: Tidak ada			
	2028	KEK Pertanian: Tidak ada			
		KEK Pariwisata: Tidak ada			
	2029	KEK Pertanian: Tidak ada			
		KEK Pariwisata: Tidak ada			
	2030	KEK Pertanian: Tidak ada			
		KEK Pariwisata: Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
					kabupaten (jalan, air, sarana persampahan, sanitasi) • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota 2028: • Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian • Penyediaan Lahan • Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota 2029: • Peningkatan SDM Pariwisata • Penyediaan Lahan • Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
					kab/kota • Promosi Investasi 2030: • Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian • Penyediaan Lahan • Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota • Promosi Investasi
16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	2025	Tidak ada	DISPERIN DAG ESDM	• Dinas TPH: Peningkatan Produksi Cabe melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Cabai varietas tahan hama & cocok untuk pengeringan, <i>capacity building</i> bagi petani • Dinas Perkebunan dan Peternakan: Peningkatan Produksi Kelapa, Aren dan Kopi melalui Sarprodi;	Dukungan Kabupaten/Kota: • Menyediakan Data IKM sektor Kopi, Kelapa, Aren, Cabe (jenis produk, data produksi, nilai omset produksi)

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2026	Tidak ada		Pemberian Bibit Kelapa genjah, Kopi Unggu, Aren, <i>capacity building</i> bagi petani • Dinas PUPR : Penguatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan	Peningkatan <i>capacity building</i> pada IKM (kelapa, cabe, kopi, aren); menyusun regulasi pengembangan hilirisasi,
	2027	Tidak ada			Penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota. Pemasaran, dukungan promosi, <i>capacity building</i> diversifikasi produk hilirisasi, Penyediaan Rumah kemasan oleh kab/kota
	2028	Tidak ada			Menentukan IKM yang akan dilakukan <i>capacity building</i> , menyusun regulasi pengembangan hilirisasi, penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota,

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
					peningkatan akses pembiayaan melalui KUR atau Koperasi, fasilitasi <i>capacity building</i> standarisasi ekspor bagi pelaku IKM.
	2029	Tidak ada			Dukungan pembiayaan KUR, identifikasi IKM berpotensi untuk dilakukan <i>business matching</i> .
	2030	Tidak ada			<i>Branding</i> Ekspor
17. BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi)	2025	Tidak ada	-	Bappelitbang: Penyusunan konsep dan perencanaan kesehatan BUMD, GCG Biro Hukum: percepatan fasilitasi regulasi Biro Pemotda: Fasilitasi Kerja sama Diskominfo: Publikasi Kegiatan Inspektorat: Audit BUMD	-
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi	2025	• Inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum optimal, serta potensi pemanfaatan • Penyusunan skema/proses bisnis pemanfaatan aset BMD • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Proses digitalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah	BKAD	Bapenda Provsu: Dukungan dalam proses bisnis pendapatan melalui pemafaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi Bappelitbang Provsu: Dukungan dalam penyusunan konsep dan perencanaan Diskominfo: Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi OPD Pengguna BMD: Dukungan dalam inventarisir dan pengamanan aset serta pemeliharaan BMD	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pengamanan BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa)
	2026	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Penyusunan Regulasi penggunaan web aplikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah • Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang			
	2027	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		• Pengembangan skema peman faatan Barang Milik Daerah • Pengembangan sistem informasi atau promosi			
	2028	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan platform lain			
	2029	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi •Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan platform lain (kerja sama dengan 1 Platform) • Evaluasi dan Monitoring			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah produktif berkelanjutan			
	2030	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil inventarisasi • Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui kerja sama ekonomi berkelanjutan			
PP.6 PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU					
19. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	2025	Tidak ada	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi dalam rangka hilirisasi hasil	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2030	Tidak ada		Perkebunan kelapa seperti alat untuk menjadikan air kelapa menjadi minyak kelapa/VCO, dan <i>coconut milk</i>, kemudian biji kopi menjadi kopi bubuk dan kopi ekstrak, kemudian aren menjadi gula aren dan bioetanol 2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok pekebun dan alat pengolah hasil produksi kelapa, kopi dan aren. 3. Dinas PMD Dukcapil: untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan 4. Diskominfo: untuk publikasi media	berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
20. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya	2025	Tidak ada	DISKANLA	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan. • Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya. • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan dan pelabuhan). • Dinas Kominfo: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan kelompok nelayan dan pembudidaya kab/kota - Klusterisasi - Sosialisasi dan Edukasi - Replikasi di daerah yang sama
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
21. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)	2025	Tidak ada	DISKANLA	• BAPPELITBANG: Integrasi program SEMESTA dalam perencanaan daerah. • Dinas Lingkungan Hidup Provsu: Kebijakan dan pemantauan kualitas lingkungan laut. • Dinas Perhubungan Provsu: Dukungan transportasi laut dan keselamatan pelayaran	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
				patroli. • Satpol PP Provsu: Penegakan perda terkait konservasi laut. • Dinas Pariwisata Provsu: Sinergi dengan wisata bahari berkelanjutan. • Dinas Kominfo Provsu: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat. • Dinas Koperasi & UKM Provsu: Penguatan kelembagaan nelayan pengawas. • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu: Kesiapsiagaan dan tanggap darurat di laut. • Inspektorat: Pengawasan dan pendampingan jalannya program	berperan dalam menyiapkan: - Pendataan Nelayan kab/kota - Klasterisasi - Sosialisasi dan Edukasi
22. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat	2025	Tidak ada	DLHK	1. Dinas Kominfo - Media massa - Publikasi kegiatan 2. Kementerian Kehutanan - Penyediaan Regulasi - Koordinasi program-program	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui DLHK dengan dukungan <i>stakeholder</i> terkait diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
					(BPBD), Kementerian Kehutanan, Kelompok Masyarakat Pesisir dan LSM/NGO/pemerhati Lingkungan. adapun dukungan kabupaten/kota pada kegiatan ini diantaranya: 1. Kolaborasi <i>Multistakeholder</i> dalam kegiatan 2. Pemberdayaan Masyarakat: Program rehabilitasi yang sukses tidak hanya tentang menanam pohon, tapi juga tentang memberdayakan masyarakat. 3. Membantu dalam proses pengadaan lahan dan memastikan status hukum lahan tersebut jelas 4. Pemerintah kabupaten

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
					melakukan pemantauan dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan mangrove berjalan baik dan program mencapai tujuannya.
23. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)	2025	Tidak ada	DISPERIN DAG ESDM	TPH: Pembinaan Kelompok Petani dalam penggunaan PLTS. • Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat: Pengawasan Pelaksanaan • Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan untuk Tahun 2025-2030: 1. Data Kelompok Tani (CPCL) 2. data penentuan lokasi 3. pengadaan
	2026	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			
	2027	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			lahan 4. Data produksi pertanian; kondisi air 5. Data <i>readiness criteria</i>
	2028	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			
	2029	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			
	2030	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			
PP 7 KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL					
24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah	2025	Tidak ada	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran krusial dalam pembangunan infrastruktur dasar pendukung pertanian. Ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta infrastruktur penunjang lainnya yang memperlancar	• Memfasilitasi penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat pertanian dasar. • Mendorong sinergi antar pemangku kepentingan lokal (petani, penyuluh,
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2028	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH	distribusi hasil panen dan aksesibilitas kawasan pertanian. Penataan ruang juga menjadi fokus penting untuk memastikan kawasan pertanian unggulan tidak terganggu oleh alih fungsi lahan. 2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) turut berperan dalam mendorong hilirisasi produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan hasil tani, seperti pengeringan, pengemasan, dan pengolahan lanjutan produk padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Di sisi perdagangan, dinas ini memastikan akses pasar yang lebih luas dan stabil melalui promosi, fasilitasi perdagangan, dan penguatan sistem rantai pasok. Adanya kegiatan Gerakan pangan Murah membuat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat berkolaborasi dengan Dinas ketahanan Pangan dan TPH dalam menjalankan kegiatan	BUMDes). • Memfasilitasi pembangunan/peingkatan akses jalan produksi di kawasan unggulan. • Mendukung pembangunan fasilitas pascapanen: gudang, alat pengering, rumah sortasi. • Mengkoordinasikan petani/UMKM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi ekspor dan standar internasional. • Memberikan laporan lengkap atas capaian program, kendala, dan peluang lanjutan. Replikasi di daerah yang sama
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
				ini 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) memegang peranan sebagai koordinator perencanaan strategis lintas sektor. Bappelitbang merumuskan arah kebijakan, menyusun rencana aksi, serta memastikan sinergi antar-dinas dalam pengembangan kawasan unggulan. 4) Diskominfo (Publikasi)	
25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	2025	Tidak ada	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: Memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi 2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: Koordinasi pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok peternak 3. Dinas PMD Dukcapil: Untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
				pengembangan kawasan peternakan 4. Diskominfo: Untuk publikasi media	peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan 3. Pemberian izin usaha untuk koperasi, UMKM, BUMDes yang mengolah hasil produksi berada di kawasan peternakan 4. Replikasi di daerah yang sama
26. Program Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	2025	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH Provinsi berperan sebagai inisiator utama program. Mereka bertanggung jawab atas perumusan	PT. Dirga Surya: memasarkan produksi bibit unggul padi	Dinas Pertanian Kabupaten mempromosikan dan menggunakan bibit unggul padi varietas baru.
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Pengembangan produksi benih unggul dan pemasaran di Kabupaten/Kota sentra provinsi Sumatera Utara dan di kepulauan Sumatera			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
			kebijakan, penyediaan alokasi anggaran, serta koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam implementasinya, mereka juga menetapkan lokasi uji multilokasi dan mendukung pelepasan varietas secara resmi		
27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2025	Fokus pada persiapan program, pembentukan Tim Pokja FPPS di provinsi dan kabupaten/kota, rekrutmen dan pelatihan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS), pemutakhiran data	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung	a) Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat memfasilitasi	Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan,

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		kelompok tani, koordinasi dengan lembaga keuangan, dan sosialisasi program. • 33 Kabupaten/Kota	g antara kelompok tani dengan lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, serta lembaga penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas membantu petani memenuhi	akses permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan. b) Disperindag ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi. c) Dinas Kominfo memainkan peran dalam penyebarluasan informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-digital, Kominfo dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi digital kelompok tani,	berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok
	2026	Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. • 33 Kabupaten/Kota			
	2027	Memperluas cakupan penerima pembiayaan, memperkuat kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan swasta, serta memberikan pelatihan lanjutan kepada FPPS terkait negosiasi bisnis dan pemasaran. • 33 Kabupaten/Kota			
	2028	Mengintegrasikan pemasaran digital dan <i>e-commerce</i> , mengembangkan sistem informasi pembiayaan pertanian berbasis aplikasi, serta melatih FPPS dan kelompok tani dalam penggunaannya • 33 Kabupaten/Kota			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2029	Melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui koperasi, CSR, dan investor. Mengembangkan usaha hilir di bidang pascapanen dan olahan, memberikan pelatihan manajemen usaha hilir, serta mendorong pemasaran produk hilir. • 33 Kabupaten/Kota	persyaratan administratif dan teknis agar layak mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan pertanian lainnya.	dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian. e) Dinas Pemdesdukcapil memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdesdukcapil memastikan agar bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani. f) Diskominfo (Publikasi)	
	2030	Melaksanakan kajian dampak ekonomi program, menyusun model pendampingan berkelanjutan, dan melatih FPPS menjadi konsultan atau koperasi tani. • 33 Kabupaten/Kota			
PP 8 PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)					

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
28. Dukungan terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	2025	Tidak ada	DISBUDPA REKRAF	KOMINFO : Publikasi Media	
	2026	Tidak ada		DISBUDPAREKRAF : Penguatan Atraksi Budaya dan Pariwisata; Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif; Promosi dan Pemasaran Destinasi; Pengembangan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata; Kolaborasi dan Sinkronisasi Program; Penguatan Tata Kelola Destinasi;	
	2027	Tidak ada		PERAN BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) : Koordinasi Pengelolaan Kawasan Pariwisata Strategis; Pengembangan infrastruktur dan Investasi; Promosi dan Branding Kawasan; Pengembangan SDM dan Ekosistem Wisata	
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada		PERAN BAPPELITBANG (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah) : Integrasi Perencanaan Pengembangan DPP Danau Toba; Sinkronisasi Program Daerah dengan Nasional; Litbang & Evaluasi Program	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
				Pengembangan Pariwisata; Dukungan Kebijakan Inovatif & Kolaboratif Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/159/KTPS/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja P3TB Provinsi Sumatera Utara, seluruh OPD Pemprov yg termasuk dalam SK Gubsu tersebut berperan dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba sesuai dengan Rencana Aksi yang disusun	
29. Pengelolaan dan Penataan Kawasan Toba Caldera UGGp dan Kawasan Geopark lainnya	2025	Tidak ada	DISBUDPA REKRAF	1. DISBUDPAREKRAF : Penyaluran Belanja Operasional BP TCUGGp; Pembangunan <i>Visibilities di Geosite</i>; Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Pariwisata dan Pengelola Desa Wisata; Identifikasi dan Penetapan <i>Cultural Heritage</i> di Kawasan Geopark; Melaksanakan <i>Event Geofest</i>. 2. DINAS Koperasi &UMK: Melakukan Pelatihan & Pembinaan UMKM terutama	
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2029	Tidak ada		di Kawasan <i>Geosite</i> ;	
	2030	Tidak ada		3. Dinas Pendidikan: Melaksanakan kegiatan <i>Geopark to School</i> dan edukasi terkait <i>Geopark</i> kepada pelajar; 4. Dinas PUPR : Peningkatan kualitas jalan/jembatan di ruas jalan Provinsi yang menghubungkan antar <i>Geosite</i> ; 5. Bappeltbang: Melaksanakan penelitian terkait <i>Geological Heritage/Natural/Biological Heritage/Cultural Heritage</i> di Kawasan Toba Caldera UGGp maupun di Kawasan Geopark yang baru; 6. BPBD : Mitigasi Bencana & Sosialisasi; 7. Dinas LHK : Pelestarian Hutan dan ekosisten di Kawasan Danau Toba 8. Dinas Kominfo: Publikasi kegiatan;	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
30. Pembentukan & Pengembangan Kawasan Strategis Budaya, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang Terintegrasi (TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK dan BAHLIKE)	2025	Tidak ada	DISBUDPA REKRAF	1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. 2. Dinas PUPR: Pembangunan Kawasan (jika ada pembangunan fisik); Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. 3. Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDES Wisata 4. Dinas Kominfo: Penyediaan Fasilitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan	
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2030	Tidak ada			
31. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Sumatera Utara	2025	Tidak ada	DISBUDPA REKRAF	1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di kawasan. 2. Dinas PUPR: Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan.	1. Memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi; 2. Penyediaan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
				3. Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDes Wisata 4. Dinas Kominfo: Penyediaan Fasilitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan 5. Dinas Pendidikan: Edukasi kepada pelajar tentang Situs Cagar Budaya	Lahan yang <i>Clean & Clear</i> (jika terdapat pembangunan fisik); 3. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Tingkat Kabupaten/Kota; 4. Pembentukan Pengelola Kawasan Situs Cagar Budaya; 5. Melaksanakan Program edukasi kepada masyarakat dan pelajar tentang Kawasan Situs Cagar Budaya; 6. Pendataan, Inventarisasi, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota 7. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi;

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
					8. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 9. Pendampingan Desa Wisata; 10. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay/Hotel</i>), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa <i>Travel Agent</i>); 11. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; 12. Pendataan dan Pendampingan UMKM; 13. Pelaksanaan <i>Event</i> Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berskala Nasional

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
32. Pelaksanaan Event Internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global	2025	Tidak ada	DISBUDPA REKRAF	1. Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat event internasional dilaksanakan 2. Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans 3. Dinas Koperasi &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksanaan event internasional 4. Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra event-event-pasca event internasional; publikasi kegiatan 5. Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan <i>Event</i> dan ketertiban Penyelenggaraan acara 6. Dinas Pemuda dan Olahraga; Pembinaan Pemuda untuk partisipasi dalam penyelenggaraan <i>event (sport, e-sport, dsb)</i>	1. Pelaksanaan <i>Side Event</i> saat pelaksanaan <i>Event</i> Internasional; 2. Pelaksanaan Promosi melalui media digital dan cetak; 3. Sosialisasi & Edukasi kepada Pelaku Usaha Pariwisata (Penyedia Jasa Akomodasi (Hotel & <i>Homestay</i>), Penyedia Jasa makan-minum, Penyedia Jasa Transportasi, dan <i>Travel Agent</i>); 4. Pendataan & pendampingan terhadap UMKM; 5. Memastikan kelancaran aksesibilitas terutama saat pelaksanaan <i>Event</i> internasional
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
					(Pengaturan lalu lintas; Peningkatan kualitas jalan)
PP 9 EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI					
33. Sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara	2025	Tidak ada	DISBUDPA REKRAF	1. Dinas PUPR: Pembangunan Sentra Industri Kreatif 2. Biro Perekonomian: Menyusun Kajian pembentukan BLUD; Pembentukan BLUD pengelola Sentra Industri Kreatif. 3. Dinas Perindag ESDM: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan IKM Kreatif. 4. Dinas Koperasi UMK: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan UMKM 5. Dinas Kominfo: Penyediaan Fasilitas Digital (Internet, dll) di Kawasan Sentra Industri Kreatif; Publikasi Kegiatan	1. Pendataan Pelaku Industri Kreatif & Data UMKM Potensial; 2. Kurasi Pelaku Ekonomi Kreatif; 3. Fasilitasi HAKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; 4. Pelaksanaan <i>Event</i> Ekonomi Kreatif secara rutin di Sentra Industri Kreatif; 5. Promosi terkait Sentra Industri Kreatif melalui media digital dan cetak;
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif	2025	Evaluasi <i>Platform e-commerce</i> yang sudah ada (SIMITRA)	DISKOP UMKM	KOMINFO: Publikasi Media	Pelaksanaan program ini

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2026	Desain dan pengembangan platform e-commerce; Kurasi awal 100 produk UMKM; Kemitraan dengan <i>platform</i> logistik & <i>payment gateway</i> . Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT		DISKOP UKM: Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan <i>Platform</i> ; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan UMKM binaan kab/kota - Kurasi Produk UMKM - Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri - <i>Capacity Building</i>
	2027	<i>Onboarding</i> UMKM; Pelatihan dan fasilitasi branding, dan manajemen toko online. Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT		DISKOP UKM: Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan <i>Platform</i> ; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	
	2028	Pengembangan <i>E-commerce</i> menjadi Market Place; Integrasi dengan katalog elektronik, Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT			
	2029	Galeri Virtual 3D; Kampanye digital nasional & regional, Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-</i>			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		commerce; • PLUT			
	2030	Kurasi produk ekspor; Promosi virtual di <i>event</i> internasional (<i>virtual expo, marketplace ASEAN</i>), Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> dan Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT			
PP 10 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN					
35. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	2025	1. Penyusunan SK Tim Forum Pemangku Kepentingan SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 2. Sosialisasi SK Tim forum dan <i>milestone</i> TPB SDGs 2025-2030 3. Updating target capaian SDGs tahun 2025 disesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 4. Penyusunan skema <i>Declaration and Registration System</i> 5. Pembangunan fitur aplikasi pendaftaran BRS SDGs 6. Replikasi, instalasi dan	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah	1. Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs kab/kota se-Sumut tahun 2025-2030 2. Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs : identifikasi UMKM/IMK serta pelaku usaha 3. Dukungan

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		<i>Capacity Building</i> Aplikasi E-Monev SDGs (Inovasi) 7. Menyusun Draf Rancangan Awal RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 8. <i>Launching</i> dan Pelaksanaan BRS <i>pilot project</i> sekaligus penyerahan sertifikat kepada 15 UMKM 9. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review</i> (VLR) Kabupaten/Kota 10. Modifikasi Aplikasi E-Monev SDGs 11. <i>Workshop E-Monev</i> dengan Bappeda/Bapperida/Bappelitbang Kabupaten/Kota 12. Menyusun <i>draf Monev</i> capaian SDGs tahun 2025			pelaksanaan <i>North Sumatera SDGs Action Awards</i> 4. Dukungan proses penginputan E-Monev Kabupaten/Kota 5. Peningkatan Kapasitas untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
	2026	1. Inovasi <i>Business Registration System Policy TPB/SDGs</i> 2. Diseminasi Skema BRS TPB/SDGs (Kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM pada acara FYP, BRS SDGs dijadikan kurikulum) 3. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2025 4. Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		melalui desk per pilas TPB/SDGs 5. <i>Launching</i> Aplikasi e-Monev 6. Pelaksanaan skema <i>Declaration and Registration System BRS TPB/SDGs</i> 7. Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 8. Penyusunan Rancang Bangun aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI) 9. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review (VLR)</i> Kabupaten/Kota 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2026 11. Sosialisasi <i>North Sumatra SDGs Action Award 2027</i> (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)			
	2027	1. Pembangunan aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI) 2. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2026 3. Forum <i>Business Registration System (BRS)</i> 4. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2027</i> (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev) 5. <i>Desk</i> capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Tahun 2026 6. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review (VLR)</i> Kabupaten/Kota 7. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2027 8. Sosialisasi penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)			
	2028	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2027 2. Finalisasi aplikasi e-Monev SDGs 3. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) 4. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2028</i> 5. <i>Launching</i> aplikasi e-Monev SDGs 6. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs 7. <i>Desk</i> capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2027 8. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review (VLR)</i> Kabupaten/Kota 9. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2028			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2029	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2028 2. Pelaksanaan Skema BRS 3. Finalisasi integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA 4. <i>Launching</i> integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA 5. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs 6. <i>Desk</i> capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2028 7. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) 8. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2029</i> 9. Pelaksanaan Skema BRS 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2029			
	2030	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2029 2. Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs tahun 2029 3. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2030</i> 4. Menyusun Draf Laporan Monev RAD TPB/SGDs			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Tahun 2026-2030 5. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review</i> (VLR) Kabupaten/Kota 6. Menyusun laporan akhir kegiatan SDGs			
36. Kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	2025	- Penyusunan MoU antara APIP dengan APH (Kejaksaan Tinggi, Kepolisian) - Pendampingan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah	Inspektorat	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis	Inspektorat kab/kota: Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota
	2026	- Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			
	2027	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2028	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2029	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2030	- Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
PP 11. TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT					

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	2025	- Tindak lanjut MoU terkait kerja sama teknis dengan BPS dan Diskominfo dalam pembangunan aplikasi Satu Data (<i>SADAINA Reborn</i>) - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - <i>Launching SADAINA Reborn</i> di Konreg PDRB ISEI (BPS dan Diskominfo) - <i>Updating</i> SK Tim Pelaksana <i>SADAINA Reborn</i> - Diseminasi aplikasi dan tupoksi tim SADAINA	Dinas Kominfo	Seluruh OPD menginput data statistik sektoral	Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait
	2026	- Pemanfaatan <i>SADAINA Reborn</i> - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2027	- Pemanfaatan SADAINA <i>Reborn</i> - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Pemanfaatan SADAINA dan Data Geospasial - Pemanfaatan SMART SADAINA SDGs - Proses bisnis integrasi SADAINA <i>Reborn</i> dengan Kabupaten/Kota			
	2028	- Pemanfaatan SADAINA <i>Reborn</i> - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Pengembangan fitur SADAINA (API) - Peningkatan kapasitas user SADAINA <i>Reborn</i> - Pemanfaatan dan replikasi SADAINA <i>Reborn</i>			
	2029	- Pemanfaatan SADAINA <i>Reborn</i> - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Menyediakan API (<i>Application Programming</i>			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		<i>Interface</i> - Peningkatan kapasitas user SADAINA <i>Reborn</i> - Pemanfaatan dan replikasi SADAINA <i>Reborn</i>			
	2030	- Menyediakan API (<i>Application Programming Interface</i>) - Pemanfaatan SADAINA <i>Reborn</i> - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Monitoring dan Evaluasi			
PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN, JEMBATAN, DAN IRIGASI YANG LANGSUNG BERDAMPAK PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL					
38. Pembangunan Ruas Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan kewenangan Provinsi	2025	Tidak ada	Dinas PUPR	Dinas Kominfo, untuk publikasi kegiatan, Dinas LHK mendukung proses penyusunan dokumen	1. Memberikan dukungan administratif atas pembangunan
	2026	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2027	Tidak ada		lingkungan, AMDAL dan izin pinjam pakai Hutan, Dinas Perhubungan untuk penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan movev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	jalan yang berada di wilayah kewenangannya, mendukung penyediaan lahan pada trase jalan serta perizinan 2. Menyelaraskan program jalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan usulan prioritas lokal. 3. Melaksanakan koordinasi teknis lapangan dan penyedia data kondisi eksisting jalan serta kebutuhan daerah.
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
39. Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar bagi Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan	2025	Tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan, AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi kegiatan, Biro Adpem melaksanakan movev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Pemerintah Kabupaten/Kota: Menyediakan lahan, mengarahkan program RTLH (Air Minum dan Sanitasi),
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2028	Tidak ada			menetapkan penerima bantuan, dan mengalokasikan anggaran daerah. 2. Dinas Perumahan Rakyat kab/kota: Pelaksana utama di lapangan yang mengurus pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan. 3. Dinas PUPR kab/kota: Memberikan dukungan teknis konstruksi, membuat RAB, dan mengawasi pelaksanaan di lapangan. 4. Dinas Sosial kab/kota: Membantu memperbaiki dan memverifikasi data kemiskinan lokal.
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
					5. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada kab/kota: Melakukan identifikasi penerima bantuan, sosialisasi, memfasilitasi gotong royong, serta membantu pemantauan di lapangan.
PP13. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING					
40. Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Melalui Pembangunan BRT dan Peningkatan Kereta <i>Commuter</i>	2025	Tidak ada	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Organisasi membentuk kelembagaan (BLUD) BRT Mebidang, Biro Adpem melaksanakan movev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
41. Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk Daerah-Daerah Terpencil	2025	Tidak ada	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Koordinasi dan Penyediaan Data: Pemerintah kabupaten/kota berperan menyediakan data dan kebutuhan daerah terkait angkutan perintis serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi agar subsidi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah terpencil yang membutuhkan akses transportasi. 2. Fasilitasi Pelaksanaan Program: Kabupaten/kota membantu pelaksanaan program subsidi dengan memastikan armada bus perintis dapat beroperasi di
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
					wilayahnya, menyediakan dukungan administratif, dan memantau pelaksanaan layanan agar berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu penyediaan fasilitas pendukung untuk kelancaran operasional, berupa lahan untuk titik keberangkatan 3. Penentuan Rute dan Kebijakan Lokal: Pemerintah daerah menetapkan rute bus perintis yang strategis sesuai kebutuhan wilayah dan sinkron dengan program nasional, serta mengeluarkan kebijakan

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
					pendukung agar subsidi bisa dimanfaatkan optimal untuk membuka keterisolasian daerah, yaitu pengusulan dan penetapan trayek dan sosialisasi program kepada masyarakat serta kesiapan infrastruktur jalan di kabupaten dalam kondisi layak dan aman, yang akan dilalui oleh trayek 4. Pengawasan dan Monitoring: Kabupaten/kota melakukan pemantauan operasional bus perintis di lapangan untuk memastikan layanan tetap berjalan dengan baik, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil.

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA					
42. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	2025	Tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk dokumen lingkungan dan AMDAL, BPBD menyusun kajian resiko bencana, rencana mitigasi, dan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat pada wilayah bencana, Diskominfo untuk publikasi kegiatan	1. Penyediaan Data dan Koordinasi: Kabupaten/kota berperan menyediakan data wilayah yang terdampak banjir serta kebutuhan teknis di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar pembangunan bisa tepat sasaran dan efektif (BPBD) 2. Fasilitas Pelaksanaan dan Administrasi: Kabupaten/kota membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
					dukungan administratif, perizinan, penyediaan lahan, dan tenaga lokal di wilayahnya (PUPR) 3. Pemeliharaan dan Pengawasan: Setelah pembangunan infrastruktur pengendali banjir dilakukan, pemerintah kabupaten/kota turut bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian agar fasilitas yang dibangun tetap berfungsi sesuai perencanaan dan umur yang diharapkan (PUPR) 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi: Pemerintah

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
					daerah mendorong partisipasi masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pengendalian banjir melalui manajemen drainase, normalisasi sungai, dan pengelolaan ruang terbuka hijau (LHK, Dinas PKP kab/kota) 5. Penyesuaian Kebijakan Lokal: Kabupaten/kota juga menetapkan kebijakan lokal yang mendukung implementasi program pengendalian banjir provinsi, termasuk

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
					pengelolaan tata ruang dan penggunaan teknologi mitigasi banjir (LHK, Dinas PKP kab/kota, BPBD)
43. Pembangunan TPST Regional	2025	Tidak ada	Dinas PUPR : pelaksana	PUPR: -Penyiapan dokumen Lingkungan, -Dalam pembuatan FS dan DED, dan pembangunan infrastruktur serta pendukungnya, Dinas LHK : - Dukungan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup -Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, -Dinas Kominfo untuk publikasi media	1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 2. Penyediaan dan penentuan lokasi 3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup kab/kota 4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan 5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan 6. Dukungan SDM
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
44. Pembangunan PLTSa	2025	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2026	Tidak ada	DISPERIN DAG ESDM	• PUPR : Pembangunan TPST • LHK: Pengelolaan Sampah • Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: Lahan dan wilayah untuk pembangunan PLTSa, Penerapan Sistem Persampahan Terpilah Perizinan 1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 2. Penyediaan dan penentuan lokasi 3. Dukungan
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
					pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup kab/kota 4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan 5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan 6. Dukungan SDM
45 Pengembangan SPAL Regional	2025	Tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, PDAM dalam peningkatan layanan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas kominfo untuk publikasi media	1. Perencanaan tata ruang (PKP Tata Ruang) 2. Membuat regulasi dan menerbitkan perizinan (LHK, DPMPTSP) 3. Sosialisasi kepada masyarakat (Dinas Kesehatan) 4. Dukungan penyediaan lahan (PKP Tata Ruang) 5. Menyediakan alokasi anggaran
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
					(BKAD) 6. Pembentukan kelembagaan untuk mengelola operasional IPLT (Biro Organisasi)
46. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	2025	Tidak ada	DLHK	1. Biro Pem Otda - SK Penlok 2. BPN - Sertifikat Lahan 3. Diskominfo - Publikasi Media	1. Dukungan terhadap pengadaan lahan 2. Penetapan Taman Kehati pada RTRW kab/kota
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
PP 15. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA					
47. Penguatan Ekonomi Desa untuk Mengurangi Ketergantungan pada Pusat Kota dengan Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pembuatan <i>Master Plan</i> Desa Produktif dan Mandiri.	2025	Tidak ada		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perkebunan (Pemberian bantuan/pelatihan pengembangan komoditas gula aren, kopi, dan kelapa kepada kelompok yang terdapat pada desa yang menjadi sasaran intervensi kegiatan ini)	-Menyediakan data potensi desa yang akurat termasuk peta sebaran komoditi unggulan. -Memperbaiki jalan produksi, pasar desa, gudang, sentra dan pengolahan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2028	Tidak ada			-Memfasilitasi kerja sama antar desa atau antar BUMDes untuk memperkuat rantai pasok. -Memfasilitasi sertifikasi produk (halal, organik, SNI) untuk meningkatkan daya saing. -Pembinaan Penggunaan dana desa untuk ekonomi desa pada Lokus yang di intervensi
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
48. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan bagi Pengelola BUMDES	2025	Pendataan BUMDES/BUMDesma yang akan menerima pemanfaatan kegiatan •27 Kabupaten/Kota yang memiliki desa		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan bagi pengelola BUMDES/Masyarakat Desa).	- Menugaskan tenaga pendamping desa atau penyuluh ekonomi untuk mendampingi operasional BUMDES. - Memfasilitasi akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital. - Memfasilitasi
	2026	- Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •Tapanuli Tengah, Tapanuli			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Utara, Nias, Simalungun, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Tengah Utara, Tapanuli Tengah, Labuhanbatu Utara, Gunungsitoli, Padangsidempuan, Karo, Toba, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu (20 Kabupaten/Kota)			sertifikasi kompetensi pengelola BUMDES melalui lembaga pelatihan resmi.
	2027	- pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •*27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			
	2028	- pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •*27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			
	2029	- pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •*27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			
	2030	Tidak ada			
PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN					
49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	2025	-Penyusunan perubahan Pergub Hibah Rumah Ibadah dengan mekanisme penyaluran hibah yang memuat alokasi terhadap biaya operasional pengelola dan sarpras rumah ibadah Tahun 2025 -Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Biro KESRA	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah)	-

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2026	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2027	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2028	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2029	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2030	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
50. Festival Seni dan Budaya Daerah	2025	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2026	Tidak ada	DISBUDPA REKRAF	1. Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat <i>event</i> internasional dilaksanakan 2. Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans 3. Dinas Koperasi &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksanaan <i>event</i> internasional 4. Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra <i>event-event</i> -pasca <i>event</i> internasional; publikasi kegiatan 5. Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan <i>Event</i> dan ketertiban penyelenggaraan acara	1. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Proyek Strategis Provinsi; 2. Pelatihan dan pembinaan Sanggar Kesenian Daerah; 3. Pendataan/Inventarisasi potensi Festival Seni Budaya di masing-masing daerah; 4. Memastikan kontinuitas pelaksanaan Festival Seni Budaya di masing-masing daerah 5. Promosi pelaksanaan Festival Seni-Budaya; 6. Penyusunan Kalender Budaya
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
51. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan	2025	Tidak ada		Dinas Pendidikan (Koordinasi rekomendasi satuan	Replikasi pelaksanaan
	2026	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat	2027	Tidak ada		pendidikan yang membutuhkan pembekalan terhadap edukasi wawasan kebangsaan) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	kegiatan Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten/kota
	2028	-Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konflik di Sumatera Utara di Tahun 2028 -Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2028 -Monitoring dan Evaluasi Tahun 2028 •Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kota Binjai			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
PP 17. TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB					
52. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (Genk Motor).	2025	Tidak ada	Satpol PP	Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota terkait dukungan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2029	Tidak ada			personel dalam pelaksanaan kegiatan. Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba di Kab/Kota)
	2030	Tidak ada			
53. Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemindahan Gembong Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan	2025	Tidak ada		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perhubungan (pengaturan lalu lintas untuk pemindahan gembong narkoba) Satpol PP (pendampingan saat pemindahan gembong narkoba)	Penguatan pencegahan narkoba di pemerintahan daerah
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan dukungan program terhadap terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2025-2029, seperti yang tersajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Dukungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025-2029.

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Perumahan dan Pemukiman													Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Koordinator)	Dinas PKP (OPD yang mengampu Perumahan)	APBN, BUMN, SWASTA
	- Pembangunan 3 Juta Rumah			TARGETING / PENERIMA MANFAAT												

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				- Utilisasi data makro (Susenas) dan data mikro (Regsosek) untuk mengembangkan housing queue atau antrian perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		160.000.000	400.000.000	440.000.000	484.000.000	532.400.000	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Koordinator)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBD
						Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			160.000.000	400.000.000	440.000.000	484.000.000	532.400.000	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Koordinator)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
							Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten / Kota			400.000.000	440.000.000	484.000.000	532.400.000	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Koordinator)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBD
				PROGRAMMING												
				- Memastikan keterpaduan program perumahan dengan penyediaan infrastruktur dasar permukiman yaitu air												

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				minum, air limbah, persamoahan, jalan dan drainase lingkungan, listrik, dan sistem transportasi publik												
				- Pemanfaatan lahan yang belum dioptimalisasi	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Spuluh) Ha	Perbaikan rumah tidak layak huni		2.400.000.000	2.400.000.000	2.640.000.000	2.904.000.000	3.194.400.000	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Koordinator)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
							Pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh			324.509.296	356.960.225	392.656.248	431.921.873	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Koordinator)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBD
							Pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh			400.000.000	440.000.000	484.000.000	532.400.000	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Koordinator)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBD
				STANDAR KEANDALAN BANGUNAN												
				- Mempersiapkan regulasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)												

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				untuk penerbitan PBG dan SLF												
				KESESUAIAN DENGAN TATA RUANG												
				- Memanfaatkan tools tata ruang untuk pengembangan perumahan ke depan dan pengendalian pembangunan	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Kota	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap pertumbuhan dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permuk	2.600.000,00	2.684.753.856	2.953.229.242	3.248.552.166	3.573.407.382	3.930.748.121	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Koordinator)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
							iman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha									
2	Makan Bergizi Gratis (MBG)													Badan Gizi Nasional (Koordinator)	Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dins Pendidikan, Dinas Kesehatan	APBN, SWASTA
	- Program Makan Bergizi			Kesehatan												

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				- Pengukuran antropometri (tinggi badan, lingkaran lengan atas)	PROGRAM PENUNHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG ANDAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	48.060.000	923.000.000	950.690.000	979.210.700	1.008.587.021	1.038.844.632	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD
				- Sertifikasi hygiene dan sanitasi satuan pelayanan	PROGRAM PENUNHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.555.888.209	459.000.000	472.770.000	486.953.100	501.561.693	516.608.544	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota										
				- Inspeksi Kesehatan lingkungan di tingkat satuan pelayanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	181.460.625	81.000.000	83.430.000	85.932.900	88.510.887	91.166.214	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	h Kabupaten /Kota										
				- Pemeriksaan kualitas sumbe air bersih												APBD
				Pendidikan												APBD
				- Penyediaan Infrastruktur sanitasi, air bersih, fasilitas transit, penyaluran makanan	PROGRAM PENGLOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.000.000,00	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Dinas Pendidikan	APBD
					PROGRAM PENGLOLAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	500.000.000	510.000.000	520.000.000	530.000.000	540.000.000	550.000.000	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Dinas Pendidikan	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					PENDIDIKAN	Meningkatkan Pertama	Sekolah									
				- Penyelaras an waktu pemberian makanan pada siswa dan santri												APBD
				- Renovasi dapur (satuan pendidikan yang menjadi SP)												APBD
				- Pelatihan tenaga pendidik untuk penyelenggaraan MBG	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0	300.000.000	305.000.000	310.000.000	315.000.000	320.000.000	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Dinas Pendidikan	APBD
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan	Sosialisasi dan Advokasi	0	75.000.000	80.000.000	85.000.000	90.000.000	95.000.000	Kementerian Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					GEL OLAHAN PENDIDIKAN	dikan Sekolah Menengah Pertama	Kebijakan Bidang Pendidikan							dan Menengah		
				- Pelibatan orang siswa dalam perilaku hidup sehat dan pemberian makan bergizi												
				- Penguatan peran kantin sehat												
				Pangan dan Pertanian												
				- Penjaminan ketersediaan stok dan keragaman												

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				bahan pangan local yang memenuhi standar mutu gizi												
				- Penjaminan keamanan bahan pangan segar												
				- Pengawasan keamanan makanan(uji keamanan pangan)												
				Infrastruktur Dasar												
				- Konektivitas	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Pembangunan jalan	75.000.000,00	75.000.000.000,00	86.250.000.000,00	99.187.500.000,00	114.065.625.000,00	131.175.468.750,00	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DAU

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	2.000.000,00	2.000.000.000,00	2.300.000.000,00	2.645.000.000,00	3.041.750.000,00	3.498.012.500,00	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DAU
					Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jembatan	2.000.000,00	2.000.000.000,00	2.300.000.000,00	2.645.000.000,00	3.041.750.000,00	3.498.012.500,00	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DAU
					Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	20.000.000,00	20.000.000.000,00	23.000.000.000,00	26.450.000.000,00	30.417.500.000,00	34.980.124.999,00	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DAU
					Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengelolaan leger jalan	70.000.000,00	70.000.000.000,00	80.500.000.000,00	92.575.000.000,00	106.461.250,00	122.430.438,00	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DAU

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Survey kondisi Jalan/Jembatan	150.000.000,00	150.000.000,00	172.500.000,00	198.375.000,00	228.131.250,00	262.350.938,00	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DAU
					Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jembatan	1.000.000,00	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00	1.322.500.000,00	1.520.875.000,00	1.749.006.250,00	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DAU
					Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin jalan	2.500.000,00	2.500.000.000,00	2.875.000.000,00	3.306.250.000,00	3.802.187.500,00	4.372.515.625,00	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DAU
					Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin jembatan	1.000.000,00	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00	1.322.500.000,00	1.520.875.000,00	.749.006.250,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DAU

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				- Telekomunikasi												
				- Listrik dan bahan bakar												
				- Pengelolaan limbah												
				Satuan Pelayanan												
				- Penyediaan/pembangunan SP												
				- Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih untuk SP												
				Pemberdayaan Masyarakat, Petani, dan Peternak Lokal												

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				- Pemberdayaan dan korporatisasi petani, peternak, dan nelayan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	73.243.043	100.000.000	110.000.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	APBD
				- Pemberdayaan dan korporatisasi	Program Pengelolaa	Pembdayaan Nelay	Pengembangan Kapasit	-	-	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	Kementerian Kelautan dan	Dinas Lingkungan Hidup	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				si petani, peternak, dan nelayan	n Perikanan Tangkap	an Kecil dalam Daerah Kabupaten /Kota	as Nelayan Kecil							Perikanan	dan Perikanan	
				- Pembinaan dan peningkatan kapasitas BUMDES, UMKM, dan koperasi	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	6.300.000	48.237.392	93.230.452	102.553.497	112.808.847	124.069.732	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				- Pembinaan dan peningkatan kapasitas BUMDES, UMKM, dan koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keannggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota	Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang , Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
							Daerah Kabupaten/Kota									
						Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Fasilitas Penuh Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						m untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit	Pengutan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	-	-	30.000.000	30.600.000	31.212.000	31.836.240	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota										
						Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	-	-	35.000.000	35.700.000	36.414.000	37.142.280	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan	APBD	

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
							ya Daerah Kabupaten/Kota									
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simp an Pinjam/Unit Simp an Pinjam Koperasi yang Wilayah Kean ggota anya dalam 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	320.000.000	18.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						(Satu) Daerah Kabupaten /Kota										
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI	Pendidikan dan Latihan Perkerasan Bagi Koperasi yang Wilayah Keannggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINGKUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/Kota	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan	APBD
							Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
							yaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									
							Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Kegiatannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan	APBD
							Sosialisasi bagi kelompok masyarakat di	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
							wilayah adat untuk membentuk koperasi									
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembag	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	22.108.000	25.000.000	50.000.000	51.000.000	52.020.000	53.060.400	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						aan dan Koordinasi dengan Para Pemanngku Kepe ntingan										
							Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	30.000.000		50.000.000	51.000.000	52.020.000	53.060.400	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan	APBD
							Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengu mbangan Usaha Mikro	150.000.000	25.000.000	50.000.000	51.000.000	52.020.000	53.060.400	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
							Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemanngku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	-		50.000.000	51.000.000	52.020.000	53.060.400	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan	APBD
							Fasilitasi Sertifikasi dan Standar disasi Usaha Mikro	-		50.000.000	51.000.000	52.020.000	53.060.400	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan	APBD
					PROGRAM PEMBANGUNAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orient	Pengembangan Usaha Mikro	-		25.000.000	25.500.000	26.010.000	26.530.200	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						asi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil										
							Penum buhan dan Pengembangan Kewirausahaa n	-		25.000.000	25.500.000	26.010.000	26.530.200	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan an	APBD
							Produk si dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusi a, serta Desain	41.000.000	50.000.000	75.000.000	76.500.000	78.030.000	79.590.600	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan an	APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
							dan Teknologi									
				terkait pembiayaan, kemampuan manajemen, pengolahan logistik bahan pangan, pengadaan barang/jasa												
				sebagai penyedia komoditas dan pengelola program												
				Ketersediaan Data												
				'- Sumber data penerima MBG (sekolah,												

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				madrasah, pesantren, Posyandu)												
3	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan															
	- Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas			Update data kondisi satuan pendidikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	120.000.000	125.000.000	130.000.000	135.000.000	140.000.000	145.000.000	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Koordinator)	Dinas Pendidikan	APBN, APBD
	- Pembangunan dan Penyelenggaraan sekolah Unggul			Dukungan penyediaan lahan bagi sekolah unggul (pada daerah yang	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan	20.000.000	22.500.000	25.000.000	27.500.000	30.000.000	32.500.000	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Dinas Pendidikan	APBN, APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				sesuai dengan kriteria lokasi prioritas)	DIDIKAN	Pertama	n di Bidang Pendidikan									
	- Pembangunan Rumah sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten / Kota			Pembangunan RS Lengkap Berkualitas dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses										Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBN, APBN (DAK)
				- Menyiapkan ketersediaan infrastruktur dan SDM Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERSONAL	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	500.000.000	625.000.000	750.000.000	1.500.000.000	1.650.000.000	Kementerian Kesehatan	RSUD Kotapinang	APBN (DAK), APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					NGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota										
							Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Kementerian Kesehatan	RSUD Kotapinang	APBN (DAK), APBD
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	3.355.342.000	852.554.976	895.182.724	939.941.861	986.938.954	1.036.285.901	Kementerian Kesehatan	RSUD Kotapinang	APBN (DAK), APBD
				- Menyiapkan anggaran untuk operasional layanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAY	Penyediaan Layanan Kesehatan	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	Kementerian Kesehatan	RSUD Kotapinang	APBN (DAK), APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					AKESEHATAN PERORANGANDAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis												
				- Menyusun dan menetapkan kebijakan untuk mendorong pelaksanaan dan tata												

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				kelola Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada wilayah kerja												
				- Membina fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas dan Labkesmas) untuk pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di wilayahnya , termasuk												
				Penyediaan BMHP	PROGRAM PEMENUHAN UPAY	Penyediaan Fasilitas Pelayanan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan	2.571.409.861	2.891.926.793	3.181.119.472	3.499.231.419	3.849.154.560	4.234.070.016	Kementerian Kesehatan	RSUD Kotapinang	APBN (DAK), APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					AKESEHATAN PERORANGGANDAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
				Penyediaan SPApendukung	PROGRAM PENUNJANGAN UPAYA KESEHATAN PERORANGGANDAN	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	883.540.078	1.750.000.000	2.012.500.000	2.213.750.000	2.545.812.500	2.393.063.750	Kementerian Kesehatan	RSUD Kotapinang	APBN (DAK), APBD

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	an Daerah Kabupaten /Kota										
				Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan												
				- Mengoordinasikan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada wilayah kerja												

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				- Menyusun rekomendasi tindak lanjut terhadap temuan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada wilayah kerja												
	- Program Penuntasan TBC			Penuntasan Kasus TBC												
				- Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM untuk mencapai target penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN KEPERAWATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujuk	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	146.467.656	351.650.000	362.199.500	373.065.485	384.257.450	395.785.173	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBN (Rupiah Murni), APBN (PHLN) APBN (DAK), lainnya

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					ORANG DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	an Tingkat Daerah Kabupaten /Kota										
				- Melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat;	PROGRAM PENUNJANGAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.915.120	86.000.000	88.580.000	91.237.400	93.974.522	96.793.758	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBN (Rupiah Murni), APBN (PHLN) APBN (DAK), lainnya

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					NMAS YARAKAT											
				- Memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan dilaporkan dalam sistem informasi TBC;												
				- Memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan												
				- Mitigasi dampak psikososial												

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya;												
				- Menyusun dan menetapkan kebijakan kepala daerah untuk mendorong pasien TBC menjalankan pengobatan sampai selesai												
				- Mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan TBC di daerah;												

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				- Menyediakan pendanaan penanggulangan TBC dari beberapa sumber												
4	Swasembada Pangan															
	- Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat													Kementerian Kehutanan (Koordinator)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	APBN, APBD, Swasta
	- Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional			- Memastikan status lahan (kepemilikan lahan) yang akan diintervensi												

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				- Memastikan ketersediaan petani dan pemberdayaan penyuluh pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	Kementerian Pertanian , Swasta	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Swasta, BUMN, APBN, APBD, Lainnya, KPBU
				- Memberikan dukungan atas pembangunan/rehabilitasi daerah irigasi di kewenangan provinsi/kab/kota	PENGLOAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PENGEMBANGAN PENLOAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDE	OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	100.000.000	200.000.000	230.000.000	264.500.000	304.175.000	349.801.250	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	APBN, KPBU

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						R PADA DAERAH IRRIGASI YANG LUAS NYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				- Komitmen keberlanjutan pengelolaan												

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	- Peningkatan Produksi Daging, Sapi, dan Susu Sapi															
5	Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital															
	- Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu													Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Koordinator)	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBN, APBD
	- Penyediaan Peta Dasar													Badan Informasi Geospasial	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBN (PHLN), APBN

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Skala Besar (1:5000) Seluruh Wilayah Indonesia															
	- Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi													Kementerian Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia		BUMN, APBN
6	Pengembangan KEK Sei Mangkei															
	- BUPP Kek Sei Mangkei, Hilirisasi, Industrialisasi, Transformasi Digital															

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
7	Bioethanol (Berbasis Tebu)													Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Swasembada Energi		
8	Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa dan Rumput Laut															
	- Hilirisasi, Industrialisasi, Transformasi Digital															

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan turut memberikan dukungan program terhadap terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, seperti yang tersajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6 Tabel Dukungan Program terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029
	Program Prioritas	Program Daerah
1	Pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat lokal	• Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik • Memperkuat ekosistem pelatihan keterampilan • Perluasan akses dan pemerataan kesempatan belajar • Pemberian bantuan kewirausahaan bagi UMKM dan koperasi
2	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya Dan Berprestasi Bentuk Intervensi:	• Peningkatan partisipasi aktif perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam dunia kerja formal dan informal • Mendorong kewirausahaan sosial, memperkuat keterlibatan perempuan, pemuda dan penyandang

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029
	Program Prioritas	Program Daerah
		disabilitas dalam bidang seni dan olahraga
3	Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu.	• Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan fasilitas penunjang kesehatan lainnya. • Peningkatan Kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat. • Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kompeten. • Peningkatan sarana kefarmasian yang memenuhi standar • Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
4	Penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah.	• Peningkatan kemudahan investasi. • Peningkatan investor yang berinvestasi • Peningkatan Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029
	Program Prioritas	Program Daerah
		• Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal.
5	Pengembangan ekonomi Hijau dan Biru.	• Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah. • Peningkatan Kualitas Sistem Drainase Perkotaan. • Terlaksananya pengelolaan perikanan tangkap. • Terlaksananya pengelolaan perikanan budidaya. • Terlaksananya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6	Ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal.	• Peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian. • Peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian. • Peningkatan kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian.
7	Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan	• Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029
	Program Prioritas	Program Daerah
	partisipasi masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/desa/kelurahan dan pengusaha lokal).	• Pemasaran Pariwisata • Tersedianya sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8	Ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi.	• Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual • Digitalisasi UMKM dan IKM
9	Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran	• Program pasar murah bergerak • Peningkatan cakupan jaminan sosial melalui pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
10	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.	• Peningkatan kualitas pelayanan publik • Peningkatan kapasitas auditor internal dan pengawasan pemerintahan dilakukan secara intensif • Penguatan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029
	Program Prioritas	Program Daerah
		Digitalisasi sistem pemerintahan
11	Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat.	- Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Digitalisasi administrasi layanan publik
12	Infrastruktur Dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi Yang Langsung Berdampak Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal.	- Peningkatan konektivitas antar wilayah - Perbaikan dan penataan jaringan irigasi - Penataan kawasan permukiman kumuh
13	Pengembangan Sistem Logistik Dan Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Daya Saing.	Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Darat
14	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana.	Pengembangan sistem pengolahan air limbah
15	Melanjutkan pembangunan berbasis desa	- Penguatan ekonomi perdesaan - Penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029
	Program Prioritas	Program Daerah
		sebagai motor penggerak ekonomi lokal
15	Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran dan rukun.	• Memperkuat dialog lintas komunikasi untuk harmoni sosial • Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) • Pemberian bantuan pembangunan dan renovasi rumah ibadah
17	Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib.	• Penguatan kemitraan stakeholder untuk kamtibmas • Pemberantasan narkoba

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Labuhanbatu Selatan diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

Tabel 4.7 Indikator Sasaran Pembangunan

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,11	76,80	77,60	78,40	79,20	81,00	84,80	
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	5,10	5,30	5,70	6,20	6,80	7,10	
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,24	3,20	3,18	3,07	3,02	2,88	2,76	
4.	Tingkat Kemiskinan	%	7,73	7,2	6,5	5,8	5,1	4,5	4,0	
5.	Indeks Gini	%	0,212	0,202	0,195	0,190	0,185	0,180	0,175	

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Ukuran keberhasilan RPJMD dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2025-2029 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan diharapkan dapat menekan angka kemiskinan. Pembangunan SDM unggul berkarakter dan harmonisasi sosial yang kondusif diupayakan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis terus diupayakan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dalam proses pembangunan di Labuhanbatu Selatan periode 2025-2029.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan IKU dan target capaian periode 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,11	76,80	77,60	78,40	79,20	81,00	84,80	
2.	Prevalensi Stunting	Persen	22	20,5	19	17,5	16	14,5	13	
3.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	Persen	90,75	91,05	92,75	93,50	94,25	95,30	96,55	
4.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	92,96	99	99	99	100	100	100	
5.	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,71	73,01	73,31	73,61	73,91	74,21	74,51	
6.	Rata-rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55.03	57.03	60.03	62.53	65.03	67.53	70.03	
7.	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65.04	66.14	67.24	68.34	69.44	70.54	71.64	
8.	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	49.89	52.79	55.69	58.59	61.49	64.39	67.29	
9.	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	59.22	60.72	62.22	63.72	65.22	66.72	68.22	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	
11.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,53	13,73	13,93	14,13	14,33	14,53	14,73	
12.	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,73	7,2	6,5	5,8	5,1	4,5	4,0	
13.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	74,78	75,95	76,13	76,29	76,32	76,52	76,71	
14.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	40,89	42,45	43,97	44,48	47,00	47,52	49,04	
15.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,75	0,80	0,90	1,20	1,88	2,54	3,20	
16.	PDRB per Kapita	Rp. Juta	124,52	125,72	135,67	145,52	154,25	160,13	174,46	
17.	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Persen		18	20	21,5	23	24,8	26,5	
18.	Indeks Inovasi Daerah	Poin/Skor	18,02	20	23	26	29	32	34	
19.	Tingkat Inflasi	Persen	3,36	3,35	3,35	3,34	3,34	3,33	3,33	
20.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,24	3,18	3,12	3,07	3,02	2,88	2,76	
21.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,89	5,10	5,30	5,70	6,20	6,80	7,10	
22.	Gini Rasio	Poin	0,212	0,202	0,195	0,190	0,185	0,180	0,175	
23.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	10,84	11,05	12,75	13,45	14,14	15,84	16,54	
24.	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	30,15	30,50	31,10	31,50	31,90	32,30	32,70	
25.	Persentase Desa Mandiri	Persen		1,40	1,92	1,92	3,85	3,85	5,77	
26.	Tingkat Partisipasi	Persen	54	55	56	57	58	59	60	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Angkatan Kerja Perempuan									
27.	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin/Skor	75,11	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	83,00	
28.	Indeks Pelayanan Publik	Poin/Skor	87,2	89	91	93	95	97	99	
29.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin/Skor	52.97	70.00	73.00	76.00	80.00	83.00	85.00	
30.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
31.	Rasio Pajak Terhadap PDRB	Persen	2,91	3,10	3,22	3,34	3,46	3,58	3,70	
32.	Indeks Akses Keuangan Daerah		2,26	2,39	2,45	2,52	2,58	2,64	2,68	
33.	Persentase Perda/Perkada Yang Ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
34.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	50	52	54	56	58	60	62	
35.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin/Skor	70,28	76,21	76,38	76,55	76,72	76,89	77,07	
36.	Indeks Risiko Bencana	Poin/Skor	13.120	13.120	12.152	12.656	11.876	11.256	11.678	
37.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen		12	13,2	17	21	26	32	
38.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen		9	11	14,5	18,5	23	28	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
39.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	70	72	74	76	78	80	82	
40.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin/Skor	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	
41.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin/Skor	71.63	71.65	72	72.5	73	73.5	80.1	
42.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	58.84	59	60	62	64	67	70	
43.	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	Persen	22	25	30	35	40	45	50	
44.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	88	88,5	89	89,5	90	90,5	91	
45.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,93	2,10	2,22	2,34	2,45	2,55	2,65	
46.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,98	89,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
47.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76,22	77	78	79	81	83	85	
48.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	21,49	23	24	25	27	32	35	
49.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	71,2	73,2	75,4	77,5	79,8	82	84,4	

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan target capaian periode 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.9 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						PD Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undermourishment)	Persen	6,65	5,50	4,8	4,2	3,8	3,2	2,5	PD Pengampu Urusan Ketahanan Pangan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin/Skor	70,28	76,21	76,38	76,55	76,72	76,89	77,07	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hdup
Rumah Tangga dengan akses Sanitasi Aman	Persen	N/A	61	63	64	65	66	68	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	N/A	12	13,2	17	21	26	32	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hdup
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen	N/A	9	11	14,5	18,5	23	28	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hdup
Konsumsi listrik per kapita (kWh)	kWh	N/A	1.000	1.100	1.200	1.350	1.500	1.650	
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Persen	N/A	76	78	81	84	87	90	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Cakupan Akses Air Minum Layak	Persen	22	25	30	35	40	45	50	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin/Skor	13.120	13.120	12.152	12.656	11.876	11.256	11.678	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan

									Keterangan Umum (BPBD)
Persentase Penurunan Emisi GRK (%)									PD Pengampu Urusan Lingkungan Hdup
a) Kumulatif	Persen	N/A	3	4	5,5	7	8,5	10	
b) Tahunan	Persen	N/A	17	18	19	20	21	22	
B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,11	76,80	77,60	78,40	79,20	81,00	84,80	Kabupaten/BPS
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,71	73,01	73,31	73,61	73,91	74,21	74,51	PD Pengampu Urusan Kesehatan (DINKES)
Angka Kematian Ibu	100.000/ KL	38,14	32,14	28,24	24,64	22,14	20,64	20,14	PD Pengampu Urusan Kesehatan (DINKES)
Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0,89	0,77	0,65	0,54	0,46	0,39	0,30	Angka Kematian Balita
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	22	20,5	19	17,5	16	14,5	13	PD Pengampu Urusan Kesehatan (DINKES)
Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	90,75	91,05	92,75	93,5	94,25	95	96,55	PD Pengampu Urusan Kesehatan (DINKES)
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	5,37	10,30	15,45	20,9	25,35	30,8	31,25	PD Pengampu Urusan Kesehatan (DINKES)
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	92,96	99	99	99	100	100	100	PD Pengampu Urusan Kesehatan (DINKES)
Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	51,30	55	60	65	70	75	80	PD Pengampu Urusan Kesehatan (RSUD)
Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	55.03	57.03	60.03	62.53	65.03	67.53	70.03	PD Pengampu Urusan Pendidikan

Rata-rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65.04	66.14	67.24	68.34	69.44	70.54	71.64	
Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	49.89	52.79	55.69	58.59	61.49	64.39	67.29	
Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	59.22	60.72	62.22	63.72	65.22	66.72	68.22	
Rata-Rata lama sekolah	Tahun	9,19	9,50	10,14	10,60	11,10	11,40	11,80	PD Pengampu Urusan Pendidikan
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,53	13,73	13,93	14,13	14,33	14,53	14,73	PD Pengampu Urusan Pendidikan
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Persen	N/A	8,8	9,2	9,8	10,4	11	11,6	PD Pengampu Urusan Pendidikan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	71.63	71.65	72	72.5	73	73.5	80.10	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintah Daerah	Nilai	21.49	23	24	25	27	32	35	PD Pengampu Urusan Kearsipan
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	Persen	N/A	52	55	57	59,5	62	65	PD Pengampu Urusan Ketenagakerjaan
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,73	7,2	6,5	5,8	5,1	4,5	4	PD Pengampu Urusan Sosial
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	74,78	75,95	76,13	76,29	76,32	76,52	76,71	PD Pengampu Urusan Ketenagakerjaan
Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Persen	N/A	20	25	27	29,5	32	35	PD Pengampu Urusan Ketenagakerjaan
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin/Skor	55	57	59	61	63	65	67	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin/Skor	78,00	80,00	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	PD Pengampu Unsur Pemerintahan Umum (BAKESBANGPOL)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin/Skor	61.81-61,97	62.47-62,98	63.53-63,80	64.37-64,90	65.16-65,75	65.89-66,10	66.59-67,15	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Ketimpangan Gender	Persen	0,524	0,510	0,490	0,470	0,460	0,440	0,420	PD Pengampu Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,24	3,18	3,12	3,07	3,02	2,88	2,76	PD Pengampu Urusan Ketenagakerjaan
Gini Rasio	Poin	0,212	0,202	0,195	0,190	0,185	0,180	0,175	Kabupaten/BPS
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	84.5	84.6	84.7	84.8	84.9	85	85.5	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Pertanahan
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	71,2	73,2	75,4	77,5	79,8	82	84,4	PD Pengampu Urusan Pangan
Nilai Tukar Petani	Indeks	120.45	120.55	120.60	120.65	120.70	120.75	120.80	PD Pengampu Urusan Pertanian
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH									
Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	40,89	42,45	43,97	44,48	47	47,52	49,04	PD Pengampu Urusan Perindustrian
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,75	0,80	0,90	1,20	1,88	2,54	3,20	PD Pengampu Urusan Pariwisata
Jumlah Tamu Wisatawan Macanegara (Hotel Berbintang)	Jumlah	N/A	900	1.050	1.250	1.500	1.800	2.100	PD Pengampu Urusan Pariwisata
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	N/A	0,40	0,52	0,58	0,65	0,73	0,82	PD Pengampu Urusan Pariwisata

Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persen	N/A	10	13	14,5	16	17,5	19	PD Pengampu Urusan Perindustrian
Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	9,5	10	11	12,2	13,5	15	16,8	PD Pengampu Urusan Perindustrian
Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	N/A	10	20	21,5	23	24,8	26,5	PD Pengampu Urusan Koperasi
Return on Asset (RoA) BUMD	Persen	N/A	1	2	2,5	3,1	3,8	4,5	
Proposi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	N/A	39	41	43,5	46	48,5	51	PD Pengampu Urusan Ketenagakerjaan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	54	55	56	57	58	59	60	PD Pengampu Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indeks Inovasi Daerah	Persen	18,02	20	23	26	29	32	34	PD Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan
Jumlah Investasi	Triliun Rupiah	3.447.28 8.045.79 2	1.0165 18.000 .000	1.067. 343.90 0.000	1.120. 711.09 5.000	1.176. 746.64 9.750	1.232. 583.98 2.238	1.297 .363. 181.3 49	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	10,84	11,05	12,75	13,45	14,14	15,84	16,54	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Ekspor Barang dan Jasa	Persen	26,32	27,75	28	30,05	32,03	35,03	37,03	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	0,31	0,55	0,71	0,95	1,31	1,55	1,71	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Rumah Tangga dengan akses hunian layak terjangkau, dan berkelanjutan	Persen	70	72	74	76	78	80	82	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	88	88,5	89	89,5	90	90,5	91	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase desa mandiri	Persen	N/A	1,40	1,92	1,92	3,85	3,85	5,77	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rasio pajak daerah terhadap PDRB	Persen	2,91	3,10	3,22	3,34	3,46	3,58	3,70	PD Pengampu Urusan Keuangan
Tingkat Inflasi	Persen	3,36	3,35	3,35	3,34	3,34	3,33	3,33	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SETDAKAB- BAG.PEREKONOM IAN dan SDA)
Indeks Akses Keuangan Daerah	Persen	2,26	2,39	2,45	2,52	2,58	2,64	2,68	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SETDAKAB- BAG.PEREKONOM IAN dan SDA)
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,89	5,10	5,30	5,70	6,20	6,80	7,10	Kabupaten/BPS
PDRB Per Kapita	Rp. Juta	124,52	125,72	135,67	145,52	154,25	160,13	174,4 6	Kabupaten/BPS
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	N/A	13,5	14,8	15,7	16,9	17,8	20,2	Kabupaten/BPS
Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen	N/A	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	Kabupaten/BPS
Total Kredit/PDRB	Persen	N/A	1,24	1,42	1,61	1,79	1,97	2,12	Kabupaten/BPS
Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	PD Pengampu Urusan Keuangan
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Perhubungan

Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	28	28	28	28	29	30	30	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Indeks Pembangunan Statistik	Poin	N/A	2.1	2.7	3	3.5	4	4.3	PD Pengampu Urusan Statistik
Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	100	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Persandian
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	492,85	516,1	525,15	530,54	538,8	546,99	553,06	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Perencanaan
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76.22	77	78	79	81	83	85	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persen	10	10	12	15	20	22	25	PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Nilai SAKIP yang meningkat	Nilai	50,36	60,10	62,50	65,20	70,05	75,20	80,15	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SETDAKAB-BAG.ORGANISASI)
Indeks Pemerataan Guru	Ratio	66,94	65,02	63,59	61,77	59,89	58,21	55,92	PD Pengampu Urusan Pendidikan
D. ASPEK PELAYANAN UMUM									
Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Poin/Skor	N/A	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	83,00	PD Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan

Indeks Reformasi Birokrasi	Poin/Skor	52,97	70	73	76	80	83	85	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SETDAKAB- BAG.ORGANISASI)
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	70	75	80	85	90	90	95	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SETWAN)
Indeks Reformasi Hukum	Poin/Skor	87,98	89,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SETDAKAB- BAG.HUKUM)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin/Skor	1,93	2,10	2,22	2,34	2,45	2,55	2,65	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Komunikasi dan Informasi
Indeks Pelayanan Publik	Poin/Skor	87,2	89	91	93	95	97	99	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SETDAKAB- BAG.ORGANISASI)
Indeks Integritas Nasional/Sistem Penilaian Integritas (SPI)	Poin/Skor	74,92	75	76	77	78	79	80	PD Pengampu Unsur Pengawasan
Persentase penegakan hukum daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SETDAKAB- BAG.HUKUM)
Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM	Persen	81,7	84	87	90	93	95	98	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan

									Pemerintahan (SETDAKAB- BAG.HUKUM)
Indeks Demokrasi Indonesia	Poin/Skor	75,11	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	83,00	PD Pengampu Unsur Pemerintahan Umum (BAKESBANGPOL)
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	50	52	54	56	58	60	62	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Keteriban Umum (SATPOL-PP)
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Unsur Kewilayahan (KECAMATAN)
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Unsur Kewilayahan (KECAMATAN)

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Kunci

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
A. PENDIDIKAN									
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,19	9,50	10,14	10,60	11,10	11,40	11,80
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,53	13,73	13,93	14,13	14,33	14,53	14,73

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
3	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	55.03	57.03	60.03	62.53	65.03	67.53	70.03
4	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65.04	66.14	67.24	68.34	69.44	70.54	71.64
5	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	49.89	52.79	55.69	58.59	61.49	64.39	67.29
6	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	59.22	60.72	62.22	63.72	65.22	66.72	68.22
7	Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS)	Persen	74,22	77,26	80,30	83,26	86,23	89,20	92,17
8	Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (APS)	Persen	98,92	99,17	99,42	99,67	99,92	100,00	100,00
9	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam	Persen	12,73	13,49	14,25	15,01	15,78	16,54	17,30

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Pendidikan kesetaraan (APS)								
B. KESEHATAN									
1	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	Persen	90,75	91,05	92,75	93,50	94,25	95	96,55
2	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	5,37	10,30	15,45	20,90	25,35	30,80	31,25
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,71	73,01	73,31	73,61	73,91	74,21	74,51
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	92,96	99	99	99	100	100	100
5	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	38,14	32,14	28,24	24,64	22,14	20,64	20,14
6	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0,89	0,77	0,65	0,54	0,46	0,39	0,30
7	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat	Persen	22	20,5	19	17,5	16	14,5	13

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	pendek) pada balita								
8	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	N/A	45	60	70	85	90	95
9	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	N/A	55	65	75	85	90	100
C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	N/A	61	63	64	65	66	68
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	76	78	81	84	87	90
3	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	30,15	30,50	31,10	31,50	31,90	32,30	32,70
4	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	60	70	71	72	72	73	73

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
5	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Dari Abrasi dan Banjir Rob	Persen	20	21	22	23	23	24	25
6	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persen	20	20	25	26	28	30	32
7	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persen	50	51	52	53	54	55	55
8	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persen	50	51	51	52	52	53	54
9	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	50	50	52	54	55	56	57
10	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persen	60	62	66	68	69	70	71
11	Persentase Penataan	Persen	56	57	57	60	62	63	64

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Bangunan dan Lingkungan								
12	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	31,76	32,00	32,40	33,10	33,70	34,40	35,50
13	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persen	20	20	25	30	32	33	34
D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	70	72	74	76	78	80	82
2	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	N/A	5	10	10	10	10	10
3	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	N/A	5	10	10	10	10	10
4	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang	Persen	30	30	30	40	50	60	70

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Ditangani								
5	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	90	65	50	50	50	50	50
6	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	7,4	7,5	8	8,5	9	9,5	10
7	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persen	40	50	60	70	80	90	100
E. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	50	52	54	56	58	60	62
2	Persentase PERDA dan PERKADA yang	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	ditegakkan								
3	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan Layanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Risiko Bencana	Poin/Skor	13.120	13.120	12.152	12.656	11.876	11.256	11.678
7	Persentase Penanganan Tanggap Bencana Darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
F. SOSIAL									

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
1	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	40	40	40	40	45	45	45
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	15	18	18	20	22	22	22
3	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	30	32	34	36	38	40	43
4	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persen	30	30	30	30	30	30	30
5	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	N/A	50	60	65	70	75	80

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
A. TENAGA KERJA									
1	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	46,66	100	100	100	100	100	100
2	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-
3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen	66,67	71,27	71,43	72,73	75	76,92	78,57
4	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persen	46,32	58,33	59,02	60,61	61,43	65,79	68,75
5	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang	75	75,95	76,13	76,29	76,32	76,52	76,71
6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	74,78	75,95	76,13	76,29	76,32	76,52	76,71

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
7	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	N/A	39	41	43,5	46	48,5	51
B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	54	55	56	57	58	59	60
2	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,524	0,510	0,490	0,470	0,460	0,440	0,420
3	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,88	89.50	90.00	90.50	91.00	91.50	92.00
4	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	94,87	95,55	96,00	96,55	97,00	97,55	98,00
5	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Indeks	60,75	90	92	93	94	95	96
6	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	4,75	5	5,22	5,25	5,29	5,66	5,69
7	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	80	80	80	80	80	80	80
8	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan	Indeks	30	30	30	30	30	30	30

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Hak Anak Sesuai								
9	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	20	20	20	20	20	20	20
10	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
11	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	95	95,55	96	96,55	97	97,55	98
C. PANGAN									
1	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	82	82,5	83	83,5	84	84,5	85
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelance of Undermourishment)	Persen	6,65	5,50	4,80	4,20	3,80	3,20	2,50
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	4	3	2,5	2	1,5	1	0,5

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
D. PERTANAHAN									
1	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
E. LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin/Skor							
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	70,00	75,80	76,00	76,20	76,40	76,60	76,80
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,47	82,95	83,15	83,35	83,55	83,75	83,95
4	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	27,88	64,44	64,51	64,58	64,65	64,72	64,79
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	N/A	12	13,2	17	21	26	32
6	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	N/A	9	11	14,5	18,5	23	28

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
7	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	N/A	65	70	75	80	90	100
8	Persentase RTH	Persen	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
9	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	75	80	82	84	86	88	90
10	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	N/A	25	30	35	40	45	50
11	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	5	5	10	15	20	25	30
12	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	N/A	5	5	10	15	20	25
13	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Pidana Lingkungan Hidup								
14	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin/Skor	8,22	8,5	9	10	15	20	25
F. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Poin/Skor	84,5	84,6	84,7	84,8	84,9	85	85,5
2	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	0,6	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	25	30	32	34	36	40	50
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Persen	98	98	98	98	98	98	98
5	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Persen	98	98	98	98	98	98	98
6	Persentase Akta Perkawinan yang	Persen	98	98	98	98	98	98	98

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan								
7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Persen	98	98	98	98	98	98	98
8	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	90	90	90	90	90	90	90
9	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	N/A	1,40	1,92	1,92	3,85	3,85	5,77
2	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persen	3,58	3,58	7,69	11,54	15,38	19,23	23,08
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Kemasyarakatan Desa (LKD)								
H. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin/Skor	61.81-61,97	62.47-62,98	63.53-63,80	64,37-64,90	65,16-65,75	65,89-66,10	66,59-67,15
2	Total Fertility Rate (TFR)	Jiwa	2,67	2,65	2,63	2,61	2,59	2,57	2,55
3	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun	20	19.3-18,3	18.2-17,2	17.1-16,1	15,00-14,00	13,00-12,00	11,00-10,00
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persen	44.78	46.78	49.30	50.80	51.20	53.00	53.80
5	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Persen	25.32	24.80	23.65	22.50	21.00	20.50	20.00
6	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	94.55	95,30	96,30	97,30	98,30	99,30	99,55
I. PERHUBUNGAN									

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
2	Konektivitas Darat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Persen	100	100	100	100	100	100	100
J. KOMUNIKASI DAN INFORMASI									
1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin/Skor	N/A	1.5	2	2.5	3.1	3.8	4.5
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin/Skor	1.93	2.10	2.22	2.34	2.45	2.55	2.65
3	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
K. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	9.5	10	11	12.2	13.5	15.0	16.8

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
2	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Persen	N/A	18	20	21.5	23	24.8	26.5
3	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	50	50	50	50	50	50	50
4	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	50	50	50	50	50	50	50
5	Persentase Koperasi Aktif	Persen	N/A	25	25	25	25	25	25
6	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persen	N/A	20	20	20	20	20	20
7	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	N/A	10	10	10	10	10	10
8	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	25	25	25	25	25	25	25
9	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persen	25	25	25	25	25	25	25
L. PENANAMAN MODAL									
1	Investor Berskala Nasional	Investor	83	90	96	101	106	110	115

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
2	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Persen	4	5	5	5	5	5	5
3	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	3	5	5	5	5	5	5
4	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	90	91	92	92	93	93	95
5	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	50	50	50	70	80	90	100
6	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	50	50	50	70	80	90	100
M. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA									
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	28	28	28	28	29	30	30
2	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	30	30	35	40	45	50	55
3	Persentase Atlet yang	Persen	N/A	50	60	70	80	90	100

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Masuk Pelatnas								
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
N. STATISTIK									
1	Indeks Pembangunan Statistik	Poin/Skor	N/A	2.5	2.9	3.2	3.8	4.1	4.8
2	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Dalam Modul E-Walidata SIPD	Persen	N/A	75	80	85	90	95	100
O. PERSANDIAN									
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	N/A	75	80	85	90	95	100
P. KEBUDAYAAN									
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin/Skor	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Pengembangan Kebudayaan								
3	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	N/A	50	60	70	80	90	100
Q. PERPUSTAKAAN									
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin/Skor	71.63	71.65	72	72.5	73	73.5	80.1
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Persen	58.84	59	60	62	64	67	70
3	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen	N/A	50	60	60	80	100	100
R. KEARSIPAN									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah	Poin/Skor	21.49	23	24	25	27	32	35

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
2	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	N/A	81	85	86	87	88	89
3	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	N/A	5	5	10	15	19	23
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
A. KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	152.05	138.49	139.26	143.84	145.69	147.77	152.12
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	492.85	516.1	525.15	530.54	538.8	546.99	553.06
3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	30.92	32	35	35.5	36	36.5	37
B. PARIWISATA									
1	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	N/A	0,40	0,52	0,58	0,65	0,73	0,82
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	50	60	70	80	90	100	100
3	Persentase Peningkatan Media Pemasaran	Persen	50	60	70	80	90	100	100

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Pariwisata								
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	50	60	70	80	90	100	100
5	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	80	80	85	87	88	89	90
C. PERTANIAN / PERKEBUNAN									
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin/Skor	120.45	120.55	120.60	120.65	120.70	120.75	120.80
2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	85	87	89	92	94	96	99
	Padi	Ton	1.601,60	1.681,68	1.765,76	1.854,05	1.946,75	2.044,10	2.146,30
	Ubi Kayu	Ton	6.247,00	6.587,70	6.917,89	7.262,94	7.626,09	8.007,39	8.407,76
	Jagung	Ton	90,00	94,50	99,23	104,19	109,4	114,87	120,61
3	Peningkatan Produksi Holtikultura	Persen	85	87	89	92	94	96	99
	Kelapa Sawit	Ton	2.824,31	2.965,53	3.113,81	3.269,50	3.432,98	3.604,63	3.784,86
	Kelapa	Ton	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Karet	Ton	38,29	40,20	42,21	44,32	46,54	48,87	51,31
4	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	1	2	3	4	5	6	7
	Daging	Ton	99.238	104.199	109.409	114.879	120.623	126.654	132.987
	Telur	Ton	64.156	67.364	70.732	74.269	77.982	81.882	85.976
5	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	122	122	122	122	122	122	122
6	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	0,5	1	2	3	4	5	6
7	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	15	20	25	30	35	40	45
8	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	25	30	35	40	45	50	55
9	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	25	30	35	40	45	50	55
10	Persentase Izin Usaha	Persen	25	30	40	45	50	55	60

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	yang Diterbitkan								
11	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persen	30	35	37	39	41	43	45
12	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persen	46	46	46	46	46	46	46
D. PERDAGANGAN									
1	Ekspor Barang dan Jasa	Persen	26,32	27,5	28	30,5	32,03	35,03	37,03
2	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	N/A	20	20	20	20	20	20
3	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persen	20	20	20	20	20	20	20
4	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Nilai Ekspor Barang	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
7	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	Persen	50	50	50	50	50	50	50
E. PERINDUSTRIAN									
1	Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah	Persen	N/A	11	13	14.5	16	17.5	19
2	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persen	N/A	50	50	50	50	50	50
3	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen	20	20	20	20	20	20	20
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
A. SEKRETARIAT DAERAH									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin/Skor	52.97	58.00	61.00	68.00	71.00	81.00	91.00
2	Indeks Reformasi Hukum	Poin/Skor	87.98	89.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
3	Tingkat Inflasi	Persen	3,36	3,35	3,35	3,34	3,34	3,33	3,33

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
4	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
B. SEKRETARIAT DPRD									
1	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Persen	70	75	80	85	90	90	95
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
A. PERENCANAAN									
1	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
2	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan Renstra PD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100	100	100	100	100
B. KEUANGAN									
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	Persen	31,8	36,02	33	33	33	33	33
3	Persentase Alokasi	Persen	26,92	27,60	27,90	28	29	30	31

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik								
4	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	91,97	92	93	94	95	96	97
5	Persentase Penurunan SILPA	Persen	N/A	1,36	1,38	1,40	1,42	7	8
6	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	N/A	10	5	7	9	11	12
8	Rasio Pajak Terhadap PDRB	Persen	2,91	3,10	3,22	3,34	3,46	3,58	3,70
9	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	2,9	5	6	6,5	7	7,5	8
10	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persen	8	10	15	18	22	27	30
11	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	Persen	25	28	30	33	37	40	45

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
C. KEPEGAWAIAN									
1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin/Skor	76.22	77	78	79	81	83	85
2	Persentase Pegawai Dengan SKP Bernilai Baik	Persen	80	80	80	80	100	100	100
3	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	Persen	80	80	80	80	80	80	80
D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persen	10	10	12	15	20	22	25
E. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Indeks Inovasi Daerah	Poin/Skor	18.02	20	23	26	29	32	34
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam	Persen	N/A	30	40	50	60	70	80

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Implementasi Pembangunan								
3	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persen	N/A	30	40	50	60	70	80
UNSUR PENGAWASAN									
A. INSPEKTORAT DAERAH									
1	Indeks Integritas Nasional/Sistem Penilaian Integritas (SPI)	Poin/Skor	74.92	75	76	77	78	79	80
2	Nilai MCSP KPK	Nilai	74	75	76	77	78	79	80
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3
4	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
5	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	Persen	N/A	83	83	83	84	84	84
UNSUR KEWILAYAHAN									
A. KECAMATAN									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	94,49	94,59	94,69	94,79	94,89	94,99	95,49
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	94,49	94,80	95,35	95,95	96,29	96,89	97,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
A. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin/Skor	75,11	80	80.5	81	81.5	82	83
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Politik								
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	70	75	80	85	85	85	85
5	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 4.11 Penyeragaman Indikator Emas (IE) dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029			OPD
Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	
Usia Harapan Hidup (UHH)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,01	74,21	DINKE S
Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:			
a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	94	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	94	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	32,14	20,64	DINKE S
b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	12,3	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	12,3	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,5	14,5	DINKE S
Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):			DINKE S
a) Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90	a) Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90	a) Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91,05	95,30	DINKE S
b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	10,30	30,80	DINKE S
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99	100	DINKE S

RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029			OPD
Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	
Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:			
a) Literasi Membaca SD/Sederajat (%)	6,06 – 12,12	27.27-30.30	a) Literasi Membaca SD/Sederajat (%)	6,06 – 12,12	27.27-30.30	a) Literasi Membaca SD/Sederajat (poin/skor)	57.53	67.53	DISDIK
b) Literasi Membaca SMP/Sederajat (%)	00,00 – 3,03	6.06 - 9.09	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat (%)	00,00 – 3,03	6.06 - 9.09	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat (poin/skor)	66.14	70.54	DISDIK
c) Numerasi SD/Sederajat (%)	35,99–38,4	41.53-44.03	c) Numerasi SD/Sederajat (%)	35,99–38,4	41.53-44.03	c) Numerasi SD/Sederajat (poin/skor)	52.79	64.39	DISDIK
d) Numerasi SMP/Sederajat (%)	33,70–36,20	37.70 - 40.20	d) Numerasi SMP/Sederajat (%)	33,70–36,20	37.70 - 40.20	d) Numerasi SMP/Sederajat (%)	60.72	66.72	DISDIK
e) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	10.3 - 10.33	10.83 - 10.84	e) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	10.3 - 10.33	10.83 - 10.84	e) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	9,5	11,4	DISDIK
f) Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.61 - 13.63	13.86 - 13.87	f) Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.61 - 13.63	13.86 - 13.87	f) Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,73	14,53	DISDIK
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12	11,12 - 11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12	11,12 - 11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,8	11	DISDIK
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	71,1	76,59	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	71,1	76,59	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	52	62	DISNA KER

RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029			OPD
Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	
yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)			yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)			yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)			
Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	7,2	4,5	DINSO S
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	29,27	40,61	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	29,27	40,61	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	75,95	76,52	DISNA KER
Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20	32	DISNA KER
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	15,4,-15,1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	15,4,-15,1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	42,45	47,52	DISKO PUKM DAG
Pengembangan Pariwisata:			Pengembangan Pariwisata:			Pengembangan Pariwisata:			
a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2,42	2,73	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2,42	2,73	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0,80	2,54	DISPO RAPAR
b) Jumlah Tamu Wisatawan Macanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	421,14	b) Jumlah Tamu Wisatawan Macanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	421,14	b) Jumlah Tamu Wisatawan Macanegara (Hotel Berbintang)	900	1.800	DISPO RAPAR

RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029			OPD
Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	5,45	5,43	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	5,45	5,43	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	0,40	0,73	DISPO RAPAR
Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)			a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)			a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)			DISKO PUKM DAG
b) Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	3,20%	3,20%	b) Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	3,20%	3,20%	b) Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	11	17,5	DISKO PUKM DAG
c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,63%	4,06%	c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,63%	4,06%	c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	10	15,0	DISKO PUKM DAG
d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	0,81%	d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	0,81%	d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	18	24,8	DISKO PUKM DAG
e) Return on Asset (RoA) BUMD (%)	1,24	1,97	e) Return on Asset (RoA) BUMD (%)	1,24	1,97	e) Return on Asset (RoA) BUMD (%)	1	3,8	
Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik:			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik:			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik:			

RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029			OPD
Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	
a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,20	2,88	DISNAKER
b) Proposi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	43	50,4	b) Proposi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	43	50,4	b) Proposi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	39	48,5	DISNAKER
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	59,29 - 61,67	59,48 - 63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	59,29 - 61,67	59,48 - 63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	55	59	DP3AP PKB
Tingkat Penguasaan IPTEK-Indeks Inovasi Daerah			Tingkat Penguasaan IPTEK-Indeks Inovasi Daerah			Tingkat Penguasaan IPTEK-Indeks Inovasi Daerah	20	32	BAPPE DALITB ANG
Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
a) Indeks Ekonomi Hijau	51,12	51,18	a) Indeks Ekonomi Hijau	51,12	51,18	a) Indeks Ekonomi Hijau	N/A		
b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	21,49	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	21,49	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	N/A		
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.5	3.8	DISKOMINFO

RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029			OPD
Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	
Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	9,5	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	9,5	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Kab/Kota	N/A	9	KABUP ATEN/ BPS
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76 - 30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76 - 30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	11,05	15,84	KABUP ATEN/ BPS
Ekpor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,5	17,13 - 17,41	Ekpor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,5	17,13 - 17,41	Ekpor Barang dan Jasa (% PDRB)	27,5	35,03	DISKO PUKM DAG
a) Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik			a) Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik			a) Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	30,50	32,30	DPUTR
a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,26%	2,33%	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,26%	2,33%	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	N/A		
b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak terjangkau, dan berkelanjutan	74,36	81,01	b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak terjangkau, dan berkelanjutan	74,36	81,01	b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak terjangkau, dan berkelanjutan	72	80	DPKP
c) Persentase desa mandiri (%)	8,44%	8,93%	c) Persentase desa mandiri (%)	8,44%	8,93%	c) Persentase desa mandiri (%)	1,40	3,85	DPMD ES

RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029			OPD
Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	
Indeks Reformasi Hukum	70	71,5	Indeks Reformasi Hukum	70	71,5	Indeks Reformasi Hukum	89.00	94.00	SETDA KAB
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.40	2,72	DISKO MINFO
Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	100	100	SETDA KAB
Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional/Sistem Penilaian Integritas (SPI)	74,92	79	INSPEKTORAT
a) Persentase penegakan hukum daerah	70	75,7	a) Persentase penegakan hukum daerah	70	75,7	a) Persentase penegakan hukum daerah	100	100	SATPOL-PP
b) Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM	60	70	b) Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM	60	70	b) Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM	84	95	SETDA KAB
Angka Kriminalitas (%)	58,5	62	Angka Kriminalitas (%)	58,5	62	Angka Kriminalitas (%)		25,5	POL-PP
Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 - 85.83	86.83 - 90.08	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 - 85.83	86.83 - 90.08	Indeks Demokrasi Indonesia	80.00	82.00	BAKES BANGPOL

RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029			OPD
Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	
Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)			Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)			Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	3,10	3,58	BAPEN DA
Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	1,4-3,7	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	1,4-3,7	Tingkat Inflasi (%)	3,35	3,33	SETDA KAB
Pendalaman/intermediasi sektor keuangan			Pendalaman/intermediasi sektor keuangan			Pendalaman/intermediasi sektor keuangan			
a) PDRB Per Kapita			a) PDRB Per Kapita			a) PDRB Per Kapita	125,72	160,13	KABUP ATEN/ BPS
a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	33,92	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	33,92	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	13,5	17,8	KABUP ATEN/ BPS
b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,12	0,13	KABUP ATEN/ BPS
c) Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	10.402.072,39	c) Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	10.402.072,39	c) Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Provinsi (Rupiah)			
d) Total Kredit/PDRB (%)	25,7	31,49	d) Total Kredit/PDRB (%)	25,7	31,49	d) Total Kredit/PDRB (%)	1,24	1,97	KABUP ATEN/ BPS

RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029			OPD
Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	
Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Indeks Akses Keuangan Daerah (%)	2,39	2,64	SETDA KAB
Diplomatik daerah dengan Internasional Jumlah Kerjasama			Diplomatik daerah dengan Internasional Jumlah Kerjasama			Diplomatik daerah dengan Internasional Jumlah Kerjasama			
Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah			Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah			Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	80.00	82.00	BAPPE DALITB ANG
Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,44 - 55,48	57,56 - 57,6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,44 - 55,48	57,56 - 57,6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57.00	65,0	DISPO RAPAR
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80.00	82.50	BAKES BANGP OL
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	62.74- 62.98	65.89- 66.10	DP3AP PKB
Indeks Ketimpangan Gender	0,407	0,37	Indeks Ketimpangan Gender	0,407	0,37	Indeks Ketimpangan Gender	0.51	0.44	DP3AP PKB
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,562	0,581	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,562	0,581	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah		0,550	DLHP

RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029			OPD
Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	
Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			
a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,2	77,87	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76.21	76.89	DLHP
b) Rumah Tangga dengan akses Sanitasi Aman (%)	10,00%	15%	b) Rumah Tangga dengan akses Sanitasi Aman (%)	10,00%	15%	b) Rumah Tangga dengan akses Sanitasi Aman (%)	61	66	DPUTR
c) Pengelolaan Sampah			c) Pengelolaan Sampah			c) Pengelolaan Sampah			DLHP
i) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	16,00%	28%	i) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	16,00%	28%	i) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	12	26	DLHP
ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	100%	ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	100%	ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	9	23	DLHP
Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			
a) Ketahanan Energi			a) Ketahanan Energi			a) Ketahanan Energi			

RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029			OPD
Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	
i) Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	1282	i) Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	1282	i) Konsumsi listrik per kapita (kWh)	1.000	1.500	KABUP ATEN/ BPS
ii) Intensitas Energi Primer (SBM/RP Milyar)	170,57	141,175	ii) Intensitas Energi Primer (SBM/RP Milyar)	170,57	141,175	ii) Intensitas Energi Primer (SBM/RP Milyar)	N/A		
b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	7,35	4,48	b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	7,35	4,48	b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	5,50	3,20	HANPANG
c) Ketahanan Air			c) Ketahanan Air			c) Ketahanan Air			
i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)			i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)			i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1	2,1	DPUTR
ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	40,95	53	ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	40,95	53	ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	76	87	DPUTR
Indeks Risiko Bencana (IRB)	157,53	152,55 - 147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB)	157,53	152,55 - 147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB)	13.120	11.256	BPBD
Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			

RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029			OPD
Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	
a) Kumulatif	10,06%	12,92%	a) Kumulatif	10,06%	12,92 %	a) Kumulatif	3%	10%	DLHP
b) Tahunan	19,04%	25,38%	b) Tahunan	19,04%	25,38 %	b) Tahunan	17%	22%	DLHP

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					289.392.701.600		297.104.912.400		304.205.182.200		312.312.444.400		319.844.620.200	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					178.008.000.000		183.224.200.000		188.424.120.000		194.312.200.000		199.624.300.000	
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran					178.008.000.000		183.224.200.000		188.424.120.000		194.312.200.000		199.624.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					110.004.701.600		112.500.712.400		114.401.062.200		116.620.244.400		118.840.320.200	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	55.03	57.53	60.03	110.004.701.600	62.53	112.500.712.400	65.03	114.401.062.200	67.53	116.620.244.400	70.03	118.840.320.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	65.04	66.14	67.24		68.34		69.44		70.54		71.64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	49.89	52.79	55.69		58.59		61.49		64.39		67.29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	59.22	60.72	62.22		63.72		65.22		66.72		68.22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) (%)	74.22	77.26	80.3		83.26		86.23		89.2		92.17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (7-15) (%)	98.92	99.17	99.42		99.67		99.92		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (7-18) Kesetaraan (%)	44.45	45.45	46.65		47.8		48.9		46		47.15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Proporsi Jumlah PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	20.35	22.11	25.11		30.23		36.63		44.3		51.98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	60.83	49.86	50.86		51.86		52.86		53.86		54.86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SD (%)	57.8	60.3	62.8		65.3		67.8		70.3		72.8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SMP (%)	54.74	57.14	59.54		61.94		64.34		66.74		69.14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SD (%)	72.86	73.76	74.66		75.56		76.46		77.36		78.26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SMP (%)	67.58	69.08	70.58		72.08		73.58		75.08		76.58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	70.98	71.98	72.98		73.98		74.98		75.98		76.98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Iklim Kebinekaan SMP (%)	68,48	69,48	70,48		71,48		72,48		73,48		74,48		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					1.380.000.000		1.380.000.000		1.380.000.000		1.380.000.000		1.380.000.000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	73,94	74,31	72,76	1.380.000.000	75,09	1.380.000.000	75,28	1.380.000.000	75,48	1.380.000.000	75,67	1.380.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	37,83	54,97	60,37		65,77		71,17		76,57		81,97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					183.014.369.802		202.039.192.369		213.066.382.428		225.619.943.913		238.017.701.941	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					114.616.754.336		131.063.949.691		139.455.156.530		148.508.862.632		158.364.031.547	
meningkatnya pelayanan kantor urusan kesehatan	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	87,2	89	91	66.288.543.211	93	68.277.199.507	95	70.325.515.493	97	72.435.280.957	99	74.608.339.386	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Kotapinang		50	65	48.328.211.125	75	62.786.750.184	78	69.129.641.037	80	76.073.581.675	95	83.755.692.161	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	51,3	55	60		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Akreditasi RSUD (Predikat)	Paripurna	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					67.611.615.466		70.165.662.678		72.777.358.498		76.252.197.859		78.769.020.469	
Meningkatnya Kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	38,14	32,14	28,24	55.379.693.955	24,64	57.041.084.774	22,14	58.752.317.317	20,64	60.514.886.836	20,14	62.330.333.441	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	22	20,5	19		17,5		16		14,5		13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase sarana dan prasarana rumah sakit dan fasilitas penunjang kesehatan lainnya	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit dan fasilitas penunjang kesehatan lainnya (%)	45	50	65	12.231.921.511	75	13.124.577.904	78	14.025.041.181	80	15.737.311.023	95	16.438.687.028	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Akreditasi RSUD (Predikat)	Paripurna	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	51,3	55	60		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
					320.000.000		329.600.000		339.488.000		349.672.640		360.162.819	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	-	45	60	320.000.000	70	329.600.000	85	339.488.000	90	349.672.640	90	360.162.819	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					90.000.000		92.700.000		95.481.000		98.345.430		101.295.793	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	100	100	100	90.000.000	100	92.700.000	100	95.481.000	100	98.345.430	100	101.295.793	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					376.000.000		387.280.000		398.898.400		410.865.352		423.191.313	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-	55	65	376.000.000	75	387.280.000	85	398.898.400	90	410.865.352	100	423.191.313	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					150.851.765.000		179.601.529.750		206.541.759.213		237.523.023.094		273.151.476.558	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.908.845.000		15.995.171.750		18.394.447.513		21.153.614.639		24.326.656.835	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	100	13.908.845.000	100	15.995.171.750	100	18.394.447.513	100	21.153.614.639	100	24.326.656.835	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					4.100.000.000		8.165.000.000		9.389.750.000		10.798.212.500		12.417.944.375	
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	60	70	71	4.100.000.000	72	8.165.000.000	72	9.389.750.000	73	10.798.212.500	73	12.417.944.375	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	20	21	22		23		23		24		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	20	20	25		26		28		30		32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					3.700.000.000		4.255.000.000		4.893.250.000		5.627.237.500		6.471.323.125	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyedia Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	50	51	52	3.700.000.000	53	4.255.000.000	54	4.893.250.000	55	5.627.237.500	55	6.471.323.125	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.000.000.000		1.150.000.000		1.322.500.000		1.520.875.000		1.749.006.250	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengolahan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domesdik Layak dan Aman) (Persentase)	50	51	51	1.000.000.000	522	1.150.000.000	52	1.322.500.000	53	1.520.875.000	54	1.749.006.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					3.300.000.000		3.795.000.000		4.364.250.000		5.018.887.500		5.771.720.625	
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	50	50	52	3.300.000.000	54	3.795.000.000	55	4.364.250.000	56	5.018.887.500	57	5.771.720.625	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					15.700.000.000		18.055.000.000		20.763.250.000		23.877.737.500		27.459.398.125	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	60	62	66	15.700.000.000	68	18.055.000.000	69	20.763.250.000	70	23.877.737.500	71	27.459.398.125	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					1.000.000.000		1.150.000.000		1.322.500.000		1.520.875.000		1.749.006.250	
Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	56	57	57	1.000.000.000	60	1.150.000.000	62	1.322.500.000	63	1.520.875.000	64	1.749.006.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					103.720.000.000		119.278.000.000		137.169.700.000		157.745.155.000		181.406.928.250	
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang aman dan nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	60	61	62	103.720.000.000	63	119.278.000.000	64	137.169.700.000	66	157.745.155.000	68	181.406.928.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					300.000.000		345.000.000		396.750.000		456.262.500		524.701.875	
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	20	20	25	300.000.000	30	345.000.000	32	396.750.000	33	456.262.500	34	524.701.875	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					4.122.920.000		7.413.358.000		8.525.361.700		9.804.165.955		11.274.790.848	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	20	20	25	4.122.920.000	30	7.413.358.000	33	8.525.361.700	35	9.804.165.955	36	11.274.790.848	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					12.638.492.811		16.821.708.202		18.825.475.534		21.003.310.902		23.460.323.800	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.130.462.384		4.513.490.436		5.286.435.992		6.110.367.406		7.078.085.953	
Tersedianya pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	100	4.130.462.384	100	4.513.490.436	100	5.286.435.992	100	6.110.367.406	100	7.078.085.953	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					356.450.000		2.072.900.000		2.280.190.000		2.508.209.000		2.759.029.900	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemertintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	0	10	356.450.000	10	2.072.900.000	10	2.280.190.000	10	2.508.209.000	10	2.759.029.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	0	0	0		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.607.152.771		3.741.577.344		4.115.735.078		4.527.308.586		4.980.039.445	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	30	30	30	2.607.152.771	40	3.741.577.344	50	4.115.735.078	60	4.527.308.586	70	4.980.039.445	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					2.684.753.856		2.953.229.242		3.248.552.166		3.573.407.382		3.930.748.121	
Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Jumlah Rumah tidak Layak Huni yang diperbaiki (Unit)	90	65	50	2.684.753.856	50	2.953.229.242	50	3.248.552.166	50	3.573.407.382	50	3.930.748.121	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					2.808.373.800		3.489.211.180		3.838.132.298		4.221.945.528		4.644.140.081	
Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	7,4	7,5	8	2.808.373.800	8,5	3.489.211.180	9	3.838.132.298	9,5	4.221.945.528	10	4.644.140.081	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					51.300.000		51.300.000		56.430.000		62.073.000		68.280.300	
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	40	50	60	51.300.000	70	51.300.000	80	56.430.000	90	62.073.000	100	68.280.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					25.071.226.647		35.030.890.274		35.546.993.656		37.046.432.378		38.701.075.970	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.807.817.862		24.558.631.489		25.241.669.871		25.996.217.093		26.883.480.035	
TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	100	5.876.070.199	100	7.626.883.826	100	8.309.922.208	100	9.064.469.430	100	9.951.732.372	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase Pegawai dengan SKP Bermilai Baik (Persentase)	100	100	100	10.931.747.663	100	16.931.747.663	100	16.931.747.663	100	16.931.747.663	100	16.931.747.663	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.662.008.785		4.092.008.785		4.522.008.785		4.952.008.785		5.382.008.785	
Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	67.034.000	100	97.034.000	100	127.034.000	100	157.034.000	100	187.034.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	982.610.825	100	1.182.610.825	100	1.382.610.825	100	1.582.610.825	100	1.782.610.825	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(15)													
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtramas (Persentase)	100	100	100	2.612.363.960	100	2.812.363.960	100	3.012.363.960	100	3.212.363.960	100	3.412.363.960
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.327.000.000		2.905.850.000		2.208.915.000		2.423.806.500		2.661.187.150
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	892.500.000	100	1.915.000.000	100	1.118.980.000	100	1.224.878.000	100	1.342.365.800
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	117.500.000	100	435.150.000	100	478.665.000	100	526.531.500	100	579.184.650
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100	317.000.000	100	555.700.000	100	611.270.000	100	672.397.000	100	739.636.700
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					3.274.400.000		3.474.400.000		3.574.400.000		3.674.400.000		3.774.400.000
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	3.274.400.000	100	3.474.400.000	100	3.574.400.000	100	3.674.400.000	100	3.774.400.000
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					7.719.196.834		12.015.594.017		12.656.186.183		13.239.870.528		13.849.738.668
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOKOTA					5.184.097.199		8.292.081.302		8.538.173.468		8.684.505.528		8.883.373.668
Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah					5.184.097.199		8.292.081.302		8.538.173.468		8.684.505.528		8.883.373.668
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					344.536.000		566.000.000		627.000.000		698.500.000		773.000.000
Meningkatnya pemberdayaan potensi SDM penyelenggara kesos	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (%)	40	40	40	344.536.000	40	566.000.000	45	627.000.000	45	698.500.000	45	773.000.000
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.001.916.376		1.640.512.715		1.818.012.715		2.001.865.000		2.148.365.000
Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	18	18	20	1.001.916.376	20	1.640.512.715	22	1.818.012.715	22	2.001.865.000	22	2.148.365.000
	Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	40	33	50		50		60		60		60	
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					533.390.759		1.030.000.000		1.135.000.000		1.270.000.000		1.398.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	30	25	30	533.390.759	30	1.030.000.000	30	1.135.000.000	35	1.270.000.000	35	1.398.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					655.256.500		487.000.000		538.000.000		585.000.000		647.000.000	
Meningkatnya cakupan perlindungan bagi korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	180.673.806	500	700	655.256.500	700	487.000.000	700	538.000.000	700	585.000.000	700	647.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7.590.874.182		10.187.444.852		11.308.789.336		11.767.268.270		13.555.531.508	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.463.326.444		3.884.659.088		4.773.124.995		4.700.437.495		5.904.417.655	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (Dokumen)	10	10	11	3.463.326.444	12	3.884.659.088	12	4.773.124.995	12	4.700.437.495	12	5.904.417.655	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0		304.000.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (Dokumen)	0	0	0	0	1	304.000.000	0	54.000.000	0	54.000.000	0	54.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					665.805.964		1.850.886.560		1.918.975.216		1.993.872.738		2.076.260.012	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)	66.67	71.27	71.43	665.805.964	72.73	1.850.886.560	75	1.918.975.216	76.92	1.993.872.738	78.57	2.076.260.012	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					358.403.276		734.226.856		807.649.542		888.414.496		977.255.946	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	46.32	58.33	59.02	358.403.276	60.61	734.226.856	61.43	807.649.542	65.79	888.414.496	68.75	977.255.946	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					3.103.338.498		3.413.672.348		3.755.039.583		4.130.543.541		4.543.597.895	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	75	75.95	76.13	3.103.338.498	76.29	3.413.672.348	76.32	3.755.039.583	76.52	4.130.543.541	76.71	4.543.597.895	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					8.505.000.000		9.430.500.000		10.488.550.000		10.518.805.000		11.457.685.500	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.560.000.000		7.291.000.000		8.135.100.000		7.930.010.000		8.610.011.000	
terwujudnya urusan pemerintah daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	5.431.236.321	100	100	6.560.000.000	100	7.291.000.000	100	8.135.100.000	100	7.930.010.000	100	8.610.011.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					390.000.000		429.000.000		471.900.000		519.090.000		570.999.000	
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	4,75	5	5,22	390.000.000	5,29	429.000.000	5,25	471.900.000	5,66	519.090.000	5,69	570.999.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	54	55	56		57		58		59		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					255.000.000		280.500.000		308.550.000		339.405.000		373.345.500	
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	80	80	80	255.000.000	80	280.500.000	80	308.550.000	80	339.405.000	80	373.345.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					130.000.000		143.000.000		157.300.000		173.030.000		190.333.000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	30	30	30	130.000.000	30	143.000.000	30	157.300.000	30	173.030.000	30	190.333.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	20	20	20	30.000.000	20	33.000.000	20	36.300.000	20	39.930.000	20	43.923.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					240.000.000		264.000.000		290.400.000		319.440.000		351.384.000	
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	60,75	90	92	240.000.000	93	264.000.000	94	290.400.000	95	319.440.000	96	351.384.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					900.000.000		990.000.000		1.089.000.000		1.197.900.000		1.317.690.000	
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	900.000.000	100	990.000.000	100	1.089.000.000	100	1.197.900.000	100	1.317.690.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	95	95,55	96		96,55		97		97,55		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					910.000.000		1.001.000.000		1.101.100.000		1.211.210.000		1.332.331.000	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					670.000.000		737.000.000		810.700.000		891.770.000		980.947.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	82	82,5	83	670.000.000	83,5	737.000.000	84	810.700.000	84,5	891.770.000	85	980.947.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					140.000.000		154.000.000		169.400.000		186.340.000		204.974.000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	4	3	2,5	140.000.000	2	154.000.000	1,5	169.400.000	1	186.340.000	0,5	204.974.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					27.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					27.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100	100	27.000.000	100	2.000.000.000	100	2.200.000.000	100	2.420.000.000	100	2.662.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					8.899.940.844		112.507.787.841		24.146.120.305		27.147.959.254		31.409.899.926	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.552.857.012		6.950.850.694		8.161.020.838		9.733.225.003		11.619.870.004	
Tertelaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah					4.552.857.012		6.950.850.694		8.161.020.838		9.733.225.003		11.619.870.004	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					0		0		700.000.000		50.000.000		0	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	0	0	0	0	0	0	100	700.000.000	100	50.000.000	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					75.281.670		595.308.227		714.369.873		857.243.847		1.028.692.617	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	70	75,8	76	75.281.670	76,2	595.308.227	76,4	714.369.873	76,6	857.243.847	76,8	1.028.692.617	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
				83,15		83,35		83,55		83,75		83,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	93,47	82,95											
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					190.050.179		276.060.215		331.272.258		397.526.709		477.032.521	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	0,29	0,29	0,29	190.050.179	0,29	276.060.215	0,29	331.272.258	0,29	397.526.709	0,29	477.032.521	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					15.000.000		126.500.000		145.475.000		167.296.250		192.390.688	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	75	80	82	15.000.000	84	126.500.000	86	145.475.000	88	167.296.250	90	192.390.688	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	25	30	32		34		36		40		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000		402.627.500	
Meningkatnya kualitas layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	98	98	98	275.000.000	98	302.500.000	98	332.750.000	98	366.025.000	98	402.627.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	98	98	98		98		98		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	98	98	98		98		98		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	98	98	98		98		98		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.500	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	90	90	90	75.000.000	90	82.500.000	90	90.750.000	90	99.825.000	90	109.807.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.500	
meningkatkan kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	75.000.000	100	82.500.000	100	90.750.000	100	99.825.000	100	109.807.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					10.926.881.646		12.188.000.731		13.168.900.302		14.236.294.803		15.398.523.980	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.046.365.404		6.649.433.364		7.082.476.198		7.547.228.289		8.046.280.814	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran					6.046.365.404		6.649.433.364		7.082.476.198		7.547.228.289		8.046.280.814	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					937.750.000		1.031.525.000		1.134.677.500		1.248.145.250		1.372.959.775	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	937.750.000	100	1.031.525.000	100	1.134.677.500	100	1.248.145.250	100	1.372.959.775	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					293.485.500		322.834.050		355.117.455		390.629.201		429.962.121	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	3.58	3.58	7.69	293.485.500	11.54	322.834.050	15.38	355.117.455	19.23	390.629.201	23.08	429.962.121	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					2.331.119.880		2.564.231.368		2.820.654.505		3.102.719.955		3.412.991.951	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	2.331.119.880	100	2.564.231.368	100	2.820.654.505	100	3.102.719.955	100	3.412.991.951	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.318.160.862		1.619.976.949		1.775.974.644		1.947.572.108		2.136.329.319	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100	100	1.318.160.862	100	1.619.976.949	100	1.775.974.644	100	1.947.572.108	100	2.136.329.319	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					2.100.000.000		2.310.000.000		2.541.000.000		2.795.100.000		3.074.610.000	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					850.000.000		935.000.000		1.028.500.000		1.131.350.000		1.244.485.000	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2.67	2.65	2.66	850.000.000	2.66	935.000.000	2.65	1.028.500.000	2.65	1.131.350.000	2.64	1.244.485.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	20	19.3-19.3	18.6-18.6		18.1-18.1		17.6-17.6		17.2-17.2		16.9-16.9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					800.000.000		880.000.000		968.000.000		1.064.800.000		1.171.280.000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	44.78	46.78	49.3	800.000.000	50.8	880.000.000	51.2	968.000.000	53	1.064.800.000	53.8	1.171.280.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	25.32	24.8	23.65		22.5		21		20.5		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					450.000.000		495.000.000		544.500.000		598.950.000		658.845.000	
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Keluarga	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	94.55	100	100	450.000.000	100	495.000.000	100	544.500.000	100	598.950.000	100	658.845.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					28.226.071.307		41.213.664.255		41.385.030.681		44.323.533.749		47.555.887.124	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.240.151.307		21.129.152.255		22.042.067.481		23.046.274.229		24.150.901.652	

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
TERSELENGGARANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					12.240.151.307		21.129.152.255		22.042.067.481		23.046.274.229		24.150.901.652
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)					15.985.920.000		20.084.512.000		19.342.963.200		21.277.259.520		23.404.985.472
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	100	100	100	15.985.920.000	100	20.084.512.000	100	19.342.963.200	100	21.277.259.520	100	23.404.985.472
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6.399.955.416		7.039.950.957		7.743.946.054		8.518.340.659		9.370.174.725
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.152.420.443		3.467.662.487		3.814.428.736		4.195.871.610		4.615.458.771
TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.152.420.443		3.467.662.487		3.814.428.736		4.195.871.610		4.615.458.771
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.438.911.961		1.582.803.047		1.741.083.352		1.915.191.687		2.106.710.856
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	100	100	100	1.438.911.961	100	1.582.803.047	100	1.741.083.352	100	1.915.191.687	100	2.106.710.856
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.808.623.112		1.989.485.423		2.188.433.966		2.407.277.362		2.648.005.098
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	1.93	2.1	2.22	1.808.623.112	2.34	1.989.485.423	2.45	2.188.433.966	2.55	2.407.277.362	2.65	2.648.005.098
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					4.993.138.442		5.893.895.364		6.157.340.132		6.433.732.139		6.723.714.246
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.875.138.442		5.118.895.364		5.374.840.132		5.643.582.139		5.925.761.246
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	100	4.875.138.442	100	5.118.895.364	100	5.374.840.132	100	5.643.582.139	100	5.925.761.246
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	50	50	0	0	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	50	50	0	0	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPI/USP KOPERASI					18.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	0	0	25	18.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	0	0	0	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					0		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	0	0	0	125.000.000	10	125.000.000	10	125.000.000	10	125.000.000	10	125.000.000
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					50.000.000		250.000.000		255.000.000		260.100.000		265.302.000
Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	25	0	0	50.000.000	25	250.000.000	25	255.000.000	25	260.100.000	25	265.302.000
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					50.000.000		125.000.000		127.500.000		130.050.000		132.651.000
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalिन Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0	25	25	50.000.000	25	125.000.000	25	127.500.000	25	130.050.000	25	132.651.000
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					9.176.174.213		10.093.791.634		11.103.170.798		12.213.487.878		13.434.836.665
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.554.293.150		8.309.722.465		9.140.694.712		10.054.764.183		11.060.240.601
PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	100	7.554.293.150	100	8.309.722.465	100	9.140.694.712	100	10.054.764.183	100	11.060.240.601
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					520.000.000		572.000.000		629.200.000		692.120.000		761.332.000
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	10,41	5	5	520.000.000	5	572.000.000	5	629.200.000	5	692.120.000	5	761.332.000
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					400.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	3	5	5	400.000.000	5	440.000.000	5	484.000.000	5	532.400.000	5	585.640.000
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					261.609.158		287.770.074		316.547.081		348.201.789		383.021.968
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	90	91	92	261.609.158	92	287.770.074	93	316.547.081	93	348.201.789	95	383.021.968
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					404.366.592		444.803.251		489.283.576		538.211.934		592.033.127

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.065.000.000		1.675.000.000		1.871.250.000		2.091.437.500		2.483.034.686	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					865.000.000		880.000.000		968.000.000		1.064.800.000		1.171.280.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	100	100	100	865.000.000	100	880.000.000	100	968.000.000	100	1.064.800.000	100	1.171.280.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					200.000.000		392.500.000		440.375.000		494.331.250		699.602.499	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	100	100	100	200.000.000	100	392.500.000	100	440.375.000	100	494.331.250	100	699.602.499	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					0		402.500.000		462.875.000		532.306.250		612.152.187	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	0	0	0	402.500.000	80	462.875.000	90	532.306.250	100	612.152.187			Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					6.222.137.672		9.167.589.589		10.210.573.649		12.217.762.957		13.539.228.292	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.742.233.024		6.810.431.046		7.440.628.875		8.681.989.574		9.144.480.332	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Nilai tingkat kegemaran membaca (%)	58,84	59	60	4.742.233.024	62	6.810.431.046	64	7.440.628.875	67	8.681.989.574	70	9.144.480.332	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.440.361.305		2.280.158.543		2.685.244.774		3.434.133.383		4.262.615.960	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca (%)	58,84	59	60	1.440.361.305	62	2.280.158.543	64	2.685.244.774	67	3.434.133.383	70	4.262.615.960	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					39.543.343		77.000.000		84.700.000		101.640.000		132.132.000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimilik (Persentase)	0	0	60	39.543.343	60	77.000.000	80	84.700.000	100	101.640.000	100	132.132.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					394.999.173		1.506.999.464		758.949.390		895.639.258		1.052.323.086	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					284.999.342		1.336.499.633		582.399.559		705.779.427		838.505.255	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	0	81	85	284.999.342	86	1.336.499.633	87	582.399.559	88	705.779.427	89	838.505.255	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					109.999.831		131.999.831		134.199.831		139.039.831		147.751.831	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK (Persentase)	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	5	5	109.999.831	10	131.999.831	15	134.199.831	19	139.039.831	23	147.751.831	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					0		38.500.000		42.350.000		50.820.000		66.066.000	
Terlaksananya Perizinan penggunaan arsip					0		38.500.000		42.350.000		50.820.000		66.066.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25 - Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					333.270.000		1.003.500.000		1.033.000.000		1.063.000.000		1.093.000.000
3.25.03 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					0		100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	152,05	138,49	139,26	0	143,84	100.000.000	145,69	110.000.000	147,77	120.000.000	152,12	130.000.000
3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					273.430.000		728.500.000		733.000.000		738.000.000		743.000.000
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	492,85	516,1	525,15	273.430.000	530,54	728.500.000	538,8	733.000.000	546,99	738.000.000	553,06	743.000.000
3.25.06 - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					59.840.000		175.000.000		190.000.000		205.000.000		220.000.000
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (kg/KAP/TH)	30,92	32	35	59.840.000	35,5	175.000.000	36	190.000.000	36,5	205.000.000	37	220.000.000
3.26 - Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					480.000.000		608.000.000		668.800.000		735.680.000		809.248.000
3.26.02 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	50	60	70	100.000.000	80	110.000.000	90	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000
3.26.03 - Program Pemasaran Pariwisata					300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000
Meningkatnya jangkaun pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	50	60	70	300.000.000	80	330.000.000	90	363.000.000	100	399.300.000	100	439.230.000
3.26.04 - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					80.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000		117.128.000
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	50	60	70	80.000.000	80	88.000.000	90	96.800.000	100	106.480.000	100	117.128.000
3.26.05 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					0		80.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000
tersedianya sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	80	80	85	0	87	80.000.000	88	88.000.000	89	96.800.000	90	106.480.000
3.27 - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					15.447.600.000		16.992.360.000		18.691.596.000		20.560.755.600		22.616.831.160
3.27.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					9.653.600.000		10.618.960.000		11.680.856.000		12.848.941.600		14.133.835.760
terpenuhinya kebutuhan anggaran, terkelolanya keuangan daerah sesuai ketentuan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik					9.653.600.000		10.618.960.000		11.680.856.000		12.848.941.600		14.133.835.760
3.27.02 - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					1.174.000.000		1.291.400.000		1.420.540.000		1.562.594.000		1.718.853.400

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	20	20	20	400.000.000	20	500.000.000	20	550.000.000	20	600.000.000	20	650.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					260.000.000		380.000.000		387.600.000		395.352.000		403.259.040	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	100	260.000.000	100	380.000.000	100	387.600.000	100	395.352.000	100	403.259.040	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					540.000.000		560.000.000		570.000.000		573.052.320		585.000.000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	100	100	100	540.000.000	100	560.000.000	100	570.000.000	100	573.052.320	100	585.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					105.000.000		182.100.000		185.742.000		189.456.840		193.245.977	
Meningkatnya terlibit niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	105.000.000	100	182.100.000	100	185.742.000	100	189.456.840	100	193.245.977	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					270.000.000		425.400.000		433.908.000		442.586.160		451.437.883	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	50	50	50	270.000.000	50	425.400.000	50	433.908.000	50	442.586.160	50	451.437.883	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					110.000.000		135.000.000		150.000.000		160.000.000		175.000.000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					100.000.000		110.000.000		125.000.000		135.000.000		150.000.000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	20	20	20	100.000.000	20	110.000.000	20	125.000.000	20	135.000.000	20	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					10.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	0	0	50	10.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					58.859.693.582		62.345.662.404		68.580.228.644		75.438.251.507		82.982.076.662	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					44.277.923.581		46.305.715.411		50.936.286.951		56.029.915.646		61.632.907.215	
terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					44.277.923.581		46.305.715.411		50.936.286.951		56.029.915.646		61.632.907.215	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					12.370.210.889		13.607.231.974		14.967.955.172		16.464.750.689		18.111.225.758	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah serta Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	100	100	12.370.210.889	100	13.607.231.974	100	14.967.955.172	100	16.464.750.689	100	18.111.225.758	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100			
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.211.559.112		2.432.715.019		2.675.986.521		2.943.585.172		3.237.943.689		
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	2.211.559.112	100	2.432.715.019	100	2.675.986.521	100	2.943.585.172	100	3.237.943.689		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					45.327.650.820		69.842.500.000		78.566.000.000		84.386.000.000		92.586.000.000		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.688.667.844		39.847.500.000		46.098.000.000		50.428.000.000		55.628.000.000		
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Fasilitas Layanan Kehumasan, Protokol dan Layana Administrasi (%)	25.873.239.600	26.685.753.063	25.688.667.844	25.688.667.844	39.847.500.000	39.847.500.000	46.098.000.000	46.098.000.000	50.428.000.000	50.428.000.000	55.628.000.000	55.628.000.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					19.638.982.976		29.995.000.000		32.468.000.000		33.958.000.000		36.958.000.000		
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	70	75	80	19.638.982.976	85	29.995.000.000	90	32.468.000.000	90	33.958.000.000	95	36.958.000.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					6.760.405.044		7.756.226.423		8.531.849.065		9.385.033.971		10.323.537.370		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.822.708.844		6.404.979.728		7.045.477.701		7.750.025.471		8.525.028.019		
Terlaksananya urusan penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	100	5.822.708.844	100	6.404.979.728	100	7.045.477.701	100	7.750.025.471	100	8.525.028.019		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					547.696.200		922.246.695		1.014.471.364		1.115.918.500		1.227.510.351		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	547.696.200	100	922.246.695	100	1.014.471.364	100	1.115.918.500	100	1.227.510.351		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100			Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					390.000.000		429.000.000		471.900.000		519.090.000		570.999.000		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	95.000.000	100	104.500.000	100	114.950.000	100	126.445.000	100	139.089.500		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	180.000.000	100	198.000.000	100	217.800.000	100	239.580.000	100	263.538.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	115.000.000	100	126.500.000	100	139.150.000	100	153.065.000	100	168.371.500		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					165.342.809.910		193.475.675.744		211.871.413.315		233.058.554.642		256.364.410.097		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.973.158.957		30.603.118.496		32.711.600.346		35.982.760.377		39.581.036.411	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	100	13.296.712.198	100	20.635.665.496	100	22.689.232.046	100	24.969.155.247	100	27.466.070.768	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Terlaksananya urusan penunjang pemerintah daerah	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	0	95	95	5.676.446.759	95	9.967.453.000	95	10.012.368.300	95	11.013.605.130	95	12.114.965.643	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					143.060.624.265		158.359.052.077		174.194.957.282		191.614.453.008		210.775.898.308	
Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Diaklokasikan melalui TKD (Persentase)	31.18	36.02	33	143.060.624.265	33	158.359.052.077	33	174.194.957.282	33	191.614.453.008	33	210.775.898.308	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	26.92	27.6	27.9		28		29		30		31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	91.97	92	93		94		95		96		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	0	1.36	1.38		1.4		1.42		7		8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.854.016.688		2.191.247.674		2.410.372.441		2.651.409.686		2.916.550.652	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	0	10	5	1.854.016.688	7	2.191.247.674	9	2.410.372.441	11	2.651.409.686	12	2.916.550.652	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.455.010.000		2.322.257.497		2.554.483.246		2.809.931.571		3.090.924.726	
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	25	28	30	199.263.000	33	269.126.197	37	296.038.816	40	325.642.698	45	358.206.967	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya penerapan sistem keuangan daerah berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	8	10	15	52.378.000	18	90.200.000	22	99.220.000	27	109.142.000	30	120.056.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	2.9	5	6	1.203.369.000	6.5	1.962.931.300	7	2.159.224.430	7.5	2.375.146.873	8	2.612.661.559	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					40.995.777.768		46.569.526.056		52.462.483.630		59.965.006.074		69.340.919.868	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					37.128.806.147		43.111.803.374		48.744.913.679		55.961.604.128		64.804.268.616	
Terpenuhi nya pelaksanaan urusan penunjang pemerintah pada BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan					37.128.806.147		43.111.803.374		48.744.913.679		55.961.604.128		64.804.268.616	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.866.971.621		3.457.722.682		3.717.569.951		4.003.401.946		4.536.651.252	
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN dan Meningkatkan kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik (%)	80	80	80	3.866.971.621	80	3.457.722.682	100	3.717.569.951	100	4.003.401.946	100	4.536.651.252	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya (%)	80	80	80		80		80		80		80	
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					4.791.546.760		2.199.520.055		2.419.472.061		2.661.419.267		2.927.561.193
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					4.791.546.760		2.199.520.055		2.419.472.061		2.661.419.267		2.927.561.193
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional (%)	10	10	12	4.791.546.760	15	2.199.520.055	20	2.419.472.061	22	2.661.419.267	25	2.927.561.193
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					250.000.000		402.047.079		442.251.787		486.476.965		535.124.663
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	-	30	40	150.000.000	50	165.000.000	60	181.500.000	70	199.650.000	80	219.615.000
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelibangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	-	30	40	100.000.000	50	110.000.000	60	121.000.000	70	133.100.000	80	146.410.000
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					0		127.047.079		139.751.787		153.726.965		169.099.663
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	18,02	20	23	0	26	127.047.079	29	139.751.787	32	153.726.965	34	169.099.663
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					9.707.817.142		10.804.364.523		11.884.800.976		13.073.281.075		14.380.609.181
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.450.160.464		9.295.176.510		10.224.694.161		11.247.163.578		12.371.879.935
persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran					8.450.160.464		9.295.176.510		10.224.694.161		11.247.163.578		12.371.879.935
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					827.561.537		993.073.844		1.092.381.229		1.201.619.352		1.321.781.287
Menurutnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik Yang Bersifat Anggaran Ataupun Proses dan Kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1 (%)	0	83	83	827.561.537	83	993.073.844	84	1.092.381.229	84	1.201.619.352	84	1.321.781.287
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					430.095.141		516.114.169		567.725.586		624.498.145		686.947.959
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Matritas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	0	3	3	430.095.141	3	516.114.169	3	567.725.586	3	624.498.145	3	686.947.959
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3	3	3		3		3		3		3	
7.01 - KECAMATAN					26.607.788.759		27.973.694.248		29.230.318.960		31.178.159.925		33.622.510.344

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.233.330.755		20.591.359.573		21.914.184.697		23.191.477.486		24.702.788.703	
Terlaksananya urusan penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	100	3.480.774.412	100	3.851.389.104	100	3.846.465.158	100	3.860.023.308	100	3.858.798.733	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya urusan penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	100	4.295.000.000	100	3.421.477.945	100	3.763.625.739	100	4.139.988.313	100	4.553.987.145	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya urusan penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	100	4.405.000.000	100	5.149.809.280	100	5.664.790.200	100	6.231.268.708	100	6.854.638.450	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya urusan penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	100	4.328.000.000	100	5.229.748.399	100	5.519.559.910	100	5.766.150.793	100	6.032.360.607	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya urusan penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	100	2.724.556.343	100	2.938.934.845	100	3.119.743.690	100	3.194.046.364	100	3.403.003.768	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					118.723.341		247.428.557		252.461.959		257.707.583		264.369.127	
Terlaksananya pemerintahan dan pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Indeks)	100	100	100	28.723.341	100	79.628.206	100	80.163.407	100	80.638.219	100	81.500.091	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pemerintahan dan pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Indeks)	100	100	100	50.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pemerintahan dan pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Indeks)	100	100	100	35.000.000	100	38.500.000	100	42.350.000	100	46.585.000	100	51.243.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pemerintahan dan pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Indeks)	100	100	100	5.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pemerintahan dan pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Indeks)	100	100	100	0	100	104.300.351	100	104.948.552	100	105.484.364	100	106.625.536	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.332.177.091		1.722.775.239		1.902.803.345		2.067.432.061		2.272.391.674	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan (%)	100	100	100	63.177.091	100	71.247.091	100	74.147.091	100	75.835.991	100	77.044.991	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan (%)	100	100	100	100.000.000	100	44.781.057	100	49.259.163	100	54.185.079	100	59.603.587	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan (%)	100	100	100	825.000.000	100	907.500.000	100	998.250.000	100	1.097.575.000	100	1.207.382.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan (%)	100	100	100	301.000.000	100	628.000.000	100	707.000.000	100	764.000.000	100	851.315.605	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan (%)	100	100	100	43.000.000	100	71.247.091	100	74.147.091	100	75.835.991	100	77.044.991	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					131.220.275		160.600.550		171.810.825		182.055.825		192.365.325	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terciptanya keteriban dan rasa aman	Persentase gangguan keamanan dan keteriban yang ditangani (%)	100	100	100	16.220.275	100	16.550.275	100	17.120.275	100	17.620.275	100	17.850.275	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terciptanya keteriban dan rasa aman	Persentase gangguan keamanan dan keteriban yang ditangani (%)	100	100	100	50.000.000	100	30.000.000	100	33.000.000	100	36.300.000	100	39.930.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terciptanya keteriban dan rasa aman	Persentase gangguan keamanan dan keteriban yang ditangani (%)	100	100	100	45.000.000	100	49.500.000	100	54.450.000	100	59.895.000	100	65.884.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terciptanya keteriban dan rasa aman	Persentase gangguan keamanan dan keteriban yang ditangani (%)	100	100	100	5.000.000	100	15.000.000	100	17.120.275	100	17.620.275	100	17.850.275	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terciptanya keteriban dan rasa aman	Persentase gangguan keamanan dan keteriban yang ditangani (%)	100	100	100	15.000.000	100	49.550.275	100	50.120.275	100	50.620.275	100	50.850.275	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					5.602.337.297		4.611.312.461		4.338.940.266		4.818.899.102		5.518.294.647	
Terlaksananya urusan pemerintahan umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan (%)	100	100	100	3.850.000.000	100	501.928.057	100	552.120.862	100	607.332.948	100	668.066.243	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terseleenggaranya urusan pemerintahan umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan (%)	100	100	100	545.000.000	100	604.945.973	100	630.080.973	100	657.197.723	100	3.227.014.973	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terseleenggaranya urusan pemerintahan umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan (%)	100	100	100	457.337.297	100	2.501.437.297	100	507.937.297	100	519.437.297	100	523.550.297	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terseleenggaranya urusan pemerintahan umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan (%)	100	100	100	380.000.000	100	418.000.000	100	459.800.000	100	2.539.930.000	100	552.123.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terseleenggaranya urusan pemerintahan umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan (%)	100	100	100	370.000.000	100	585.001.134	100	2.189.001.134	100	495.001.134	100	547.540.134	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					190.000.000		640.217.868		650.117.868		660.587.868		672.300.868	
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase fasilitasi dan koordinasi pembinaan pemerintahan desa (%)	100	100	100	0	100	256.608.934	100	257.708.934	100	258.708.934	100	259.904.934	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase fasilitasi dan koordinasi pembinaan pemerintahan desa (%)	100	100	100	75.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase fasilitasi dan koordinasi pembinaan pemerintahan desa (%)	100	100	100	70.000.000	100	77.000.000	100	84.700.000	100	93.170.000	100	102.487.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase fasilitasi dan koordinasi pembinaan pemerintahan desa (%)	100	100	100	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase fasilitasi dan koordinasi pembinaan pemerintahan desa (%)	100	100	100	45.000.000	100	256.608.934	100	257.708.934	100	258.708.934	100	259.908.934	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					8.807.729.727		10.962.234.912		12.606.155.871		14.497.079.363		16.671.641.494	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.877.792.398		4.459.806.255		5.128.362.916		5.897.617.464		6.782.260.311	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029			2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	100	3.877.792.398	100	4.459.806.255	100	5.128.362.916	100	5.897.617.464	100	6.782.260.311	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.861.374.923		2.140.581.161		2.461.668.336		2.830.918.586		3.255.556.374	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	1.861.374.923	100	2.140.581.161	100	2.461.668.336	100	2.830.918.586	100	3.255.556.374	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.967.108.701		2.262.175.007		2.601.501.257		2.991.726.446		3.440.485.413	
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	1.967.108.701	100	2.262.175.007	100	2.601.501.257	100	2.991.726.446	100	3.440.485.413	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					475.778.795		547.145.614		629.217.456		723.600.075		832.140.086	
Persentasi Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	70	75	80	475.778.795	85	547.145.614	85	629.217.456	85	723.600.075	85	832.140.086	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					243.337.946		279.838.638		321.814.434		370.086.599		425.599.588	
Persentasi kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	243.337.946	100	279.838.638	100	321.814.434	100	370.086.599	100	425.599.588	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					382.336.964		1.272.688.237		1.463.591.472		1.683.130.193		1.935.599.722	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	382.336.964	100	1.272.688.237	100	1.463.591.472	100	1.683.130.193	100	1.935.599.722	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.164.740.623.215		1.439.002.137.753		1.453.230.182.242		1.573.213.210.671		1.709.695.394.315	



Kabupaten
Labuhanbatu
Selatan



BAB 5

Penutup

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Labuhanbatu Selatan adalah sebuah pedoman yang sangat penting untuk membimbing langkah-langkah pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. RPJMD ini disusun sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan jangka menengah periode tahun 2025 hingga 2029, serta menjadi arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk turut andil dalam pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Pelaksanaan kebijakan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menuntut pentingnya keterpaduan, keselarasan, dan sinkronisasi antara para pelaku pembangunan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dokumen RPJMD ini harus didukung oleh penjabaran yang jelas mengenai manajemen risiko dan sumber pendanaan yang terukur untuk melaksanakan rencana pembangunan. Selain itu, diperlukan kerangka regulasi yang jelas dan kaidah pelaksanaan yang terstruktur untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan menjadi bagian dari rencana yang komprehensif dan terintegrasi.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai pedoman dalam beberapa hal, antara lain:

1. Menyusun visi, misi, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta sebagai acuan bagi calon kepala daerah.
2. Menyusun Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Menciptakan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mencapai visi dan misi daerah.
4. Menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antara fungsi pemerintahan daerah.

5. Menjadi pedoman bagi penentu kebijakan pembangunan dan memastikan keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam rangka memastikan pelaksanaan yang efektif dan komprehensif, ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan, seperti:
 - a. Menjaga konsistensi perencanaan dan pendanaan untuk memastikan keselarasan dan kesinambungan dalam pembangunan daerah.
 - b. Memperhatikan RPJPD sebagai pedoman dalam menyusun visi dan misi daerah serta program pembangunan dalam RPJMD.
 - c. Lembaga eksekutif dan legislatif, didukung oleh instansi vertikal dan masyarakat, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.
 - d. Bupati Labuhanbatu Selatan memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD dengan memobilisasi seluruh potensi dan kekuatan daerah.
 - e. Sekretaris Daerah bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD.
 - f. Penerapan Kerangka Logis Kinerja (Cascading) diperlukan untuk menghubungkan tujuan jangka menengah dengan strategi tahunan dan program-program tahunan lainnya.
 - g. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan RPJMD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program serta pendanaannya.
 - h. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) bertugas mengkoordinasikan penyusunan RPJMD dan memandu proses perencanaan pembangunan.
 - i. Bappedalitbang juga bertugas membangun komunikasi organisasi dan kepada masyarakat mengenai RPJMD dan melaksanakan evaluasi pelaksanaannya.
 - j. Pengendalian dan evaluasi antar dokumen harus dilakukan secara terkoordinasi untuk memastikan implementasi yang efektif. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi

- pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jangka pendek (tahunan).
- k. Insentif untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran
 - l. Mekanisme perubahan harus diatur dengan jelas sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menanggapi perubahan kondisi atau kebijakan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, target RPJMD dapat dimutakhirkan melalui RKPD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
 - m. Komunikasi publik perlu ditingkatkan melalui keterlibatan pemangku kepentingan lainnya, khususnya masyarakat, untuk memastikan partisipasi yang luas dalam pembangunan daerah. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.
6. Sistem Insentif. Sistem insentif bertujuan nantinya agar dapat diterapkan untuk mendorong pelaksanaan program, baik dalam bentuk regulasi, dukungan finansial, atau kebijakan khusus. Dukungan sistem insentif yang akan diberikan

sebagai berikut: a) Insentif fiskal berupa subsidi atau pengurangan pajak untuk proyek strategis daerah.; b) Insentif regulasi, seperti penyederhanaan perizinan bagi sektor prioritas.; c) Insentif non-fiskal, seperti pengakuan dan penghargaan bagi pihak yang berkontribusi besar dalam pembangunan.

7. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan; - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan; dan - terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
8. Dokumen RPJMD perlu diseleraskan dan dikoordinasikan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya. Proses koordinasi antara RPJMD, RPJPD Renstra dan RKPD penting dilakukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian alokasi anggaran. Diperlukan instrumen regulasi atau forum lintas sektoral guna menjami konsistensi antara perencanaan dan pendanaan.
9. Diperlukan kerangka pengendalian yang di dalamnya terdapat tata cara evaluasi dan pemantauan yang terintegrasi, termasuk hal-hal sebagai berikut: Jadwal evaluasi berkala (misalnya dua tahunan); b) Indikator kinerja untuk mengevaluasi pencapaian visi, misi, dan sasaran pokok; c) Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk pengendalian dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi.
10. Komunikasi publik perlu dibangun dalam penyusunan, evaluasi, maupun pelaksanaan RPJMD. Adapun strategi komunikasi publik yang perlu dilakukan seperti: a) Penggunaan media sosial, forum diskusi, atau musyawarah masyarakat untuk menyosialisasikan program RPJMD; b) Langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi publik, termasuk kelompok rentan; c) Mekanisme umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan yang dirumuskan.

5.2. Kaidah Pembiayaan

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentu tidak akan berhasil jika tidak mendapatkan dukungan sumber pembiayaan yang diperbolehkan dari ketentuan yang ada. Oleh karena itu, sumber pembiayaan yang dimaksud tentu

bersifat legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber pembiayaan pembangunan yang dimaksud dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara maupun APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selain sumber yang dimaksud tersebut, dimungkinkan untuk pembiayaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Optimalisasi sumber pembiayaan baru tentu sangat bergantung pada pelbagai upaya untuk mencari sumber pemasukan dari aktivitas ekonomi eksisting serta dari peningkatan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pembangunan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang secara umum semakin mengandalkan pada sektor jasa yang modern dan beragam diharapkan dapat menghasilkan dampak pengganda, baik dari sisi nilai tambah, serapan tenaga kerja, maupun pajak. Optimalisasi sumber pembiayaan baru ini sangat bergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan para pemangku kepentingan, termasuk elemen masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Oleh karena itu, adanya kesepemahaman, partisipasi, dan kolaborasi yang sinergis diperlukan untuk dapat mewujudkan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di jangka panjang.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa pembiayaan pembangunan yang ada dalam dokumen perencanaan daerah bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun optimalisasi sumber pembiayaan baru yang dapat dilakukan, yaitu: a) Pemanfaatan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU); b) Meningkatkan partisipasi swasta dalam proyek strategis daerah; c) Pengembangan sumber pendapatan daerah melalui inovasi layanan publik dan pengembangan sektor unggulan.

5.3. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah

Pelaksanaan dan implementasi dari visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentu akan menghadapi hambatan yang pada akhirnya mengganggu ketercapaian RPJMD. Oleh karena itu, penting untuk kemudian menjamin keberlangsungan dan tercapainya keberhasilan rencana pembangunan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membangun *framework* manajemen risiko sehingga dapat mengidentifikasi, mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan. Manajemen risiko merupakan suatu upaya sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko yang akan datang. Manajemen risiko ini perlu dibangun atas

dasar rasionalitas keberterimaan sehingga memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi pelaksana RPJMD. Manajemen risiko merupakan suatu proses rangkaian non-linier, yaitu dapat memberikan umpan balik (feedback) di setiap tahapannya. Hal ini dilakukan karena beragam ketidakpastian di masa depan yang membutuhkan upaya-upaya adaptasi (dan penyesuaian) di setiap tahapan. Sebagai rangkaian manajemen risiko, penting untuk melakukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko di tahap awal. Setelah tahap ini tercapai, perlu dilakukan mitigasi risiko, yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi untuk dapat mengurangi dampak (impact). Bahkan jika ditarik lebih ke hulu, maka mitigasi juga bisa dilakukan dengan memahami kemungkinan (probability) risiko tersebut muncul dan upaya untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Secara umum, dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara penentuan strategi penanganan, yaitu menerima risiko, men-transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko. Tentu pilihan yang diambil bisa merupakan gabungan strategi, selain bergantung pada jenis risiko yang dihadapi / akan dihadapi. Manajemen risiko dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilaksanakan sebelum penyusunan RPJMD periode berikutnya, dimana penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal.

5.4. Kesimpulan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional), RPJPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan. RPJMD Labuhanbatu Selatan Tahun 2025- 2029 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi

segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang. RPJMD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berdimensi tahunan.

Dukungan, kesungguhan, tanggungjawab, semangat gotong royong, peran aktif serta komitmen berbagai pihak di Labuhanbatu Selatan sangat diharapkan dalam mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG



Kabupaten
Labuhanbatu
Selatan



www.labuhanbatuselatankab.go.id